



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 (RPJMD)
 KABUPATEN MURUNG RAYA
 TAHUN 2018-2023**



**KARTU
 MURA SEHAT**

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN



**KARTU
 MURA CERDAS**



**KARTU
 MURA SEJAHTERA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
 2019**





**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) dan pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan perlu menyusun rencana pembangunan menengah 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. bahwa rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas merupakan landasan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2013-2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya.

6. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Kabupaten Murung Raya untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.
8. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan Kabupaten Murung Raya berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan.
9. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan, guna mencapai tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
10. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.
11. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
12. Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.
13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan

- kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra - SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
 17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diambil; tindakan korektif bagi penyempurnaan dan perkembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem, program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan indikator pembangunan.
 19. Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunikasi dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya dan pemecahan konflik kepentingan.
 20. Indikator pencapaian adalah indikator kinerja yang ditargetkan oleh program prioritas baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
 21. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Murung Raya merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional.
- (2) RPJMD Kabupaten Murung Raya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023; dan
 - b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028.
- (2) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

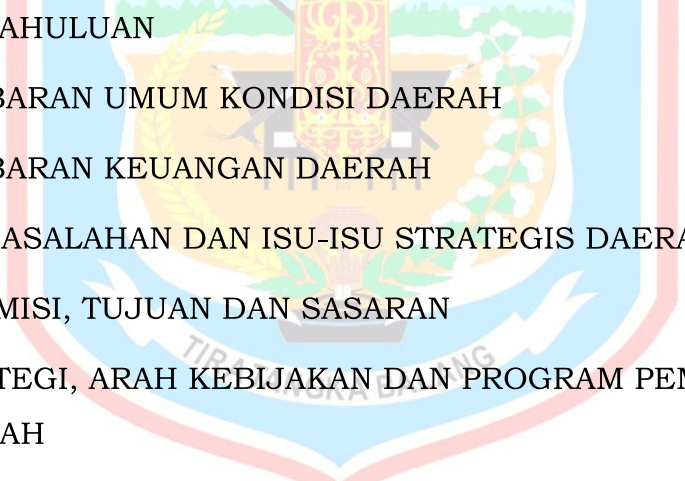
Pasal 5

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan dalam Penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD dan perencanaan penganggaran.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V
SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 6

Sistimatika RPJMD Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
 - BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB IX PENUTUP

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten.
- (3) Evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi/kabupaten dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (4) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 9

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

NYARUTONO TUNJAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 4

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01, 20/2019**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018-2023**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Murung Raya sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sesuai periode. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan perspektif masa depan Kabupaten Murung Raya tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi :

”Terwujudnya masyarakat Sejahtera yang Mandiri dan Bermartabat berbasis Pembangunan Perdesaan menuju Murung Raya Emas Tahun 2030 ”.

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.

Adapun maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan landasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2018-2023. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 4



KATA PENGANTAR



Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 dapat tersusun tepat waktu.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017; Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya berkewajiban menyusun RPJMD untuk periode 2018-2023. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 12 Permendagri No. 86 Tahun 2017, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta bentuk dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya. Dokumen ini disusun dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, atas-bawah, bawah-atas serta politis. Selain itu, secara substansi, penyusunan dokumen ini disusun dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan serta penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bermuara pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan

tersusunnya dokumen RPJMD ini, diharapkan proses perencanaan yang baik dapat mempercepat terwujudnya masyarakat Murung Raya yang sejahtera dan bermartabat melalui pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan menuju Murung Raya Emas Tahun 2030. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya selama proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, termasuk GGGI yang telah mendampingi Kabupaten Murung Raya dalam upaya mengarusutamakan pertumbuhan ekonomi hijau di Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, Maret 2019

BUPATI MURUNG RAYA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top, a vertical line, and a horizontal line at the bottom.

DRS. PERDIE, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	Vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3 Hubungan Antardokumen	I - 6
1.4 Maksud Dan Tujuan	I - 7
1.5 Sistematika Penyusunan RPJMD	I - 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II - 1
2.1.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi	II - 1
2.1.1.2 Letak dan kondisi geografis	II - 3
2.1.1.3 Topografi	II - 6
2.1.1.4 Geologi	II - 7
2.1.1.5 Fisiologi lahan	II - 7
2.1.1.6 Hidrologi	II - 8
2.1.1.7 Klimatologi	II - 10
2.1.1.8 Penggunaan lahan	II - 10
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana	II - 11
2.1.3 Potensi Sumber Daya	II - 12
2.1.3.1 Kawasan hutan yang bertegakan hutan	II - 12
2.1.3.2 Kawasan lindung	II - 12
2.1.3.3 Kawasan perlindungan setempat	II - 13
2.1.3.4 Kawasan ruang terbuka hijau	II - 14
2.1.3.5 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	II - 14
2.1.3.6 Kawasan peruntukan permukiman	II - 15
2.1.3.7 Kawasan peruntukan industri	II - 17
2.1.3.8 Kawasan peruntukan pariwisata	II - 17
2.1.3.9 Kawasan peruntukan hutan produksi	II - 17
2.1.3.10 Kawasan peruntukan pertanian	II - 18
2.1.3.11 Kawasan peruntukan pertambangan	II - 19
2.1.4 Demografi	II - 20
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 22
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 22
2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II - 23
2.2.1.2 Laju Inflasi	II - 27
2.2.1.3 Indeks Gini dan Pemerataan pendapatan	II - 28
2.2.1.4 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	II - 29

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 30
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II - 30
2.2.2.2 Pendidikan	II - 32
2.2.2.3 Kesehatan	II - 34
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II - 35
2.2.3.1 Kebudayaan	II - 35
2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga	II - 36
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 37
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II - 37
2.3.1.1 Pendidikan	II - 38
2.3.1.2 Kesehatan	II - 44
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II - 53
2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Permukiman	II - 55
2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II - 56
2.3.1.6 Sosial	II - 57
2.3.2 Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II - 59
2.3.2.1 Tenaga Kerja	II - 59
2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II - 60
2.3.2.3 Pangan	II - 62
2.3.2.4 Lingkungan Hidup	II - 63
2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II - 65
2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II - 65
2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II - 66
2.3.2.8 Komunikasi dan Informatika	II - 68
2.3.2.9 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II - 70
2.3.2.10 Penanaman Modal	II - 72
2.3.2.11 Statistik	II - 72
2.3.2.12 Perpustakaan	II - 72
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan	II - 74
2.3.3.1 Pariwisata	II - 74
2.3.3.2 Pertanian	II - 76
2.3.3.3 Peternakan	II - 79
2.3.3.4 Perikanan	II - 80
2.3.3.5 Industri	II - 81
2.3.3.6 Energi dan Sumber Daya Mineral	II - 82
2.3.3.7 Perdagangan	II - 83
2.3.4 Penunjang Urusan	II - 83
2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan	II - 83
2.3.4.2 Keuangan	II - 84
2.4 Aspek Daya saing Daerah	II - 86
2.4.1 Pengeluaran Per Kapita	II - 86

	2.4.2 Perbankan	II - 86
	2.4.3 Rasio Ketergantungan	II - 87
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
	3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III - 2
	3.1.1.1 Pendapatan Daerah	III - 2
	3.1.1.2 Belanja Daerah	III - 4
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 6
	3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 6
	3.2.2 Neraca Daerah	III - 10
	3.3 Kerangka Pendanaan	III - 15
	3.3.1 Proyeksi Pendapatan	III - 15
	3.3.2 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat	III - 17
	3.3.3 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III - 18
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV - 1
	4.1 Permasalahan Pembangunan	IV - 1
	4.1.1 Kualitas SDM di Murung Raya masih rendah	IV - 3
	4.1.2 Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa	IV - 9
	4.1.3 Rendahnya kemandirian perekonomian daerah	IV - 12
	4.1.4 Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	IV - 15
	4.1.5 Rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	IV - 17
	4.1.6 Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup	IV - 19
	4.2 Isu Strategis	IV - 25
	4.2.1 Isu Strategis Internasional	IV - 26
	4.2.1.1 <i>Sustainable Development Goals</i>	IV - 26
	4.2.1.2 <i>Global Megatrends</i>	IV - 28
	4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	IV - 30
	4.2.3 Isu <i>Stunting</i>	IV - 30
	4.2.4 Isu Strategis Nasional	IV - 32
	4.2.4.1 Telaahan RPJMN Tahun 2015-2019	IV - 33
	4.2.4.2 Telaahan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024	IV - 39
	4.2.4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV - 41
	4.2.4.4 Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kota Cerdas (Smart City)	IV - 43
	4.2.4.5 Pengarusutamaan Resiko Bencana dalam Pembangunan	IV - 45
	4.2.5 Isu Strategis Regional	IV - 45
	4.2.5.1 Telaahan RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021	IV - 45
	4.2.5.2 Telaahan RTRW Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035	IV - 48
	4.2.5.3 Telaahan Dokumen RPJMD Daerah Lainnya	IV - 51
	4.2.6 Isu Strategis Lokal	IV - 53

4.2.6.1	Telaahan RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028	IV	-	53
4.2.6.2	Telaahan RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038	IV	-	54
4.2.6.3	Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023	IV	-	56
4.2.6.4	Isu Strategis Pembangunan Murung Raya Periode 2018-2023	IV	-	59
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V	-	1
5.1	Visi	V	-	2
5.2	Misi	V	-	5
5.3	Tujuan dan Sasaran	V	-	10
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI	-	1
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	VI	-	1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	VI	-	46
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI	-	54
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII	-	1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII	-	1
BAB IX	PENUTUP	IX	-	1
9.1	Pedoman Transisi	IX	-	1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX	-	2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan	II - 2
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Kategori Desa	II - 3
Tabel 2.3	Daya Dukung dan Daya Tampung Setiap Kecamatan	II - 5
Tabel 2.4	Statistik Klimatologi di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017	II - 10
Tabel 2.5	Data Jenis dan Intensitas Bencana Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan/Lahan, Kekeringan dan Puting Beliung Di Kabupaten Murung Raya	II - 11
Tabel 2.6	Luas Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Murung Raya	II - 13
Tabel 2.7	Kawasan Peruntukan Permukiman Kabupaten Murung Raya	II - 16
Tabel 2.8	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kabupaten Murung Raya	II - 18
Tabel 2.9	Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Murung Raya	II - 19
Tabel 2.10	Bahan Galian Potensial Kabupaten Murung Raya	II - 20
Tabel 2.11	Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Murung Raya	II - 20
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017	II - 21
Tabel 2.13	Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Murung Raya	II - 22
Tabel 2.14	PDRB ADH Berlaku dan Distribusi PDRB menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah, 2017	II - 24
Tabel 2.15	Distribusi PDRB (Struktur Ekonomi) Kabupaten Murung Raya Tahun 2014-2017	II - 26
Tabel 2.16	Inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit Tahun 2013-2017 (%)	II - 28
Tabel 2.17	Indeks Gini/Koefisien Gini Kab. Murung Raya	II - 29
Tabel 2.18	Banyaknya Organisasi Pemuda menurut Jenis Organisasi di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2015	II - 36
Tabel 2.19	Fasilitas Olahraga di Kabupaten Murung Raya	II - 37
Tabel 2.20	Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru menurut jenis dan Status Sekolah di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016	II - 39
Tabel 2.21	Persentase Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Murung Raya Tahun	II - 40

	2013-2017	
Tabel 2.22	Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	II - 41
Tabel 2.23	Rasio Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah 7-15 Tahun 2016 - 2017 Kab. Murung Raya	II - 41
Tabel 2.24	Gedung Sekolah Baik SD/MI Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 – 2017	II - 42
Tabel 2. 25	Gedung Sekolah Baik SMP/MTs Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Murung Raya Tahun 2013 – 2017	II - 42
Tabel 2.26	Persentase Siswa Jenjang PAUD di Kab. Murung Raya Tahun 2013 – 2017	II - 43
Tabel 2.27	Guru yang berkualifikasi S1/D.IV SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Murung Raya, 2013-2017	II - 43
Tabel 2.28	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016	II - 44
Tabel 2.29	Jumlah Tenaga Kerja Kesehatan di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2017	II - 45
Tabel 2.30	Jumlah Dukun Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017	II - 46
Tabel 2.31	Jumlah Kunjungan Wanita Hamil, Nifas, Bayi, dan Anak di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2017	II - 46
Tabel 2.32	Jumlah Akseptor KB Aktif dan Pemakaian Alat Kontrasepsi di Murung Raya, Tahun 2016	II - 47
Tabel 2.33	Banyaknya 10 Kasus Penyakit Terbanyak menurut Jenis Penyakit di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016	II - 47
Tabel 2.34	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2016 – 2017 Kab. Murung Raya	II - 48
Tabel 2.35	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Kab. Murung Raya Tahun 2013 – 2017	II - 49
Tabel 2.36	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kab. Murung Raya Tahun 2013 – 2017	II - 50
Tabel 2.37	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Kab. Murung Raya Tahun 2013 – 2017	II - 50
Tabel 2.38	Klasifikasi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2017	II - 54
Tabel 2.39	Panjang Jalan Menurut Kondisi Ruas Jalan dan Kecamatan Tahun 2017	II - 54
Tabel 2.40	Data Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya Tahun 2013–2017	II - 56
Tabel 2.41	Sebaran Titik Hot Spot Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Murung Raya 2013–2017	II - 57

Tabel 2.42	Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Murung Raya Tahun 2005-2017	II - 58
Tabel 2.43	Jumlah Penduduk Pemeluk Agama di Kabupaten Murung Raya, 2015	II - 58
Tabel 2.44	Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama, 2012-2017	II - 59
Tabel 2.45	Persentase Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2017	II - 60
Tabel 2.46	Potensi Banjir Setiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya	II - 64
Tabel 2.47	Potensi Lahan Kritis Setiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya	II - 64
Tabel 2.48	Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 - 2017	II - 67
Tabel 2.49	Rasio Akseptor KB Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	II - 67
Tabel 2.50	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Beredar di Murung Raya	II - 69
Tabel 2.51	Jumlah Stasiun Radio Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	II - 69
Tabel 2.52	Jumlah TV Nasional dan TV Lokal Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	II - 70
Tabel 2.53	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Murung Raya	II - 71
Tabel 2.54	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2017	II - 72
Tabel 2.55	Jumlah Gedung Perpustakaan Kabupaten Murung Raya	II - 73
Tabel 2.56	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Murung Raya	II - 74
Tabel 2.57	Objek Wisata di Kabupaten Murung Raya	II - 75
Tabel 2.58	Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi per Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016	II - 76
Tabel 2.59	Luas Panen Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Kecamatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2016	II - 76
Tabel 2. 60	Luas Panen Kacang Tanah, Kacang Kedelai dan Kacang Hijau menurut Kecamatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2016	II - 77
Tabel 2. 61	Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016	II - 78
Tabel 2.62	Banyaknya Populasi Ternak dan Unggas menurut Jenisnya Kabupaten Murung Raya, Tahun 2016-2017	II - 79
Tabel 2.63	Produksi daging dan Telur menurut Jenis Ternak (Kg)	II - 80

di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017

Tabel 2.64	Produksi Perikanan Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 (Dalam Ton)	II	-	81
Tabel 2.65	Produksi Pertambangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 (Dalam Ton)	II	-	82
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Murung Raya Periode 2013-2017	II	-	87
Tabel 3.1	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	III	-	1
Tabel 3.2	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)	III	-	3
Tabel 3.3	Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	III	-	5
Tabel 3.4	Perkembangan SiLPA Kabupten Murung Raya Tahun 2013-2017	III	-	7
Tabel 3.5	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	III	-	7
Tabel 3.6	Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)	III	-	9
Tabel 3.7	Perkembangan Neraca Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	III	-	12
Tabel 3.8	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)	III	-	16
Tabel 3.9	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Murung Raya	III	-	17
Tabel 3. 10	Kerangka Pendanaan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	III	-	18
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023	III	-	20
Tabel 4.1	Rumusan Permasalahan Kualitas SDM di Murung Raya Masih Rendah	IV	-	9
Tabel 4.2	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Status Ketenagakerjaan Kabupaten Murung Raya, Tahun 2017	IV	-	11
Tabel 4.3	Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa	IV	-	11
Tabel 4.4	Rumusan Permasalahan Rendahnya kemandirian perekonomian daerah	IV	-	14

Tabel 4.5	Rumusan Permasalahan Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	IV - 16
Tabel 4.6	Rumusan Permasalahan Rendahnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah	IV - 19
Tabel 4.7	Status Daya Dukung Air Setiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya	IV - 21
Tabel 4.8	Rumusan Permasalahan Terjadinya Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	IV - 25
Tabel 4.9	Proyeksi Target Indikatif Pembangunan 2020-2024	IV - 40
Tabel 4.10	Visi Misi RPJMD Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara	IV - 51
Tabel 5.1	Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Murung Raya Terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	V - 4
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023	V - 19
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023	VI - 21
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023	VI - 23
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	VI - 34
Tabel 6.4	Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet di Kabupaten Murung Raya	VI - 47
Tabel 6.5	Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Murung Raya	VI - 50
Tabel 6.6	Kawasan Peruntukan Perkebunan Kabupaten Murung Raya	VI - 52
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Murung Raya	VII - 2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023	VII - 4
Tabel 8.1	Target Indikator Kinerja Daerah Pembangunan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023	VIII - 2
Tabel 8.2	Target Indikator Kinerja Daerah Pembangunan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023	VIII - 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I -	7
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Murung Raya	II -	2
Gambar 2.2	Persentase Daya Dukung dan Daya Daya Tampung	II -	6
Gambar 2.3	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung	II -	6
Gambar 2.4	Luas Beberapa Fisiologi Lahan di Kabupaten Murung Raya	II -	8
Gambar 2.5	Panjang Sungai (Km) di Kabupaten Murung Raya	II -	9
Gambar 2.6	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Murung Raya	II -	12
Gambar 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017 (Trilyun Rupiah)	II -	24
Gambar 2.8	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalteng Tahun 2013-2017 (%)	II -	25
Gambar 2.9	PDRB per Kapita Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	II -	27
Gambar 2.10	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017 (%)	II -	30
Gambar 2.11	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017	II -	31
Gambar 2.12	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	II -	33
Gambar 2.13	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	II -	34
Gambar 2.14	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017	II -	35
Gambar 2.15	Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Keatas Menurut jenis dan Kelamin Penduduk Kabupaten Murung Raya, Tahun 2016	II -	39
Gambar 2.16	Peta Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten Murung Raya	II -	54

Gambar 2.17	Jumlah IKM Berdasarkan Kelompok Komoditas, Tahun 2015-	II -	82
Gambar 4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Murung Raya	IV -	2
Gambar 4.2	Perbandingan IPM Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017	IV -	3
Gambar 4.3	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017	IV -	4
Gambar 4.4	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017	IV -	7
Gambar 4.5	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017	IV -	10
Gambar 4.6	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017	IV -	12
Gambar 4.7	Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017	IV -	18
Gambar 4.8	Ketersediaan Air di Kabupaten Murung Raya	IV -	21
Gambar 4.9	Kebutuhan Air di Kabupaten Murung Raya	IV -	22
Gambar 4.10	Daya Dukung Air di Kabupaten Murung Raya	IV -	22
Gambar 4.11	Status Daya Dukung Air di Kabupaten Murung Raya	IV -	23
Gambar 4.12	Kerangka Pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	IV -	41
Gambar 5.1	Gambar Hubungan Antar-Elemen Visi	V -	4
Gambar 5.2	Misi dan Tujuan RPJMD dalam Kerangka Pertumbuhan Hijau	V -	12
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya	VI -	31

-

-



Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan pembangunan yang dilakukan dalam proses manajemen pemerintah secara efektif dan efisien. Dalam kerangka desentralisasi dan dekonsentrasi, pemerintah daerah memiliki peran sentral untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah yang sepatutnya dilaksanakan selaras, seiring serta mendukung program-program pembangunan di tingkat regional dan nasional.

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah guna peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, daerah, harus berbenah agar mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara mandiri dengan menggali potensi-potensi yang dimiliki secara optimal tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian segala sumber daya dan potensi daerah seefektif dan seefisien mungkin, pembangunan harus dilaksanakan secara terstruktur, transparan, merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam implementasinya, pembangunan harus diawali dengan sebuah perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, optimalisasi partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat tersebut, Kabupaten Murung Raya berkewajiban untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan bernegara serta mendukung kebijakan pembangunan provinsi dan nasional melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018, pada Senin, 24 September 2018 telah dilantik Drs. Perdie, M.A. sebagai Bupati Murung Raya dan Rejikinnor, S.Sos. sebagai Wakil Bupati Murung Raya untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Dalam hal ini, sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017; Kepala daerah terpilih wajib menyusun RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 sesuai dengan visi dan misinya sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Murung Raya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 12 Permendagri No. 86 Tahun 2017, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sebagai dokumen jangka menengah lima tahunan, RPJMD Kabupaten Murung Raya harus sesuai dengan periode kepemimpinan kepala daerah terpilih terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yakni tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, selanjutnya dilaksanakan dalam RKPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

RPJMD Kabupaten Murung Raya disusun dengan berpedoman pada ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dengan memerhatikan



prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sesuai amanat Permendagri No. 7 Tahun 2018, integrasi TPB ke dalam RPJMD dilakukan melalui analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sesuai KLHS RPJMD. Melalui pengintegrasian TPB ke dalam dokumen RPJMD diharapkan akan menghasilkan prioritas pembangunan yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional. Adapun landasan operasional penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yakni:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

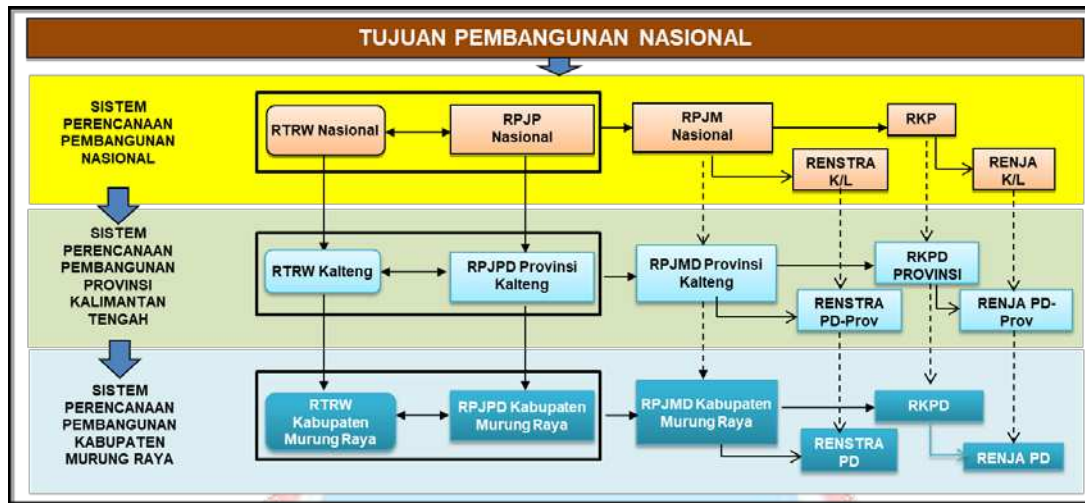


22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169); dan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antardokumen

Penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dengan memerhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya juga selaras dengan RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038. RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 tahap ketiga. RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Sasaran dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Perangkat daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD. Hubungan antardokumen perencanaan pembangunan secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, gambar diolah.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Murung Raya ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya periode 2018-2023 serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah dan strategi pembangunan daerah periode 2018-2023.
2. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD untuk kemudian dijabarkan dalam Renja PD dalam periode yang sama.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun 2018-2023.
4. Sebagai pedoman bagi evaluasi capaian kinerja Renstra PD dan Renja PD periode 2018-2023.



1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 9 (sembilan) bab sebagaimana ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat gambaran kinerja keuangan masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan proyeksi keuangan daerah (kerangka pendanaan) tahun 2018-2023.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang berdampak signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah di masa yang akan datang sehingga harus segera diantisipasi dan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat strategi terpilih yang kemudian dijabarkan



ke dalam arah kebijakan, baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan, untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas (strategis) daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas daerah serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Perumusan berbagai kebijakan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam perwujudan tujuan pembangunan karena setiap langkah pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat berpedoman pada kebijakan tersebut. Oleh karena itu, rumusan kebijakan pembangunan daerah harus memiliki relevansi dengan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Data dan informasi pembangunan daerah merupakan salah satu komoditi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah agar terjaga relevansi antara program dan kegiatan pembangunan dengan permasalahan yang ingin dihadapi. Ketepatan sasaran dalam memilih kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode pembangunan harus terimplementasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagai acuan perumusan kebijakan pembangunan maka disusunlah gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Murung Raya sebagai potret dari hasil pembangunan daerah selama ini yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan batas wilayah administrasi

Luas wilayah Kabupaten Murung Raya kurang lebih mencakup 23.700 km² dan terdiri dari 10 kecamatan dan 115 desa dan 9 kelurahan. Kecamatan U'ut Murung merupakan kecamatan terluas, yaitu 7.263 km² dan diikuti oleh Kecamatan Seribu Riam seluas 7.023 km² dan Sumber Barito seluas 2.797 km². Secara rinci pada Tabel 2.1 disajikan luas wilayah Kabupaten Murung Raya menurut kecamatan.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten Murung Raya Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Luas Murung Raya
1. Permata Intan	804	3,39
2. Sungai Babuat	423	1,78
3. Murung	730	3,08
4. Laung Tuhup	1 611	6,80
5. Barito Tuhup Raya	1 500	6,33
6. Tanah Siang	1 239	5,23
7. Tanah Siang Selatan	310	1,31
8. Sumber Barito	2 797	11,80
9. Seribu Riam	7 023	29,63
10. U'ut Murung	7 263	30,65
Murung Raya	23 700	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Batas-batas wilayah Kabupaten Murung Raya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kapuas dan Gunung Mas;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur; dan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Barat.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Murung Raya



Sumber: Baplitbangda Kabupaten Murung Raya 2018



2.1.1.2 Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Murung Raya, secara geografis, terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 113° 12' 40,98" - 115° 8' 6,52" BT dan 0° 51' 51,87" LS - 0° 47' 25,24" LU. Wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya terdiri dari 10 kecamatan dan 115 Desa serta 9 Kelurahan. Berdasarkan status hukum, desa atau kelurahan yang berstatus definitif di Kabupaten Murung Raya adalah sebanyak 124 desa atau 100 persen. Kabupaten Murung Raya sejak awal pembentukannya pada tahun 2002 hingga tahun 2006 memiliki wilayah administrasi pemerintahan yang hanya meliputi 5 kecamatan, 116 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan – kecamatan tersebut adalah Kecamatan Permata Intan, Murung, Laung Tuhup, Tanah Siang, dan Sumber Barito.

Pengembangan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Murung Raya terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pemekaran wilayah kecamatan dilakukan pada tahun 2007 dan tahun 2016 dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat melalui beberapa upaya berikut.

- a. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- b. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- c. Percepatan pengelolaan potensi daerah; dan
- d. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

Setelah pemekaran, wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Murung Raya meliputi 10 kecamatan, 115 desa, dan 9 kelurahan. Secara rinci pada Tabel 2.2 disajikan jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan dan menurut klasifikasi Kemendagri.

Tabel 2.2.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Kategori Desa

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Kategori Desa		
			Swadaya	Swakarsa	Swasembada
1. Permata Intan	10	2	0	3	9
2. Murung	13	2	0	5	1
3. Laung Tuhup	23	3	1	5	9
4. Tanah Siang	26	1	1	17	8
5. Sumber Barito	8	1	1	7	3
6. Sungai Babuat	6	-	2	22	3
7. Barito Tuhup Raya	11	-	0	4	2
8. Tanah Siang Selatan	7	-	0	5	4



9.	Seribu Riam	7	-	1	4	2
10.	U'ut Murung	5	-	1	4	0
Total		116	9	7	76	41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan yang paling banyak yaitu Tanah Siang yaitu 26 desa dan 1 kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan U'ut Murung (5 desa). Kecamatan Tanah Siang memiliki luas daerah 1.239 km² atau 5,23% dari luas Kabupaten Murung Raya. Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan U'ut Murung sebagai kecamatan yang terluas 7.263 km² atau 30,65% dari luas Kabupaten Murung Raya. Kecamatan lainnya memiliki jumlah desa berkisar antara 6-26 desa/kelurahan.

Desa atau kelurahan di Kabupaten Murung Raya terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu desa Swadaya (tradisional), Swakarsa (transisional), dan Swasembada (berkembang). Berdasarkan kepada klasifikasi tersebut, desa atau kelurahan yang termasuk Swadaya (tradisional) sebanyak 7 desa/kelurahan, 76 desa/kelurahan termasuk Swakarsa (transisional) dan 41 desa/kelurahan termasuk klasifikasi Swasembada (berkembang). Sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Murung Raya merupakan Desa Swakarsa yang dapat terus ditingkatkan sehingga statusnya menjadi Desa Swasembada dengan Program 1 miliar 1 desa/1 kelurahan dari Bupati Murung Raya. Jumlah Desa Swasembada sebanyak 41 desa. Ini merupakan pencapaian yang baik mengingat usia Kabupaten Murung Raya yang masih muda, yaitu 16 (enam belas) tahun.

Adanya pemekaran beberapa kecamatan membawa dampak pada perubahan klasifikasi desa. Secara umum dalam periode 2013-2018, sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Murung Raya berklasifikasi desa swakarsa (tradisional). Kecamatan yang tidak memiliki desa dengan status swasembada adalah Kecamatan U'ut Murung. Pemekaran desa perlu dilakukan di Kecamatan U'ut Murung dikarenakan kecamatan tersebut melingkupi sebagian besar wilayah Kabupaten Murung Raya (30%) tetapi memiliki jumlah desa dan kelurahan paling kecil. Selain itu, pemekaran juga dilakukan untuk pertumbuhan dan peningkatan desa di Kecamatan U'ut Murung dengan klasifikasi swadaya dan swakarsa menjadi swasembada.

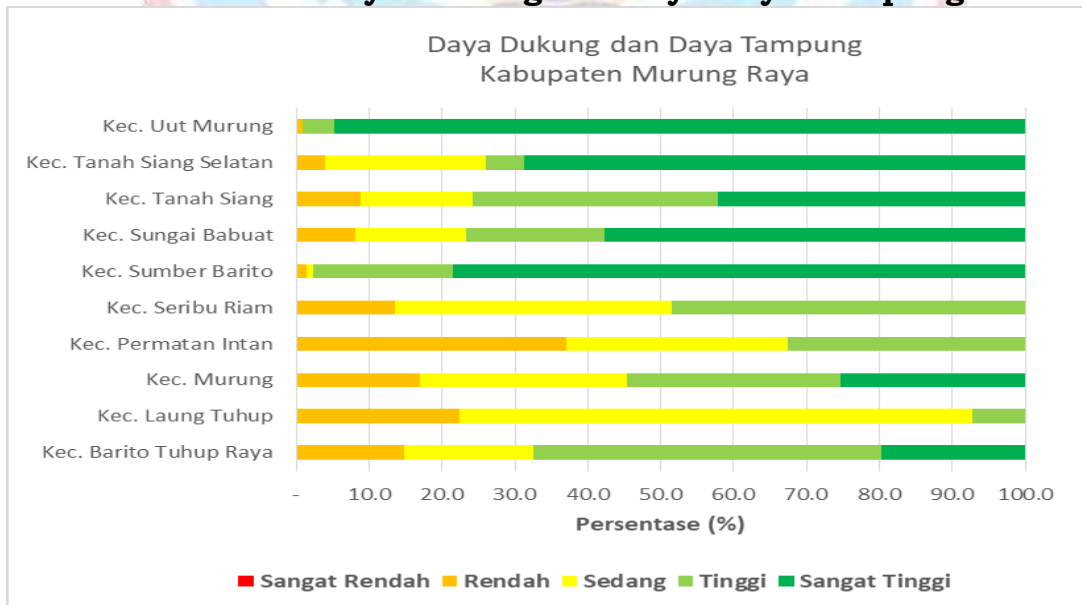
Berdasarkan data dari Peta ekoregion Pulau Kalimantan, menunjukkan bahwa Daya Dukung dan Daya Tampung di Kabupaten Murung Raya, termasuk kategori tinggi sebesar 1.054.359,32 ha (62,37%) dan kategori rendah sebesar 221.020,46 ha (13,41%), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3. Untuk sebaran wilayah kecamatan, daya dukung dan daya tampung dominan tersebar di wilayah utara seperti Kecamatan Uut Murung dan Seribu Riam.

Tabel 2.3.
Daya Dukung dan Daya Tampung Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total
1	Barito Tuhup Raya	-	22.105,31	26.561,35	71.791,39	29.541,95	150.000,00
2	Laung Tuhup	-	36.043,57	113.437,12	11.619,32	-	161.100,00
3	Murung	-	12.373,44	20.707,52	21.375,18	18.543,86	73.000,00
4	Permatan Intan	-	29.778,48	24.381,84	26.239,68	-	80.400,00
5	Seribu Riam	-	94.658,60	267.252,10	340.389,30	-	702.300,00
6	Sumber Barito	-	3.962,61	2.642,66	53.306,98	219.787,75	279.700,00
7	Sungai Babuat	-	3.458,40	6.404,40	8.035,62	24.401,58	42.300,00
8	Tanah Siang	-	11.041,40	18.937,85	41.651,25	52.269,50	123.900,00
9	Tanah Siang Selatan	-	1.217,01	6.829,21	1.621,26	21.332,53	31.000,00
10	Uut Murung	-	6.381,66	1,10	31.435,09	688.482,15	46.669,91
	Luas Total	-	221.020,46	487.155,15	607.465,07	1.054.359,32	383.400,00

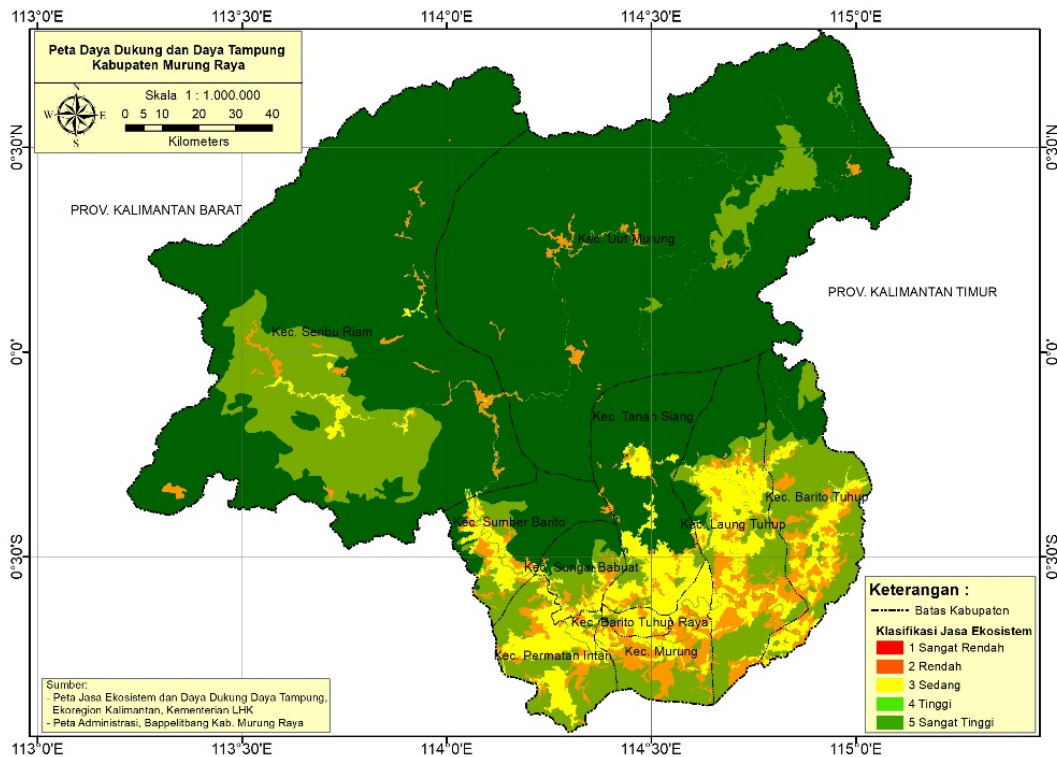
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023

Gambar 2.2
Persentase Daya Dukung dan Daya Tampung



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023

Gambar 2.3
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023

2.1.1.3 Topografi

Menurut keadaan wilayahnya, tanah Kabupaten Murung Raya terdiri dari berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 123-700 m. Sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian Selatan membentang sejauh lebih kurang 150 km ke Utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman (pH) kurang dari 7. Pada sisi kiri dan kanan dataran rendah tersebut terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan dan patahan, terdapat adanya tanah berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku dan batubatuan lainnya.

Pada umumnya topografi Kabupaten Murung Raya dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan *Muller/Schwanner*. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak di bagian selatan tepi Sungai Barito, bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 1.785 Km² (21,5%). Bagian wilayah dengan kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 Km² (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 Km² (25%).



2.1.1.4 Geologi

Sebagian formasi geologi Kabupaten Murung Raya tergolong tua, kecuali daerah endapan alluvial (*kwarter*) di bagian selatan. Susunan batuan geologi yang terbentuk di wilayah Kabupaten Murung Raya sebagai berikut: (1) *Kwarter*, merupakan batuan alluvial/endapan dari kerikil yang membentang di dataran rendah; (2) *Miosis*, merupakan batuan sedimen batu bara, batu pasir, lempung, seringkali dengan sisipan batu gamping tipis; (3) *Paelogen*, mencakup semua endapan eosin dan oligosen, yang terdiri dari konglomerat alas pada bagian bawah, diikuti oleh batuan gamping dan napal-lempung pada bagian atas; (4) *Mesozoikum*, merupakan batuan facies sedimen dan gunung api, terdiri dari batuan lelehan dan piroklastik bersusun basa dan intermediter, batu pasir, konglomerat, sabak, kersik, serpih, lempung, dan batu gamping; dan (5) *Batuan Dalam*, terdiri dari granit dan granodirit.

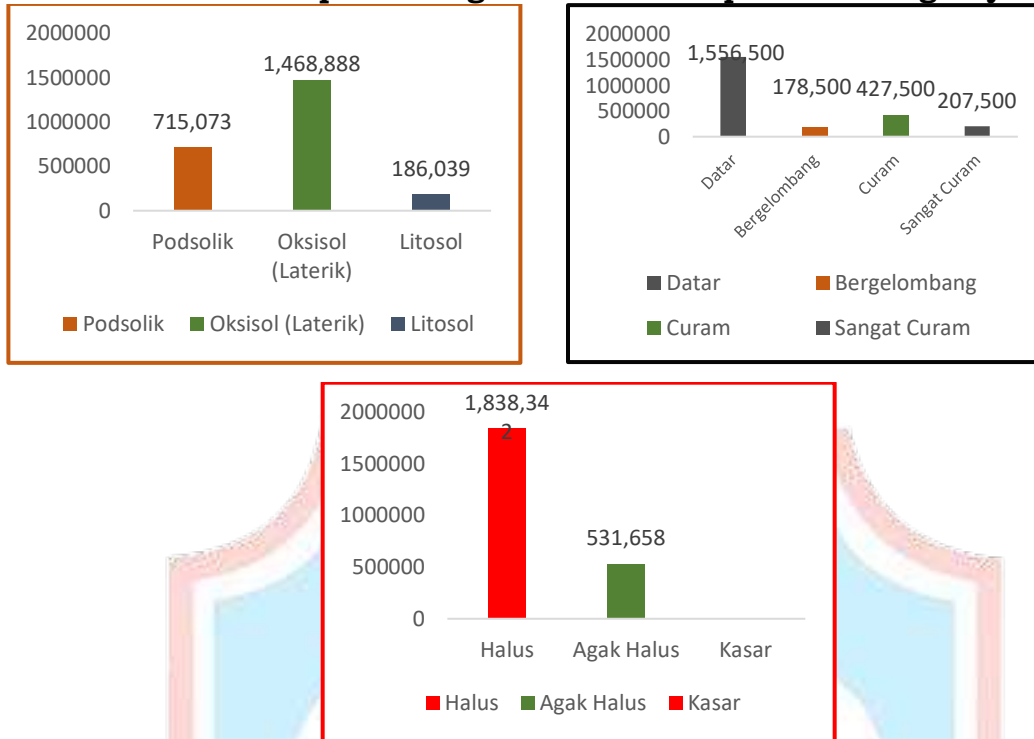
Kondisi iklim dan batuan telah membentuk tanah yang ada di Kabupaten Murung Raya. Dengan Jenis-jenis tanah sebagai berikut:

- a. Alluvial terdapat di aliran sungai;
- b. Regosol, terdapat menyebar di bagian selatan wilayah Kabupaten Murung Raya;
- c. Podsolik, merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku, terdapat pada wilayah yang berbukit;
- d. Kambisol; dan
- e. Okisol (Laterik) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan medan bergelombang dan berbukit.

2.1.1.5 Fisiologi Lahan

Kemiringan tanah merupakan unsur yang penting dalam merencanakan peruntukan penggunaan tanah, khususnya di bidang pertanian. Berdasarkan kelas kelerengan lahan, di Kabupaten Murung Raya sebagian besar adalah datar (1,556,500 ha; 65.68%), selebihnya merupakan lahan bergelombang (178,500 ha; 7.53%), curam (427,500 km²; 18.04%), dan sangat curam (207,500 km²; 8.76%).

Gambar 2.4
Luas Beberapa Fisiologi Lahan di Kabupaten Murung Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

Jenis tanah di Kabupaten Murung Raya sebagian besar adalah Oksisol (Laterik) luasnya mencapai 1.468.888 ha (61.98%). Jenis tanah ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujannya sangat tinggi. Jenis tanah yang lain adalah tanah Podsolik mencapai 715.073 ha (30.17%). Tanah ini telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat. Untuk jenis tanah Litosol mencapai luas 186.039 ha (7.85%), memiliki solum dangkal dan berbatu, serta membentang di puncak pegunungan Muller, dengan ketinggian 500–1.000 m dpl.

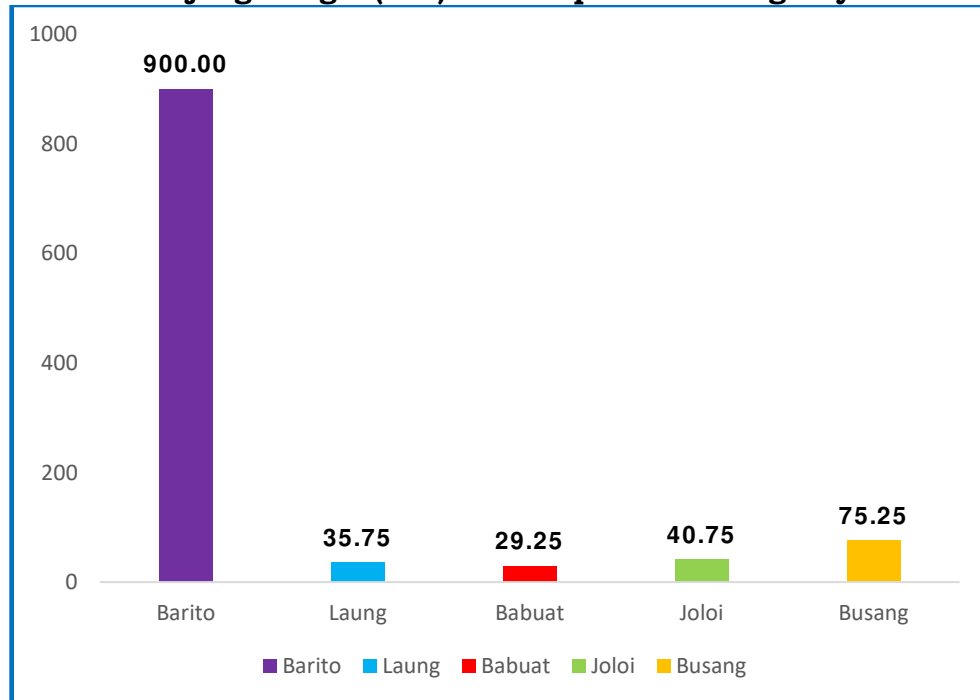
Berdasarkan kedalaman efektif tanahnya, wilayah Kabupaten Murung Raya sebagian besar mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm. Tanah dengan kedalaman efektif 30-90 cm sebagian besar terletak di bagian Selatan. Sementara itu berdasarkan tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Murung Raya terdiri dari 77.57%.

2.1.1.6 Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Murung Raya cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai antara lain Sungai Barito, Sungai Murung, Sungai Busang, Sungai Laung, Sungai Tuhup, dan beberapa sungai kecil lainnya. Sungai terbesar yang berada di Kabupaten Murung Raya adalah Sungai Barito yang sejalur dengan Kabupaten Barito Utara

dan Kabupaten Barito Selatan dengan panjang sungai lebih kurang 900 km dan lebar rata-rata 650 m dengan kedalaman rata-rata 8 m yang bermuara di Laut Jawa.

Gambar 2.5
Panjang Sungai (Km) di Kabupaten Murung Raya



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memiliki garis pantai. Kawasan perairan yang terdapat di kabupaten ini adalah sungai besar beserta anak-anak sungainya. Sungai di kabupaten ini mempunyai berbagai potensi, baik sebagai sumber usaha perikanan umum, potensi wisata dan arung jeram, juga berpotensi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air.

2.1.1.7 Klimatologi

Kabupaten Murung Raya memiliki iklim tropis yang lembab dan panas, sesuai pengamatan Stasiun Meteorologi Bandara Beringin Muara Teweh, keadaan curah hujan rata-rata tertinggi di Kabupaten Murung Raya adalah sekitar 631 milimeter dengan jumlah hari hujan rata-rata 28 hari yang terjadi pada bulan November. Selain itu, terlihat bahwa suhu atau temperatur maksimum paling rendah pada bulan Maret, Agustus, dan November yaitu sebesar 23,2°C dan yang tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 33,1°C.

Tabel 2.4.
Statistik Klimatologi di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017

Bulan	Temperatur (°C)		Hujan		Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran Matahari (%)	Kelembaban Udara (%)
	Max	Min	Curah (mm)	Hari				
Januari	32,7	23,3	268	19	1.012,1	4	48,6	85
Februari	32,5	23,6	80	15	1.012,6	4,2	45,5	83
Maret	32,2	23,2	208	22	1.012,8	4	43,7	85
April	32,6	23,5	242	20	1.012,0	4	47,9	85
Mei	32,7	24,0	380	24	1.012,3	4	48,1	85
Juni	32,2	23,6	142	20	1.012,8	3,8	44,9	85
Juli	32,9	23,3	492	19	1.013,1	4	42,6	86
Agustus	31,8	23,2	392	23	1.012,6	4	43,7	86
September	33,1	23,9	55	12	1.012,8	4	53,4	83
Oktober	32,6	24,2	178	12	1.011,7	4	56,2	84
Nopember	32,0	23,2	631	28	1.010,2	4	42,3	87
Desember	32,0	23,3	353	18	1.010,7	5	53,6	85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

2.1.1.8 Penggunaan lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Murung Raya, penggunaan lahan di Kabupaten Murung Raya masih didominasi oleh kawasan hutan yang mencapai luasan 2.246.447 hektar atau sebesar 94,79 % dari luas total Kabupaten Murung Raya, sedangkan kawasan non-hutan hanya sebesar 123.553 hektar atau sebesar 5,21 % dari total luas wilayah. Kawasan hutan didominasi oleh kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 1.225.625 ha atau sebesar 51,71 % dari luas total wilayah Kabupaten Murung Raya, kemudian diikuti oleh Hutan Lindung seluas 501.388 ha (21,16 %), Kawasan Suaka Alam seluas 186.931 ha (7,89 %), Hutan Produksi seluas 199.835 ha (8,43 %), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 132.678 ha (5,60 %).

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:

- 1) Kawasan rawan tanah longsor, terdapat:
 - a) Sepanjang ruas jalan antar kabupaten dari Kabupaten Barito Utara ke Kabupaten Murung Raya;
 - b) Sepanjang ruas jalan di Ibu Kota Kabupaten menuju ke Kecamatan/Kelurahan dan desa yang berada di Kabupaten Murung Raya; dan
 - c) Sepanjang Daerah Aliran Sungai yang berada di Kabupaten Murung Raya.

2) Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Murung, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan U'ut Murung, Kecamatan Seribu Riam.

3) Kawasan rawan kebakaran, beberapa kasus kebakaran yang pernah terjadi seperti kebakaran permukiman dan kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi baik di permukiman penduduk dan pernah terjadi di wilayah pasar. Sedangkan kebakaran hutan yang pernah terjadi dan harus diwaspadai kembali berada di Kecamatan T. Siang Selatan dan Kecamatan Murung.

Dalam penanganan bencana alam, daerah evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, tempat ibadah, dan gedung sekolah terdekat yang aman dari bencana. Selain itu, jalur evakuasi bencana menggunakan jaringan jalan dan jalur sungai yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.

Tabel 2.5.

Data Jenis dan Intensitas Bencana Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan/Lahan, Kekeringan dan Puting Beliung Di Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Jenis dan Intensitas Bencana				
		Banjir	Tanah Longsor	Karhutla	Kekeringan	Putting Beliung
1	Barito Tuhup Raya	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
2	Laung Tuhup	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
3	Murung	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
4	Permata Intan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
5	Seribu Riam	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
6	Sungai Babuat	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah
7	Sumber Barito	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8	Tanah Siang	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
9	Tanah Siang Selatan	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
10	U'ut Murung	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Murung Raya, 2018

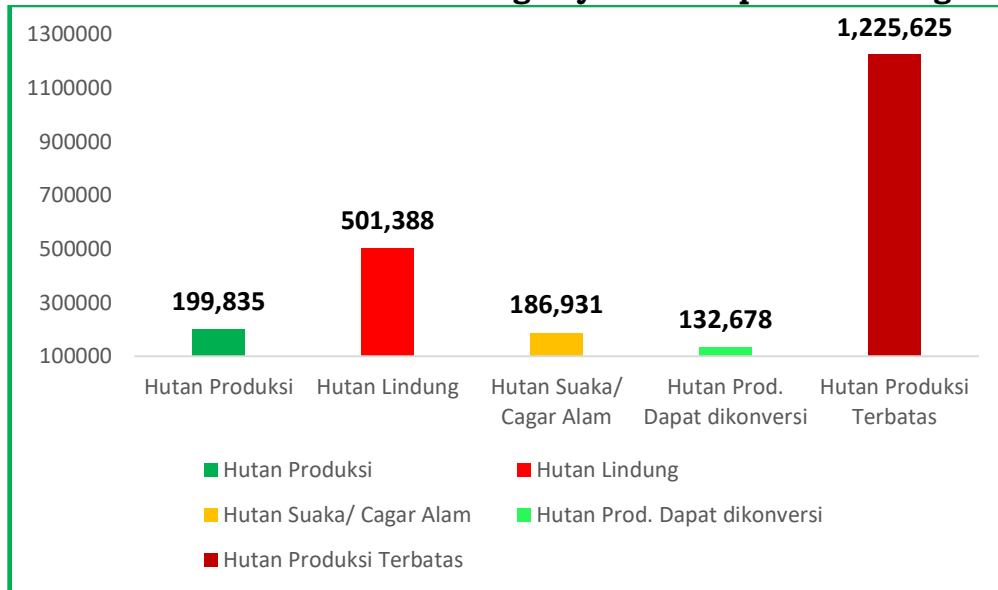
2.1.3 Potensi Sumber Daya

2.1.3.1 Kawasan hutan yang bertegakan hutan

Kawasan hutan di Kabupaten Murung Raya yang masih bertegakan hutan, meliputi kawasan Hutan Suaka/Wisata/Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, dan Hutan Cadangan, yang mencapai luas 2.023.815 ha. Kawasan hutan suaka/wisata/cagar alam, dan hutan lindung yang mencapai luas 36.64% dari luas seluruh kawasan hutan, umumnya masih berupa tegakan hutan primer, sedangkan kawasan hutan lain (63.36%),

sebagian kawasan hutannya sudah berupa tegakan hutan sekunder. Secara grafik, luas kawasan hutan tersebut, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Gambar 2.6
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Murung Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

2.1.3.2 Kawasan lindung

Kawasan lindung berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Murung Raya yang meliputi: area sempadan Sungai Sungai Barito, Sungai Laung, Sungai Babuat, Sungai Joloi dan Sungai Busang, kawasan resapan air dan atau kawasan yang mempengaruhi terhadap tata air, kawasan hutan rawa. Kawasan lindung yang merupakan kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 501.388 hektar, yang meliputi:

Tabel 2.6.
Luas Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	13.341
2	Laung Tuhup	873
3	Murung	-
4	Permata Intan	3.572
5	Seribu Riam	359.975
6	Sungai Babuat	265
7	Sumber Barito	12.601
8	Tanah Siang	21.607
9	Tanah Siang Selatan	-
10	U'ut Murung	89.153
Jumlah		501.388

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038



2.1.3.3 Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Murung Raya sebagian besar terkonsentrasi di kawasan sempadan Sungai Barito yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu, merusak kondisi sungai sekaligus mengamankan aliran sungai. Kawasan lindung yang merupakan kawasan perlindungan setempat kabupaten, meliputi: 1) sempadan sungai, dengan luas kurang lebih 14.169 hektar; dan 2) kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

1. Pada sempadan sungai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - 1) sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih.
 - 2) sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (limaratus) kilometer persegi.
 - b. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; dan
 - c. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
2. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan, berupa:
 - a. jalur hijau;
 - b. pemakaman umum;
 - c. lapangan olah raga; dan
 - d. hutan kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan ruang terbuka hijau perkotaan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



2.1.3.4 Kawasan ruang terbuka hijau

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Murung Raya dilengkapi fasilitas RTH yang dibutuhkan terdiri dari tempat bermain, taman, lapangan olah raga. Pengaturan RTH di wilayah Kabupaten Murung Raya berpedoman pada jumlah penduduk. Pada setiap unit lingkungan kecil akan dibangun taman dan tempat bermain, sedangkan setiap 2-3 unit lingkungan besar akan dibangun sebuah lapangan olah raga dan tempat rekreasi. Dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut, maka pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Murung Raya adalah taman dan lapangan olah raga melalui penataan lansekap yang lebih baik, sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi. Dan areal lokasinya menyebar ke setiap unit lingkungan kelurahan dan kecamatan di wilayah Kabupaten Murung Raya.

2.1.3.5 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Murung Raya diarahkan pada kawasan Alam Bukit Sapat Hawung dan sekitarnya dengan cakupan luas 186.931 Ha atau 3,3% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Murung Raya. Pengelolaan kawasan cagar budaya di wilayah Kabupaten Murung Raya dapat dilakukan melalui: mempertahankan keberadaannya dan dijaga kelestariannya melalui upaya konservasi bangunan dan lingkungan, membangun infrastruktur pendukung yang berfungsi menjaga kelestarian kawasan, menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan budi daya di sekitar kawasan cagar budaya, menetapkan kegiatan-kegiatan budi daya yang diperbolehkan di sekitar kawasan cagar budaya. Ada pun pembagian Kawasan lindung yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi:

1. Kawasan Suaka Alam Bukit Sapat Hawung dengan luas 186.931 hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan U'ut Murung seluas 156.755 hektar.
 - b. Kecamatan Seribu Riam seluas 30.176 hektar.
2. kawasan Cagar Budaya yang meliputi:
 - a. Rumah Betang Konut terletak di Kecamatan Tanah Siang.



- b. Rumah Betang Bantian terletak di Kecamatan Permata Intan.
- c. Rumah Betang Apat terletak di Kecamatan Sungai Babuat.
- d. Bukit Puruk Kambang di Kecamatan Tanah Siang Selatan.

2.1.3.6 Kawasan peruntukan permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan pada sekitar wilayah pengembangan di Kelurahan Beriwit (Kecamatan Murung) Kelurahan Musak Kecamatan Murung, Desa Bahitom, Desa Danau Usung dan Desa Juking Pajang atau pusat wilayah pengembangan dengan luas rata-rata 200m²/unit persil rumah hunian.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang di wilayah pengembangan ini adalah minimal 200 m² per unit persil rumah hunian. Arah pengembangan yang diprioritaskan untuk pengembangan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang ini, selain tetap mengisi lahan kosong yang ada pada kawasan permukiman yang ada, juga pengembangan kawasan permukiman baru yang seiring dengan realisasi rencana jalur jalan lingkaran luar mulai dari intensifikasi kawasan permukiman dan sekitarnya.

Pengembangan kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan pada pinggiran kota yang direncanakan, dengan rata-rata luas 200m² per persil unit hunian perumahan. Wilayah pengembangan di Kelurahan Puruk Cahu Seberang Kec. Murung, Kecamatan Laung Tuhup mencakup (Kelurahan Muara Laung, Kelurahan Muara Tuhup, Desa Muara Maruwei dan Kelurahan Batu Bua), Desa Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Laung Kecamatan Permata Intan, Muara Joloi Kec. Seribu Riam dan Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Khas Perairan Sungai (Lanting) Kawasan permukiman lanting dalam penertibannya erat kaitannya dengan penetapan areal sempadan sungai dan danau. Untuk itu kawasan lanting yang sebagian besar berada di pusat-pusat lingkungan kelurahan yang linier dengan jalur Sungai Barito masih tetap di berlakukan ketentuan lebar sempadannya 10-50 meter dari air pasang tertinggi kedaratan, atau dari tepian sungai dengan kedalam minimal 3



meter ke arah daratan yang mencapai tingkat kedalaman kurang dari 3 meter minimal.

Kawasan peruntukan permukiman, seluas kurang lebih 5.199,59 hektar meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan, seluas 867,44 hektar, kawasan peruntukan permukiman perdesaan, seluas 4.332.15 hektar, kawasan transmigrasi, seluas 3.312,15 hektar, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.7.
Kawasan Peruntukan Permukiman Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Perkotaan (Ha)	Kawasan Perdesaan (Ha)	Kawasan transmigrasi (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	-	237,2	-
2	Laung Tuhup	45,4	307,2	-
3	Murung	550,4	715,01	3.312,15
4	Permata Intan	45,4	296,88	-
5	Seribu Riam	7,3	727,58	-
6	Sungai Babuat	32,2	49,75	-
7	Sumber Barito	11,5	149,74	-
8	Tanah Siang	107,9	1301,97	-
9	Tanah Siang Selatan	8,9	328,54	-
10	U'ut Murung	-	218,31	-
	Jumlah	867,44	4.332,15	3.312,15

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

2.1.3.7 Kawasan peruntukan industri

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Murung Raya adalah sektor industri Kecil dan Menengah yang berwawasan lingkungan. Kawasan Industri Kecil dan Menengah tersebut di kembangkan pada Kecamatan Laung Tuhup dan Kecamatan Murung yang di alokasi luas lahannya 1000 Ha, sedangkan untuk Kawasan peruntukan industri rumah tangga dalam bentuk sedang menengah, tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Murung Raya untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.3.8 Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata yang dikembangkan mencakup destinasi dan sarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik lokal, regional dan nasional yang didalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Murung Raya di bagi menjadi 3 zona wisata meliputi:



- (1) Kawasan peruntukan pariwisata budaya, meliputi:
 - a. Rumah Betang Konut di Kecamatan Tanah Siang;
 - b. Rumah Betang Tumbang Bantian di Kecamatan Permata Intan;
 - c. Rumah Betang Apat di Kecamatan Sungai Babuat; dan
 - d. Rumah Adat dan Budaya Dayak di Kecamatan Murung.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi:
 - a. Arung Jeram di Kecamatan Sumber Barito;
 - b. Arung Jeram di Kecamatan U'ut Murung;
 - c. Pegunungan Mueller di Kecamatan U'ut Murung;
 - d. Air Terjun Bumbun di Kecamatan Tanah Siang; dan
 - e. Liang Pandan di Kecamatan Murung.
 - f. Pasir Putih di Sungai Danau
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi:
 - a. Jembatan Pajai di Kecamatan U'ut Murung
 - b. Tugu Equator di Kecamatan U'ut Murung
 - c. Pengembangan Makam Baras Kuning

Zona wisata ini akan dikembangkan lagi dan akan terus digali sesuai dengan potensi yang dimiliki di Kabupaten Murung Raya.

2.1.3.9 Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 1.558.147 hektar, meliputi kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 199.835 hektar, kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 1.225.625 hektar, kawasan Hutan Produksi Konversi seluas kurang lebih 132.687 hektar, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.8.
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi Tetap (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Kawasan Hutan Produksi Konversi (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	31.496	70.519	20.318
2	Laung Tuhup	29.952	70.958	31.117
3	Murung	29.540	-	-
4	Permata Intan	46.511	1.070	23.338
5	Seribu Riam	33.410	381.625	-



6	Sungai Babuat	961	15.833	22.420
7	Sumber Barito	16.702	26.709	22.167
8	Tanah Siang	5.750	102.461	6.450
9	Tanah Siang Selatan	268	-	-
10	U'ut Murung	5.245	556.450	6.876
	Jumlah	199.835	1.225.625	132.686

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

2.1.3.10 Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian yang tersedia di Kabupaten Murung Raya yang tersebar di wilayah kecamatan, seluas kurang lebih 81.018 hektar, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.9.
Kawasan Peruntukan Pertanian Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Pertanian (Ha)	Kawasan Peternakan (Ha)	Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	9.495,7		
2	Laung Tuhup	20.175	191,3	
3	Murung	1.936,5	288,79	4.636,1
4	Permata Intan	4.891,7		299,6
5	Seribu Riam	8.408,8		
6	Sungai Babuat	1.129,9		
7	Sumber Barito	8.799,1		
8	Tanah Siang	18.357,3		
9	Tanah Siang Selatan	1.376,2	60,71	
10	U'ut Murung	871,6		
	Jumlah	75.541,8	540,8	4.935,7

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

2.1.3.11 Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan seluas kurang lebih 1.109.409,74 hektar, berupa kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan, potensi bahan galian tambang di Kabupaten Murung Raya dapat di golongan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A, yaitu bahan galian strategis, antara lain: minyak, gas bumi, dan batu bara.
2. Golongan B, yaitu bahan galian golongan vital, antara lain: emas, intan dan antimonite dan;
3. Golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital antara lain: batu kapur, bentonit, basal phosshpat, kaolin, maka, endesit, granit dan gabro.

Kawasan peruntukkan pertambangan di Kabupaten Murung Raya terdiri dari Wilayah Tambang dan Wilayah Pertambangan Rakyat yang di bagi menjadi berapa potensi bahan galian tambang yang ada di Kabupaten Murung Raya, yang sudah dimanfaatkan adalah emas, intan dan sebagian kecil galian C, baik yang dikelola oleh perusahaan swasta maupun masyarakat secara tradisional, tercatat beberapa informasi bahan galian potensial di Kabupaten Murung Raya, seperti pada berikut:

Tabel 2.10.
Bahan Galian Potensial Kabupaten Murung Raya

No	BAHAN TAMBANG	KETERANGAN /LOKASI
1.	Batu bara	Terdapat di Kecamatan Laung Tuhup, Murung Permata Intan, dan Sumber Barito: mempunyai deposit yang sangat besar dengan usia Eksploitasi 40 tahun
2.	Emas	Terdapat di Kecamatan : Murung, Tanah Siang Permata Intan
3.	Kapur	Terdapat di Kecamatan : Murung dan Permata Intan
4.	Bentonit	Terdapat di Kecamatan : Murung dan Permata Intan
5.	Batu dan Pasir	Terdapat di Kec. Murung, Tanah Siang, Permata Intan , Sumber Barito

Sumber: Situs Resmi Kabupaten Murung Raya, 2018

Tabel 2.11.
Kawasan Peruntukan Pertambangan Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Wilayah Tambang (Ha)	Wilayah Pertambangan Rakyat (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	117.783,83	2.454
2	Laung Tuhup	106.503,46	642
3	Murung	23.654,73	10.368
4	Permata Intan	48.800,5	7492
5	Seribu Riam	166.595,72	5.792
6	Sungai Babuat	19.657,23	2.828
7	Sumber Barito	76.824,91	5.984
8	Tanah Siang	94.903,57	96
9	Tanah Siang Selatan	6.059,53	5.286
10	U'ut Murung	398.529,93	2211
Jumlah		1.059.313,41	43.153

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya 2018-2038

2.1.4 Demografi

Penduduk Kabupaten Murung Raya pada akhir Tahun 2017 telah mencapai 115.604 jiwa, terdiri dari sebanyak 60.173 orang laki-laki (52,05%) dan 55.431 orang penduduk perempuan (47,95%). Jumlah penduduk Kabupaten Murung Raya tersebut tergolong masih sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang cukup luas (23.700 km²), dimana tingkat kepadatan penduduk pada tahun selama tahun 2010-2017 hanya sekitar 5 jiwa/km².



Kepadatan penduduk dapat dinyatakan dalam 2 (dua) bentuk kepadatan yaitu kepadatan secara geografis dan secara agraris. Kepadatan geografis membandingkan jumlah penduduk terhadap luas wilayah keseluruhan, sedangkan kepadatan agraris merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas tanah atau lahan yang diusahakan baik oleh pemerintah, swasta/perusahaan dan masyarakat sendiri termasuk pemukiman penduduk. Lahan yang diusahakan bisa berupa perkampungan, sawah, ladang/tegal, perkebunan, rawa/tambak serta semak belukar.

Kepadatan penduduk Kabupaten Murung Raya semenjak mengalami pemekaran kabupaten pada tahun 2002 sampai pada tahun 2017 mengalami perubahan, yaitu 5 orang penduduk per 1 (satu) Km² wilayahnya. Paling sedikit di antara semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi ini menjadi prioritas peningkatan pengembangan daerah, oleh karena itu program penambahan penduduk tenaga trampil pada wilayah-wilayah yang sesuai peruntukannya seperti program transmigrasi perlu digalakkan.

Umumnya penduduk masih terkonsentrasi di pusat pemerintahan kabupaten (Kecamatan Murung dengan kepadatan 53 jiwa/km²). Sedangkan beberapa wilayah hanya memiliki kepadatan penduduk 1 jiwa/km² seperti kecamatan Seribu Riam dan U'ut Murung.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin penduduk, sebagian besar penduduk Murung Raya memiliki jenis kelamin laki-laki dengan perbandingan *sex ratio* 109 yang mengindikasikan bahwa di setiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. *Sex ratio* tertinggi berada di Kecamatan U'ut Murung dan terendah berada di Kecamatan Laung Tuhup dan Tanah Siang Selatan dengan nilai *sex ratio* sebesar 106.

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017

Kecamatan		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1.	Permata Intan	6.360	6.002	12.362	106
2.	Sungai Babuat	1.349	1.176	2.525	115
3.	Murung	20.247	18.687	38.934	108
4.	Laung Tuhup	10.837	10.271	21.108	106
5.	Barito Tuhup Raya	2.515	2.288	4.803	110
6.	Tanah Siang	7.954	7.317	15.271	109
7.	T. Siang Selatan	3.039	2.862	5.901	106



Kecamatan		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
8.	Sumber Barito	4.306	3.919	8.225	110
9.	Seribu Riam	2.079	1.701	3.780	122
10.	U'ut Murung	1.487	1.208	2.695	123
Jumlah Tahun 2017		60.173	55.431	115.604	109
Tahun 2016		58.771	54.205	112.976	108
Tahun 2015		57.382	53.008	110.390	108
Tahun 2014		55.991	51.733	107.724	108
Tahun 2013		54.600	50.500	105.100	108

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Tabel 2.12.
Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Murung Raya

Kecamatan	Tahun 2010-2017	Tahun 2016-2017
Permata Intan	11,96	1,60
Sungai Babuat	11,99	1,61
Murung	25,76	3,56
Laung Tuhup	11,96	1,60
Barito Tuhup Raya	11,96	1,61
Tanah Siang	19,47	2,69
T. Siang Selatan	19,46	2,70
Sumber Barito	5,53	0,62
Seribu Riam	5,56	0,61
U'ut Murung	5,52	0,63
Murung Raya	16,64	2,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Murung Raya cukup rendah dimana satu tahun periode 2016-2017 memiliki pertumbuhan penduduk sebesar 2,33 persen. Sedangkan jika dilihat secara kumulatif pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 (pelaksanaan Sensus Penduduk 2010) maka terlihat pertumbuhan hingga mencapai 16,64 persen dalam kurun waktu tujuh tahun.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, serta seni budaya dan olahraga. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya diperoleh dari peningkatan perekonomian daerah beserta pemerataannya hingga ke



berbagai kalangan sehingga tidak hanya golongan tertentu saja yang mendapat manfaatnya. Dalam gambaran umum kondisi daerah ini, fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara umum diarahkan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB merupakan suatu indikator yang memiliki peranan penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, selain menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Acuan dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah dilihat dari nilai PDRB. PDRB mencerminkan neraca ekonomi suatu wilayah. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yang ditetapkan berdasarkan pada Harga Berlaku dan Harga Konstan.

Relevansi data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan tidak salah arah. Angka PDRB sangat diperlukan karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja proses pembangunan di wilayah tersebut.

Pada Tahun 2017, lebih dari setengah dari PDRB Provinsi Kalimantan Tengah hanya disumbangkan oleh empat kabupaten/kota yakni Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Palangka Raya dan Kapuas, dengan kontribusi masing-masing daerah di atas 10 persen. Sementara sisanya disumbangkan oleh 10 kabupaten lainnya termasuk Kabupaten Murung Raya, dengan kontribusi masing-masing kabupaten hanya berkisar antara 2 hingga 7 persen. Jika dibandingkan dengan empat kabupaten/kota dengan kontribusi perekonomian terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai kontribusi Kabupaten Murung Raya

masih tergolong rendah, yakni hanya sebesar 5,54 persen terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

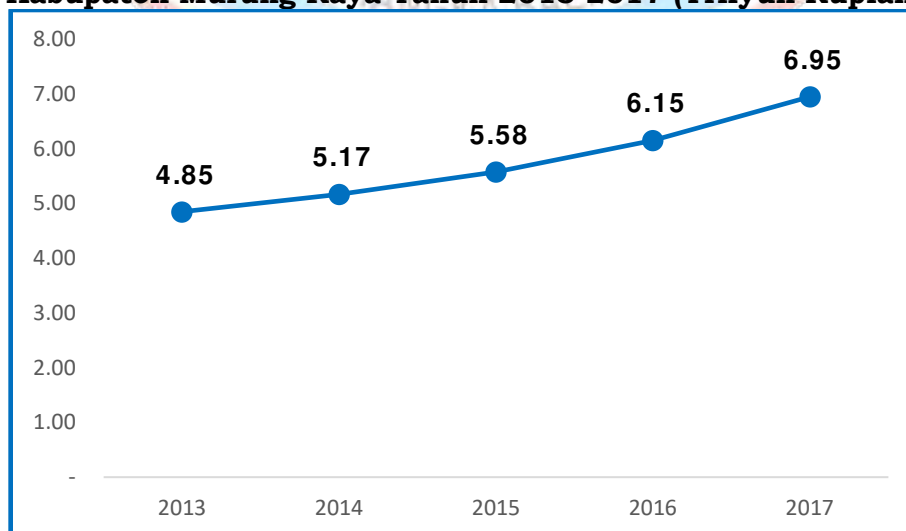
Tabel 2.13.
PDRB ADH Berlaku dan Distribusi PDRB menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

Kabupaten/Kota	Nilai PDRB adh Berlaku	Distribusi (%)
Kotawaringin Barat	16.368,1	13,05
Kotawaringin Timur	22.429,6	17,88
Kapuas	13.562,0	10,81
Barito Selatan	5.428,6	4,33
Barito Utara	8.266,4	6,59
Sukamara	3.572,7	2,85
Lamandau	4.514,1	3,60
Seruyan	7.588,7	6,05
Katingan	6.805,6	5,42
Pulang Pisau	4.438,9	3,54
Gunung Mas	4.709,8	3,75
Barito Timur	6.320,0	5,04
Murung Raya	6.948,1	5,54
Kota Palangka Raya	14.514,0	11,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

PDRB Kabupaten Murung Raya dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 5 Tahun, nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan dari 4,85 trilyun rupiah pada tahun 2013 hingga menjadi sebesar 6,95 trilyun rupiah. Jadi peningkatan angka PDRB selama kurun waktu lima tahun terakhir berkisar 2,10 trilyun rupiah.

Gambar 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017 (Trilyun Rupiah)

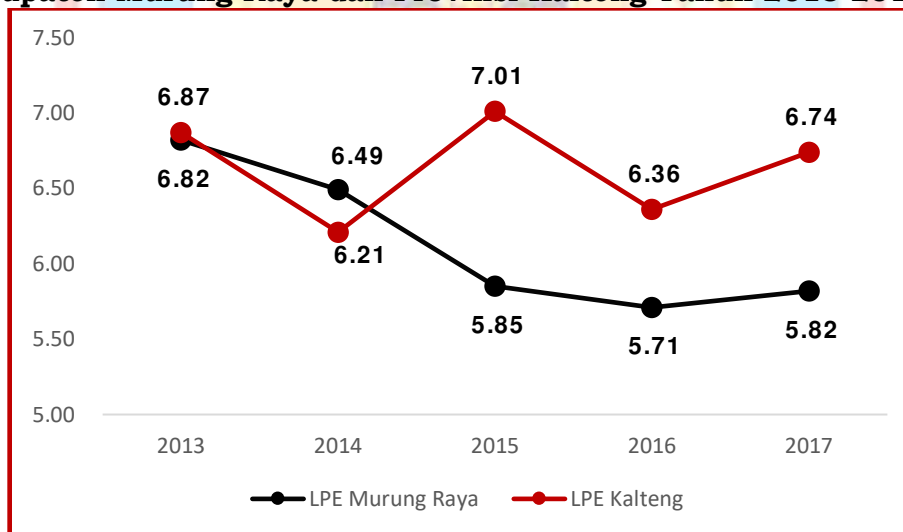


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran makro dari hasil proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dan gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui laju pertumbuhan dari PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Murung Raya secara umum mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2013 sebesar 6,82 persen dan menurun hingga tahun 2017 melambat menjadi 5,82 persen. Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Murung Raya juga masih cukup jauh di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dimana pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 6,74 persen.

Gambar 2.8
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalteng Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Struktur perekonomian di Kabupaten Murung Raya cukup timpang dimana dominasi perekonomian daerah berasal dari pertambangan dan penggalian yang notabene merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan pada kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan perekonomian daerah. Selain itu, sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi PDRB sebesar



11,63 persen. Angka ini juga mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Masih cukup tingginya kontribusi sektor pertambangan ini perlu menjadi perhatian mengingat di saat yang bersamaan terjadi penurunan pula pada sektor yang dari potensi sumber daya alam terbarukan.

Tabel 2.14.
Distribusi PDRB (Struktur Ekonomi) Kabupaten Murung Raya
Tahun 2014-2017

Kode	Kategori	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,41	12,62	12,10	11,63
B	Pertambangan dan Penggalian	52,83	49,02	49,33	49,54
C	Industri Pengolahan	3,21	3,52	3,42	3,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,03	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,05	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,78	7,62	7,58	7,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	5,98	5,85	5,73
H	Transportasi dan Pergudangan	3,21	3,52	3,72	3,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,71	0,73	0,76
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,23	1,22	1,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,78	0,74	0,76	0,78
L	Real Estate	1,44	1,55	1,55	1,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	4,36	4,48	4,46
P	Jasa Pendidikan	4,39	4,76	4,78	4,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,04	2,30	2,40	2,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,83	1,97	2,01	2,03
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator adanya peningkatan kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat dapat didekati dengan nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita suatu daerah dihitung dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah tersebut. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk.

Perlu diperhatikan bahwa, PDRB perkapita tersebut belum memperhitungkan pendapatan yang keluar dan masuk ke Kabupaten Murung Raya (*Net Factor Income from Abroad*). Sehingga pendapatan perkapita yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat Murung Raya. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar dan masuk ke suatu daerah menyebabkan PDRB perkapita merupakan pendekatan yang paling tepat dalam mengukur rata-rata pendapatan masyarakat.

Apabila diamati selama lima tahun terakhir, nilai laju pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Murung Raya selalu tumbuh positif, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu tersebut. Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai 60,10 juta rupiah. Angka ini tentu saja meningkat pesat hingga peningkatannya mencapai 13,96 juta rupiah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar 2.9
PDRB per Kapita Kabupaten Murung Raya
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di daerah tersebut mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara

umum. Inflasi di Kabupaten Murung Raya adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dalam menghitung inflasi saat ini, tidak semua kab/kota menjadi sampel dalam perhitungan dan Kabupaten Murung Raya menjadi salah satu kota yang tidak termasuk dalam sampel tersebut. Untuk memperkirakan dan memberikan gambaran mengenai inflasi, perhitungan inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi rujukan.

Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Povinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada beberapa tahun terakhir secara konsisten baik Kota Palangka Raya maupun Kota Sampit mengalami penurunan inflasi yang mengindikasikan efektifnya pengendalian inflasi daerah oleh pemerintah daerah masing-masing. Namun pada tahun 2017, terjadi kenaikan angka inflasi baik di Kota Palangka Raya maupun Kota Sampit hingga mencapai 3,11 persen dan 3,29 persen.

Tabel 2.15.
Inflasi di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit Tahun 2013-2017 (%)

Uraian	Indeks dan IHK				
	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Palangka Raya	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11
Inflasi Kota Sampit	7,25	7,90	5,72	2,46	3,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2018

2.2.1.3 Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna), sehingga semakin rendah indek Gininya menunjukkan semakin kecil ketimpangan di daerah tersebut dan demikian pula sebaliknya. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva *Lorenz* (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal.



Indeks gini di Kabupaten Murung Raya cukup fluktuatif yang menandakan bahwa pemerataan kesejahteraan sosial penduduk Murung Raya masih belum stabil. Hingga tahun terakhir, indeks gini Murung Raya mencapai 0,303 dimana angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 0,328. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2017 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Terlihat pula bahwa pemerataan pendapatan yang cukup timpang dimana 40 persen penduduk berpenghasilan rendah hanya menikmati pendapatan sebesar 21,64 persen dari total pendapatan masyarakat Murung Raya. Sedangkan dari 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi menikmati 44,57 persen pendapatan dari seluruh pendapatan masyarakat Murung Raya.

Tabel 2.16.
Indeks Gini/Koefisien Gini Kab. Murung Raya

Tahun	Kriteria	Gini Rasio Kab. Murung Raya	Indeks Gini
2013	40% penduduk berpenghasilan rendah	21,56	0,318
	40% penduduk berpenghasilan sedang	37,46	
	20% penduduk berpenghasilan tinggi	40,98	
2014	40% penduduk berpenghasilan rendah	21,10	0,333
	40% penduduk berpenghasilan sedang	35,84	
	20% penduduk berpenghasilan tinggi	43,05	
2015	40% penduduk berpenghasilan rendah	21,82	0,297
	40% penduduk berpenghasilan sedang	39,51	
	20% penduduk berpenghasilan tinggi	38,68	
2016	40% penduduk berpenghasilan rendah	NA	0,328
	40% penduduk berpenghasilan sedang	NA	
	20% penduduk berpenghasilan tinggi	NA	
2017	40% penduduk berpenghasilan rendah	21,64	0,303
	40% penduduk berpenghasilan sedang	38,28	
	20% penduduk berpenghasilan tinggi	44,57	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

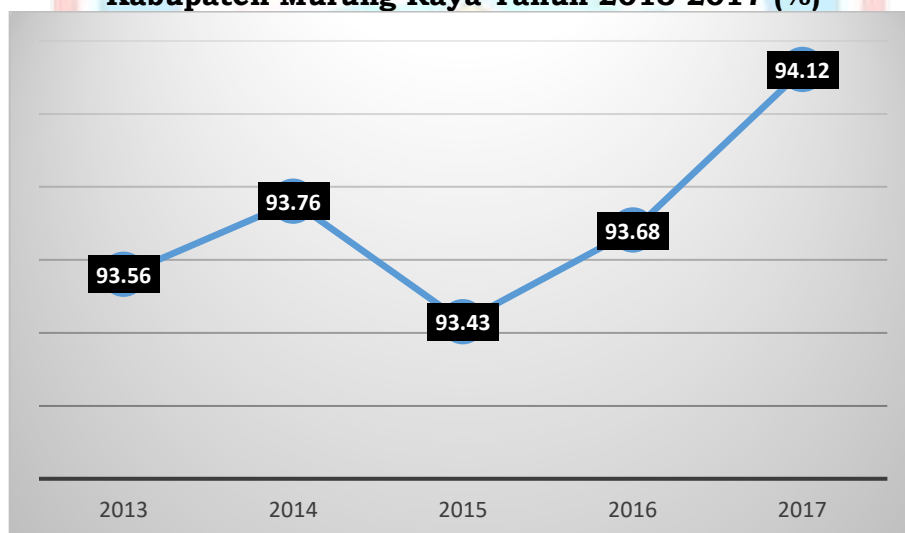
2.2.1.4 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Angka kemiskinan suatu wilayah akan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan disini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran baik makanan maupun

non makanan di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, untuk melihat penduduk masyarakat yang sejahtera, maka dapat didekati dengan melihat persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan atau dianggap penduduk tidak miskin.

Terlihat pada gambar di bawah ini bahwa secara umum dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan atau bisa dikategorikan tidak miskin. Namun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan hingga mencapai 93,43 persen penduduk yang tidak miskin padahal tahun sebelumnya sempat mencapai angka 93,76 persen. Meskipun begitu, pada tahun 2017 merupakan titik tertinggi persentase penduduk yang tidak miskin hingga mencapai angka 94,12 persen.

Gambar 2.10
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial menguraikan gambaran umum seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Fokus ini akan melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya selama ini berdasarkan indikator pembangunan yang relevan dengan kesejahteraan sosial.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan

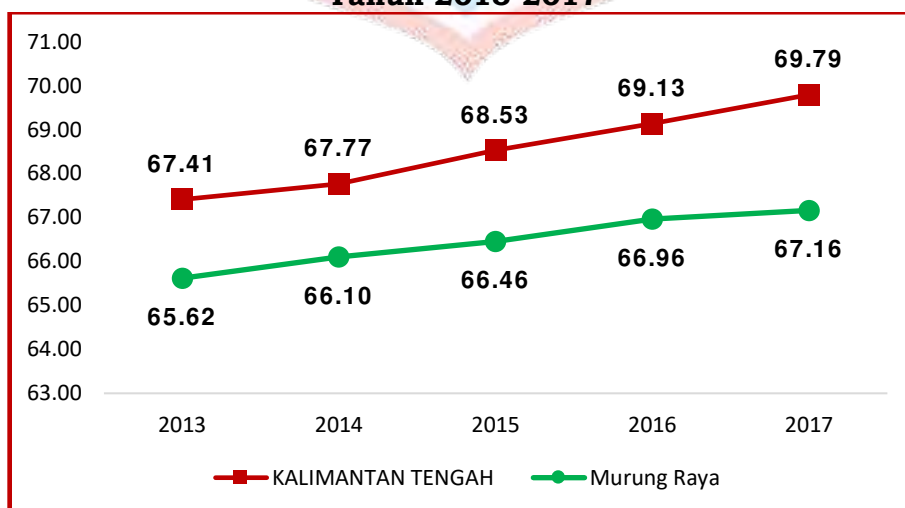


tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes* (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Murung Raya memiliki nilai yang masih cukup rendah jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk angka IPM Kalimantan Tengah sendiri. Meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan angka IPM, namun rendahnya angka IPM ini akan berdampak pada capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan.

Gambar 2.11
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Tahun 2018



Angka IPM Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 sebesar 67,16 dan jauh di bawah angka Kalimantan Tengah yang memiliki IPM sebesar 69,79. Angka IPM Kabupaten Murung Raya ini berada pada peringkat ke 11 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, pemerintah harus *concern* dengan indikator ini mengingat IPM adalah indikator makro pembangunan daerah yang terlihat dari komponen pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rumah tangga.

2.2.2.2 Pendidikan

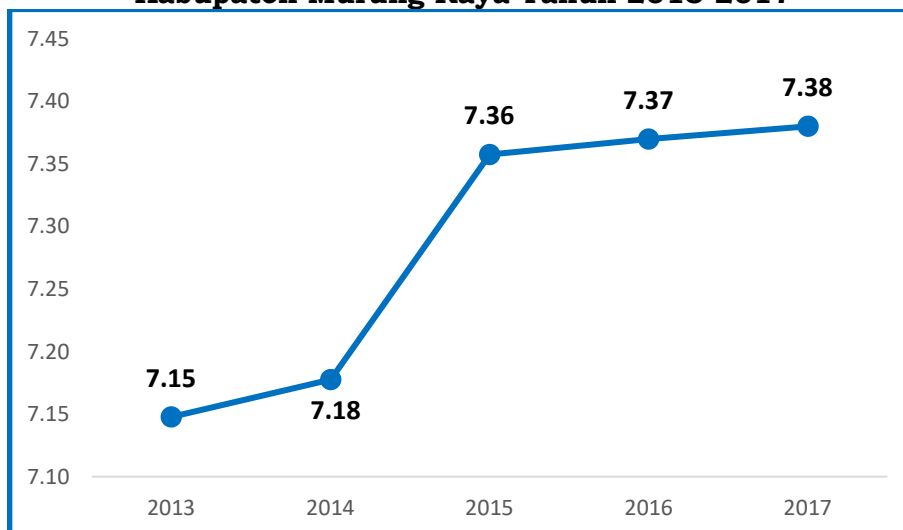
Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

- Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah ialah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang diselesaikan dalam pendidikan normal (tidak termasuk tahun yang mengulang) Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dari segi pendidikan formal. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Murung Raya mengalami kenaikan di setiap tahunnya meskipun secara capaian masih tergolong rendah. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Murung Raya masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 8,29 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah Murung Raya hanya selama 7,38 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata sekolah penduduk berumur 25 tahun ke atas mengenyam jenjang pendidikan di Kabupaten Murung Raya hanya selama 7,38 tahun atau hanya sampai menduduki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 2 semester 1.

Gambar 2.12
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017



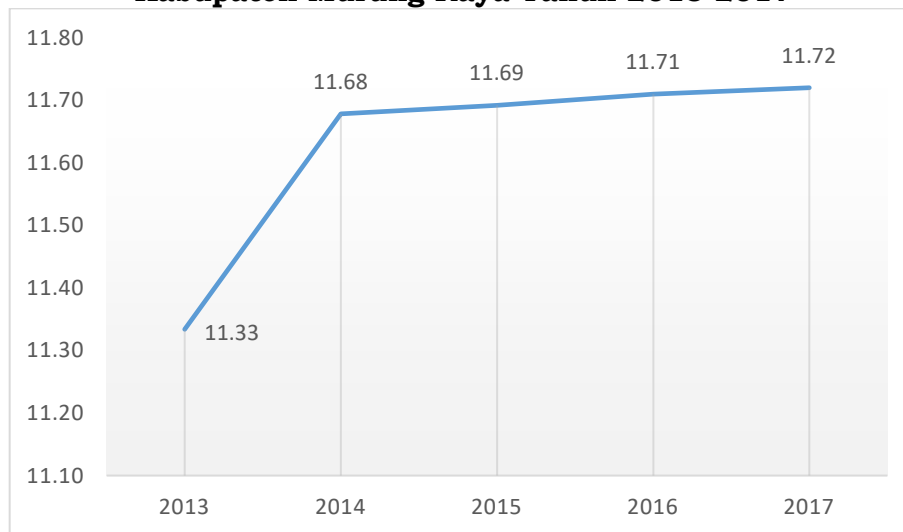
Sumber: Badan Pusat Statistik Murung Raya, Tahun 2018

- **Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Murung Raya terkesan cukup lambat karena hingga tahun 2017 hanya memiliki harapan usia sekolah selama 11,72 tahun yang berarti dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas di Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat mengenyam jenjang pendidikan hingga SMA kelas 3 semester kedua. Angka ini berada cukup jauh di bawah rata-rata provinsi dimana harapan lama sekolah mencapai 12,45 tahun.

Gambar 2.13
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017



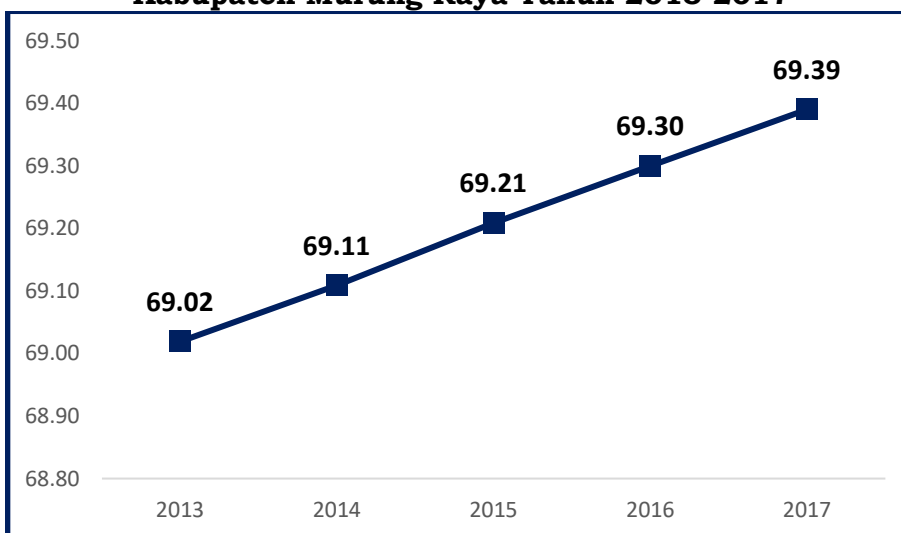
Sumber: Badan Pusat Statistik Murung Raya, Tahun 2018

2.2.2.3 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama bagi sumber daya manusia suatu wilayah dalam mengupayakan kehidupannya sekaligus dalam rangka meningkatkan capaian pembangunan daerah. Indikator kesehatan secara umum diwakili oleh komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia yakni Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dengan melihat harapan hidup seorang bayi yang baru saja lahir pada tahun yang bersangkutan.

Harapan Lama Sekolah Murung Raya memang mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa program kesehatan menampilkan hasil positif. Meskipun begitu, secara capaian dan pertumbuhan Harapan Lama Sekolah, angka Murung Raya tergolong rendah dimana selama lima tahun terakhir hanya meningkat 0,37 poin. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Murung Raya yang selama 69,39 tahun, memiliki arti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2017 di Kabupaten Murung Raya akan memiliki harapan hidup hingga berumur 69-70 tahun.

Gambar 2.14
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Murung Raya, Tahun 2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Kebudayaan

Fokus seni budaya dan olahraga akan menguraikan gambaran umum bidang kebudayaan serta pemuda dan olahraga. Dari segi kebudayaan Kabupaten Murung Raya, pokok bahasan terkait bahasa daerah asli masyarakat di Kabupaten Murung Raya yakni bahasa “*Ut danom*”. Namun hingga tahun 2007, bahasa di daerah ini sudah berkembang dengan adanya suku-suku lain yang masuk ke daerah ini, seperti suku Dayak Ngaju dengan bahasa “Kapuas”, suku Banjar dengan bahasa “Banjar”. Kesenian daerah juga cukup berkembang dan cukup spesifik dibanding daerah lain, terutama jenis tari-tarian daerah, lagu daerah, dan pakaian daerahnya. Terkait dengan kebudayaan, juga di Kabupaten Murung Raya terdapat berbagai situs bersejarah. Di Kabupaten Murung Raya, terdapat rumah adat “betang”, yaitu “Betang Konut”, dan “Betang Beras Kuning”. Juga di daerah ini ditemui situs bersejarah lainnya seperti makam keramat.

Dari sisi suku bangsa atau etnis di Kabupaten Murung Raya, masih didominasi oleh suku asli yaitu suku Dayak. Meskipun demikian, suku Dayak di kabupaten ini sudah lama terbuka dan menerima suku bangsa yang lain sebagai suku pendatang. Sehingga selain suku Dayak, suku lain yang dapat ditemui di kabupaten ini hingga sekarang seperti suku Banjar, Jawa, Bugis, Ambon, Batak, dan Tionghoa. Suku pendatang ini umumnya datang untuk berusaha dan banyak pula yang sudah lama tinggal serta hidup menetap, dan berbaur dengan suku asli daerah ini.



2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

Organisasi kepemudaan yang terdapat di Kabupaten Murung Raya, diantaranya adalah KNPI di ibukota kabupaten (Kecamatan Murung), dan karang taruna di semua kecamatan yang ada. Selain itu, juga cukup banyak terdapat organisasi pemuda/pemudi di bidang keagamaan, seperti kelompok pemuda/pemudi mesjid, seksi pelayanan pemuda/pemudi kristen.

Tabel 2.17.
Banyaknya Organisasi Pemuda menurut Jenis Organisasi di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2015

Jenis Organisasi		Jumlah
1.	KNPI	11
2.	Gerakan Pemuda Dayak	1
3.	Barisan Pemuda Pancasila	1
4.	PSSI	1
5.	PERBAKIN	1
6.	Pemuda Katholik	2
7.	Pramuka	2
8.	Pemuda Ka'bah	1
9.	Karang Taruna/ Depsos	10
10.	Remaja Masjid	1
11.	Hafidz Al-Qur'an	1
12.	Relawan Pemuda Gereja	1
13.	Gerakan Angkatan Muda Kristen	1
14.	Barisan Pemuda Adat Nusantara	1
15.	KONI	1
16.	Pemuda Muhamadiyah	1
17.	PBVS	1
18.	PERCASI	1
19.	PBSI	1
20.	Pemuda DAD	124
Jumlah 2015		164
2014		177
2013		43
2012		49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Organisasi keolahragaan juga sudah ada, namun sebagian besar masih di ibukota kabupaten, seperti persatuan olahraga bulu tangkis, sepak bola, tennis lapangan, volly ball, dan basket. Sementara itu jumlah gelanggang olah raga juga semakin baik, dimana pada tahun 2017 sudah terdapat sebanyak 50 unit, yang tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Tabel 2.18.
Fasilitas Olahraga di Kabupaten Murung Raya

Tahun	Gedung Olah Raga/ Sanggar Senam	Lapangan Sepak Bola	Lapangan Basket	Lapangan Tennis	Lapangan Bulu Tangkis	Lapangan Futsal	Lapangan Bola Voli
2017	2	8	4	2	13	2	19



Tahun	Gedung Olah Raga/ Sanggar Senam	Lapangan Sepak Bola	Lapangan Basket	Lapangan Tennis	Lapangan Bulu Tangkis	Lapangan Futsal	Lapangan Bola Voli
2016	2	9	5	2	13	1	26
2015	2	9	5	2	13	1	26
2014	4	12	8	1	59	-	97
2013	4	12	8	1	59	-	97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini mencakup fokus layanan urusan wajib, layanan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan pembangunan daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi anak yang bersekolah pada tahun tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah



pada tahun yang sama. Angka partisipasi sekolah yang dievaluasi adalah untuk jenjang pendidikan SD hingga SLTA, selama tahun 2017. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Murung Raya selama tahun 2017 cenderung semakin meningkat. Angka partisipasi sekolah pada tahun 2016 untuk penduduk berumur 7 – 12 tahun sebesar 98,95 % mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 98,16%, untuk penduduk berumur 13 – 15 tahun sebesar 92,46 % mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, untuk penduduk berumur 16 – 18 tahun sebesar 59,10% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Cukup membaiknya angka partisipasi sekolah pada tahun 2017 tersebut, terkait dengan program wajib belajar sembilan tahun, pembebasan dana pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, perbaikan fasilitas pendidikan dan peningkatan jumlah tenaga pendidikan setiap tahunnya. Selain itu juga karena semakin pulihnya kondisi perekonomian masyarakat pada periode tersebut. Membaiknya perekonomian masyarakat mendorong terjadinya perbaikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

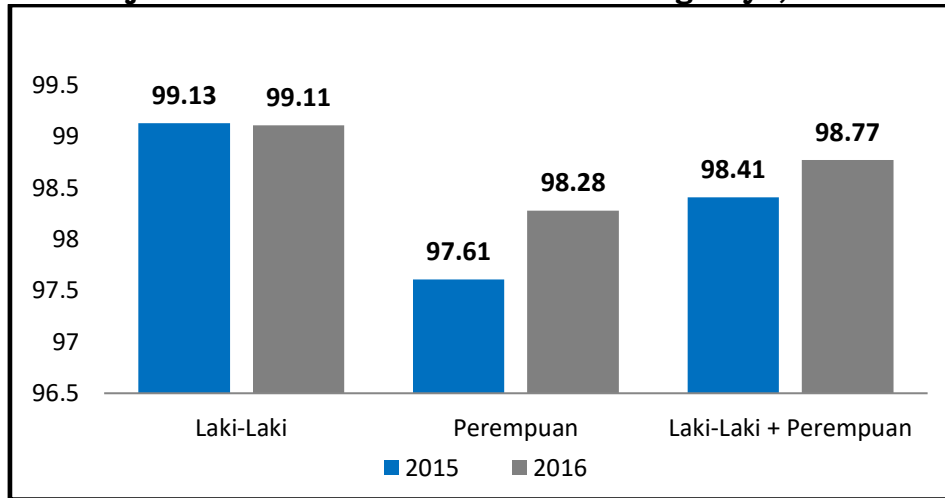
b. Angka Melek Huruf

Angka buta huruf menunjukkan proporsi penduduk 15 tahun ke atas yang belum bisa membaca dan menulis terhadap total penduduk pada kelompok umur tersebut. Dengan diketahuinya angka buta huruf maka selebihnya merupakan porsi penduduk yang melek huruf. Angka melek huruf atau banyaknya masyarakat Murung Raya tahun 2016 yang dapat membaca dan menulis mencapai 98,77 persen, nilai tersebut sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya mencapai 98,41 persen berdasarkan jenis kelamin.

Pada tahun 2016 Angka Melek Huruf penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yakni 99,11 persen (laki-laki) dan 98,28 persen (perempuan) ini merupakan capaian yang sangat bagus di tengah kondisi geografis wilayah Murung Raya yang sebagian wilayahnya masih tergolong sulit dalam hal aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan. Namun angka tersebut mutlak harus ditingkatkan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengenal baca tulis di tengah era globalisasi ini serta proses menuju Murung Raya emas 2030 mendatang. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Murung Raya yang tidak dapat membaca dan menulis persentasenya sangat kecil dibanding yang bisa

membaca dan menulis. Berikut ini adalah persentase kepandaian membaca dan menulis penduduk Kabupaten Murung Raya.

Gambar 2.15
Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Keatas
Menurut jenis dan Kelamin Penduduk Murung Raya, Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Tabel 2.19.
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru menurut jenis dan Status Sekolah di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

Jenis Sekolah	Sekolah		Murid		Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	PNS	Swasta
Taman Kanak-Kanak (TK) Sederajat	1	164	61	4 999	7	472
Sekolah Dasar (SD)/ Sederajat	166	14	15 899	1 051	1 492	105
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat	60	6	6 262	567	635	41
Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat	24	2	3 941	178	355	16
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	-	383	-	37	-
Jumlah	253	186	26 546	6 795	2 526	634

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya, 2018

Fasilitas pendidikan formal yang terdapat di Kabupaten Murung Raya hingga Tahun 2016 adalah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum. Hingga Tahun 2016, jumlah Gedung SD sebanyak 180 unit, gedung SLB 1 unit, gedung SMP sebanyak 66 unit, Gedung MTS adalah 4 unit, Gedung SMA 26 unit, Gedung MA sebanyak 2 unit dan Gedung SMK 2 unit.

Ketersediaan fasilitas pendidikan di kecamatan pemekaran harus ditingkatkan. Namun demikian, sebagaimana sebelumnya anak-anak di kecamatan pemekaran tersebut tetap bersekolah di kecamatan



induknya. Jumlah murid sekolah yang berada di Kabupaten Murung Raya pada Tahun 2016 adalah 16.950 murid SD dengan 1.597 orang guru; SMP dengan 676 orang guru dan 6.829 orang murid; SMA dengan jumlah murid 4.119 dan jumlah guru 371; SMK dengan jumlah murid 383 murid dan jumlah guru 37 Guru.

c. Angka Putus Sekolah (berdasarkan jenjang pendidikan)

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs selama kurun waktu 2015 – 2017 mengalami penurunan APtS SD/MI tahun 2015 sebanyak 120 siswa, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan APtS SD/MI tahun 2017 sebanyak 162 siswa. Pada tahun 2015 - 2017 APtS SMP/MTs tahun 2015 sebanyak 86 turun menjadi 27 siswa pada tahun 2017. Jika dilihat berdasarkan persentasenya, maka terlihat penurunan angka yang signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 yang terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.20.
Persentase Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

No.	Jenjang Pendidikan	Persentase				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD	9,6	9,2	8,6	7,3	7,1
2	SMP	8,3	8,1	7,8	7,4	6,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

d. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan adalah jumlah siswa baru tingkat pertama pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa lulusan pada jenjang pendidikan di bawahnya pada tahun ajaran sebelumnya. Jumlah siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017, angka melanjutkan menurun cukup signifikan. Terlihat persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP sederajat meningkat hingga mencapai 91,10 persen pada tahun 2016, namun angka tersebut menurun hingga mencapai 86,19 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.21.
Persentase Siswa Melanjutkan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	1.634	1.824	2.160	2.283	2.191
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	2.169	2.354	2.436	2.506	2.542
	Persentase	75,33	77,49	88,67	91,10	86,19

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya, 2018

e. Rasio Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Murung Raya termasuk masih rendah, hal ini karena keterbatasan keberadaan sekolah yang hanya tersebar di beberapa kecamatan, namun secara bertahap telah dilaksanakan beberapa pembangunan sekolah terutama SMK sehingga perkembangannya tahun 2013 - 2017 mengalami peningkatan. Namun apabila dibandingkan dengan pendidikan dasar masih jauh lebih tinggi rasio ketersediaan sekolah di pendidikan dasar, menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah untuk menampung penduduk usia sekolah dasar lebih memadai.

Tabel 2.22.
Rasio Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah 7-15 Tahun 2016 - 2017 Kab. Murung Raya

No	Jenjang Pendidikan	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Penduduk	21.255	21.415
2	Kelompok Usia 7 - 12	13.739	13.722
3	Kelompok Usia 13 - 15	7.516	7.690
4	Rasio/10.000 penduduk	47,05	46,70

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya, 2018

f. Persentase Gedung Sekolah Kondisi Baik

1) Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik

Bangunan atau gedung sekolah SD/MI dalam kondisi baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa saat proses pembelajaran di kelas, sehingga bisa meningkatkan prestasi siswa. Pada tahun 2016,



merupakan persentase tertinggi gedung sekolah SD mengalami kondisi terbaik dengan capaian 99,42 persen gedung SD/MI dalam kondisi baik dan hanya 1 unit sekolah yang belum memenuhi kondisi baik. Meskipun angka ini menurun pada tahun 2017, namun masih dalam kisaran tinggi dalam persentasenya yang mencapai 97,74 persen, terlebih lagi jika dilihat dari unitnya maka terjadi peningkatan unit gedung sekolah dalam kondisi baik.

Tabel 2.23.
Gedung Sekolah Baik SD/MI Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	165	168	171	171	177
1.2	Jumlah Gedung Sekolah kondisi Baik	150	157	160	170	173
1.3	Persentase (%)	90,91	93,45	93,57	99,42	97,74

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya, 2018

2) Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik

Capaian pembangunan fasilitas pendidikan direpresentasikan dengan besaran ruang kelas dalam kondisi baik. Pada tahun 2017 persentase kelas SMP/MTs dalam kondisi baik sebanyak 62 gedung kondisi baik dengan capaian 91,17 persen. Secara lebih jelas tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Gedung Sekolah Baik SMP/MTs Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Murung Raya Tahun 2013 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	55	59	59	64	68
2.2	Jumlah Gedung Sekolah kondisi Baik	50	52	55	58	62
2.3	Persentase (%)	90,90	88,13	93,22	90,62	91,17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya, 2018

g. Persentase Siswa Jenjang Pendidikan Usia Dini

PAUD adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan usia dan tumbuh kembang anak agar anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Angka Partisipasi Sekolah PAUD di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2016 mencapai 54,33 dan tahun 2017 mencapai 85,20. Peningkatan yang sangat tajam,

hal ini didukung dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak sejak dini

Sehingga hampir semua desa/kelurahan mempunyai PAUD baik yang dikelola oleh desa maupun perorangan. Angka APK, APM, jumlah PAUD, murid dan guru semuanya menunjukkan perkembangan yang sangat bagus.

Tabel 2.25.
Persentase Siswa Jenjang PAUD
di Kab. Murung Raya Tahun 2013 - 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah siswa TK/RA	2.508	4.422	3.266	3.059	4.412
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun				5.630	5.178
	Persentase				54,34	85,20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya, 2018

h. Guru Berkualifikasi Sarjana/Diploma

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV lebih diharapkan dapat meningkatkan kapasitas guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas anak didiknya. Selama kurun waktu tahun 2013 - 2017, seluruh pendidik SMP/MTs memiliki kualifikasi S1/DIV, S2, S2 atau lebih di berbagai jenjang pendidikan. Sedangkan pada pendidik pada SD/MI masih cukup banyak guru yang belum memiliki kualifikasi minimal S1/DIV.

Tabel 2.26.
Guru yang berkualifikasi S1/D.IV SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
Tahun 2013 - 2017 di Kabupaten Murung Raya, 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru berijazah Kualifikasi S1/D.IV	402	458	580	694	701
1.2	Jumlah Guru Jenjang SD/MI	1303	1348	1.348	1.426	1.256
1.3	Presentase (%)	30,85	33,97	43,02	48,66	55,81
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru berijazah Kualifikasi S1/D.IV	481	512	512	522	527
2.2	Jumlah Guru Jenjang SMP/MTs	481	512	512	522	527
2.3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya, 2018



2.3.1.2 Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya hingga Tahun 2016, berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu dan polindes. Jumlah rumah sakit di kabupaten ini sebanyak 1 buah, yang terdapat di Ibu Kota Kabupaten (Puruk Cahu). Jumlah puskesmas pada Tahun 2010 sebanyak 13 buah, Jumlah Puskesmas meningkat pada Tahun 2016 menjadi 15 unit. Puskesmas sudah terdapat di semua kecamatan. Sementara itu, jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2010 sebanyak 86 unit meningkat menjadi 109 unit pada Tahun 2016. dan sudah terdapat di semua kecamatan.

Tabel 2.27.
Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

Kecamatan		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Rumah Bersalin	Posyandu	Klinik	Polindes
1.	Permata Intan	-	1	12	-	14	-	-
2.	Sungai Babuat	-	1	5	-	7	-	-
3.	Murung	1	3	14	-	23	-	1
4.	Laung Tuhup	-	3	20	-	37	-	-
5.	Barito Tuhup Raya	-	1	10	-	13	-	-
6.	Tanah Siang	-	2	22	-	27	-	-
7.	Tanah Siang Selatan	-	1	6	-	9	-	-
8.	Sumber Barito	-	1	8	-	10	-	2
9.	Seribu Riam	-	1	8	-	7	-	-
10.	U'ut Murung	-	1	4	-	6	-	-
Tahun 2016		1	15	109	-	153	-	3
2015		1	15	95	1	114	2	1
2014		1	14	95	1	138	-	1
2013		1	14	83	-	147	-	-
2012		1	14	88	-	124	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Murung Raya, 2018

Tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di Kabupaten Murung Raya hingga Tahun 2007 sebanyak 193 orang dan meningkat dua kali lipat pada Tahun 2012 menjadi 289. Secara umum memang terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan tetapi jika dilihat dari data Tahun 2011 dan Tahun 2012 terjadi penurunan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter, bidan, perawat dan sarjana kesehatan masyarakat. Penurunan jumlah tenaga kesehatan ini dimungkinkan karena perpindahan tenaga kerja kesehatan tersebut ke daerah lain. Walaupun begitu, ada peningkatan jumlah tenaga kesehatan untuk



posisi ahli gizi (5 menjadi 10), sanitasi (7 menjadi 12 orang) dan farmasi (5 menjadi 7 orang).

Tabel 2.28.
Jumlah Tenaga Kerja Kesehatan di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2017

Kecamatan	Dokter	Farmasi	Bidan	Perawat	Ahli Gizi	Teknis Media	Sanitasi	Sarjana Kesmas	Total
1. Permata Intan	3	1	7	11	1	-	1	-	24
2. Sungai Babuat	4	2	17	23	2	-	6	-	54
3. Murung	4	1	13	32	3	-	3	-	56
4. Laung Tuhup	2	1	14	45	1	-	1	-	64
5. Barito Tuhup Raya	1	1	6	17	1	-	1	-	27
6. Tanah Siang	-	-	4	4	-	-	-	-	8
7. Tanah Siang Selatan	1	-	4	12	-	-	A-	-	17
8. Sumber Barito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Seribu Riam	2	1	4	11	1	-	-	1	20
10. U'ut Murung	1	-	4	13	1	-	-	-	119

Sumber: Diolah dari Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2016 dan Data dari Dinas Kesehatan, 2018.

Status rasio kesehatan di Kabupaten Murung Raya berbeda dengan rasio kesehatan. Status rasio kesehatan cenderung berfluktuasi. Ini dikarenakan jumlah dokter yang ada di Kabupaten Murung Raya yang diprediksi tidak akan memenuhi kebutuhan berdasarkan target dari Kementerian Kesehatan. Periode tahun 2010 jumlah dokter mengalami penurunan sampai tahun 2012 kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2018. Walaupun jumlah dokter mengalami peningkatan, status rasio kesehatan cenderung mengalami penurunan hingga menjadi 0,262 pada Tahun 2019. Ini berarti peningkatan jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Murung Raya tidak memenuhi target Kementerian Kesehatan. Ini menjadikan kesehatan sebagai salah satu isu penting dalam pembangunan Kabupaten Murung Raya.

Selain tenaga kesehatan terdidik tersebut, layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Murung Raya juga didukung oleh tenaga dukun bayi, yang biasanya membantu melayani kelahiran. Di tahun 2017, jumlah dukun bayi tersebut sebanyak 304. Pelatihan terhadap

dukun bayi harus dilakukan untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi serta mengurangi kematian ibu dan anak.

Tabel 2.29.
Jumlah Dukun Bayi Menurut Kecamatan
Kabupaten Murung Raya Tahun 2017

Kecamatan		Dukun Bayi Bermitra	Dukun Bayi tidak bermitra	Jumlah
1.	Permata Intan	25	14	39
2.	Murung	42	4	46
3.	Laung Tuhup	20	24	44
4.	Tanah Siang	46	32	78
5.	Sumber Barito	22	7	29
6.	Sungai Babuat	8	1	9
7.	Barito Tuhup Raya	11	25	36
8.	T. Siang Selatan	6	-	6
9.	Seribu Riam	3	1	4
10.	U'ut Murung	9	4	13
Jumlah Tahun 2017		192	112	304
Tahun 2016		-	318	318
Tahun 2015		-	263	263
Tahun 2014		-	85	85
Tahun 2013				

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Tabel 2.30.
Jumlah Kunjungan Wanita Hamil, Nifas, Bayi, dan Anak
di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah kunjungan				
	Wanita Hamil	Nifas/ Menyusui	Bayi	Anak	
1. Permata Intan	223		245	1.009	
2. Murung	757	647	626	1.548	
3. Laung Tuhup	369	374	364	1.116	
4. Tanah Siang	273	271	259	1.311	
5. Sumber Barito	189	140	146	730	
6. Sungai Babuat	42	40	38	227	
7. Barito Tuhup Raya	81	77	73	501	
8. T. Siang Selatan					
9. Seribu Riam	69	66	63	312	
10. U'ut Murung	67	64	61	120	
Jumlah Tahun 2017		2.092	1.925	1.875	1.890
Tahun 2016		2.435	1.783	1.795	6.579
Tahun 2015		2.136	1.833	1.833	6.773
Tahun 2014		1.920	1.790	1.744	7.096

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya (2013) dan Data dari Dinas Kesehatan Tahun 2018.

Jumlah kunjungan wanita hamil, nifas, bayi, dan anak tahun 2013-2017 paling banyak adalah di Kecamatan Murung. Jumlah kunjungan anak pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.890 anak dari sebelumnya sekitar 6.579 (2016). Besarnya jumlah kunjungan tersebut tentunya terkait dengan jumlah wanita hamil, nifas, bayi, dan



anak yang terdapat di wilayah kecamatan, serta jumlah fasilitas yang tersedia seperti di Kecamatan Tanah Siang Selatan yang belum memiliki fasilitas kesehatan. Jumlah akseptor KB aktif yang terdapat selama tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 13.958. Alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah suntikan dan pil.

Tabel 2.31.
Jumlah Akseptor KB Aktif dan Pemakaian Alat Kontrasepsi di Murung Raya, Tahun 2016

	Kecamatan	Pil	IUD	Kondom	MOP	MOW	Suntik	Susuk	Jumlah
1.	Permata Intan	490	13	27	4	1	733	74	1342
2.	Murung	1.706	72	52	5	39	2.436	278	4.588
3.	Laung Tuhup	842	4	34	3	-	865	49	1.797
4.	Tanah Siang	781	19	62	-	4	1.398	198	2.462
5.	Sumber Barito	327	1	14	-	3	489	82	925
6.	Sungai Babuat	315	2	18	-	-	286	26	647
7.	Barito Tuhup Raya	217	4	21	-	1	277	65	585
8.	T. Siang Selatan	198	3	32	1	4	266	38	542
9.	Seribu Riam	233	-	11	-	-	278	47	569
10.	U'ut Murung	189	4	9	-	4	236	59	501
Total 2016		5.298	122	280	13	56	7273	916	13958
2015		6.766	67	280	9	51	5726	777	13676

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya 2018

Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Murung Raya adalah Inspeksi Akut pada Saluran Pernapasan Akut. Ini dapat terkait dengan kualitas udara menjadi semakin tidak baik akibatnya meningkatnya aktivitas pertambangan dan kebakaran hutan.

Tabel 2.32.
Banyaknya 10 Kasus Penyakit Terbanyak menurut Jenis Penyakit di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

No.	Jenis Penyakit	Banyaknya Kasus
1.	Infeksi Akut pada Saluran Pernafasan Atas	13.309
2.	Diare	3.083
3.	Penyakit pada sistim otot dan jaringan pengikat	5.500
4.	Tekanan darah tinggi	5.294
5.	Penyakit kulit alergi	3.735
6.	Gastritis	4.663
7.	Infeksi Penyakit Usus	1.836
8.	Penyakit pulpa dan jaringan periapikal	1.847
9.	Anemia	1.702
10.	Asma	1.243
Jumla		42.212

Sumber: Dinas Kesehatan Murung Raya, 2018

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat, yang berguna untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian

neo-natal dan kematian bayi yang lain. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi Kabupaten Murung Raya tahun 2017 meningkat dibanding dari tahun 2016. Peningkatan rasio Angka Kematian Bayi mengindikasikan pula penurunan Angka Kelangsungan Hidup Bayi.

Tabel 2.33.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2016 - 2017
Kab. Murung Raya

Tahun	Rasio Kematian Neonatal (0-28 Hr)	Jumlah Kelahiran Hidup	Rasio AKB	AKHB
2016	10,75	2.046	16,62	983,38
2017	6,11	2.290	27,95	972,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya 2018

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat pada Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KB mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah:

- a) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas);
- b) Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera);
- c) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lain yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
- d) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau

ditingkatkan. Rasio posyandu terhadap jumlah balita di Kabupaten Murung Raya mengalami penurunan dimana jumlah balita mengalami peningkatan yang cukup pesat sedangkan fasilitas posyandu tidak signifikan dalam penambahannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posyandu termasuk memadai dalam melayani balita yang ada. Rasio posyandu terhadap balita yang masih kurang memadai adalah di Kecamatan di 10 Kecamatan sehingga perlu adanya peningkatan jumlah posyandu di sepuluh kecamatan tersebut.

Tabel 2.34.
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita
Kab. Murung Raya Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah posyandu	158	158	162	138	153
2	Jumlah Balita	4.186	5.140	11.066	10.784	13.029
3	Rasio	3,77	3,07	1,46	1,28	1,17

Sumber: Dinas Kesehatan Murung Raya, 2018

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik kesehatan desa terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing- masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Secara jelas perkembangannya Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu pada Tahun 2013 ada 14 tersebar di semua kecamatan sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui puskesmas sudah tersedia. Juga didukung dengan adanya 84 puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya setiap tahunnya sudah di atas standar Kementerian Kesehatan RI yaitu 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui puskesmas, puskesmas pembantu. Sehingga secara umum pelayanan kesehatan yang aksesnya belum tersedia di desa.

Rasio puskesmas, rasio poliklinik dan rasio puskesmas pembantu terlihat menurun di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi belum diimbangi dengan penambahan unit fasilitas kesehatan.

Tabel 2.35.
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kab. Murung Raya
Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	14	14	14	15	15
2	Jumlah Poliklinik	-	6	6	6	6
3	Jumlah Pustu	84	95	105	109	110
4	Jumlah Penduduk	100.100	105.100	107.724	107.724	115.604
5	Rasio Puskesmas Persatuan penduduk (=1/4 x 100%)	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	-	0.06	0.06	0.05	0.05
7	Rasio Pustu persatuan penduduk (=3/4 x 100%)	0.84	0.90	0.97	0.96	0.95

Sumber: Dinas Kesehatan Murung Raya, 2018

c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Sejak tahun 2013–2017 jumlah rumah sakit daerah 1 (satu) unit. Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2017 adalah 0,0086 artinya satu rumah sakit melayani 180.000 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Murung Raya dengan penduduk sebesar 115.604 jiwa dan hanya memiliki 1 rumah sakit, meski masih dapat menampung masyarakat Kabupaten Murung Raya, namun nantinya harus menambah lagi rumah sakit dengan meningkatnya penduduk kabupaten Murung Raya.

Tabel 2.36.
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Kab. Murung Raya
Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	100.100	105.100	107.724	107.724	115.604
3	Rasio	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

Sumber: Dinas Kesehatan Murung Raya, 2018

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter



dibandingkan jumlah penduduk Selain dokter umum juga ada dokter gigi yang tersebar di kecamatan. Pada tahun 2018, terjadi penurunan jumlah dokter yang berpraktek di Murung Raya. Rasio dokter umum 1 banding 8.257 menunjukkan satu orang dokter umum melayani 8.257 penduduk. Angka rasio tersebut masih jauh dari ideal karena idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan penambahan jumlah dokter. Jumlah dokter paling banyak di Kecamatan Murung sedangkan paling sedikit di Sembilan Kecamatan.

e. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas pembantu). Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Murung Raya pada periode tahun 2013 sebesar 34,41 persen dan mengalami fluktuatif setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 mencapai 40,18 persen komplikasi yang tertangani oleh bidan.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak 2013 sampai dengan 2017 cenderung meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga hanya sebesar 70,76 persen.

f. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) ialah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0- 11 bulan), ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1(satu) dosis BCG, 3 (tiga) dosis DPT, 4 (empat) dosis Polio, 4 (empat) dosis Hepatitis B,1 (satu) dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 (dua) dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi, 1 (satu) dosis DT, 1 (satu) dosis campak, 2 (dua) dosis TT. Desa UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut



sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Cakupan desa UCI tiap tahun fluktuatif dimana pada tahun 2018 ini mencapai titik tertinggi yakni 80,00 persen.

g. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan medis dibagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada 2013-2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah serta masyarakat di lingkungan sekitar.

h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA selama kurun waktu tahun 2013 - 2017 masih fluktuatif. Masih rendahnya cakupan karena masih adanya sebagian masyarakat yang *dropout* dalam berobat. Pada tahun 2018 ini, cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA mengalami penurunan hingga mencapai 45 persen, padahal pada tahun sebelumnya mencapai 121,12 persen.

i. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD

Penyakit-penyakit yang ditularkan vektor dan menjadi masalah kesehatan di Indonesia adalah malaria, filariasis dan demam berdarah. Penularannya dari orang ke orang dengan perantara nyamuk, demam berdarah sendiri ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah sub tropik dan tropik dan mengenai sekitar 500 – 100 juta jiwa per tahun. Dengan demikian sekitar dua per lima penduduk dunia bertempat tinggal di daerah berisiko tinggi termasuk Indonesia. Hasil Riskesdas 2007 di Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa DBD lebih banyak diderita penduduk laki-laki, DBD terutama diderita penduduk <15 tahun, mereka yang berpendidikan rendah dan mereka yang hidup di perkotaan juga lebih rawan terkena DBD.

Penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditangani adalah penderita DBD yang ditangani sesuai standar satu wilayah dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/ dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini, kasus DBD cenderung



mengalami naik turun sejak tahun 2013 yaitu sebanyak 75 kasus menjadi 175 kasus di Tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 29 kasus. Seluruh kasus yang terjadi baik melalui penularan setempat maupun *import* dari wilayah luar Kabupaten Murung Raya telah mendapatkan penanganan seluruhnya (100%).

j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100 persen. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai angka 90 persen dimana tahun sebelumnya sebesar 85,71 persen.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang pekerjaan umum merupakan salah satu bidang penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pembangunan daerah, seperti sarana dan prasarana perhubungan, permukiman layak huni, dan sebagainya. Oleh karena itu, salah satu indikator penting dalam bidang pekerjaan umum adalah terkait proporsi kualitas jalan, baik dari bahan pembuatan jalan maupun kondisi jalan. Pembenahan infrastruktur jalan hingga sekarang masih selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Panjang jalan dengan status provinsi belum cukup panjang hanya sepanjang 9,8 km, sedangkan panjang jalan kabupaten mencapai 909,94 km.

Sebagian besar jenis jalan di Kabupaten Murung Raya masih memiliki jenis permukaan tanah yakni sepanjang 637,785 km atau sebesar 70,09 persen. Hal ini harus menjadi perhatian bagi *stakeholders* terkait agar memperhatikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari percepatan pemerataan pembangunan daerah. Selain itu, kerusakan yang cukup banyak terjadi dimana sebagian besar jalan mengalami rusak berat hingga 624,92 km. Sedangkan yang memiliki kondisi baik sepanjang 156,01 km.

Tabel 2.37.
Klasifikasi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tahun 2019

Status Jalan	Jenis Konstruksi Permukaan				Total
	Beton / Rigid Pavement	Aspal ATB, HRS / Pen. Macadam	Telford / Kerikil	Tanah / Belum Tembus	
JALAN PROPINSI	0	9,8	0	0	9,8
JALAN KABUPATEN	96,5732	135,5	43,6368	637,785	909,94

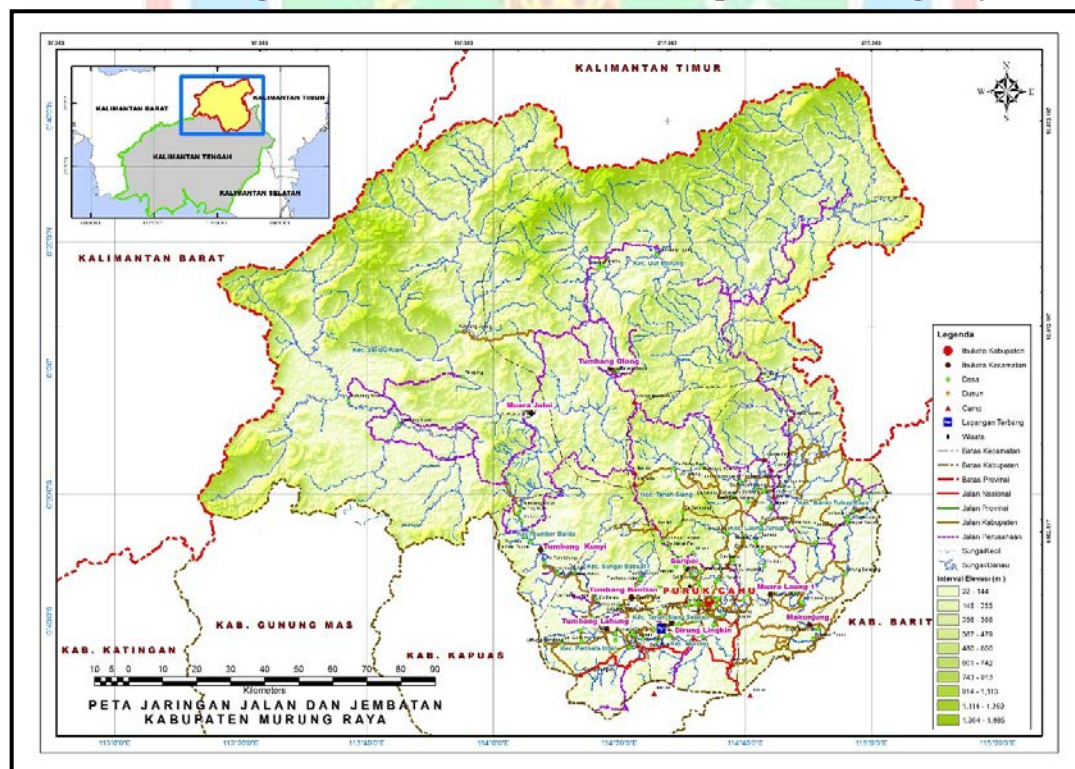
Sumber: DPUPR Murung Raya, 2018

Tabel 2.38.
Panjang Jalan Menurut Kondisi Ruas Jalan dan Kecamatan Tahun 2019

Status Jalan	Panjang Tiap Kondisi							
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	KM	(%)	KM	(%)	KM	(%)	KM	(%)
JALAN PROPINSI	9,8	100	0	0	0	0	0	0
JALAN KABUPATEN	156,01	17,79	51,79	5,63	79,23	8,62	624,92	67,96

Sumber: DPUPR Murung Raya, 2018

Gambar 2.16
Peta Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten Murung Raya



Sumber: DPUPR Murung Raya, 2018

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi diarahkan pada sekitar wilayah pengembangan di Kelurahan Beriwit (Kecamatan Murung) Kelurahan Musak Kecamatan Murung, Desa Bahitom, Desa Danau Usung dan Desa Juking Pajang atau pusat



wilayah pengembangan dengan luas rata-rata 200m²/unit persil rumah hunian.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang di wilayah pengembangan ini adalah minimal 200 m² per unit persil rumah hunian. Arah pengembangan yang diprioritaskan untuk pengembangan permukiman dengan tingkat kepadatan sedang ini, selain tetap mengisi lahan kosong yang ada pada kawasan permukiman yang ada, juga pengembangan kawasan permukiman baru yang seiring dengan realisasi rencana jalur jalan lingkaran luar mulai dari intensifikasi kawasan permukiman dan sekitarnya.

Pengembangan kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan pada pinggiran kota yang direncanakan, dengan rata-rata luas 200m² per persil unit hunian perumahan. Wilayah pengembangan di Kelurahan Puruk Cahu Seberang Kec. Murung, Kecamatan Laung Tuhup mencakup (Kelurahan Muara Laung, Kelurahan Muara Tuhup, Desa Muara Maruwei dan Kelurahan Batu Bua), Desa Saripoi Kecamatan Tanah Siang, Dirung Lingkin Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kelurahan Muara Bakanon, Kelurahan Tumbang Laung Kecamatan Permata Intan, Muara Joloi Kec. Seribu Riam dan Tumbang Kunyi Kec. Sumber Barito.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman Khas Perairan Sungai (Lanting) Kawasan permukiman lanting dalam penertibannya erat kaitannya dengan penetapan areal sempadan sungai dan danau. Untuk itu kawasan lanting yang sebagian besar berada di pusat-pusat lingkungan kelurahan yang linier dengan jalur sungai Barito masih tetap di berlakukan ketentuan lebar sempadannya 10-50 meter dari air pasang tertinggi ke daratan, atau dari tepian sungai dengan kedalam minimal 3 meter ke arah daratan yang mencapai tingkat kedalaman kurang dari 3 meter minimal.

Kawasan peruntukan permukiman, seluas kurang lebih 5.199,59 hektar meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan, seluas 867,44 hektar, kawasan peruntukan permukiman perdesaan, seluas 4.332.15 hektar, kawasan transmigrasi, seluas 3.312,15 hektar.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja tersebut menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.39.
Data Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya Tahun 2013–2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Data Anggota Satpol PP					
	a. PNS	27	19	18	18	22
	b. Non PNS					
	- Kabupaten	68	59	82	92	91
	- Kecamatan	20	20	20	21	25
	- Humas					
	Jumlah	110	106	127	139	146

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Murung Raya, 2018

Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian baik dari segi material maupun secara psikologis. Salah satu fokus dari penanganan bencana yang menjadi perhatian pemerintah daerah maupun nasional adalah terkait bencana kebakaran hutan dan lahan dimana bencana tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam penurunan kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2018, jumlah seluruh titik *Hot spot* di Kabupaten Murung Raya dari Bulan Maret sampai dengan Bulan Oktober 2018 adalah 373 titik *Hot spot* yang tersebar diseluruh Kecamatan dimana titik *Hot spot* paling banyak terjadi dibulan September sebanyak 272 (72 %) *Hot spot* dari total *Hot spot* dan Oktober 75 titik *Hot spot*.



Tabel 2.40.
Sebaran Titik Hot Spot Kebakaran Hutan Dan Lahan
Kabupaten Murung Raya 2013–2017

No	Bulan	Kecamatan	Jumlah Titik Hot Spot
1	Maret	Laung Tuhup	2
2	April	Laung Tuhup	3
3	Mei	Murung	1
4	Juni	Barito Tuhup Raya	1
		Permata Intan	1
		Murung	1
		Laung Tuhup	1
5	Juli	Permata Intan	1
		U'ut Murung	1
6	Agustus	Permata Intan	1
		Sumber Barito	3
		U'ut Murung	2
		Tanah Siang	2
		Laung Tuhup	3
		Seribu Riam	3
7	September	Laung Tuhup	70
		Murung	17
		Barito Tuhup Raya	28
		Permata Intan	35
		Seribu Riam	11
		Sumber Barito	16
		Sungai Babuat	13
		Tanah Siang	56
		Tanah Siang Selatan	11
		U'ut Murung	15
8	Oktober	Laung Tuhup	6
		Murung	3
		Barito Tuhup Raya	31
		Permata Intan	16
		Seribu Riam	1
		Sumber Barito	1
		Tanah Siang	8
		Tanah Siang Selatan	2
		U'ut Murung	7
Jumlah Total			373

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, 2018

2.3.1.6 Sosial

Salah satu indikator berhasilnya pemerintah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan



di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Murung Raya dari tahun ke tahun masih tinggi, bahkan dalam tahun 2005-2017 cenderung semakin meningkat. Hal ini terindikasi dari semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin di kabupaten ini. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2005 adalah sebanyak 9800 jiwa berkurang pada tahun 2017 menjadi 6.750 jiwa. Ini menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui perbaikan ekonomi dan pemekaran beberapa kecamatan.

Tabel 2.41.
Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Murung Raya
Tahun 2005-2017

Tahun	Jumlah penduduk miskin (000 Jiwa)	Persentase penduduk miskin	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2005	9 800	10,24	136 661
2006	8 936	11,24	153 539
2007	8 683	8,91	164 753
2008	8 030	7,95	210 392
2009	7 190	6,94	210 392
2010	6 900	6,55	272 809
2011	6.236	6,30	291.433
2012	5.870	5,78	311.328
2013	6.770	6,44	353.373
2014	6.760	6,24	364.994
2015	7.200	6,57	378.062
2016	7.100	6,32	402.682
2017	6.750	5,88	421.903

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Tabel 2.42.
Jumlah Penduduk Pemeluk Agama di Kabupaten Murung Raya, 2015

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Kaharingan	Jumlah
Permata Intan	10.484	1.220	91	428	-	1	308	11.764
Sungai Babuat	80	710	121	1.152	-	-	1.444	2.402
Murung	30.452	3.581	722	138	2	-	208	34987
Laung Tuhup	16.711	910	338	2.239	2	-	3039	20086
Barito Tuhup Raya	2.027	535	380	1.875	-	-	1.820	4.571
Tanah Siang	1.211	4.742	2.885	3.681	-	-	4.653	14074
Tanah Siang Selatan	1.808	865	686	968	-	-	1.433	5.438
Sumber Barito	4.190	1.999	74	1.204	-	-	1.182	8.059
Seribu Riam	1.582	1.249	62	738	-	-	863	3.703
U'ut Murung	728	482	91	821	-	-	1.215	2.640
Jumlah 2015	69.273	16.293	5.450	13.244	4	1	16165	120.430

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2017

Mayoritas penduduk dilihat dari agama yang dipeluk oleh masyarakat di Kabupaten Murung Raya adalah Islam. Selama tahun 2015, jumlah pemeluk agama Islam berkisar 69.273 jiwa. Pemeluk agama Kristen Protestan di kabupaten ini masih cukup banyak 16.293 jiwa (terbanyak ke-2 setelah agama Islam), kecuali agama Budha dan Khonghucu, agama lainnya di Kabupaten Murung Raya tersebar di semua kecamatan yang ada.

2.3.2 Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan karena dapat menunjukkan kualitas SDM sekaligus *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2017, penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 53.949 jiwa yang terdiri dari 52.449 jiwa yang bekerja dan 1.500 jiwa pengangguran. Sedangkan, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang termasuk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebanyak 24.435 jiwa. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Murung Raya sebesar 68,83 dan Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 2,78 persen.

Tabel 2.43.
Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama, 2012-2017

Jenis Kegiatan Utama		2012	2013	2014	2015	2017
I.	Angkatan Kerja Terhadap Usia Kerja	66,14	69,69	65,09	71,73	68,83
	1. Bekerja	65,13	67,23	64,36	67,19	66,91
	2. Penganggur	1,01	2,46	0,73	4,54	1,92
II.	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan Lainnya)	33,86	30,31	34,91	28,27	31,17
Jumlah		100	100	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		66,14	69,69	65,09	71,73	68,83
Tingkat Pengangguran		1,52	3,54	1,13	6,33	2,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018 (tahun 2016 tidak ada penghitungan)



Lapangan usaha di bidang pertanian (Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan), masih merupakan sumber utama penghidupan masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Pada Tahun 2017, penduduk yang bekerja di bidang pertanian mencapai 39,70 persen. Kemudian tenaga kerja tertinggi kedua diserap oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mencapai 10.634 tenaga kerja atau sebanyak 20,27 persen.

Tabel 2.44.
Persentase Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Murung Raya, Tahun 2017

Lapangan Usaha		% Tenaga Kerja
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan/	39,70
2.	Pertambangan & penggalian	20,27
3.	Industri pengolahan	1,69
4.	Listrik, gas, air minum	0,00
5.	Konstruksi/Construction	3,73
6.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi/	15,66
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi/	1,55
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan/	0,37
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/	17,04
Jumlah		100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun yang dibahas dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu 1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah. 2) Rasio Kekerasan



Dalam Rumah Tangga (KDRT). 3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual meliputi: 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jumlah kekerasan terhadap pasangan yang terjadi di Kabupaten Murung Raya yang terdeteksi sebanyak 1 kasus. Hal ini mungkin masih rendahnya keberanian dalam pelaporan korban KDRT.



2.3.2.3 Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya terus mendorong pemerintahan desa untuk meningkatkan program kemandirian pangan melalui berbagai kegiatan di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.

Komoditas perkebunan utama di Murung Raya antara lain Karet, Kelapa, dan Kopi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pertanian dan Perikanan Murung Raya, luas tanaman perkebunan di Kabupaten Murung Raya tahun 2017 untuk perkebunan karet sebesar 51.1126,39 ha, perkebunan kelapa sebesar 404,62 ha, kelapa sawit sebesar 68,10 ha, kopi sebesar 257,56 ha, lada sebesar 7,45 ha, dan pinang sebesar 29,79 ha. Jumlah Kepala keluarga tani tanaman perkebunan karet sebanyak 17.557 orang, perkebunan kelapa sebesar 2.558 orang, kelapa sawit sebesar 25 orang, perkebunan kopi sebesar 195 orang perkebunan lada sebesar 27 orang, dan perkebunan pinang 155 orang. Luas panen padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Murung Raya tahun 2015 masing-masing sebesar 262 ha dan 11.383 ha dengan jumlah kelompok tani di Murung Raya tahun 2017 sebanyak 462 dengan jumlah anggota sebanyak 9.214 orang. Adapun produksi hasil ikan di Murung Raya tahun 2017 sebanyak 1.254,29 ton untuk jenis budidaya kolam dan 940,28 ton untuk jenis budidaya keramba.

2.3.2.4 Lingkungan Hidup

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Murung Raya dilengkapi fasilitas RTH yang dibutuhkan terdiri dari tempat bermain, taman, lapangan olah raga. Pengaturan RTH di wilayah Kabupaten Murung Raya berpedoman pada jumlah penduduk. Pada setiap unit lingkungan kecil akan dibangun taman dan tempat bermain, sedangkan setiap 2-3 unit lingkungan besar akan dibangun sebuah lapangan olah



raga dan tempat rekreasi. Dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut, maka pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Murung Raya adalah taman dan lapangan olah raga melalui penataan lansekap yang lebih baik, sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi. Dan areal lokasinya menyebar ke setiap unit lingkungan kelurahan dan kecamatan di wilayah Kabupaten Murung Raya.

Dalam meningkatkan kenyamanan dan keasrian dalam menghuni suatu wilayah, pengelolaan sampah menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Murung Raya dimana salah satu poin penting dalam mewujudkan keasrian lingkungan hidup adalah meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Dari data yang ada, produksi sampah di Murung Raya mencapai 12.300 ton sampah dengan produksi sampah yang tertangani sebanyak 71 persen di tahun 2018. Jika menilik data 2017 dimana cakupan pelayanan persampahan menjadi indikator kinerja utama OPD, maka persentase cakupan pelayanan mencapai 48 persen yang meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 44 persen.

Pada konteks lingkungan hidup, dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan manusia pada umumnya seringkali bersifat negatif dan akan terbentuk risiko-risiko yang dapat membahayakan tidak hanya lingkungan itu saja, namun juga manusia. Oleh sebab itu, penting adanya kajian tentang risiko guna mencegah atau memperkecil dampak. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya ditinjau dari aspek banjir, kebakaran lahan dan lahan kritis. Berdasarkan data KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023, untuk potensi banjir wilayah Kabupaten Murung Raya memiliki potensi rendah yakni sebesar 99,24% dan kategori tinggi hanya sebesar 0,76%. Wilayah Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Murung dan Kecamatan Permata Intan merupakan daerah dengan potensi banjir tinggi, karena wilayah ini merupakan daerah sungai dan memiliki topografi yang lebih rendah.



Tabel 2.45.
Potensi Banjir Setiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya

Kecamatan	Potensi Banjir				Total
	Tinggi		Rendah		
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
Kec. Barito Tuhup Raya			142729,46	100,00	142729,46
Kec. Laung Tuhup	4396,99	2,57	166806,72	97,43	171203,72
Kec. Murung	11230,69	17,39	53334,17	82,61	64564,86
Kec. Permata Intan	2620,68	3,15	80529,22	96,85	83149,90
Kec. Seribu Riam			813142,74	100,00	813142,74
Kec. Sumber Barito			89860,46	100,00	89860,46
Kec. Sungai Babuat			43795,35	100,00	43795,35
Kec. Tanah Siang			151089,04	100,00	151089,04
Kec. Tanah Siang Selatan			11736,47	100,00	11736,47
Kec. Uut Murung			814804,68	100,00	814804,68
Total	18248,36		2367828,31		2386076,67

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Potensi lahan kritis di Kabupaten Murung Raya dominan merupakan daerah potensial kritis dan agak kritis yakni masing-masing sebesar 59,03% dan 21,03%, sedangkan kategori kritis sebesar 8,63%. Wilayah Kecamatan dengan kategori potensi sangat kritis terdapat di Kecamatan Seribu Riam (11952,67) dan potensi kritis ada di Kecamatan Tanah Siang (41609,41), Laung Tuhup (35574,82) dan Kecamatan Permata Intan (28574,24), sedangkan potensil kritis ada di Kecamatan Uut Murung (545395,14).

Tabel 2.46.
Potensi Lahan Kritis Setiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya

Kecamatan	Lahan Kritis					Total
	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	
Kec. Barito Tuhup Raya	547,22	8520,54	84182,81	48944,26	533,62	142728,46
Kec. Laung Tuhup	3002,38	35574,82	60081,12	71077,75	1466,45	171202,52
Kec. Murung	932,58	20756,23	22456,94	18883,53	1535,12	64564,41
Kec. Permata Intan	2001,60	28574,24	8023,26	43892,34	657,87	83149,32
Kec. Seribu Riam	11952,67	18127,69	109014,58	529323,15	144718,98	813137,06
Kec. Sumber Barito	190,36	18189,16	17306,94	53049,41	1123,97	89859,83
Kec. Sungai Babuat	60,19	9448,47	7974,77	25828,34	483,27	43795,04
Kec. Tanah Siang	1805,82	41609,41	33186,24	70918,11	3568,39	151087,98
Kec. Tanah Siang Selatan	664,64	5678,81	4248,97	1142,09	1,88	11736,39
Kec. Uut Murung	4568,12	19549,86	155327,23	545395,14	89958,64	814798,99
Total	25725,60	206029,23	501802,86	1408454,13	244048,20	2386060,01
Persentase	1,08	8,63	21,03	59,03	10,23	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023



2.3.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia dan lain sebagainya membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Untuk itu, administrasi kependudukan sangatlah penting dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMD/K mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/K dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Adapun jumlah LPMD di Kabupaten Murung Raya 266 dan LPMK 23 buah.

Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan perangkat daerah terkait maupun program lainnya. Tugas LPMD/K adalah:

- a) Menyusun rencana pembangunan desa/kelurahan secara partisipatif;
- b) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, dan;
- c) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.



Dalam melaksanakan tugasnya LPMD/K mempunyai fungsi:

- a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- c) Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif .
- d) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- e) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah/pusat. Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui desa/kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten, terutama bagi 22 desa/kelurahan yang menjadi lokasi desa/kelurahan binaan dan 2 desa pemberdayaan masyarakat berperspektif gender sedangkan pembinaan bagi desa/kelurahan lainnya dilaksanakan secara berjenjang.

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dimana dicanangkan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Murung Raya terbanyak pada tahun 2015 dengan jumlah 22.541 pasangan.

Tabel 2.47.
Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Murung Raya
Tahun 2013 - 2017

NO	Tahun	Jumlah Penduduk Peserta KB				
		PUS	Peserta KB	Persentase Peserta KB	Tidak KB	Persentase Tidak KB
1	2013	-	13.485	-	-	-
2	2014	-	13.676	-	-	-
3	2015	22.541	14.005	62,13%	8.536	37,86 %
4	2016	14.440	17.063	87,77%	2.377	12,23 %
5	2017	20.324	17.752	87,32%	2.577	12,68 %

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kab. Murung Raya 2018

Perincian yang mengikuti Keluarga Berencana sebanyak pasangan (62,13 %) dan yang tidak mengikuti Keluarga Berencana sebanyak 25.303 pasangan (37,86 %). Sedangkan Pasangan Usia Subur (PUS) terkecil pada tahun 2016 dengan jumlah 14.440 pasangan. Dengan perincian yang mengikuti Keluarga Berencana sebanyak 17.063 pasangan (87,77 %) dan tidak mengikuti Keluarga Berencana sebanyak 2.377 pasangan (12,23 %).

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.48.
Rasio Akseptor KB Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Akseptor KB Laki-Laki	544	293	340	412	371
2	Akseptor KB Perempuan	12.941	13.383	13.665	16.651	17.381
3	Jumlah Akseptor KB	13.485	13.676	14.005	17.063	17.752
4	Jumlah Pasangan Usia Subur	-	-	22.541	14.440	20.329
5	Rasio Akseptor KB	-	-	8.536 / 37,86 %	2.377 / 12,2 %	2.577 / 12,6 %

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kab. Murung Raya 2018

Dengan pendekatan Pentahapan Keluarga Sejahtera maka keluarga diklasifikasikan menjadi Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. Definisi dari klasifikasi keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:



- a. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal (agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan)
- b. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi)
- c. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan social psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan (menabung dan memperoleh informasi)
- d. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan social psikologis dan kebutuhan pengembangan tetapi belum dapat memberi sumbangan/kontribusi terhadap masyarakat secara teratur dalam bentuk material dan keuangan, dan berperan aktif dalam lembaga di kemasyarakatan.

2.3.2.8 Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat. Terobosan dalam teknologi komunikasi dan informasi ikut mengubah daerah. Kini setiap warga memiliki kemampuan untuk menyuarakan opininya dan mengakses beragam informasi kapanpun dan dimanapun. Fasilitas informasi dan telekomunikasi di Kabupaten Murung Raya hingga sekarang sudah semakin berkembang. Fasilitas telekomunikasi yang tersedia di kabupaten ini berupa telepon umum, telepon kabel, wartel, telkom flexi, jaringan Telkomsel, XL dan Indosat. Sedangkan fasilitas informasi yang tersedia berupa radio Pemda Swara Murung Raya, stasiun relay TV Pemda Murung Raya, TV Kabel Silva Vision, *website* (www.kabmurungraya.go.id), pusat informasi dan pengaduan SMS (0528330001), dan kantor pos/pos pembantu/rumah pos. Sampai Desember Tahun 2012 tercatat terdapat 1197 pelanggan telepon di Kabupaten Murung Raya.

Media Cetak adalah sebuah media yang menggunakan bahan dasar kertas atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya. Unsur-unsur utama adalah tulisan (teks), gambar visualisasi atau keduanya.

Tabel 2.49.
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Beredar di Murung Raya

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SK Terbitan Nasional (Kompas, Media Indonesia, Tempo, Bisnis Indonesia, Republika, Jawa Post)	5	7	8	8	8
2	SK Terbitan Lokal (Kalteng Post, Banjarmasin Post, Radar Sampit, BorneoNews)	2	4	4	4	4
Jumlah		7	11	12	12	12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa media cetak nasional sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 berjumlah 8 (delapan) media cetak yang beredar secara nasional yang beredar di Murung Raya diantaranya adalah Kompas, Media Indonesia, Tempo, Bisnis Indonesia, Republika, Jawa Post. Sedangkan media cetak lokal pada tahun 2017 berjumlah 4 (empat) yang beredar di Murung Raya antara lain: Kalteng Post, Banjarmasin Post, Radar Sampit, Borneo News.

a. Jumlah penyiaran radio

Penyiaran radio di Kabupaten Murung Raya mencakup radio lokal dan nasional. Jumlah radio nasional dengan frekuensi pancar secara nasional baik langsung maupun tidak langsung dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebanyak 1 (satu) radio. Radio nasional yang mampu ditangkap di Murung Raya antara lain RRI.

Tabel 2.50.
Jumlah Stasiun Radio Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Radio Lokal (RRI Kalteng, Smura FM)	2	2	2	2	2
2	Radio Nasional (RRI Nasional)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, 2018

Adapun Radio lokal yakni yang hanya memiliki frekuensi pancar tingkat lokal saja dan Kalimantan Tengah dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebanyak 2 (dua) radio, yakni RRI Kalteng dan Smura FM.

b. Jumlah penyiaran TV

Kabupaten Murung Raya selain dari radio, informasi juga dapat diakses dari penyiaran TV, baik TV lokal maupun nasional.

Tabel 2.51.
Jumlah TV Nasional dan TV Lokal
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	TV Lokal (TVRI Kalteng, Silva Chanel)	2	2	2	2	2
2	TV Nasional (TVRI, MetroTV, RCTI, Trans7, Indosiar, Inews, Kompas TV)	6	6	6	7	7

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, 2018

Dari tabel tersebut di atas, jumlah TV nasional dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebanyak 7 (tujuh) yang memiliki frekuensi pancar nasional. Televisi nasional yang mampu ditangkap di Murung Raya adalah TVRI, MetroTV, RCTI, Trans7, Indosiar, Inews, KompasTV. Adapun Televisi lokal dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebanyak 2 (dua) yang hanya bersifat lokal saja. TV lokal yang mampu ditangkap di Murung Raya adalah TVRI Kalteng dan Silva Chanel.

c. *Website* milik pemerintah daerah

Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai *website* resmi yaitu www.kabmurungraya.go.id. *Website* tersebut terhubung langsung dengan beberapa Perangkat Daerah (PD) yang juga sudah mempunyai *website* dan berada di bawah domain www.kabmurungraya.go.id.

2.3.2.9 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan lapangan kerja. Kegiatan koperasi dan UMKM mencakup hampir seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, bahkan desa terpencil, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan koperasi dan UMKM yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi pilihan yang strategis dalam kerangka pembangunan daerah, distribusi pendapatan dan tenaga kerja serta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Koperasi sebagai soko guru ekonomi terus ditingkatkan perannya dalam

mendorong mobilitas ekonomi di Kabupaten Murung Raya. Periode 2016 hingga 2017 jumlah koperasi di Kabupaten Murung Raya menurun. Pada tahun 2017 jumlah koperasi tercatat sebanyak 96 unit dan menurun dibandingkan pada Tahun 2016 sebanyak 107 unit.

Dari total 107 koperasi pada tahun 2016 tersebut, sebanyak 23 koperasi aktif dan 84 unit merupakan koperasi tidak aktif. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 22 koperasi aktif dan 74 unit merupakan koperasi tidak aktif. Meskipun jumlah koperasi tidak aktif berada dibawah dari rata-rata nasional, namun kenyataan ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan dan pembenahan koperasi di daerah.

Tabel 2.52.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	2016		2017	
		Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
1	Barito Tuhup Raya	4	-	2	5
2	Laung Tuhup	6	12	7	11
3	Murung	5	13	4	14
4	Permata Intan	2	12	1	13
5	Seribu Riam	-	23	-	6
6	Sungai Babuat	-	-	1	-
7	Sumber Barito	4	9	4	9
8	Tanah Siang	1	10	1	10
9	Tanah Siang Selatan	-	1	1	1
10	U'ut Murung	1	4	1	5

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Murung Raya, 2018

Peran koperasi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah juga terlihat dari sisi jumlah anggota, perkembangan modal, asset, koperasi. Disamping itu, selang tahun 2013 – 2017, sedangkan untuk perkembangan UMKM di Kabupaten Murung Raya periode 2013-2017 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 2.138 unit dan Tahun 2017 menjadi 2.620 unit, atau meningkat selama 2 tahun.

2.3.2.10 Penanaman Modal

Jumlah investasi PMDN/PMA dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah. Jumlah persetujuan investasi dihitung dengan menjumlahkan nilai proyek investasi PMDN berskala nasional dan nilai proyek investasi PMA



berskala nasional yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sedangkan jumlah investasi riil adalah banyaknya investasi PMDN berskala nasional dan banyaknya investasi PMA berskala nasional yang telah terealisasi pada suatu periode tahun tertentu. Pada tahun 2017 nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp. 3.521.590.280.000,- sedangkan nilai investasi PMDN dengan nilai sebesar Rp. 364.896.100.000,-.

Tabel 2.53.
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2017

Triwulan	PMA	PMDN
I	Rp. 1.989.251.740.000,-	Rp. 0,-
II	Rp. 5.484.920.000,-	Rp. 400.000.000,-
III	Rp. 101.639.000.000,-	Rp. 250.340.300.000,-
IV	Rp. 1.425.214.620.000,-	Rp. 114.155.800.000,-
Jumlah	Rp. 3.521.590.280.000,-	Rp. 364.896.100.000,-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Murung Raya (LKPM Online), 2017

2.3.2.11 Statistik

Di Kabupaten Murung Raya terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya mempublikasikan buku Kabupaten Murung Raya Dalam Angka dan PDRB Murung Raya sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

2.3.2.12 Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat dengan 3 (tiga) indikator yaitu: jumlah perpustakaan desa/kelurahan, jumlah perpustakaan SD, SMP/MI, SMA/MA, SMK. Serta Perpustakaan keliling Data jumlah perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.54.
Jumlah Gedung Perpustakaan Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Jenis Perpustakaan	Jumlah	Keterangan
1	Barito Tuhup Raya	a. Perpustakaan Desa	-	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	2	
2	Laung Tuhup	a. Perpustakaan Desa	-	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	14	
3	Murung	a. Perpustakaan Desa	-	



No	Kecamatan	Jenis Perpustakaan	Jumlah	Keterangan
		b. Pusling	2	Perpustakaan keliling ke desa/kelurahan
		c. Perpustakaan Sekolah	20	
4	Permata Intan	a. Perpustakaan Desa	-	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	8	
5	Seribu Rielatanam	a. Perpustakaan Desa	-	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	3	
6	Sungai Babuat	a. Perpustakaan Desa	-	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	2	
7	Sumber Barito	a. Perpustakaan Desa	-	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	6	
8	Tanah Siang	a. Perpustakaan Desa	-	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	10	
9	Tanah Siang Selatan	a. Perpustakaan Desa	1	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	3	
10	U'ut Murung	a. Perpustakaan Desa	-	
		b. Pusling	-	
		c. Perpustakaan Sekolah	4	

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Murung Raya, 2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa telah ada perpustakaan di tingkat Kabupaten yang representatif didukung dengan kondisinya sedangkan seluruh desa/kelurahan belum mempunyai perpustakaan. Kondisi yang berbeda terjadi di tingkat sekolah dimana banyak sekolah yang telah memiliki perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2017 sebanyak 1.329 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 1.902 pengunjung.

Tabel 2.55.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2013 – 2017
Kabupaten Murung Raya

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pengunjung Daerah Kabupaten Murung Raya	0	0	1.799	1.902	1.329

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Murung Raya, 2018

2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Murung Raya.

2.3.3.1 Pariwisata

Wisata alam yang terdapat di Kabupaten Murung Raya hingga tahun 2007 adalah wisata alam bahari. Potensi wisata alam bahari di kabupaten ini relatif besar, namun hingga sekarang belum dapat dikelola secara optimal. Potensi wisata alam bahari tersebut berupa riam, gunung, goa, air terjun, sumber air panas, hutan alam dengan keanekaragaman hayatinya. Pengembangan sektor wisata di Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan. Ini terkait dengan status 12 tempat wisata yang teridentifikasi di Kabupaten Murung Raya belum dikelola dan belum dikomersialkan. Jika sektor pariwisata dikelola dengan baik maka akan memberikan tambahan pendapatan daerah untuk Kabupaten Murung Raya dari sektor pariwisata.

Potensi wisata yang juga cukup potensial di Kabupaten Murung Raya adalah wisata budaya. Potensi wisata budaya di kabupaten ini terutama adalah rumah betang dan tari-tarian. Dalam rangka mengembangkan wisata budaya tersebut, beberapa rumah betang sudah dilakukan renovasi, termasuk perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi. Sedangkan untuk tari-tarian, telah sering dipromosikan baik di tingkat provinsi, nasional, hingga manca negara.

Tabel 2.56.

Objek Wisata di Kabupaten Murung Raya

No.	Jenis Objek Wisata	Lokasi (Kecamatan)	Keterangan
1.	Wisata Gunung Bondang/Muara	Kec. Laung Tuhup	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
2.	Pegunungan Muller Scwhaznerr	Kec. Seribu Riam	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
3.	Pasir Putih / Bukit Tengkorak	Kec. U'ut Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
4.	Gunung Kolompai/Desa Saripoi	Kec. Tanah Siang	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
5.	Gunung Danau Usung	Kec. Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
6.	Gunung Tunjuk	Kec. Barito Tuhup Raya	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
7.	Air Terjun Bumbun	Kec. U'ut Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil



No.	Jenis Objek Wisata	Lokasi (Kecamatan)	Keterangan
8.	Air Terjun Dirung Duhung/Desa Saripoi	Kec. Tanah Siang	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
9.	Air Terjun Ongkong Bangkan Taruh/ Desa Makunjung	Kec. Barito Tuhup Raya	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
10.	Air Terjun Apui Nyalu/ Desa Datah Kotou	Kec. T. Siang Selatan	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
11.	Wisata Arung Jeram/Dirung Duhung	Kec. Tanah Siang	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
12.	Wisata Air Soko / Mantibab	Kec. Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
13.	Wisata Air Liang Pandan	Kec. U'ut Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
14.	Monumen Equator	Kec. U'ut Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
15.	Pemandangan Di Atas Jembatan Pajai	Kec. Tanah Siang	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
16.	Batang Konut/Desa Konut	Kec. Sungai Babuat	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
17.	Batang Tumbang Apat Dan Batang Bantian	Kec. Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
18.	Makam Sultan Muhammad Seman	Kec. Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
19.	Benteng Peninggalan Kolonial Belanda	Kec. Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
20.	Tugu Perdamaian/Desa Mangkahui	Kec. Tanah Siang	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
21.	Keraton Maya/Desa Saripoi	Kec. Tanah Siang	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
22.	Ornamen Antik Lada/ Desa Saripoi	Kec. Tanah Siang	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
23.	Makam Tamanggung Silam	Kec. Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
24.	Air Terjun Tosah	Kec. Murung	Tidak Dikelola/Tidak Komersil
25.	Objek Wisata Taman Kota	Kec. Murung	Dikelola/ Komersil
26.	Sumber Air Asin Sopan Kolu'ung	Kec. Tanah Siang	Belum Dikelola
27.	Gunung Bahiyo	Kec. U'ut Murung	Belum Dikelola

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

2.3.3.2 Pertanian

Kegiatan pertanian sampai saat ini masih memberikan peran yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Murung Raya sampai saat ini masih didominasi oleh sektor Pertanian, yang terdiri dari Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan. Berikut disajikan data hasil produksi dari kegiatan pertanian Murung Raya selama Tahun 2016.

Tabel 2.57.
Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi per Kecamatan
di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

Kecamatan	Padi Sawah	Padi Ladang
	Luas Panen (Ha)	Luas Panen (Ha)
Permata Intan	85	1.267
Sungai Babuat	-	455
Murung	12	2.545
Laung Tuhup	-	1.851
B. Tuhup Raya	-	1.206
Tanah Siang	-	1.318
T. Siang Selatan	11	1.035
Sumber Barito	-	405
Seribu Riam	-	363
Uut Murung	-	540
Jumlah	108	10.985

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan dan BPS Kabupaten Murung Raya, 2018 (Data 2017 belum tersedia karena sedang dalam pergantian metodologi)

Selain data padi sawah dan padi ladang, juga terdapat data mengenai jagung, ubi kayu, dan ubi jalar dan kacang-kacangan yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.58.
Luas Panen Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Kecamatan
Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

Kecamatan	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
Permata Intan	9	12	-
Sungai Babuat	6	7	2
Murung	7	4	4
Laung Tuhup	7	7	-
Barito Tuhup Raya	8	7	-
Tanah Siang	11	5	7
Tanah Siang Selatan	4	7	4
Sumber Barito	10	5	6
Seribu Riam	8	-	-
U'ut Murung	4	2	1
Jumlah	74	56	24

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan dan BPS Kabupaten Murung Raya, 2018 (Data 2017 belum tersedia karena sedang dalam pergantian metodologi)

Tabel 2.59.
Luas Panen Kacang Tanah, Kacang Kedelai dan Kacang Hijau
menurut Kecamatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

Kecamatan	Kacang Tanah	Kacang Kedelai	Kacang Hijau
	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
Permata Intan	-	7	6
Sungai Babuat	-	-	-
Murung	2	-	-
Laung Tuhup	-	-	-
Barito Tuhup Raya	-	-	-
Tanah Siang	3	-	-
Tanah Siang Selatan	1	-	-
Sumber Barito	-	-	-
Seribu Riam	-	-	-
U'ut Murung	-	-	-
Jumlah	6	7	6

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan dan BPS Kabupaten Murung Raya, 2018 (Data 2017 belum tersedia karena sedang dalam pergantian metodologi)

Potensi pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Murung Raya sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Lahan yang sesuai untuk tanaman pangan terletak di sebagian kecil Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Murung, dan Kecamatan Laung Tuhup. Komoditi potensial di Laung Tuhup antara lain padi ladang, kacang tanah, tanaman kopi, lada dan kelapa. Sedang di Kecamatan Murung memiliki komoditi potensial antara lain padi Ladang, jagung, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, tanaman karet, tanaman kopi dan jambu mete.

Areal kawasan hutan relatif makin terbatas sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya. Oleh karena itu pelepasan kawasan hutan yang bersifat mengubah fungsi hutan perlu dibatasi. Pengembangan perkebunan dengan menggunakan tanaman tahunan yang berupa pohon, merupakan teknologi yang kompatibel dengan persyaratan ekologis, dapat memberikan fungsi hutan yang berbeda dengan hutan produksi. Redesign perkebunan pada dasarnya berupa membangun suasana harmonis antara unsur-unsur ekologi, ekonomi dan sosial budaya, sehingga nantinya bisa menjadi kawasan industri masyarakat perkebunan (Kimbun).

Sebagian penduduk di Kabupaten Murung Raya hidup dari hasil perkebunan. Dengan mengandalkan teknologi tradisional ternyata

penduduk tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya. sehingga, pemerintah akan memberikan kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya.

Pemerintah daerah akan bekerjasama dengan KPHP Murung Raya dan atau swasta dengan petani sebagai plasma untuk Tanaman Perkebunan dalam kawasan Hutan Produksi sehingga produktivitas karet meningkat pesat. Kendala yang dihadapi oleh petani adalah terutama berkaitan dengan sumberdaya petani yang relatif rendah, masalah sosial ekonomi. Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) belum menyentuh pada hal-hal yang mendasar berupa teknologi tepat guna, permodalan dan pemasaran. Hal ini menyebabkan petani mengalami hambatan dalam hal meningkatkan mutu produksi perkebunan dan pemasaran.

Tabel 2.60.
Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2016

Kecamatan	Karet	Kopi	Lada	Kelapa
Permata Intan	7.490,63	24,70	-	59,39
Sungai Babuat	2.387,24	10,56	-	20,30
Murung	6.217,08	65,58	-	58,00
Laung Tuhup	13.684,31	26,00	3,42	70,28
Barito Tuhup Raya	3.040,27	9,80	-	29,52
Tanah Siang	9.127,91	67,70	4,03	39,94
Tanah Siang Selatan	2.254,99	20,42	-	25,00
Sumber Barito	4.858,81	16,25	-	57,27
Seribu Riam	1.191,31	8,67	-	21,97
U'ut Murung	873,84	7,88	-	22,95
Jumlah	51.126,39	257,56	7,45	404,62

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018 (Data 2017 belum tersedia karena sedang dalam pergantian metodologi)

Pemanfaatan potensi hutan yang melimpah di Kabupaten Murung Raya cukup menjanjikan bagi perekonomian di daerah ini. Tanaman perkebunan dengan nilai ekonomi tinggi seperti karet, kelapa, kopi, lada dan jambu mete telah dikembangkan tersebar diseluruh kecamatan dan dapat mendorong meningkatnya ekonomi masyarakat. Sampai saat ini tanaman karet masih menjadi produk unggulan di sektor perkebunan.

Hampir semua kecamatan di Kabupaten Murung Raya memiliki potensi untuk pengembangan karet dan kelapa, akan tetapi bagian tengah sampai ke Utara Kabupaten Murung Raya lebih potensial karena didukung oleh kondisi wilayah yang relatif lebih tinggi. Komoditi perkebunan seperti kopi, lada, dan sawit relatif masih dalam skala kecil



diusahakan oleh masyarakat. Komoditi ini terbatas pada lahan sekitar pemukiman atau lahan pekarangan dan lahan usaha untuk daerah transmigrasi.

Sejalan dengan pengakuan petani setempat hanya dengan membudidayakan karet dan kelapa di lahan usaha mereka, pendapatan dalam jangka panjang akan stabil, sedangkan jika pun ada tanaman pangan yang diusahakan oleh petani hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Kelebihan dari budidaya komoditi karet dan kelapa karena masyarakat sudah terbiasa membudidayakan komoditi tersebut dan lebih toleran terhadap kondisi lingkungan sehingga resiko kegagalan budidaya oleh petani relatif kecil. Sedangkan budidaya tanaman pangan umumnya hanya berupa komoditas lokal yang produksinya masih relatif rendah. Usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman adalah dengan membudidayakan varietas yang unggul yaitu dari segi produksinya dan tahan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Murung Raya.

2.3.3.3 Peternakan

Peternakan di Kabupaten Murung Raya setiap tahun terjadi peningkatan populasi semua jenis ternak. Hampir di semua kecamatan terutama kecamatan Murung dan Tanah Siang kegiatan peternakan dikembangkan. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan usaha kegiatan pertanian tanaman pangan khususnya sawah, yang memberikan keuntungan subsitusi dari dua kegiatan tersebut.

Tabel 2.61.
Banyaknya Populasi Ternak dan Unggas menurut Jenisnya
Kabupaten Murung Raya, Tahun 2016-2017

No	Jenis Ternak	2016	2017
	Ternak		
1	Sapi Potong	2.042	2.141
2	Kerbau	8	10
3	Kambing	1.490	1.097
4	Babi	7.460	6.650
	Unggas		
1	Ayam Buras/ Ayam Kampung	94.790	94.590
2	Ayam Ras/ Petelur	6.350	-
3	Ayam Ras Broiler	287.500	574.300
4	Itik	2.390	800

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

Tabel 2.62.
Produksi daging dan Telur menurut Jenis Ternak (Kg)
di Kabupaten Murung Raya Tahun 2017

Jenis Ternak	Produksi Daging/Telur (Kg/Butir)	Berat Karkas yang Digunakan(Kg)
Daging:		
1. Sapi	168.365	160
2. Kerbau	-	18.050
3. Kambing	6.330	1.265
4. Domba	-	-
5. Babi	23.400	5.740
6. Kuda	-	-
7. Unggas		
• Ayam Petelur	-	-
• Ayam Broiler	727.400	150
• Ayam Buras	17.384	101
• Itik	-	-
Telur:		
• Ayam Ras	-	-
• Ayam Buras	90.402	-
• Itik / Bebek	6.644	-

Sumber: Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan dan BPS Kabupaten Murung Raya, 2018

2.3.3.4 Perikanan

Kabupaten Murung Raya tidak memiliki garis pantai sehingga produksi perikanan yang dihasilkan adalah ikan air tawar. Pemenuhan kebutuhan ikan di daerah Kabupaten Murung Raya selama ini, masih bertumpu pada hasil perikanan dari daerah lain. Namun demikian, pemerintah tidak tinggal diam, penggalakan program budidaya ikan seperti sudah mulai membuahakan hasil. Dengan pemberian bantuan benih ikan, diharapkan produksi budidaya ikan kian meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagian besar produksi perikanan di Kabupaten Murung Raya dihasilkan dari perikanan budidaya sebanyak 2.254,58 ton. Sebagian besar produksi perikanan dihasilkan di Kecamatan Murung dengan total produksi mencapai 654,13 ton.

Tabel 2.63.
Produksi Perikanan Kabupaten Murung Raya
Tahun 2017 (Dalam Ton)

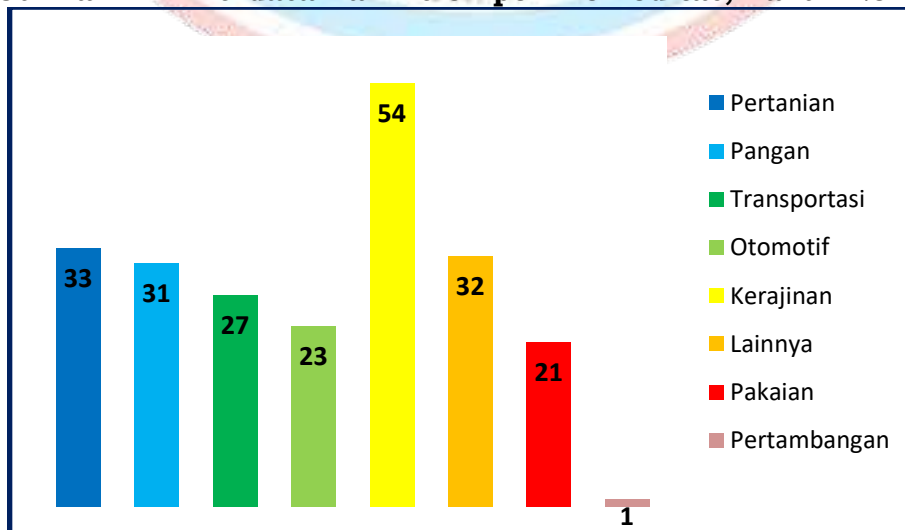
Kecamatan	Jenis Perairan		Jumlah
	Perairan Umum	Budidaya	
Permata Intan	22,07	260,39	282,46
Sungai Babuat	8,40	112,72	121,12
Murung	40,47	613,66	654,13
Laung Tuhup	41,56	262,93	304,49
Barito Tuhup Raya	4,74	227,84	232,58
Tanah Siang	10,57	238,32	248,89
Tanah Siang Selatan	8,40	175,60	184
Sumber Barito	22,30	205,30	227,6
Seribu Riam	28,53	67,64	96,17
U'ut Murung	23,79	90,18	113,97
Jumlah	210,83	2.254,58	2.465,41

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Murung Raya Dalam Angka, 2018

2.3.3.5 Industri

Industri kecil dan menengah yang terdapat di Kabupaten Murung Raya tersebar di Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Barito Raya. Jenis IKM bervariasi dari ragam usaha kerajinan tangan seperti rotan dan pengrajin kayu, industri pertanian seperti penggilingan padi, industri pangan, mekanik. Sampai Tahun 2015 terdapat 226 unit IKM dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 582 orang. Nilai usaha berkisar dari 6 juta sampai 375 juta. Berdasarkan pengelompokan untuk jenisnya, IKM yang terdapat di Kabupaten Murung Raya adalah IKM untuk kerajinan tangan, pertanian dan pangan.

Gambar 2.17
Jumlah IKM Berdasarkan Kelompok Komoditas, Tahun 2015



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, KOPERSASI dan UMKM Murung Raya, 2018

2.3.3.6 Energi dan Sumber Daya Mineral

Dari beberapa potensi yang terdapat di Kabupaten Murung Raya yang sudah dimanfaatkan adalah batubara dan mineral yang sebagian merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Potensi batubara terdapat di Kecamatan Murung, Laung Tuhup, U'ut Murung, Seribu Riam dan Sumber Barito. Pertambangan yang telah beroperasi dan telah memproduksi batubara berada di Kecamatan Laung Tuhup dan Barito Tuhup Raya. Sedangkan wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral antara lain terdapat di Kecamatan Tanah Siang dan Sei Babuat. Beberapa potensi pertambangan lainnya seperti pertambangan intan berpotensi di Kecamatan Permata Intan dan Murung. Pertambangan yang beroperasi dan telah memproduksi bahan galian emas dan pengikut logam lainnya berada di Kecamatan Tanah Siang Selatan.

Tabel 2.64.
Produksi Pertambangan Kabupaten Murung Raya
Tahun 2017 (Dalam Ton)

Jenis Bahan Pertambangan	Satuan	Jumlah Produksi	
		2014	2015
Batubara	MT	2.882.142,44	1.481.525,80
Kerikil	M ³	NA	168.538.032
Sirtukil	M ³	NA	80.488.825
Batu Belah	M ³	6.869	16.566.820
Sirtu	M ³	2.866	81.997.938
Pasir	M ³	16.617	143.844.625
Awkes	M ³	5.566	NA
Koral	M ³	NA	129
Tanah Urug	M ³	374	1.665
Batu Kapur	M ³	-	NA

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2018

2.3.3.7 Perdagangan

Di bidang perdagangan, terdapat beberapa pasar yang berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Murung Raya, yaitu:

- Pasar tradisional/lokal, yang melayani kebutuhan harian masyarakat dan pedagang yang ada pada umumnya memiliki modal yang relatif kecil,
- Pasar menengah, pada saat ini masih menyatu dengan kecil.



Keberadaan tempat perdagangan bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya belum memadai memadai masyarakat harus berbelanja ke daerah lain di sekitarnya. Pedagang yang sudah berada di Kabupaten Murung Raya adalah pedagang menengah dan pedagang kecil. Mayoritas adalah pedagang kecil yang berada di kecamatan kecuali Kecamatan U'ut Murung dan Sungai Babuat. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya, jumlah pedagang kecil yang terdaftar ada sebanyak 23 pedagang dan pedagang menengah sebanyak 19 pedagang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk total Murung Raya, maka 1 orang pedagang harus melayani 2628 orang penduduk.

2.3.4 Penunjang Urusan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi awal pemerintah daerah melaksanakan setiap program dan kegiatan pembangunannya untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya telah menetapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038.

2.3.4.2 Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan daerah perlu ditinjau sumber-sumber penerimaan daerah yang menjadi kriteria penting dalam mengalokasikan belanja, menentukan strategi dan prioritas anggaran. Sesuai dengan ketentuan yang ada, sumber-sumber penerimaan daerah meliputi:



a. Pendapatan

- Pendapatan Asli Daerah,
- Pajak Daerah,
- Retribusi Daerah,
- Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
 - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) Jasa giro;
 - 3) Pendapatan bunga;
 - 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

b. Dana Perimbangan

- Dana Bagi Hasil (DBH)

Dari Pajak

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dari Sumber Daya Alam

- 1) kehutanan;
 - 2) pertambangan umum;
 - 3) perikanan;
 - 4) pertambangan minyak bumi;
 - 5) pertambangan gas bumi; dan
 - 6) pertambangan panas bumi.
- Dana Alokasi Umum (DAU), dan
 - Dana Alokasi Khusus (DAK).



- c. Pinjaman Daerah, dan
- d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- e. Pembiayaan
 - Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
 - Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - Dana Cadangan Daerah; dan
 - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dengan memahami sumber-sumber penerimaan daerah tersebut, dapat dipahami bahwa beberapa sumber masih mengandalkan penerimaan dari pemerintah pusat, di samping juga sumber penerimaan asli daerah. Kondisi tersebut menuntut upaya pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk lebih kreatif menciptakan sumber-sumber penerimaan asli daerah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sumber penerimaan daerah sesuai ketentuan yang ada, terlihat bahwa pendapatan yang berpotensi untuk ditingkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Murung Raya bertekad meningkatkan sumber PAD baik melalui pajak daerah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya Peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Pengeluaran Per Kapita

Tingkat daya beli masyarakat dapat dilihat dari tingkat konsumsi riil per kapita masyarakat, sebagai salah satu komponen untuk melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Tingkat konsumsi riil masyarakat juga sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan, meningkatkan usia harapan hidup, serta kemampuan untuk



menyekolahkan anak lebih tinggi. Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang disesuaikan sebagai komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2017 mencapai 9.872 ribu per kapita per tahun meningkat dari tahun kemarin yang hanya mencapai 9.742. ribu/kapita/tahun. Namun peningkatan ini harus menjadi perhatian mengingat meskipun meningkat namun angka pengeluaran per kapita Murung Raya masih jauh di bawah angka provinsi yang mencapai 10.492 ribu/kapita/tahun.

2.4.2 Perbankan

Keberadaan perbankan di daerah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk penguatan modal usaha melalui skim kredit. Salah satu skim yang sangat diminati adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR diarahkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kelayakan usaha namun tidak bankable dikarenakan tidak adanya asset yang bisa dijadikan jaminan. Lebih lanjut, untuk lembaga keuangan sesuai data yang ada terdapat 5 lembaga perbankan yang ada di Murung Raya baik perbankan nasional maupun swasta yakni Bank Pembangunan Kalteng, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank Danamon.

2.4.3 Rasio Ketergantungan

Di sisi produktivitas penduduk digambarkan dalam rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah banyaknya penduduk 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas (yang merupakan penduduk yang ditanggung) dibandingkan dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun, sebagai penanggung). Dalam waktu selama periode 2010-2016 rasio ketergantungan di Kabupaten Murung Raya cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 angka beban tanggungan Murung Raya mencapai 60,31 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 61 penduduk usia tidak produktif. Kemudian angka beban tanggungan terus mengalami penurunan hingga mencapai 54,23 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban 54-55 penduduk usia tidak produktif.



Pembangunan Kabupaten Murung Raya memiliki berbagai kebijakan strategis untuk mencapai tujuan akhir pembangunan yakni menyejahterakan masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan berikutnya harus mengevaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya melalui data dan informasi yang valid dan relevan. Berikut ini adalah tabel realisasi capaian kinerja Kabupaten Murung Raya yang dapat digunakan sebagai bahan kajian perumusan perencanaan pembangunan periode mendatang.

Tabel 2.65.
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan
Kabupaten Murung Raya Periode 2013-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,82	6,49	5,85	5,71	5,82
1.2	Tingkat inflasi (Palangkaraya)	%	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11
1.3a	PDRB ADHB	Juta Rp	4.849.767	5.166.413	5.581.919	6.153.227	6.948.119
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	46,14	47,96	50,57	54,46	60,10
1.4	Indeks gini	%	0,318	0,333	0,297	0,328	0,303
1.5	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	93,56	93,76	93,43	93,68	94,12
1.6	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%			97,18	96,83	94,20
1.7	Tingkat pengangguran	%	3,54	1,13	6,33		2,78
1.8	Paritas daya beli	Ribu Rp	9.245	9.268	9.328	9.742	9.872
1.9	Jumlah Penduduk	Jiwa	105.100	107.724	110.390	112.976	115.604
1.10.a	Pertumbuhan Penduduk	%		2,50	2,47	2,34	2,33
1.10.b	Pengeluaran per kapita	Rp.					1.111.088
1.11	IPM		65,62	66,10	66,46	66,96	67,16
II	Fokus Kesejahteraan Sosial						
2.1	Pendidikan						
2.1.2	Angka melek huruf	%	NA	NA	98,41	98,77	98,77
2.1.3	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,15	7,18	7,36	7,37	7,38
2.1.4a	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	93,14	97,66	98,12	110,59	123,92
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	85,98	96,99	105,12	84,8	91,33
2.1.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	89,11	97,66	99,07	91,13	96,61
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	83,07	96,99	96,99	83,07	63,54



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.1.6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,33	11,68	11,69	11,71	11,72
2.2	Kesehatan						
2.2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,02	69,11	69,21	69,30	69,39
2.2.2	Persentase Bayi Gizi Buruk	%	1,20	0,01	0,03	0,01	0,04
2.2.3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	3,10	0,50	1,50	0,30	1,70
2.2.4	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	64,52	78,20	78,40	78,57	62,40
2.3	Pertanahan						
2.4	Ketenagakerjaan						
2.4.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,46	98,87	93,67		97,22
III	Fokus Budaya dan Olahraga						
3.1	Kebudayaan						
3.2	Pemuda dan Olahraga						
Aspek Pelayanan Umum							
A	Urusan Pemerintahan Wajib						
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1.1	Urusan Pendidikan						
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%					98,95
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS	%					92,46
1.1.1.c	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK	%					59,10
1.1.2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						
	- SD/MI	Orang	402	458	580	694	701
	- SMP/MTs	Orang	481	512	512	522	527
1.1.3	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	11,33	11,68	11,69	11,71	11,72
1.2	Urusan Kesehatan						
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	5,42	14,55	27,24	16,62	17,03
2.2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Per 1.000 KH	0,25	0,30	0,35	0,42	0,58
2.3.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	10,34	7,04	7,43	2,44	3,49
2.4.	Angka Kematian Neonatal	Per 1.000 KH	17,24	15,49	13,87	8,80	7,42
2.5.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	147,78	328,48	346,71	293,26	262,01
2.6.	Rasio posyandu	per satuan Balita	37,74	13,95	14,64	14,19	14,65
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	per satuan penduduk	0,01	1,05	1,11	1,16	1,10
2.8.	Rasio Rumah Sakit	per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.9.	Rasio dokter	per satuan penduduk	0,10	0,16	0,13	0,17	0,29



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.10.	Rasio tenaga paramedic	per satuan penduduk	3,10	2,81	1,41	5,16	3,54
2.11.	Kunjungan Bumil K4	%	79,59	85,60	82,26	86,36	75,76
2.12.	Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	34,41	47,31	33,83	47,74	72,76
2.13.	Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	81,89	81,89	75,26	89,36	85,80
2.14.	Pelayanan Nifas	%	86,90	89,75	79,89	95,04	89,68
2.15.	Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	%	37,05	83,61	34,57	40,83	9,30
2.16.	Kunjungan Bayi	%	99,83	77,61	80,34	34,95	93,94
2.17.	Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	45,97	57,26	41,60	76,92	27,20
2.18.	Pelayanan Anak Balita	%	68,31	67,75	72,92	70,31	85,37
2.19.	Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin	%	99,25	99,25	99,25	81,23	98,02
2.20.	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100
2.21.	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	89,39	90,46	89,39	89,40	91,57
2.22.	Peserta KB Aktif	%	33,40	33,40	42,42	44,38	49,66
2.23.	Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	%	0	0	0	0	0
2.24.	Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	3,13	3,13	3,13	1,23	14,41
2.25.	Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan Pasien baru TB BTA Positif	%	50,00	50,00	52,70	76,76	121,12
2.26.	Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penderita DBD yang ditangani	%	100	49,12	100	100	100
2.27.	Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Penemuan penderita diare	%	68,14	68,14	100	65,27	74,55
2.28.	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	%	64,14	64,14	10,16	60,27	85,71
2.29.	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	0,11	0,11	0,18	0,39	70,00
2.30.	Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten Murung Raya	%	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.31.	Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	0	0	0	0	0
2.32.	Desa Siaga Aktif	%	64,52	76,61	64,52	78,57	62,40
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%					14,84
1.3.2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk					
	Jumlah Masjid dan Mushola	Unit					175
	Jumlah Gereja dan Kapel Katolik	Unit					26
	Jumlah Gereja Protestan	Unit					99
	Jumlah Pura	Unit					1
1.3.3	Jumlah Pelanggan air bersih	Pelanggan		3.877	3.922	4.007	4.010
1.3.4	Volume air yang disalurkan	m3		913.150	700.080	608.020	668.458
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%			97,18	96,83	94,20
1.6	Urusan Sosial						
1.6.1	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	6.770	6.760	7.200	7.100	6.750
1.6.2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.					1.111.088
1.6.3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%					40,62
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
2.1	Urusan Tenaga Kerja						
2.1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,69	65,09	71,73		68,83
2.1.2	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,54	1,13	6,33		2,78
2.1.3	Tingkat UMP	Rp.	1.731.034	1.938.758	2.190.797	2.497.716	2.497.716
2.1.4	Penduduk bekerja	%	96,46	98,87	93,67		97,22
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%			16,00		
2.2.2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%					48,37
2.3	Urusan Pangan						
2.3.1	Jumlah produksi padi	Ton			27.464		
2.3.2	Produktivitas Padi	Ton/Ha			2,37		
2.4	Urusan Pertanahan						
2.5	Urusan Lingkungan Hidup						
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.6.1	Kepadatan penduduk		5	5	5	5	5



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Laju pertumbuhan penduduk	%		2,50	2,47	2,34	2,33
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.7.1	Posyandu	Unit	147	138	114	153	
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.8.1	Rasio akseptor KB	%			62,13	87,77	87,32
2.8.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	80,99	81,53	82,31		
2.8.3	Persentase Alat Kontrasepsi yang Digunakan oleh Penduduk						
	- WOW/MOP/IUD/Spiral	%	0,96	1,26	1,89	2,91	2,70
	-Susuk KB	%	7,06	7,71	9,08	13,47	9,37
	-Suntik	%	29,52	56,79	72,13	74,53	49,63
	-Pil	%	57,20	67,10	52,54	49,73	41,64
	-Alat Tradisional lain	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Kondom	%	5,27	2,78	2,78	3,22	0,85
2.9	Urusan Perhubungan						
2.9.1	Jumlah kendaraan bermotor	Unit	11.138	16.636	8.492	20.104	7.462
2.9.2	Panjang jalan	Km					919,54
2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang		4.012	9.530	10.041	6.814
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika						
2.10.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Terbitan	7	11	12	12	12
2.10.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Stasiun	3	3	3	3	3
2.10.3	Web site milik pemerintah daerah	Site	1	1	1	1	1
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
2.11.1	Persentase koperasi aktif	%				21,50	22,92
2.11.2	Jumlah koperasi	Unit				107	96
2.11.3	Jumlah UMKM	Unit				2.138	2.620
2.12	Urusan Penanaman Modal						
2.12.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp.					364.896.100.000
2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Rp.					3.521.590.280.000
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga						
2.13.1	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	43	177	164		
2.13.2	Lapangan olahraga	Unit			60	60	52
2.14	Urusan Statistik						
2.14.1	Buku Kabupaten Murung Raya Dalam Angka	Buku	1	1	1	1	1



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.14.2	Buku PDRB Kabupaten Murung Raya	Buku	1	1	1	1	1
2.15	Urusan Kebudayaan						
2.16	Urusan Perpustakaan						
2.16.1	Jumlah perpustakaan	Unit					75
2.16.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang			1.799	1.902	1.329
2.17	Urusan Kearsipan						
2.18	Urusan Perencanaan Pembangunan						
2.18.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Buku	1	1	1	1	1
2.18.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Buku	1	1	1	1	1
2.18.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Buku	1	1	1	1	1
2.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
2.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
2.20.1	Pertumbuhan ekonomi	%	6,82	6,21	5,85	5,71	5,82
2.20.2	Kemiskinan	%	6,44	6,24	6,57	6,32	5,88
2.20.3	Opini laporan keuangan pemerintah kota	Opini			WTP	WTP	WTP
B	Urusan Pemerintahan Pilihan						
1	Urusan Kelautan dan Perikanan						
1.1	Produksi perikanan Umum	Ton					210,83
1.2	Produksi perikanan Darat	Ton					2.254,58
2	Urusan Pariwisata						
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang			17.362	13.097	41.691
3	Urusan Pertanian						
3.1a	Produktivitas padi sawah	kw/ha			36,26		
3.1b	Produktivitas padi ladang	kw/ha			23,39		
3.2	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%		12,41	12,62	12,10	11,63
3.3	Produksi padi	ton			27,46		
3.4	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%		3,24	3,71	0,01	2,51
3.5	Jumlah produksi daging (sapi, kambing, babi)	Kg					198.095
3.6	Jumlah produksi daging ayam/unggas	Kg					744.784
3.7	Jumlah produksi telur ayam/unggas	Kg					97.046



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
4	Urusan Kehutanan						
4.1	Luas Hutan	ha					2.246.447
4.2	Luas Hutan lindung	ha					501.388
4.3	Luas Hutan Produksi terbatas	ha					1.225.625
4.4	Luas Hutan Produksi tetap	ha					199.825
4.5	Luas Hutan produksi yang dikonversi	ha					132.678
4.6	Luas Hutan lainnya	ha					186.931
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
5.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	%		52,83	49,02	49,33	49,54
5.2	Produksi listrik	KWh					29.346.575
6	Urusan Perdagangan						
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	%		5,47	5,98	5,85	5,73
7	Urusan Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	2,80	3,21	3,52	3,42	3,36
7.2	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	4,27	11,52	5,30	3,67	6,14
7.3	Jumlah IKM	IKM	221	223	226	230	238
7.4	Tenaga kerja industri	orang	411	420	582	584	592

Sumber: LKPJ Pemerintah Kabupaten Murung Raya 2018 dan diolah dari berbagai sumber





BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara fokus dan hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dijalankan yang bertujuan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Bab ini akan menggambarkan mengenai kinerja masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah di masa sebelumnya dapat menggambarkan bagaimana suatu daerah melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Indikator yang digunakan untuk menganalisis kemampuan daerah dapat diukur melalui kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan. Korelasi antara PAD yang didapatkan oleh daerah dengan total pendapatan daerah secara keseluruhan dapat menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Tabel 3.1
Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah
2013	30.600.000.000	813.242.003.233,12	3,76%
2014	29.505.000.000	950.910.400.171,9	3,10%
2015	30.320.000.000	1.090.772.084.361,89	2,78%
2016	37.555.989.853	1.179.412.895.364,89	3,18%
2017	73.110.866.309,6	1.206.580.337.671,49	6,06%
2018	70.169.699.791	1.272.835.183.895,09	5,51%

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013-2018

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat tergambar bahwa terjadi fluktuasi dalam kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Di tahun 2013 kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 3,76% di tahun 2013 yang kemudian turun sampai dengan 2,78% di tahun 2015



dan naik kembali menjadi 6,06% di tahun 2017 dan akhirnya turun kembali di tahun 2018 sampai dengan 5,51%, Hal ini tidak terlepas dari Pendapatan Asli Daerah yang juga fluktuatif dan Total Pendapatan Daerah yang rata-rata naik setiap tahunnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, APBD Kabupaten Murung Raya mengalami perkembangan yang cukup stabil. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dari sisi pendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Murung Raya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Dana Perimbangan, meliputi: dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; serta
- (3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: bantuan/hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Guna mengetahui kinerja pendapatan daerah dilakukanlah analisis pendapatan daerah dengan menggunakan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah. Hasil analisis pendapatan daerah sekaligus juga digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan atau memproyeksikan pendapatan daerah di masa mendatang.



Tabel 3.2
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018 (Dalam Juta Rupiah)

NO	PENERIMAAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	PENDAPATAN DAERAH	813.242	950.910	1.090.772	1.179.413	1.206.580	1.272.835
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	30.600	29.505	30.320	37.556	1.206.580	1.272.835
	-Pajak Daerah	3.662	3.830	4.675	5.579	73.111	70.170
	-Hasil Retribusi Daerah	7.678	8.280	8.310	3.267	5.114	5.888
	-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	8.690	2.650	2.650	4.000	3.237	2.849
	-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.570	14.745	14.685	24.710	4.700	6.100
2	DANA PERIMBANGAN	712.825	839.179	943.978	1.041.049	60.060	55.333
	-Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	166.892	251.925	331.553	194.885	1.004.078	1.042.128
	-Dana Alokasi Umum	545.933	585.235	593.990	678.555	162.124	179.771
	-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		2.020	18.436	127.769	667.655	667.655
	-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				39.840	113.644	118.411
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69.817	82.226	116.474	100.808	60.656	76.291
	-Pendapatan Hibah / BOS SD / SMP					129.392	160.538
	-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	39.226	46.589	25.963	25.963		18.747
	-Dana Penyesuaian - TPG / T Profesi Guru	21.942	26.837	48.841		25.963	29.364
	-Dana Penyesuaian / DID						
	-Bantuan Keuangan dari Provinsi - Harati - Barigas	8.650	8.800	8.250		7.500	8.750
	-Bantuan Keuangan dari Provinsi - Pilkada						
	-Pendapatan Lainnya/ Dana Desa			33.421	74.845		1.500

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013-2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya dari tahun 2013-2018 cenderung meningkat. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, hampir sekitar 70-80% total pendapatan Kabupaten Murung Raya berasal dari dana transfer. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Murung Raya masih sangat bergantung pada dana transfer yang mayoritas berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah dapat dikatakan masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan tabel 3.3 juga dapat tergambar Dana Alokasi Umum (DAU) masih menempati porsi terbesar dalam dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, yakni hampir sebesar 70-80%.



Kemudian diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak atau Sumber Daya Alam dan DBH pajak.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari komponen: (1) belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal; dan (2) belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Guna efektivitas dan efisiensi alokasi dana untuk belanja daerah dilakukanlah analisis belanja. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Belanja Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	
BELANJA	805.796.601.228	873.776.689.466	1.094.702.716.178	1.197.906.185.286	941.716.805.670	3,17%
Belanja Operasional	518.183.667.647	596.915.699.032	743.212.921.020	808.932.752.561	721.802.471.320	6,85%
Belanja Pegawai	285.743.114.827	307.956.127.733	327.482.664.908	373.167.594.378	429.347.960.577	8,48%
Belanja Barang dan Jasa	161.970.694.731	225.596.646.795	305.170.895.862	303.392.978.580	197.051.298.066	4,00%
Belanja Subsidi	2.360.212.865	4.440.475.122	8.091.558.925	7.795.168.259	19.363.486.364	52,34%
Belanja Hibah	27.316.088.687	16.850.453.000	94.627.891.325	120.328.651.344	69.258.894.013	20,45%
Belanja Bantuan Sosial	9.670.571.000	7.950.660.000	7.839.910.000	4.248.360.000	6.780.832.300	-6,85%
Belanja Modal	286.647.933.581	275.976.990.434	351.364.795.158	388.385.450.475	219.839.334.350	-5,17%
Belanja Modal Tanah	10.018.116.200	10.013.924.740	10.073.573.914	3.912.479.500	20.715.659.337	15,64%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.628.876.796	43.772.835.487	68.106.085.745	31.400.594.545	20.715.659.337	-13,84%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.522.838.745	67.116.276.620	64.198.607.564	88.539.938.119	70.560.938.043	-10,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	110.805.026.615	154.163.383.837	205.019.533.983	261.851.527.972	123.225.737.585	2,15%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.774.817.900	796.301.750	2.985.888.952	2.577.072.339	1.292.856.886	-6,14%
Belanja Modal Aset Lainnya	898.257.325	64.250.000	981.105.000	103.838.000	224.785.000	-24,20%
Belanja Tidak Terduga	164.000.000	77.000.000	125.000.000	587.982.250	75.000.000	-14,48%

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013-2017



Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat rata-rata pertumbuhan realisasi total belanja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 3.17%. Proporsi antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal masih didominasi oleh Belanja Operasi yang mana hampir berkisar 70% dari Total Belanja. Hal ini mendakan bahwa secara umum penggunaan anggaran masih dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat operasional atau mudah habis dan berjangka pendek dibandingkan dengan belanja modal yang sifatnya berorientasi jangka panjang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, yakni dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017, akan diuraikan ke dalam substansi proporsi penggunaan anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam membahas mengenai APBD 2013-2017, tentu tidak akan lepas untuk membahas belanja yang merupakan tindak lanjut atas pendapatan yang telah diperoleh oleh Kabupaten Murung Raya juga sebagai bentuk upaya dalam mensejahterakan masyarakat daerah Kabupaten Murung Raya. Tabel 3.5 menggambarkan realisasi Total Belanja dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Komposisi defisit anggaran belanja daerah Kabupaten Murung Raya seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya.

Pencapaian prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tergambar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setiap tahunnya. Setiap tahun diharapkan nominal ataupun persentase SiLPA menurun secara berkelanjutan. Belanja pemerintah yang kurang diberdayakan tergambar pada tingginya SiLPA, sehingga tidak optimal



dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Murung Raya. Tabel 3.6 menggambarkan perkembangan SILPA dari tahun 2013 ke tahun 2017.

Tabel 3.4
Perkembangan SiLPA Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

Tahun	SiLPA	Pengeluaran APBD	%
2013	285,891,239,882	805,796,601,228	0,35
2014	321,389,582,247	873,776,689,466	0,37
2015	209,003,598,712	1,094,702,716,178	0,19
2016	93,064,978,079	1,197,906,185,286	0,08
2017	126,241,487,441	941,716,805,670	0,13
Rata-Rata % SiLPA terhadap Pengeluaran APBD			0,22

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013-2018

SiLPA Kabupaten Murung Raya mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan angka yang masih cukup besar. Di antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, SiLPA tertinggi pada tahun 2014 sebesar Rp321.389.582.247 dengan Pengeluaran APBD sebesar Rp873.776.689.466. SiLPA terendah menyentuh di angka Rp74.277.147.045 di tahun 2017; dengan rata-rata perbandingan SiLPA terhadap pengeluaran APBD pada 20% an.

1. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis rasio mandiri keuangan daerah digunakan untuk melihat sejauh mana daerah dapat melaksanakan otonomi secara efektif dan efisien yang bersumber dari pendapatan sendiri. Tabel 3.7 menggambarkan perkembangan PAD, pengeluaran APBD, serta rasio antara keduanya.

Tabel 3.5
Rasio Kemandirian Keuangan
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

Tahun	Total PAD	Pengeluaran Daerah	Rasio PAD/Total Pengeluaran
2013	25,507,489,562.27	805,796,601,228	3.17%
2014	38,138,507,758.80	873,776,689,466	4.36%
2015	54,891,573,871.38	1,094,702,716,178	5.01%
2016	33,853,527,199.48	1,197,906,185,286	2.83%
2017	68,670,822,679.05	941,716,805,670	7.29%

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013-2017

Sesuai Tabel 3.5, secara umum PAD dan Pengeluaran Daerah mengalami peningkatan. Rasio antara PAD dengan Total Pengeluaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat, kecuali



untuk tahun 2016 pada rata-rata 4,5%. Rasio tertinggi di tingkat 7.29% pada tahun 2017 dan terendah di tingkat 2.83% pada di tahun 2016. Secara umum, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Murung Raya masih rendah.





Tabel 3.6
Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)

Uraian	Realisasi					Fluktuasi
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pendapatan	813.242	950.910	1.090.772	1.179.413	1.206.580	11%
Belanja	805.796	873.776	1.094.702	1.197.906	941.716	5%
Surplus (Defisit)	62.339	46.302	(105.541)	(11.068)	39.337	-225%
Penerimaan Pembiayaan	22.555	285.949	321.794	209.003	93.153	272%
Pengeluaran Pembiayaan	2.000	10.863	7.250	5.250	6.250	100%
Pembiayaan Netto	223.552	275.086	314.544	203.753	86.903	-14%
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)	285.891	321.389	209.003	93.064	126.241	-11%

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013-2017



Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dari segi pendapatan, rata-rata pertumbuhannya mencapai 8%. Berbeda dari sisi belanja yang hanya mencapai 4% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari Belanja di tahun 2016 yang menurun ke tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah anggaran yang dibelanjakan Rp1.197.906.185.286 yang kemudian menurun Rp941.716.805.670. Tahun 2013 hingga tahun 2017 terus terjadi peningkatan pembelanjaan, kecuali untuk tahun 2017. Penurunan di tahun 2017 juga tidak dapat terelakan dari terjadinya penurunan pendapatan di tahun 2016 dari Rp1.195.030.568.366 menjadi Rp1.161.799.194.467 di tahun 2017.

Perbandingan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rata-rata mencapai 90% ke atas. Namun, terlihat pada tahun 2017 terjadi penurunan, di mana realisasi pendapatan sebesar Rp1.161.799.194.467 dan realisasi belanja sebesar Rp941.716.805.670 atau sekitar 81% dari realisasi pendapatan.

Berdasarkan Tabel 3.3 dalam segi pendapatan secara keseluruhan terjadi fluktuasi perkembangan antara anggaran dan realisasi pendapatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa kinerja penerimaan daerah mencapai atau bahkan melebihi target, meskipun pada tahun 2014, 2015, dan 2017 perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan.

3.2.2. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Murung Raya periode tahun 2013 sampai dengan periode 2017 mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan APDB dalam periode tersebut. Berdasarkan tabel 3.4 Jumlah Aset Lancar mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar Rp184.896.367.444 dan kemudian mengalami peningkatan kembali sebesar Rp196.415.643.359 di tahun 2017. Dalam hal investasi permanen dan jangka panjang, terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan terjadi mulai dari tahun 2013 sebesar Rp19.931.053.842 yang meningkat secara bertahap sampai sebesar Rp44.931.053.842 di tahun 2017. Hal ini menandakan terjadi



konsistensi dan komitmen dalam meningkatkan investasi di setiap tahunnya.





Tabel 3.7
Perkembangan Neraca Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Fluktuasi
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	283.612.579.741	320.839.805.046	206.519.757.895	92.015.621.992	120.890.267.390	-15.68%
Kas di Bendahara Penerimaan	58.647.286	5.957.612	788.530.673	-	-	137.79%
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.394.935.714	2.660.095.162	1.008.772.582	3.969.160	-	-82.66%
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	-	-	1.633.519.450	1.898.818.835	2.327.311.819	12.52%
Kas di Bendahara Dana BOS	-	-	141.953.672	567.090.897	168.902.526	5.97%
Kas di Bendahara BLUD	-	-	-	37.659.518	3.756.564.118	898.75%
Piutang Pendapatan	12.609.078.415	2.726.254.256	15.511.203.554	14.338.840.944	15.087.259.687	3.65%
Piutang Lainnya	733.605.800	461.152.000	723.774.014	721.724.014	694.847.622	-1.08%
Penyisihan Piutang	-	-	(863.594.179)	(1.245.160.763)	(1.377.942.746)	16.85%
Beban Dibayar Dimuka	-	-	111.251.804	135.990.410	125.446.016	4.08%
Persediaan	-	17.653.935.945	27.273.736.078	76.421.812.438	54.742.986.927	25.40%
Jumlah Aset Lancar	307.690.386.193	344.347.200.021	252.848.905.542	184.896.367.444	196.415.643.359	-8.59%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	19.931.053.842	26.181.053.842	33.431.053.842	38.681.053.842	44.931.053.842	17.65%
Jumlah Investasi Permanen	19.931.053.842	26.181.053.842	33.431.053.842	38.681.053.842	44.931.053.842	17.65%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	19.931.053.842	26.181.053.842	33.431.053.842	38.681.053.842	44.931.053.842	17.65%
ASET TETAP						
Tanah	253.324.942.193	263.331.885.933	271.021.943.339	274.785.822.839	267.850.552.099	1.12%
Peralatan dan Mesin	260.479.215.422	302.562.850.909	362.428.867.558	388.248.488.450	397.404.730.383	8.82%
Gedung dan Bangunan	973.598.256.798	1.037.514.390.418	1.086.333.501.689	1.160.338.621.759	1.200.964.104.997	4.29%



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Jalan, Irigasi dan Jaringan	830.202.783.203	984.406.352.900	1.167.666.419.391	1.450.819.743.290	1.622.361.408.512	14.34%
Aset Tetap Lainnya	22.127.544.135	22.663.220.885	23.039.962.928	19.780.015.485	23.090.349.125	0.86%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	2.501.977.000	10.932.365.050	16.351.482.490	86.96%
Akumulasi Penyusutan	-	-	(669.937.471.978)	(796.768.993.779)	(959.807.571.942)	12.73%
Jumlah Aset Tetap	2.339.732.741.751	2.610.478.701.045	2.243.055.199.926	2.508.136.063.094	2.568.215.055.662	1.88%
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	-	-	1.711.081.432	1.711.081.432	1.711.081.432	0.00%
Aset Tidak Berwujud	2.261.464.500	2.373.412.500	845.264.375	710.209.644	1.003.058.435	-15.01%
Aset Lain-lain	53.379.106.080	56.629.249.080	74.032.661.688	7.949.526.750	64.733.064.892	3.93%
Jumlah Aset Lainnya	55.640.570.580	59.002.661.580	76.589.007.495	10.370.817.826	67.447.204.759	3.92%
JUMLAH ASET	2.722.994.752.366	3.040.009.616.488	2.605.924.166.806	2.742.084.302.206	2.877.008.957.623	1.11%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.116.275.573	1.711.081.432	1.777.142.601	1.712.613.611	1.711.081.432	-4.16%
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	249.684.700	365.710.339	361.129.680	13.09%
Beban Yang Masih Harus Dibayar			1.557.235.947	2.021.568.607	1.123.739.341	-10.30%
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.814.560.828	-	3.326.364.250	23.313.887.305	699.965.080	-28.76%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.930.836.401	1.711.081.432	6.910.427.498	27.413.779.862	3.895.915.533	-8.06%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	1.147.937.125	1.235.098.634	-	3.73%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	1.147.937.125	1.235.098.634	-	3.73%
JUMLAH KEWAJIBAN	5.930.836.401	1.711.081.432	8.058.364.623	28.648.878.496	3.895.915.533	-8.06%
EKUITAS						



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Ekuitas	2.717.063.915.965	3.038.298.535.056	2.597.865.802.183	2.713.435.423.710	2.873.113.042.090	1.12%
JUMLAH EKUITAS	2.717.063.915.965	3.038.298.535.056	2.597.865.802.183	2.713.435.423.710	2.873.113.042.090	1.12%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.722.994.752.366	3.040.009.616.488	2.605.924.166.806	2.742.084.302.206	2.877.008.957.623	1.11%

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013-2017





Dalam hal aset tetap, jumlah akumulasi sejak tahun 2013 sampai 2014 terjadi peningkatan, namun di tahun 2015 terjadi penurunan. Hal ini tidak terlepas dari adanya akumulasi penyusutan yang muncul di tahun 2015 yang mana hal tersebut tidak muncul di tahun 2013 dan 2014. Di tahun 2015 sampai dengan 2017 terus terjadi peningkatan namun tidak begitu signifikan karena akumulasi penyusutan yang juga terus meningkat setiap tahunnya semenjak tahun 2015 sampai tahun 2017. Hal ini berdampak pada total jumlah aset yang meningkat di tahun 2014 dan kemudian menurun di tahun 2015 dan meningkat kembali di tahun 2016 dan 2017.

3.3 Kerangka Pendanaan

Di sisi penerimaan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilanjutkan. Dalam hal ini penerimaan pajak daerah dan Retribusi daerah diharapkan terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya selama periode tahun 2013-2018. Sementara di sisi belanja, sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran untuk mewujudkan misi 1 (membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterisolasian), maka perlu dilakukan pengendalian peningkatan anggaran untuk belanja pegawai.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan merupakan target pendapatan yang diharapkan akan tercapai oleh suatu daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan di bidang keuangan negara.



Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PENERIMAAN DAERAH	1.281.901	1.482.164	1.528.039	1.583.206	1.666.141	
	a						
	Pendapatan Daerah	1.273.288	1.361.596	1.430.137	1.486.599	1.565.477	
	-	Pendapatan Asli Daerah	70.623	85.856	102.977	124.043	150.046
	-	Pendapatan Transfer	1.042.128	1.109.187	1.160.232	1.195.610	1.248.484
	-	Lain-lain Pendapatan Daerah yagn sah	160.538	166.552	166.928	166.946	166.947
	b						
Penerimaan Pembiayaan	8.613	120.568	97.902	96.607	100.664		
-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	8.613	70.568	97.902	96.607	100.664	
-	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	50.000	-	-	-	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya 2018



3.3.2 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat daerah Kabupaten Murung Raya tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Murung Raya (Juta Rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	PENGELUARAN DAERAH	693.805	704.569	737.224	750.955	765.220
a	Belanja Tidak Langsung	686.590	697.354	713.342	727.073	741.338
	- Belanja Pegawai	451.289	462.571	474.136	485.989	498.139
	- Belanja Bunga	-	-	1.750	1.167	583
	- Belanja Subsidi	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
	- Belanja Hibah	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
	- Belanja Bantuan Sosial	28.100	28.490	30.668	33.064	35.700
	- Belanja Bagi Hasil	828	911	1.002	1.102	1.212
	- Belanja Bantuan Keuangan	195.161	194.171	194.575	194.540	194.493
	- Belanja Tidak Terduga	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B	Pengeluaran Pembiayaan	7.215	7.215	23.882	23.882	23.882
	- Penyertaan Modal Daerah	7.215	7.215	7.215	7.215	7.215
	- Pembayaran Pokok Utang	-	-	16.667	16.667	16.667

3.3.3 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023 yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan untuk prioritas I, II, dan III tersaji pada tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10
Proyeksi Kapasitas Riil Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENERIMAAN DAERAH	1.281.901	1.482.164	1.528.039	1.583.206	1.666.141
a	Pendapatan Daerah	1.273.288	1.361.596	1.430.137	1.486.599	1.565.477
b	Penerimaan Pembiayaan	8.613	120.568	97.902	96.607	100.664
2	PENGELUARAN DAERAH	693.805	704.569	737.224	750.955	765.220
a	Belanja Tidak Langsung	686.590	697.354	713.342	727.073	741.338
b	Pengeluaran Pembiayaan	7.215	7.215	23.882	23.882	23.882
Kapasitas Riil (1-2)		588.097	777.595	790.815	832.251	900.921

Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan ke berbagai program kegiatan sesuai urutan prioritas berdasarkan visi, misi, dan program pembangunan calon kepala daerah. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II, dan prioritas III dimana setiap tingkatan prioritas mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas di atasnya terpenuhi.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada serentak 27 Juni 2018. Selain itu prioritas I juga mengamanatkan pelaksanaan kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen). Termasuk juga pelaksanaan kebijakan prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 yang memiliki korelasi positif dan relevan dengan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi misi Bupati Murung Raya 2018-2023. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi, berhubungan dengan layanan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, dan belanja bantuan sosial (organisasi kemasyarakatan). Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Rincian	2019	2020	2021	2022	2023
Prioritas 1	149.481	281.777	197.337	205.696	236.569
Prioritas 2	438.616	495.874	593.550	626.605	663.280









Guna mendapatkan fokus dan prioritas paling strategis, perumusan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah harus dapat mendefinisikan permasalahan dan isu strategis daerah. Mengingat urgensinya terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah masa kini dan mendatang, setiap permasalahan dan isu strategis daerah harus ditemukenali, dikaji, dianalisis dan dicari solusi inovatif terbaik bagi Kabupaten Murung Raya. Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang tepat dan bersifat strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD. Analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah diharapkan dapat terhubung dengan permasalahan dan isu strategis renstra perangkat daerah. Integrasi analisis tersebut diharapkan dapat menjadi kepaduan kebijakan pembangunan antara daerah dengan perangkat daerah.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Sesuai ketentuan Umum Permendagri No. 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berpijak pada definisi tersebut, perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan daerah sebagai pijakan bagi perumusan kebijakan di masa datang. Potensi permasalahan pembangunan daerah umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdayagunakan, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi serta ancaman yang belum diantisipasi.

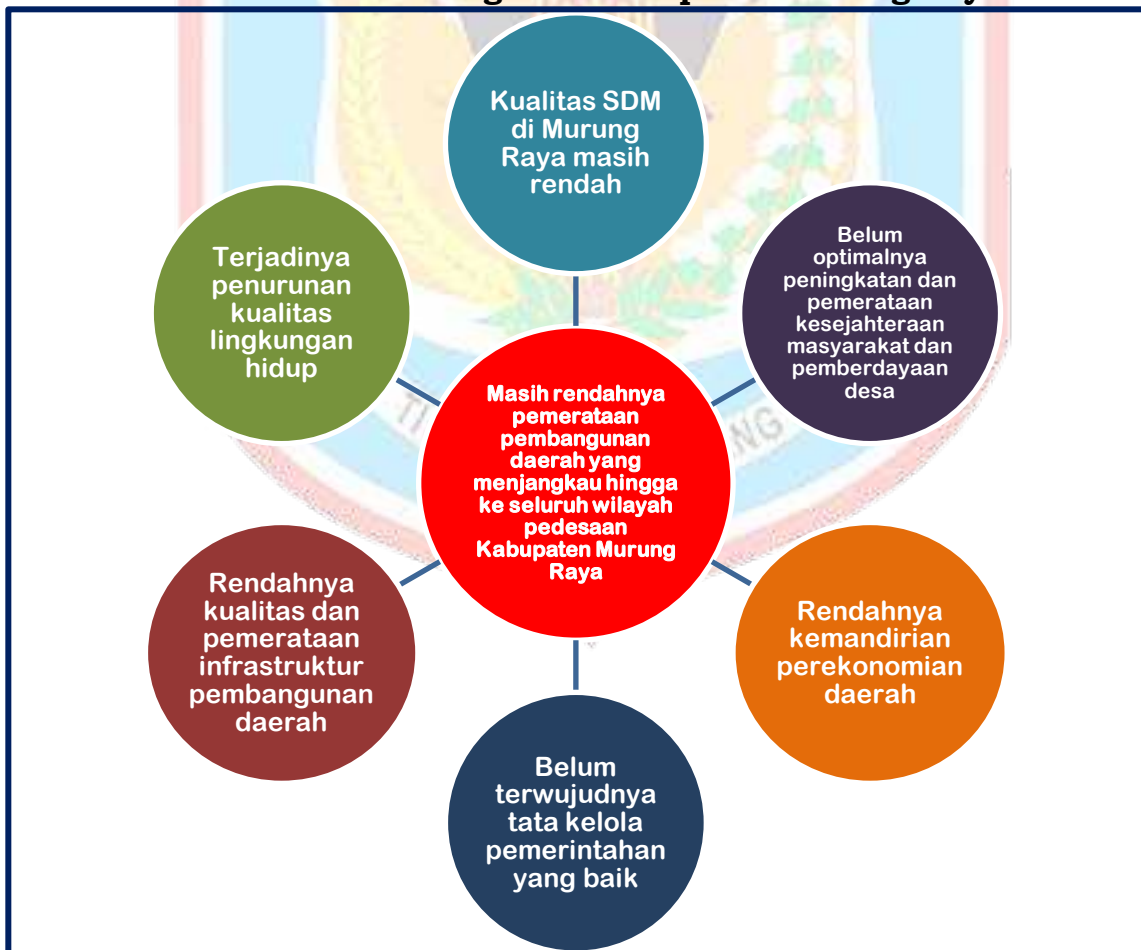
Permasalahan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalahnya sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah selama lima tahun mendatang. Setelah menelaah data dan

informasi capaian kinerja pembangunan periode sebelumnya dan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya, yaitu:

“MASIH RENDAHNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENJANGKAU HINGGA KE SELURUH WILAYAH PEDESAAN KABUPATEN MURUNG RAYA”

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Murung Raya di atas kemudian diperinci ke dalam pokok permasalahan yang mencakup lima fokus pembangunan, yakni: sumber daya manusia, ekonomi, pemerintahan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Secara tematik, permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Murung Raya sebagaimana dijabarkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Permasalahan Pembangunan Kabupaten Murung Raya

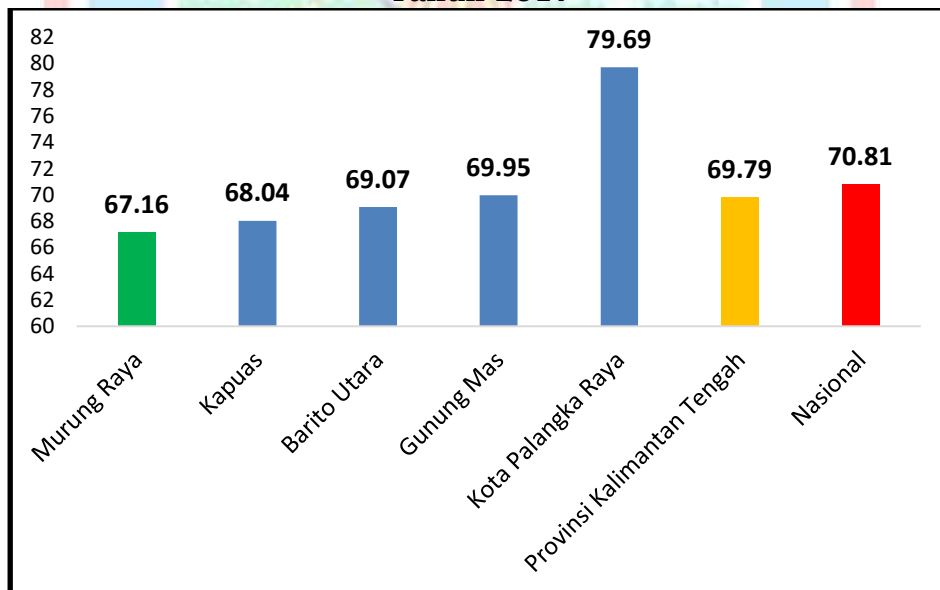


Kelima permasalahan pokok di atas merupakan rumusan penting sebagai salah satu pijakan dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Murung Raya lima tahun ke depan; dengan penjabaran sebagai berikut.

4.1.1 Kualitas SDM di Murung Raya masih rendah

Sebagai salah satu faktor utama pembangunan daerah, sumber daya manusia menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah. Dengan jumlah penduduk sebesar 115.604 jiwa maka pada dasarnya Kabupaten Murung Raya telah memiliki modal dasar cukup; dengan catatan, masyarakat memiliki daya saing yang baik. Kondisi dimaksud dapat diukur dengan melihat perbandingan tingkat IPM Kabupaten Murung Raya dengan daerah sekitar, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.2
Perbandingan IPM Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya
Tahun 2017



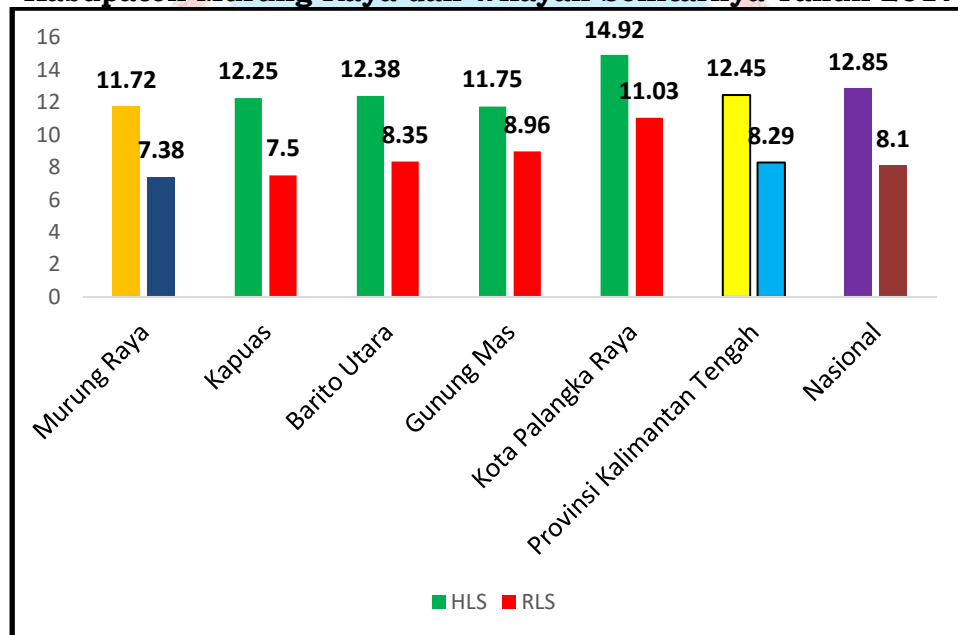
Sumber: BPS RI, 2018

Dalam melihat kualitas sumber daya manusia, secara umum indikator IPM cukup mewakili secara mendalam. Berdasarkan gambar di atas, terlihat secara jelas angka IPM Kabupaten Murung Raya cukup jauh dari harapan dimana diantara kabupaten sekitar bahkan level provinsi dan nasional, IPM Murung Raya memiliki nilai paling rendah yakni sebesar 67,16, padahal angka provinsi sebesar 69,79 dan angka nasional mencapai 70,81.

Secara umum terlihat kondisi pendidikan di Murung Raya dari indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah yang

merupakan indikator penyusun IPM. Jika dilihat perbandingan dengan wilayah lain maupun regional provinsi dan nasional, maka angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Murung Raya masih jauh tertinggal. Hal ini jelas mengindikasikan belum optimalnya akses masyarakat terhadap dunia pendidikan baik sarana prasarana maupun dalam segi jangkauan pendidikan. Pemerintah harus jeli dalam melihat hal ini mengingat SDM berkualitas ditentukan oleh pendidikan masyarakatnya.

Gambar 4.3
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017



Sumber: BPS RI, 2018

Kunci utama peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tercipta sumber daya manusia yang berdaya saing adalah melalui pembangunan di sektor pendidikan. Saat ini, pendidikan di Kabupaten Murung Raya memiliki beberapa permasalahan, antara lain dapat dilihat dari belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan khususnya di pedalaman Murung Raya. Keterbatasan sarana prasarana ini dapat dilihat dari Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Murung Raya lima tahun terakhir yang memperlihatkan bahwa rasio antara jumlah penduduk usia sekolah terhadap ketersediaan gedung sekolah mengalami penurunan. Untuk gedung sekolah SD/MI pada tahun 2016 sebesar 79,4,18 namun di tahun 2018 menjadi 75,5; untuk gedung SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 129,6 namun di tahun 2017 menjadi 107,5 sedangkan untuk gedung SMA/Aliyah mengalami peningkatan dari yang semula pada tahun 2016 sebesar 149,0 pada



tahun 2017 meningkat menjadi 274,2. Hal yang harus diperhatikan adalah ketersediaan fasilitas pendidikan di kecamatan pemekaran yang masih harus ditingkatkan.

Berdasarkan banyaknya sekolah, murid dan guru TK/ sederajat menurut Kecamatan dan status sekolah, jumlah sekolah didominasi sekolah swasta dengan perbandingan 1 sekolah Negeri berbanding 166 sekolah swasta; 39 orang murid pada sekolah negeri berbanding dengan 779 murid sekolah swasta; dan 2 orang guru negeri berbanding 433 guru swasta. Adapun jumlah guru untuk SD/MI cukup berimbang dengan jumlah murid usia sekolah di mana pada tahun 2018, untuk 1 (satu) orang guru dapat mengajar hingga 12 penduduk usia sekolah. Sedangkan untuk sekolah SLTP/MTs, 1 (satu) orang guru dapat mengajar sampai 10 murid usia sekolah, untuk SMP/MTs satu orang guru dapat mengajar hingga 9 murid, dan untuk tingkat SMA/Aliyah 1 orang guru dapat mengajar hingga 13 orang murid. Meskipun jumlah ketersediaan guru sudah bisa dikatakan ideal menurut standar Kemendikbud di mana rasio guru yang memadai adalah 1:25 terhadap muridnya; namun dari sisi kualitas guru masih perlu untuk terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan globalisasi sehingga guru memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai bagi anak didiknya.

Jika dilihat dari angka melek huruf di Kabupaten Murung Raya, rasio angka melek huruf masih didominasi oleh laki-laki di mana pada tahun 2016 Angka Melek Huruf penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yakni 99,11 persen (laki-laki) dan 98,28 persen (perempuan). Angka ini merupakan capaian yang sangat bagus di tengah kondisi geografis wilayah Murung Raya yang sebagian besar wilayahnya masih tergolong sulit dalam hal aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan. Namun angka tersebut mutlak harus ditingkatkan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengenal baca tulis di tengah era globalisasi ini serta proses menuju Murung Raya Emas 2030 mendatang.

Keberhasilan pendidikan juga sangat bergantung pada antusias keikutsertaan penduduk dalam bersekolah yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka partisipasi Murni (APM). Tingkat partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kelompok umur lain, yakni mencapai



angka 13.722 penduduk. Namun semakin bertambahnya usia tampaknya semakin kecil partisipasi penduduk untuk bersekolah yang terlihat dari semakin rendahnya nilai APS dan APM. Rata-rata lama sekolah di Murung Raya juga terlihat masih rendah, hanya sekitar 7,37 tahun pada 2017 yang berarti bahwa secara rata-rata penduduk Murung Raya hanya menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkat SMP kelas 1. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI di mana APtS SD/MI pada tahun 2017 sebanyak 162 siswa, naik dari angka 120 siswa pada 2015. Gambaran umum pendidikan di Murung Raya ini menunjukkan pada satu sisi Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan namun di sisi lain masih terlihat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenyam pendidikan dan keterampilan yang tinggi sebagai modal dasar dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

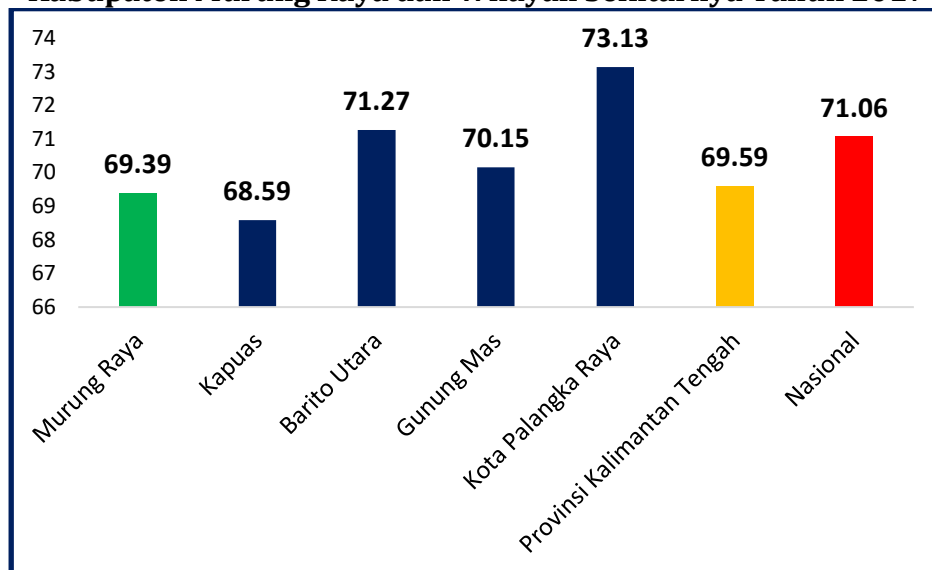
Dari beberapa aspek di atas, berbagai upaya dilakukan agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, sehingga generasi muda mampu menghadapi tantangan global. Pendidikan masyarakat tidak hanya usia sekolah (PAUD 0- 6 tahun, SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, maupun SMA/SMK 16-18 tahun), namun termasuk mereka yang mengikuti pendidikan non formal, kelompok pemuda, cabang olahraga, maupun kelompok masyarakat lainnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemuda adalah warga yang berusia 16-30 tahun, tentu menjadi perhatian yang sama.

Kunci utama berikutnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tercipta sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani adalah melalui pembangunan di bidang kesehatan. Keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh penyedia jasa kesehatan dan masyarakat sebagai objek kesehatan. Namun demikian, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang sarana prasarana di fasilitas kesehatan semata, akan tetapi akses pelayanan kesehatan juga termasuk segi pembiayaan.

Permasalahan pembangunan kesehatan Murung Raya secara eksplisit terlihat dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH). Terlihat masih rendahnya AHH Murung Raya dengan capaian harapan hidup

selama 69,39 tahun. Angka ini masih berada di bawah angka provinsi Kalimantan Tengah dan angka Nasional yang masing-masing memiliki AHH selama 69,59 tahun dan 71,06 tahun.

Gambar 4.4
Perbandingan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017



Sumber: BPS RI, 2018

Fasilitas kesehatan yang tersedia bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya hingga Tahun 2016, berupa rumah sakit sebanyak 1 buah, yang terdapat di Ibu Kota Kabupaten (Puruk Cahu); Puskesmas sebanyak 15 unit tersebar di semua kecamatan; Puskesmas pembantu sebanyak 109 unit; Posyandu sebanyak 153 unit; dan polindes sebanyak 3 unit. Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2017 adalah 0,0086 artinya satu rumah sakit melayani 180.000 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Murung Raya dengan penduduk sebesar 115.604 jiwa dengan 1 rumah sakit masih dapat menampung masyarakat Kabupaten Murung Raya, namun perlu ada tambahan rumah sakit seiring meningkatnya penduduk Kabupaten Murung Raya.

Sumber daya kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat, bidan sampai tenaga administrasi, epidemiolog, kesehatan lingkungan dan tenaga penyuluh kesehatan adalah ujung tombak sukses tidaknya pembangunan kesehatan. Dari data tercermin keberadaan yang belum mencukupi dalam hal jumlah maupun kompetensinya. Jumlah dokter yang ada di Kabupaten Murung Raya diprediksi tidak akan memenuhi kebutuhan berdasarkan target dari Kementerian Kesehatan di mana periode tahun 2010-2012 jumlah dokter



mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2018 mencapai 0,5. Walaupun jumlah dokter mengalami peningkatan, status rasio kesehatan cenderung mengalami penurunan hingga menjadi 0,252 pada Tahun 2018. Selain tenaga kesehatan terdidik, layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Murung Raya juga didukung oleh tenaga dukun bayi. Di tahun 2017, jumlah dukun bayi sebanyak 304 orang yang kesemuanya tidak terlatih dengan benar. Pelatihan terhadap dukun bayi tidak terlatih harus dilakukan untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi serta mengurangi kematian ibu dan anak. Peningkatan jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Murung Raya yang tidak memenuhi target Kementerian Kesehatan menjadikan kesehatan sebagai salah satu isu penting dalam pembangunan Kabupaten Murung Raya lima tahun ke depan.

Dari sisi masyarakat sebagai pelaku utama kesehatan belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah orang untuk menjadi sakit (paradigma sakit). Pengetahuan yang terbatas itu ketika berhadapan dengan permasalahan penyakit, baik degeneratif maupun infeksi, tidak segera mengetahui tanda maupun cara pencegahannya. Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Murung Raya adalah Infeksi Akut pada Saluran Pernapasan Akut yang mencapai angka 13.309 pada tahun 2016. Ini dapat terkait dengan kualitas udara menjadi semakin tidak baik akibat meningkatnya aktivitas pertambangan dan kebakaran hutan.

Pengetahuan yang kurang memang menjadi lingkaran setan ketika disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang dialami. Belum optimalnya ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator rendahnya ketahanan keluarga antara lain tingginya jumlah persalinan remaja dan tingginya jumlah perceraian. Ketahanan keluarga yang belum optimal antara lain disebabkan oleh komunikasi yang rendah dalam keluarga sehingga kedekatan antara anggota keluarga semakin renggang. Belum optimalnya advokasi dan KIE serta penguatan kelembagaan program kependudukan, keluarga berencana dan ketahanan keluarga juga menjadi penyebab belum optimalnya ketahanan keluarga.

Dari berbagai penjabaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya di atas, maka rincian rumusan permasalahan pembangunan “Kualitas SDM di Murung Raya masih rendah” ditabelkan sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Rumusan Permasalahan
Kualitas SDM di Murung Raya Masih Rendah

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan pendidikan yang menjangkau ke pelosok	Sarana dan prasarana pendidikan khususnya di pedalaman belum memadai
	Masih rendahnya pemerataan dan kualitas tenaga pendidik
	Bantuan sosial kependidikan belum optimal dilakukan
	Minimnya kesadaran masyarakat dalam membaca
	Belum adanya fasilitas jenjang pendidikan tinggi
Belum optimalnya pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke wilayah perdesaan	Fasilitas sarana dan prasarana kesehatan masih terpusat di kecamatan
	Terindikasinya kasus <i>stunting</i> pada beberapa daerah di Murung Raya
	Ketersediaan tenaga medis dan paramedis masih rendah, khususnya di daerah terpencil
	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan maupun pengobatan secara medis
	Mutu pelayanan kesehatan masyarakat masih belum optimal

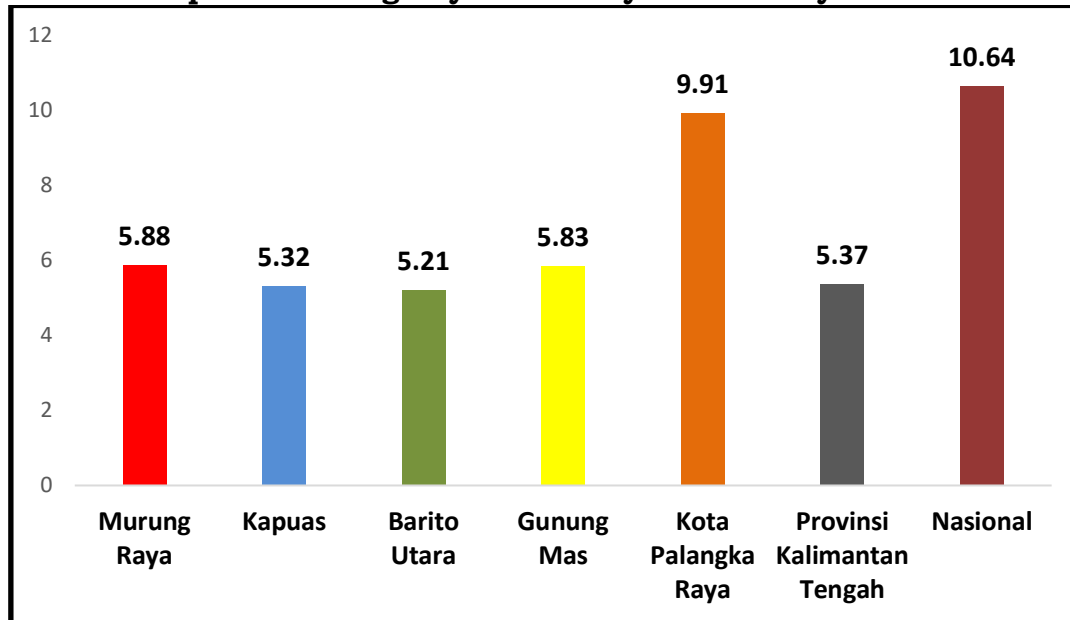
4.1.2 Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa

Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya daerah yang masih memiliki *remote area* yang sulit untuk diwujudkan pemerataan pembangunannya. Sebagai daerah yang memiliki cukup banyak wilayah pelosok, Murung Raya memiliki perhatian dalam pencapaian dan pemerataan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan desa dan perekonomian kerakyatan yang berkualitas.

Secara terstruktur, tingkat kemiskinan Kabupaten Murung Raya cukup rendah jika dibandingkan dengan level nasional, namun memiliki kesamaan jika dibandingkan dengan angka Provinsi Kalimantan Tengah meskipun tingkat kemiskinan Murung Raya berada di atas 0,51 poin angka provinsi. Jika dilihat secara series seperti yang sudah dipaparkan pada bahasan sebelumnya, tingkat kemiskinan Murung Raya sempat

terjadi gejolak dimana pada tahun 2012 angka kemiskinan sebesar 5,78 persen dan meningkat menjadi 6,44 persen di tahun berikutnya. Selain itu penurunan yang terjadi hingga 2014 sebesar 6,24 persen juga mengalami peningkatan kembali di tahun 2015 menjadi 6,57 persen. Fluktuasi ini harus diperhatikan pemerintah demi menjaga kestabilan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan.

Gambar 4.5
Perbandingan Angka Kemiskinan
Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017



Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2018

Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, pendapatan menjadi salah satu sorotan dalam penentuan kesejahteraan suatu keluarga. Pendapatan masyarakat secara umum berbanding lurus dengan lapangan usaha maupaun kualitas tenaga kerjanya. Di Kabupaten Murung Raya, sebagian besar masyarakat bekerja di lapangan usaha pertanian yang mencapai 20.820 orang. Selain itu, sebagian besar penduduk bekerja juga hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena minimnya pendidikan tenaga kerja akan mengakibatkan produktivitas kinerja tidak maksimal. Selain itu, pendapatan masyarakat juga tidak secara signifikan terdongkrak mengingat kondisi tenaga kerja belum memiliki standar dan keterampilan yang layak.

Tabel 4.2.
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Status Ketenagakerjaan
Kabupaten Murung Raya, Tahun 2017

Pendidikan Tertinggi	Status		
	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
Tidak/Belum Tamat SD	9.572	342	9.914
Sekolah Dasar	17.732	114	17.846



Sekolah Menengah Pertama	10.340	221	10.561
Sekolah Menengah Atas	8.629	408	9.037
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	1.036	227	1.263
DI/II/III/Akademi/Universitas	5.140	188	5.328
Jumlah	52.449	1.500	53.949

Sumber: BPS Murung Raya, 2018

Pemberdayaan desa di Murung Raya mengalami berbagai hambatan khususnya dikarenakan wilayah geografis yang tidak mendukung. Oleh karena itu, timbul berbagai permasalahan dalam pengembangan kualitas perdesaan seperti rendahnya tingkat pengawasan penggunaan dana desa, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, hingga belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan perdesaan. Hal tersebut menyebabkan pembangunan daerah sebagian besar masih berfokus pada wilayah-wilayah perkotaan seperti pusat kecamatan yang notabene lebih mudah dijangkau.

Dari berbagai penjabaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya di atas, maka rincian rumusan permasalahan pembangunan “Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa” ditabelkan sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Rumusan Permasalahan
Belum Optimalnya Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan
Masyarakat dan Pemberdayaan Desa

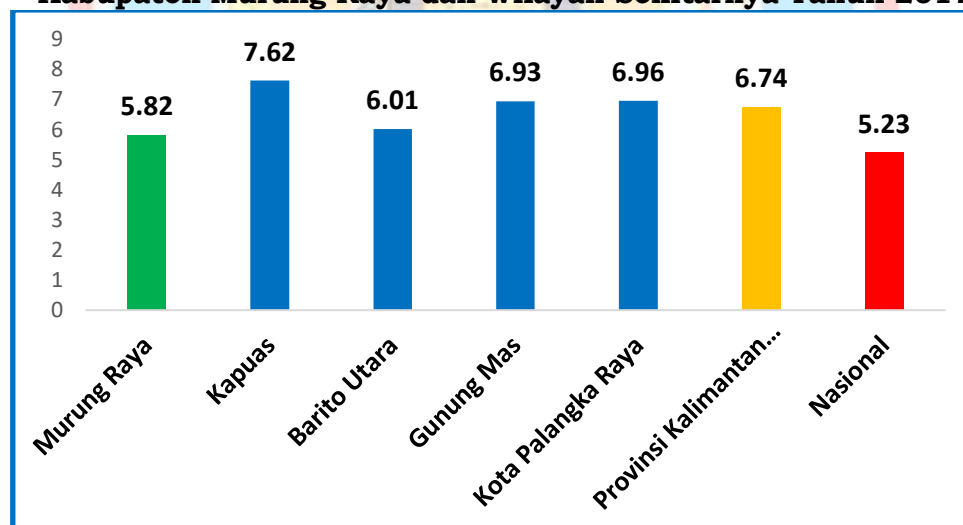
Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya penanganan penyandang masalah sosial	Belum optimalnya penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	Belum optimalnya penyaluran bantuan sosial
Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingginya kemiskinan budaya, khususnya di daerah pelosok
	Masih rendahnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja (maupun angkatan kerja)
	Tidak meratanya distribusi tenaga kerja antar sektor dan antar wilayah, serta berkurangnya lapangan kerja formal di perkotaan dan di perdesaan
Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pembangunan perdesaan	Terbatasnya kesempatan kerja sehingga penyerapan tenaga kerja tidak optimal
	Minimnya pengawasan penggunaan dana desa
	Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, khususnya daerah perdesaan
	Minimnya sarana dan prasarana pendukung pembangunan perdesaan

4.1.3 Rendahnya kemandirian perekonomian daerah

Perekonomian merupakan tulang punggung bagi terlaksananya pembangunan daerah khususnya dari segi pembiayaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pergerakan perekonomian diupayakan stabil dan memiliki *trend* meningkat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup. Indikator makro yang merepresentasikan permasalahan perekonomian Kabupaten Murung Raya adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Murung Raya dalam lima tahun terakhir memiliki pola melambat dan terlihat jika dibandingkan dengan beberapa wilayah sekitar termasuk regional Kalimantan Tengah, maka pertumbuhan ekonomi Murung Raya berada pada posisi terbawah dengan capaian 5,82 persen. Meskipun secara nasional masih lebih baik, perlambatan perekonomian ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan sehingga perlu adanya perhatian dan tindak lanjut khusus dalam mempertahankan kestabilan perekonomian daerah.

Gambar 4.6
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017



Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2018

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Murung Raya selalu memiliki angka positif di setiap tahunnya, namun yang perlu diperhatikan adalah adanya *trend* perlambatan ekonomi yang kemungkinan disebabkan karena bertumpunya perekonomian daerah terhadap sumber daya alam tak terbarui khususnya dalam sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor



terbesar dalam perekonomian Murung Raya walaupun tahun 2014 menyumbang 52,83 persen dan mengalami penurunan jika dibanding tahun 2017 yang menyumbang 49,54 persen, terhadap total perekonomian Murung Raya. Seiring dengan Harga batubara acuan yang menurun sejak tahun 2011, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Murung Raya juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, untuk sektor pertambangan dan penggalan diperlukan kajian lebih jauh terhadap kesejahteraan masyarakat Murung Raya mengenai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu diperhatikan juga apakah kerusakan lingkungan yang diakibatkan dengan adanya aktivitas pertambangan sebanding dengan hasil yang diperoleh dan juga perlu diperhatikan kelestarian lingkungan bagi daerah yang digunakan untuk aktivitas pertambangan.

Pengembangan perekonomian kerakyatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat meningkat serta mengurangi kemiskinan. Koperasi dan UMKM mencakup seluruh lapangan usaha dan tersebar di seluruh kecamatan dan desa, bahkan desa terpencil.

Periode 2016 hingga 2017 jumlah koperasi di Kabupaten Murung Raya menurun Pada tahun 2017 jumlah koperasi tercatat sebanyak 96 unit dan menurun dibandingkan pada Tahun 2016 sebanyak 107 unit. Dari total 107 koperasi pada tahun 2016 tersebut, sebanyak 23 koperasi aktif dan 84 unit merupakan koperasi tidak aktif. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 22 koperasi aktif dan 74 unit merupakan koperasi tidak aktif. Meskipun jumlah koperasi tidak aktif berada dibawah rata-rata nasional, namun kenyataan ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan dan pembenahan koperasi di daerah.

Adapun perkembangan UMKM di Kabupaten Murung Raya periode 2013-2017, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 2.138 unit dan Tahun 2017 menjadi 2.620 unit, atau meningkat selama 2 tahun. Meskipun demikian, melihat pada kondisi wilayah Murung Raya yang mayoritas di pedalaman, untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata maka sangat penting untuk dilakukan inovasi terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah secara modern.

Persentase jumlah hotel merupakan salah satu indikator utama dalam melihat perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Murung Raya. Jumlah penginapan/hotel yang ada di Kabupaten Murung Raya mengalami penurunan yang semula pada tahun 2015 berjumlah 29 unit pada tahun 2016 berkurang menjadi 23 unit yang mana penurunan terbanyak ada di Kecamatan Murung yang disebabkan terjadinya kebakaran. Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Murung Raya pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2015 jumlah wisatawan 17.362 turun sebesar 4.275 menjadi 13.087 wisatawan. Adapun wisatawan asing yang ke Murung Raya, jumlahnya hanya sedikit yakni hanya 10 wisman pada tahun 2016. Jelas kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan terobosan baru untuk memajukan sektor pariwisata di Murung Raya dengan segala potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terlihat bahwa pergerakan perekonomian Murung Raya belum stabil dan optimal. Oleh karena itu, secara rinci masih terdapat kendala yang harus segera dituntaskan terkait dengan permasalahan pokok “**Rendahnya kemandirian perekonomian daerah**” yang hadir karena dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.4.
Rumusan Permasalahan

Rendahnya kemandirian perekonomian daerah

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan UMKM	Rendahnya dukungan dari sisi permodalan dalam pengelolaan UMKM
	Upaya peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan UKM masih rendah
	Minimnya keinginan masyarakat untuk berwirausaha
Rendahnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian	Belum optimalnya pembinaan/ pendampingan pemerintah kepada petani
	Minimnya penggunaan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktivitas
	Rendahnya dukungan sarana prasarana dalam pengembangan komoditas pertanian
Rendahnya nilai investasi di daerah	Minimnya perencanaan pengembangan iklim dan promosi investasi
	Kurangnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah



Permasalahan	Akar Masalah
	Belum optimalnya sistem pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan
	Belum optimalnya layanan perizinan dan non perizinan
Belum optimalnya pengelolaan pariwisata	Rendahnya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan
	Rendahnya pengelolaan destinasi wisata khususnya pariwisata potensial seperti agrowisata pertanian
	Minimnya kualitas penunjang pariwisata seperti akomodasi dan penyediaan makan dan minum
	Rendahnya intensitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata unggulan
	Rendahnya pengembangan seni dan budaya kekhasan daerah

4.1.4 Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) merupakan bentuk ideal perwujudan kinerja yang harus diraih oleh setiap pemerintahan daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. Dalam rangka merealisasikan *good government* tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya harus memperhatikan dan menindaklanjuti prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan, yakni: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*, dalam realisasinya untuk memastikan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dapat berjalan pada koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Beberapa hal penyebab belum efektifnya kinerja pemerintah dapat dilihat dari beberapa kondisi yang masih ada, diantaranya: belum optimalnya kualitas perencanaan diakibatkan oleh masih belum terpenuhinya kuantitas maupun kualitas SDM perencana pada semua OPD; pedoman teknis perencanaan dalam hal-hal tertentu belum dirumuskan secara jelas, diantaranya penentuan pagu anggaran OPD dan penentuan bobot serta progres capaian fisik kinerja, sehingga menimbulkan adanya multi tafsir dan kurangnya akurasi data kinerja; serta belum tepatnya sasaran perencanaan untuk mampu menjawab permasalahan daerah. Kesemua permasalahan dalam fungsi perencanaan di atas berimplikasi pada belum optimalnya kualitas perencanaan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang belum optimal.

Permasalahan lain yang juga menjadi salah satu perhatian pemerintah adalah terkait administrasi keuangan yang masih memiliki cukup banyak temuan administrasi dalam pemeriksaan administrasi penggunaan keuangan daerah. Sedangkan permasalahan yang lebih umum adalah dalam mengembangkan kapasitas ASN daerah dimana masih cukup banyak ASN yang belum memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari segi masyarakat dalam menjalankan tata norma pemerintahan, maka permasalahan dapat dijabarkan dalam rendahnya ketaatan masyarakat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga belum tercipta masyarakat yang beradab, harmonis, serasi, nyaman dan sejahtera. Angka kriminalitas masih cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir sehingga perlu dioptimalkan penegakan peraturan perundangan demi terjaganya keamanan daerah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya kasus kejahatan maka perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat bahwa kejahatan bukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terlihat bahwa meskipun kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Murung Raya cenderung naik setiap tahunnya, namun masih terdapat kendala yang harus segera dituntaskan terkait dengan permasalahan pokok **“Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”** yang hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dengan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan

Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Permasalahan	Akar Masalah
Minimnya koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan satu dengan yang lainnya	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pada pembangunan
	Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan satu dengan yang lain
	Belum optimalnya kajian dan penelitian dalam pengembangan perencanaan pembangunan
Tingginya tingkat temuan kesalahan administrasi dalam penggunaan keuangan daerah	Minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah
	Belum adanya sistem keuangan yang tertata dengan baik
	Minimnya penggunaan Teknologi Informasi dalam mempermudah pengelolaan keuangan dan aset daerah
Rendahnya upaya peningkatan kompetensi	Ketidaksiuaian kompetensi dengan tugas dan fungsi ASN



Permasalahan	Akar Masalah
ASN dalam struktur organisasi pemerintahan	Rendahnya kualitas dan kuantitas ASN Murung Raya
Rendahnya penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rendahnya sarana dan prasarana dalam penegakan hukum perda
	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan perundangan yang berlaku
	Minimnya pelayanan dalam mengantisipasi pelanggaran peraturan termasuk dalam kekerasan rumah tangga
	Belum optimalnya antisipasi/pencegahan tindak kriminalitas

4.1.5 Rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah

Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten yang berada di pedalaman Pulau Kalimantan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito dan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilintasi garis khatulistiwa, yang tepatnya berasi di wilayah Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung. Melihat pada topografi Murung Raya yang merupakan daerah dataran berbukit-bukit, pegunungan lipatan dan patahan, serta posisinya yang berada di pedalaman Kalimantan menjadikan aksesibilitas ke Kabupaten Murung Raya cukup sulit. Sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, pusat perekonomian dan lain sebagainya belum tersebar merata hingga pelosok Murung Raya. Beberapa wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Murung Raya masih memiliki akses yang sulit, beberapa desa ada yang tidak dapat ditembus dengan jalur darat, sehingga harus menggunakan sarana transportasi sungai. Di antara wilayah dengan akses jalur sungai tersebut belum semuanya memiliki jalur transportasi regular, sehingga harus carter kendaraan.

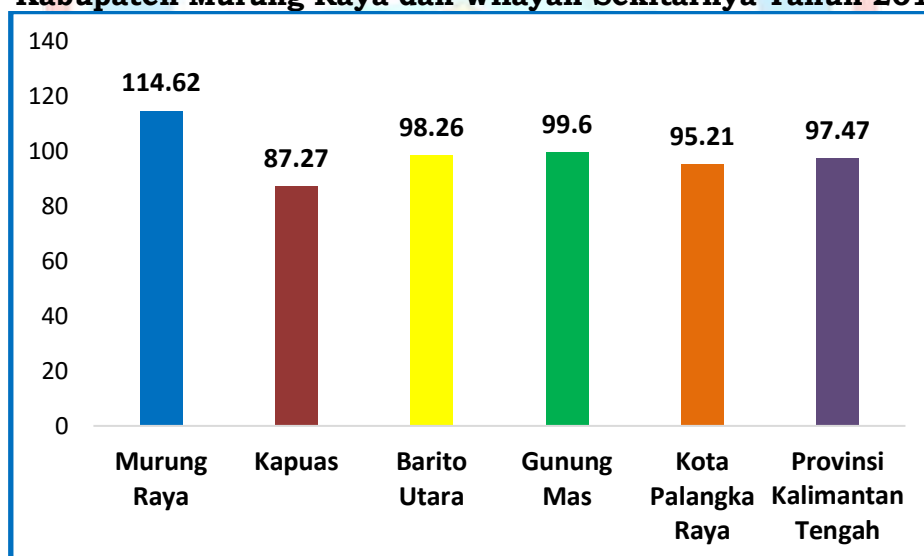
Pembenahan infrastruktur jalan hingga sekarang masih selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Total keseluruhan panjang jalan yang melintasi wilayah Murung Raya adalah 919,55 Km. Pada Tahun 2015 sepanjang 44,09 Km telah dibeton dan 112,91 Km telah diaspal, sisanya masih berupa jalan kerikil sepanjang 61,15 Km dan jalan tanah sepanjang 700,41 km. Sepanjang 46,67 km dalam keadaan baik dan sepanjang 720,94 km dalam keadaan rusak berat.

Salah satu indikator dalam melihat bagaimana infrastruktur pembangunan daerah khususnya dalam hal aksesibilitas dapat dilihat

dari indikator Indeks Kemahalan Konstruksi yang merupakan suatu indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan barang konstruksi sehingga mampu melihat bagaimana kondisi geografisnya, distribusi perdagangan, hingga fasilitas pemasaran wilayah. Indeks ini juga merupakan suatu indikator penentu dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu wilayah.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Murung Raya jika dibandingkan angka kabupaten/kota sekitar dan regional provinsi jelas berada jauh di atas. Hal ini mengindikasikan distribusi barang yang cukup terhambat sehingga harga barang-barang konstruksi berada jauh di atas 100 terlebih lagi di atas rata-rata angka Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 4.7
Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi
Kabupaten Murung Raya dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2017



Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2018

Begitu pula dengan akses masyarakat terhadap air bersih, hanya sebanyak 69,90 persen rumah tangga yang sudah menikmati air minum bersih pada tahun 2017. Minimnya sosialisasi terkait pencegahan kesehatan khususnya dalam penggunaan air minum hingga belum optimalnya distribusi dan pemerataan air bersih menjadi kendala yang cukup berat dalam meningkatkan penggunaan air minum bersih oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terlihat bahwa meskipun aksesibilitas, konektivitas dan infrastruktur Kabupaten Murung Raya cenderung naik setiap tahunnya, namun masih terdapat kendala yang harus segera dituntaskan terkait dengan permasalahan

pokok “**Rendahnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah**” yang hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dengan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.6.
Rumusan Permasalahan
Rendahnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur
Pembangunan Daerah

Permasalahan	Akar Masalah
Rendahnya kuantitas dan kualitas jalan antar wilayah	Belum optimalnya penganggaran dalam peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah
	Tingginya intensitas penggunaan jalan diluar kapasitas
Belum optimalnya pengelolaan sanitasi pemukiman	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi sehat
Minimnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan (Puruk Cahu)	Rendahnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana umum masyarakat
Belum optimalnya distribusi air bersih	Belum meratanya penyediaan sumber air baku

4.1.6 Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup

Segala potensi sumber daya alam di Kabupaten Murung Raya sejatinya harus dimanfaatkan dengan bijak dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam sering kali kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menunjang semua kegiatan manusia menjadi sangat penting untuk diperhatikan, agar dapat memenuhi semua kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Adanya keterbatasan sumber daya alam serta potensi penurunannya baik secara kuantitas maupun kualitas, maka pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan keberlanjutan pemanfaatannya untuk menunjang kehidupan yang

keberlanjutan dalam pembangunan serta memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup hingga masa yang akan datang. Oleh karena itu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya (daya dukung lingkungan hidup) serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (daya tampung lingkungan hidup) penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Penentuan status daya dukung lingkungan terhadap pengelolaan serta penggunaan sumberdaya air dilakukan dengan membandingkan total ketersediaan air dan total kebutuhan air. Dari hasil perhitungan daya dukung dengan menggunakan konsep perhitungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, kebutuhan air di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 adalah sebesar 184.968.417 m³/tahun. Berdasarkan perhitungan proyeksi selama 5 tahun kedepan (2017 - 2023) merupakan prediksi yang diketahui kebutuhan airnya terus meningkat. Jika diperkirakan ketersediaan air (SA) tetap dan tidak bertambah yaitu sebesar 30.815.105.169 m³/tahun dikarenakan dalam penggunaan lahan untuk tahun kedepannya (2017 - 2023) tidak diketahui, jadi ketersediaan air pada tahun 2017 dijadikan acuan untuk memprediksi tahun (2017 - 2023). Apabila ketersediaan air diasumsikan akan tetap dan tidak bertambah maka dapat dilihat status daya dukung air surplus (kelebihan air) baik untuk kebutuhan domestik maupun kebutuhan pangan dan lainnya yakni sebesar 30.607.284.792 m³/tahun.

Secara rinci ketersediaan, kebutuhan dan status daya dukung air disajikan pada pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Status Daya Dukung Air Setiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya

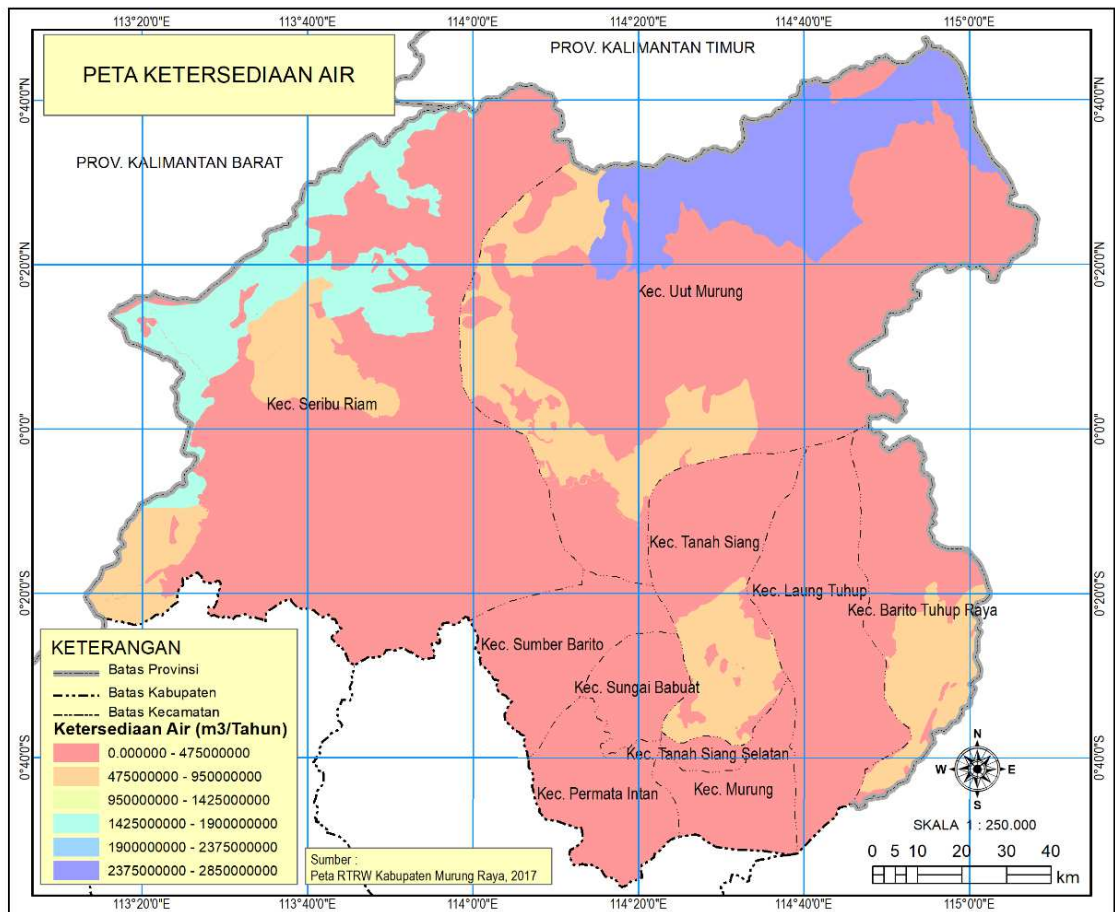
Kecamatan	Jumlah Penduduk		Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)		Status Daya Dukung Air (M ³ /tahun)	
	2017	5023		2017	2023	2017	2023
Barito Tuhup Raya	4.803	5.202	1.857.111.719	7.684.800	8.323.200	1.849.426.919	1.848.788.519
Laung Tuhup	21.108	22.852	2.193.967.649	33.772.800	36.563.200	2.160.194.849	2.157.404.449



Kecamatan	Jumlah Penduduk		Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /Tahun)		Status Daya Dukung Air (M ³ /tahun)	
	2017	5023		2017	2023	2017	2023
Murung	38.934	46.376	819.255.960	62.294.400	74.201.600	756.961.560	745.054.360
Permata Intan	12.362	13.383	1.050.117.780	19.779.200	21.412.800	1.030.338.580	1.028.704.980
Seribu Riam	3.780	3.897	10.553.110.890	6.048.000	6.235.200	10.547.062.890	10.546.875.690
Sumber Barito	8.225	8.483	1.149.600.080	13.160.000	13.572.800	1.136.440.080	1.136.027.280
Sungai Babuat	2.525	2.735	561.621.604	4.040.000	4.376.000	557.581.604	557.245.604
Tanah Siang	15.271	17.438	1.937.793.512	24.433.600	27.900.800	1.913.359.912	1.909.892.712
Tanah Siang Selatan	5.901	6.742	148.208.131	9.441.600	10.787.200	138.766.531	137.420.931
Uut Murung	2.695	2.781	10.544.317.845	4.312.000	4.449.600	10.540.005.845	10.539.868.245
Total	117.621	134.912	30.815.105.169	184.968.417	207.824.423	30.630.140.786	30.607.284.792

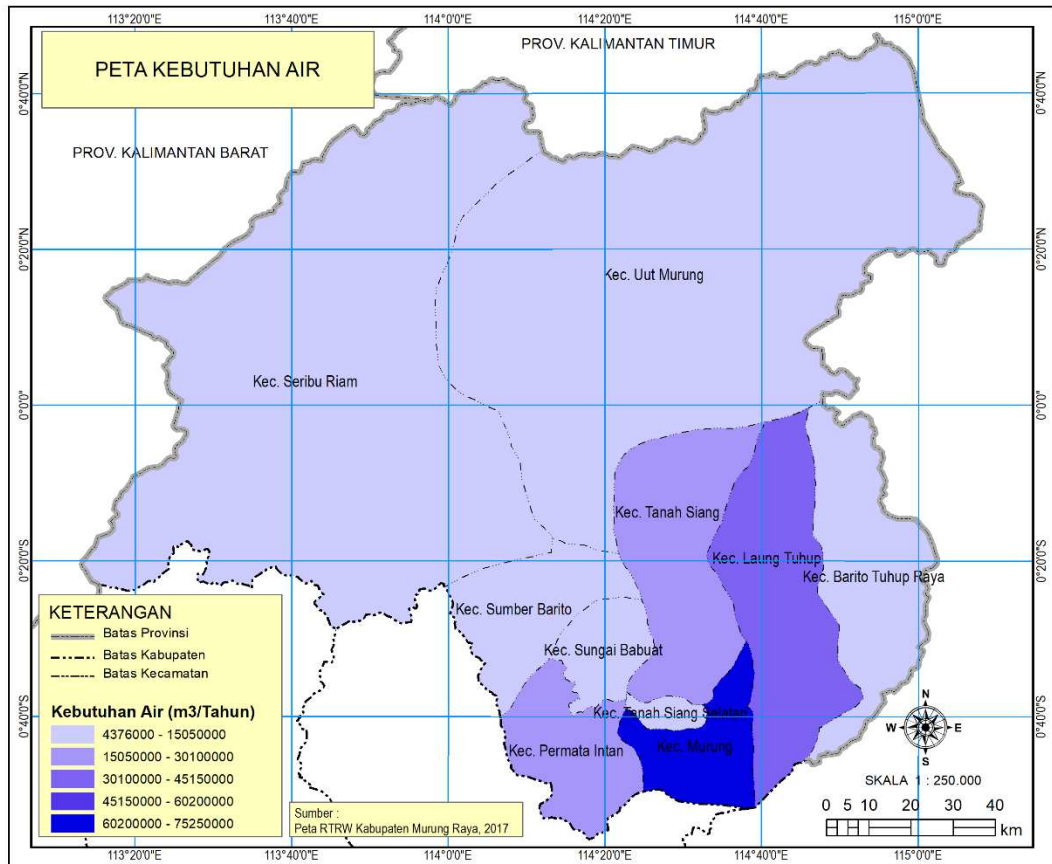
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023

Gambar 4.8 Ketersediaan Air di Kabupaten Murung Raya



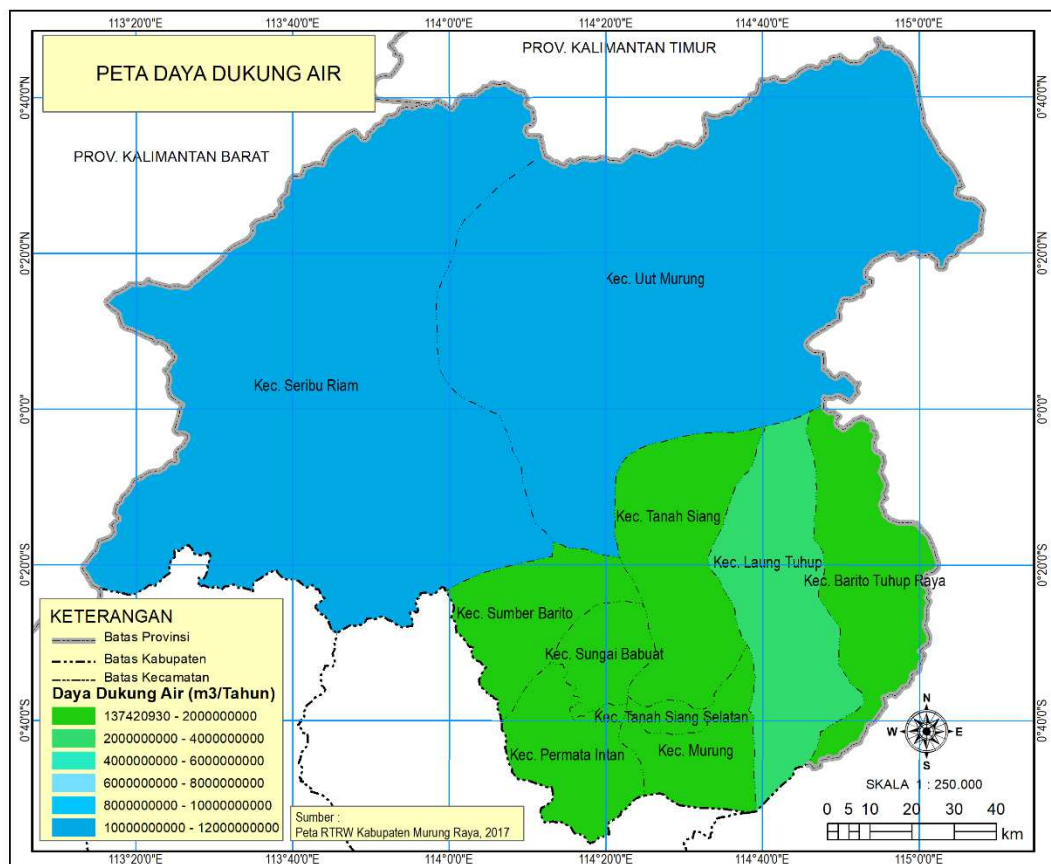
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Gambar 4.9
Kebutuhan Air di Kabupaten Murung Raya



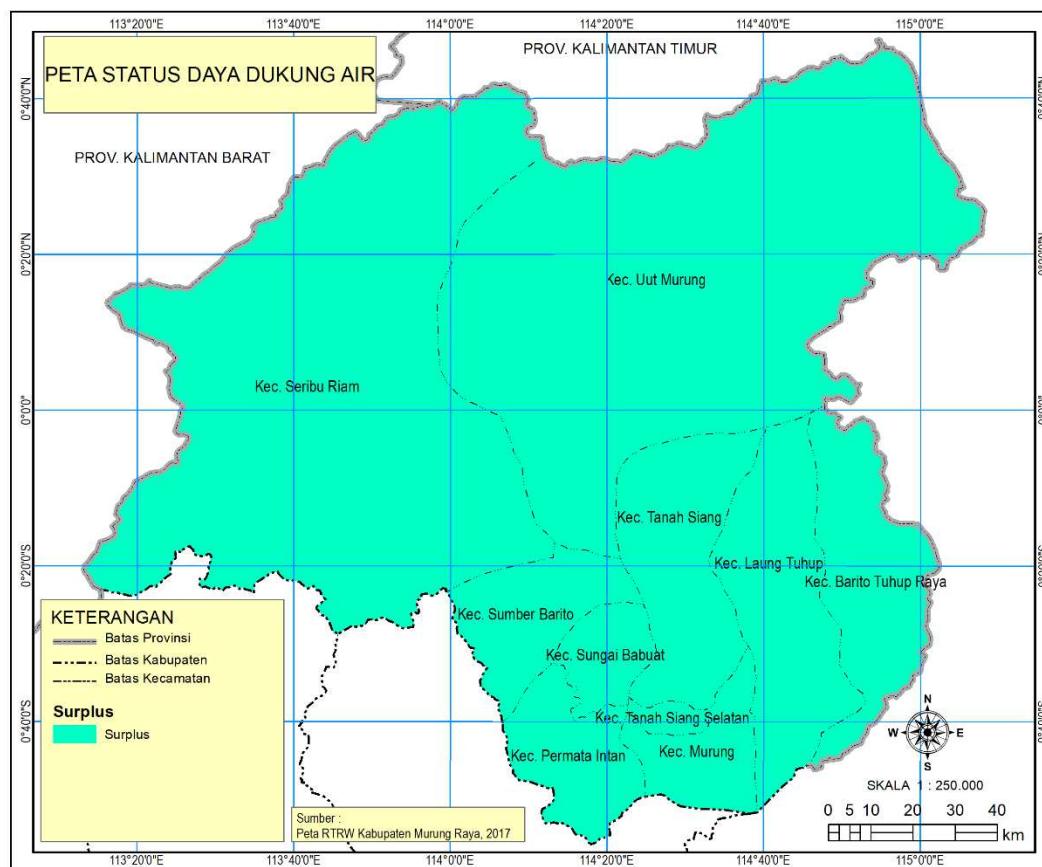
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Gambar 4.10
Daya Dukung Air di Kabupaten Murung Raya



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Gambar 4.11
Status Daya Dukung Air di Kabupaten Murung Raya



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Untuk menjamin ketersediaan air pada setiap Kecamatan di Kabupaten Murung Raya tetap mencukupi untuk kebutuhan hidup layak penduduk maka masyarakat setempat agar mampu mempertahankan fungsi lahan menurut aspek konservasi dan mencegah degradasi maka langkah yang dilakukan oleh manajemen pertanian dan perkebunan adalah dengan mempertahankan wilayah lindung/konservasi sebagai penampung alami. Hal ini sesuai dengan penelitian Rusmayadi (2011) bahwa dengan tetap mempertahankan wilayah konservasi sebagai penampungan alami. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan sekitar. Oleh karena itu, potensi sumber daya air yang tersedia perlu direncanakan dengan baik pemanfaatan dan konservasinya. Selain itu, apabila permasalahan ketersediaan air tidak disikapi dengan pemanfaatan air yang lebih proporsional, maka dikhawatirkan akan terjadinya krisis air kedepannya.

Terjadinya degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya terkait erat dengan permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang dialami daerah. Permasalahan ini disebabkan oleh dua faktor



utama, yaitu faktor *endowment* daerah dan manusia. Faktor *endowment* daerah adalah faktor-faktor yang secara *inherent (given)* dimiliki daerah yang mana daerah tidak sepenuhnya mampu mengendalikan. Faktor *endowment* daerah tersebut antara lain letak geografis Kabupaten Murung Raya yang dekat Pegunungan Schwaner dan Muller. Geomorfologi Kabupaten Murung Raya tersebut pada banyak sisi memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah. Kemudian, kondisi daerah Kabupaten Murung Raya yang dilewati beberapa cabang atau anak sungai, juga menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan banjir di daerah aliran sungai yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan Pemerintah Kabupaten Murung Raya karena sebagian daerah penyangga berada di luar kewenangan Kabupaten Murung Raya, yaitu di Kabupaten Barito Utara.

Sementara itu, permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia adalah terkait dengan perilaku 'masyarakat' yang tidak memerhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, misalnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, pendirian rumah hunian di sepanjang daerah aliran sungai, pendirian bangunan liar yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Murung Raya, antara lain masih tingginya produksi sampah yang di buang ke TPA di sebabkan masih belum terbentuknya tempat pemilahan sampah terpadu atau belum adanya TPS 3R. Masih kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah ke TPS dan kurangnya kesadaran dalam pemilahan sampah organik dan anorganik juga menjadi penyebab dari tingginya produksi sampah di Murung Raya. Teknologi yang digunakan di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di jalan Cilik Riwut Tahujan Ontu masih menggunakan metode *open dumping*. Selain itu, masalah sampah lainnya adalah masih kurang optimalnya kegiatan bank sampah/pengepul sampah dari swasta maupun masyarakat serta Masih kurangnya sarana perasana pendukung dalam pengelolaan sampah.

Kondisi wilayah permukiman di Kabupaten Murung Raya pada umumnya membentuk pola linier yang diperlihatkan oleh suatu permukiman yang berkelompok dengan pola perkembangannya berbentuk memanjang di sepanjang tepian ORS Barito. Kondisi demikian

kurang menguntungkan karena masyarakat cenderung membuang sampah ke sungai sehingga akan menimbulkan masalah pencemaran sungai. Peningkatan aktivitas bidang swasta di bidang pertambangan dan kehutanan di Kabupaten Murung Raya juga mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan. Penurunan kualitas tersebut meliputi aspek fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terlihat bahwa masih terdapat kendala yang harus segera dituntaskan terkait dengan permasalahan pokok **“Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup”** yang hadir karena dipicu oleh beberapa masalah dengan akar masalah sebagai berikut.

Tabel 4.8.
Rumusan Permasalahan
Terjadinya Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan	Akar Masalah
Rendahnya pengelolaan kawasan hijau	Minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola lingkungan
	Belum optimalnya rehabilitasi lahan, khususnya pasca penambangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
	Minimnya sistem penanggulangan dan tanggap bencana
Belum optimalnya antisipasi pencemaran lingkungan hidup	Belum optimalnya pengawasan kawasan pertambangan dan penggalian
	Belum optimalnya penegakan perda perihal pencemaran lingkungan hidup

4.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dikelompokkan ke dalam isu internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah di masa datang dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang



belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, isu-isu strategis harus menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari isu dunia internasional, nasional, regional maupun lokal. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, peranan dunia internasional juga memiliki dampak yang signifikan dalam keberhasilan pembangunan. Sejumlah masalah dan isu yang bersifat eksternal yang berasal dari dunia internasional harus dideteksi sejak dini mengingat isu tersebut akan berpengaruh besar bagi pengembangan kesejahteraan di Kabupaten Murung Raya.

4.2.1.1 Sustainable Development Goals

SDG's sebagai keberlanjutan dari MDGs adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemerintah pusat telah berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RJPMN), menindaklanjuti konvergensi yang kuat antara SDGs, sembilan agenda prioritas presiden "Nawa Cita" dan RJPMN serta pengesahan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi tonggak utama untuk menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Dengan semangat yang sama dan komitmen yang seiring, Kabupaten Murung Raya akan menghubungkan berbagai target dan indikator SDGs dalam RPJMD Murung Raya Tahun 2018-2023.



Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan *governance*. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra-dan antarnegara.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan



dampaknya

15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Upaya pencapaian SDGs di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan SDGs antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

4.2.1.2 Global Megatrends

Berbagai lembaga *think-tank* dunia telah banyak melakukan kajian mengenai *global megatrends* yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bila suatu negara tidak dapat merespon hal tersebut. Berbagai tantangan dalam *megatrends* tersebut mencakup bonus demografi, mobilisasi penduduk, perdagangan internasional, kemunculan kelas menengah, persaingan sumber daya alam dan geostrategis dan revolusi industri 4.0. Isu-isu tersebut beserta dampaknya sangat penting untuk ditelaah agar Kabupaten Murung Raya dapat merespon dengan kebijakan yang tepat dalam merencanakan pembangunan.



Bonus demografi akan ditandai dengan semakin tingginya migrasi antar negara (*borderless society*) dan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Dalam 30 tahun ke depan, pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan melambat. Hal ini akan berdampak penyesuaian sektor produksi untuk menjawab kebutuhan hidup masyarakat dengan kesempatan hidup yang semakin Panjang. Terkait dengan mobilisasi penduduk, PBB memperkirakan sekitar 65 persen penduduk dunia akan tinggal di perkotaan dengan 95 persen pertambahannya terjadi ketika *emerging economies* pada tahun 2050. Konsekuensi dari hal tersebut adalah peranan perkotaan dalam pembangunan semakin penting, sebagai ruang bagi berkembangnya eksternalitas positif dari aglomerasi industri dan tenaga kerja terlatih.

Sementara itu, untuk urusan perdangan internasional, kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan dan investasi dunia. Namun dengan adanya *Trump effects* diperkirakan akan mendorong keseimbangan baru, termasuk dalam konsep peningkatan *global production network*. Antisipasi industri nasional terhadap dampak dari perubahan ini dapat diupayakan melalui penguatan kerja sama internasional serta perdagangan dan investasi dalam kawasan.

Isu lainnya yang saat juga tengah dihadapi oleh Indonesia adalah kemunculan kelas menengah di *emerging market economies* (EMEs) di kawasan Asia dan Amerika Latin. Secara ekonomi, kelas menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya pendapatan per kapita akan mendorong pengeluaran serta meningkatkan tabungan dan investasi. Indonesia memiliki penduduk yang tergolong *consuming class* pada 2015 adalah sebanyak 45 juta, dan akan terus meningkat sehingga pada 2045 mencapai 258 juta orang atau 80 persen dari penduduk Indonesia. Untuk itu, kemampuan menguasai pasar domestik sangat penting, dengan melihat industri apa yang diperlukan untuk 258 juta *consuming class* Indonesia.

Berlanjut pada isu *megatrends* berikutnya, persaingan memperebutkan SDA ke depan akan tetap tinggi seiring dengan bertambahnya penduduk dunia, meningkatnya kegiatan ekonomi, serta perubahan gaya hidup. Kondisi ini memberikan dampak pada pengembangan industri nasional diarahkan untuk menjaga dan



mengelola SDA dengan inovasi dan teknologi. Terkait dengan revolusi industri yang sudah masuk fase Industri 4.0, *internet of things* atau otomatisasi penerapan teknologi yang bertumpu pada internet dan pertukaran data (*big data*) akan menjadi tren manufaktur yang memungkinkan adanya proses yang lebih efisien dalam proses manufaktur (*smart factory*) dan pengelolaan *value chain*.

4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Beberapa negara di dunia bertumbuh pesat dalam satu dekade terakhir, termasuk Indonesia, berdasarkan peningkatan PDB. Namun, pertumbuhan tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan mempercepat habisnya sumber daya alam di Indonesia. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh energi fosil, industri ekstraktif, dan menghabiskan sumber daya alam dengan cepat, semakin membuat Indonesia rentan terhadap perubahan iklim dan kemiskinan. Tingkat kemiskinan telah berkurang banyak sejak tahun 2000, menjadi 11,3% pada tahun 2014. Namun penduduk yang berada di sekitar lingkungan hidup yang rusak menderita tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena kelompok miskin lebih rentan terhadap guncangan, termasuk guncangan lingkungan hidup, dan kurangnya ketahanan terhadap bencana alam yang semakin sering terjadi. Dampak sosial dan lingkungan hidup sangat berat; dari banjir di perkotaan, kebakaran hutan, sengketa lahan di pedesaan, hingga penangkapan ikan yang berlebihan dan rusaknya ekosistem pesisir.

Tanpa perubahan dalam waktu dekat, Indonesia berisiko mengikuti pertumbuhan yang tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan membatasi peluang dan mengakibatkan ekonomi yang stagnan. Memilih infrastruktur hijau (yang ramah lingkungan) hari ini akan membawa manfaat selama beberapa dekade ke depan. Negara-negara berkembang bisa memimpin dan melakukan lompatan dari pertumbuhan 'kotor' ke pertumbuhan '**hijau**'.

4.2.3 Isu Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. *Stunting* terkait erat dengan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam



waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). *Stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Menurut UNICEF, *stunting* didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, *stunting* juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. *Stunting* dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi. Perkembangan *stunting* adalah proses yang lambat, kumulatif dan tidak berarti bahwa asupan makanan saat ini tidak memadai. Kegagalan pertumbuhan mungkin telah terjadi di masa lalu seorang.

Menurut WHO, di seluruh dunia, diperkirakan ada 178 juta anak di bawah usia lima tahun pertumbuhannya terhambat karena *stunting*. Indonesia, menurut Badan Kesehatan Dunia, berada di urutan ke-lima jumlah anak dengan kondisi *stunting*. Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menunjukkan prevalensi Balita *stunting* di Indonesia masih tinggi, yakni 29,6% di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%). Penelitian Ricardo dalam Bhutta tahun 2013 menyebutkan balita *stunting* berkontribusi terhadap 1,5 juta (15%) kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta anak kehilangan masa hidup sehat setiap tahun. Untuk menekan angka tersebut, masyarakat perlu memahami faktor penyebab *stunting*, antara lain: rendahnya akses terhadap makanan bergizi dalam waktu lama, rendahnya asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani, retardasi pertumbuhan intrauterine, tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori, perubahan hormon yang dipicu oleh stres, dan sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak.

Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak *stunting* apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik.



Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.

Hasil Riskesdas 2013 menyebutkan kondisi konsumsi makanan ibu hamil dan balita tahun 2016-2017 menunjukkan di Indonesia 1 dari 5 ibu hamil kurang gizi, 7 dari 10 ibu hamil kurang kalori dan protein, 7 dari 10 Balita kurang kalori, serta 5 dari 10 Balita kurang protein. Faktor lainnya yang menyebabkan *stunting* adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi pertumbuhan anak.

Stunting dapat dicegah dengan memperbanyak makan makanan bergizi yang berasal dari buah dan sayur lokal sejak dalam kandungan. Kemudian diperlukan pula kecukupan gizi remaja perempuan agar ketika dia mengandung ketika dewasa tidak kekurangan gizi. Selain itu butuh perhatian pada lingkungan untuk menciptakan akses sanitasi dan air bersih. Waktu terbaik untuk mencegah *stunting* adalah selama kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan. *Stunting* di awal kehidupan akan berdampak buruk pada kesehatan, kognitif, dan fungsional ketika dewasa. Untuk mengatasi masalah *stunting*, Kementerian Kesehatan dengan dukungan *Millennium Challenge Account-Indonesia* (MCA-I), melalui Program Hibah *Compact Millennium Challenge Corporation* (MCC) melakukan Kampanye Gizi Nasional Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM). Salah satu intervensi dalam program PKGM adalah tentang perubahan perilaku masyarakat, yang dilakukan dalam program Kampanye Gizi Nasional (KGN).

4.2.4 Isu Strategis Nasional

Selain isu internasional, isu strategis berikutnya yang harus diperhatikan dengan seksama adalah isu internal dalam hal ini isu strategis nasional di mana segala perubahan yang terdampak dari keberadaan isu strategis nasional ini akan berdampak besar bagi perubahan kebijakan Kabupaten Murung Raya. Isu strategis nasional dengan demikian merupakan isu-isu di tingkat nasional yang memiliki



potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi arah pembangunan Kabupaten Murung Raya.

4.2.4.1 Telaahan RPJMN Tahun 2015-2019

Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian hukum dan merupakan amanat peraturan perundangan yang harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dan RPJPD, serta harus mengacu pula pada RPJPN. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN Tahun 2005-2025 maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai berikut: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas (NAWA CITA), yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Salah satu tema pokok atau fokus pembangunan pada RPJMN Tahun 2015-2019 yakni fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan, baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia. Adapun telaah yang dilakukan pada RPJMN Tahun 2015-2019 akan dikhususkan untuk melihat arah pembangunan nasional di kawasan Kalimantan, khususnya provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

Pengembangan Wilayah Kalimantan (Buku III RPJMN 2015-2019: Agenda Pengembangan Wilayah)



Pada perencanaan pembangunan nasional periode 2015-2019, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan sesuai RPJMN 2015-2019 (Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah) adalah:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerah masing-masing, melalui:

1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
2. Penyediaan infrastruktur wilayah;
3. Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk provinsi dan 10% untuk kabupaten/kota;
2. Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD;
3. Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan;



4. Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%;
6. Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan;
7. Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
8. Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%;
9. Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%;
10. Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimant. Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah;
11. Terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan.

Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks resiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya. Diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019).

Arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah strategis Pulau Kalimantan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Pulau Kalimantan melalui strategi:



- a. Menyiapkan kawasan pengembangan komoditas mineral, pertanian pangan, kelapa sawit, karet, dan rotan;
 - b. Mengembangkan klaster-klaster industri pengolahan mineral dan kelapa sawit berorientasi ekspor;
 - c. Meningkatkan produktivitas hasil olahan mineral dan kelapa sawit di dalam dan sekitar pusat industri; serta
 - d. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan komoditas unggulan kelapa sawit, karet, dan rotan.
2. Percepatan Penguatan Konektivitas Peningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasankawasan penyangga sekitarnya, arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan Kalimantan Tengah adalah Pengembangan Distribusi Air Baku; pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.
3. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK melalui strategi berikut:
- a. Pengembangan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di bidang energi pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. Memberikan pembinaan kelembagaan badan usaha pengelola kawasan yang mendukung perubahan pola pikir bisnis berorientasi daya saing internasional;
 - c. Pembangunan *Science Park* berteknologi tinggi di bidang perkebunan dan pertambangan sebagai sarana peningkatan kualitas SDM kawasan; serta
 - d. Pembangunan *Technology Park* komoditas mineral, kelapa sawit, karet, dan rotan untuk meningkatkan inovasi teknologi.
4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Diperlukan sinergisasi dan sinkronisasi regulasi melalui strategi berikut:
- a. Penerapan regulasi insentif fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, antara lain fasilitas fiskal disemua bidang usaha, pembebasan PPN dan PPNBM untuk bahan dan barang



- impor yang akan diolah dan digunakan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Membuat regulasi terkait dengan pelimpahan kewenangan antara pusat, daerah, dan instansi terkait kepada administrator kawasan-kawasan pertumbuhan;
 - c. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal;
 - d. Membuat regulasi terkait dengan pembagian kewenangan antara Kabupaten/Kota di pusat-pusat pertumbuhan; serta
 - e. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi.

Terkait dengan kebijakan dalam penanggulangan bencana di Kalimantan, beberapa hal yang menjadi isu strategis di wilayah Kalimantan antara lain:

1. kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pulau Kalimantan.
2. bencana banjir dan kekeringan.

Untuk mendukung pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, arah kebijakan penanggulangan bencana diarahkan untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap bencana. Strategi penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana di wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi Pengurangan Resiko Bencana dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, melalui:
 - a. Pengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah;
 - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 untuk kota sasaran;
 - c. Integrasi kajian dan peta resiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota;



- d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) serta menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD.

2. Penurunan Kerentanan Terhadap Bencana

- a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
- b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, baik melalui media cetak, radio dan televisi;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan rawan bencana dan pasca bencana;
- d. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah paska bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah paska bencana alam di wilayah Pulau Kalimantan;
- e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Kapuas, Mahakam dan Barito maupun daerah rawan bencana alam lainnya;
- f. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

4.2.4.2 Telaahan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Seiring dengan semakin besarnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan SDA yang datang dari semua kegiatan manusia, termasuk kegiatan tambang dan ancaman pembalakan liar maka jika tidak dikendalikan dengan baik tentu akan mengancam keberlanjutan pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan kepada pembangunan **hijau**. Adapun isu strategis pembangunan periode 2020-2024 yang dirumuskan dalam Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024, antara lain:

1. Pembangunan manusia
2. Pembangunan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur

4. Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Pembangunan nasional pada periode 2020-2024 menekankan pada kondisi investasi dan kondisi sumber daya alam (SDA) yang ramah lingkungan. Pengarusutamaan yang dikedepankan meliputi: kesetaraan gender, tata kelola (*governance*), kerentanan bencana, perubahan iklim dan modal sosial dan budaya.

Tabel 4.9.
Proyeksi Target Indikatif Pembangunan 2020-2024

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	Pengangguran	Ketimpangan
Kondisi Saat Ini (2018)	5,27%*	9,82%	5,13%	0,389
Sasaran dalam RKP 2019	5,2-5,6%	8,5-9,5%	4,8-5,2%	0,380-0,390
Sasaran dalam RPJPN 2005-2025	4,5-5,5%**	≤5%	≤5%	0,360
Proyeksi Baseline SDGs 2024	4,2 %***	8,21%	5,02%	0,387
Sasaran Dalam RPJMN 2020-2024****	5,7%	5,0-5,7%	4,0-4,6%	0,371-0,373

Sumber: Bappenas, 2018

Keterangan:

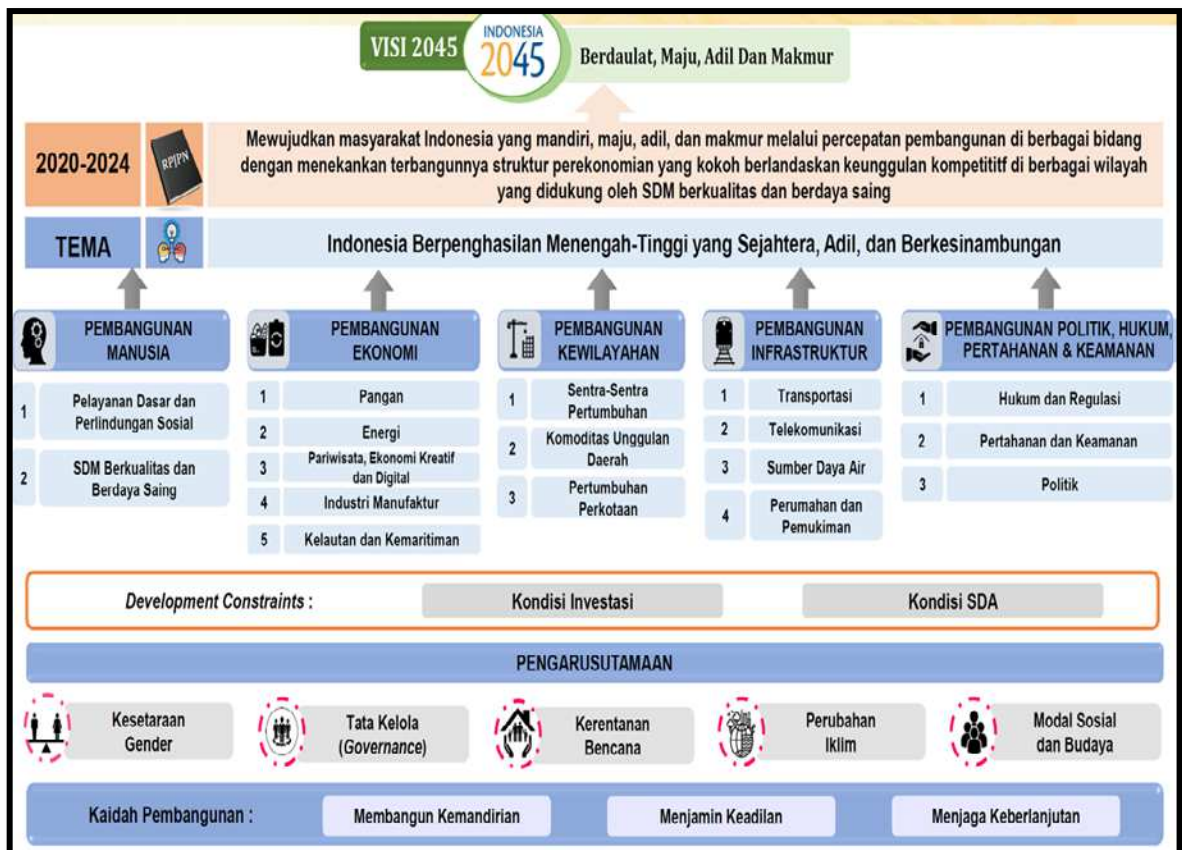
*) Kuartal II 2018

**) Tertulis: setara negara berpendapatan menengah

***) Laju pertumbuhan PDB per kapita

****) Skenario moderat

Gambar 4.12
Kerangka Pembangunan pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024



4.2.4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten/kota meliputi:

- SPM Bidang Pendidikan, meliputi: Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan kesetaraan
- SPM Bidang Kesehatan, meliputi: Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan; Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Cakupan anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar; Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar; Cakupan warga negara usia 15-



59 tahun (usia produktif) mendapatkan skirinning kesehatan sesuai standar kesehatan; Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Cakupan penyandang diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; Cakupan orang dengan tuberkolosis (TB) mendapat pelayanan TB sesuai standar; dan Cakupan orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar.

- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi: pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi: penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, meliputi: pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban;
- f. SPM Bidang Sosial, meliputi: rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan menetapkan kebijakan Percepatan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Mengingat SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu. Sampai saat ini, pedoman kebijakan tentang Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

4.2.4.4 Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kota Cerdas (*Smart City*)

Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* dapat berupa komputer, *laptop/notebook* dilengkapi dengan perangkat pendukungnya seperti printer, jaringan, infokus, modem, LAN, dan lain-lain. Sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada organisasi pemerintah secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Electronic Government (e-Government), menurut Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat



memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal melalui *e-Government*.

Dari sisi masyarakat, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena syarat utama penggunaan teknologi informasi untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah untuk prosedur pelayanan yang baku dan standar serta jelas dari sisi waktu penyelesaian maupun biaya yang harus dikeluarkan.

Dari sisi pemerintah, dapat meningkatkan transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 mengamanatkan kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional.

Dalam pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government*) oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya salah satunya melalui MURA *Integrated Resources Management System* (MIRMS) yaitu sistem pengelolaan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang diawali dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan anggaran dan pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran diupayakan agar dapat dilaksanakan secara elektronik/digital.

Namun, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik hingga saat ini dirasa masih belum optimal. Salah satu upaya konkrit yang perlu dilaksanakan adalah penggelaran program Desa/Kelurahan-Net; yaitu program pendekatan layanan kepada masyarakat berupa penambahan fungsi pemberdayaan potensi pembangunan di seluruh kantor kelurahan/desa se-Murung Raya yang telah diperlengkapi dengan jaringan internet dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.

4.2.4.5 Pengarusutamaan Resiko Bencana Dalam Pembangunan

Kabupaten Murung Raya secara topografis dan geografis adalah daerah rawan bencana. Wilayah Kabupaten Murung Raya dapat



dikatakan tidak ada kawasan yang aman 100% dari ancaman bencana. Isu strategis yang terkait dengan kawasan rawan bencana adalah:

- 1) Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 2) Sistem peringatan dini di tingkat hulu dan hilir;
- 3) Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PUPRB);
- 4) Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana;
- 5) Koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring; dan
- 6) Penyusunan pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Murung Raya dalam menghadapi ancaman bencana sudah melakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatkan kapasitas masyarakat dengan pembentukan desa tangguh bencana.

4.2.5 Isu Strategis Regional

4.2.5.1 Telaahan RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Untuk menjaga sinergitas pembangunan secara berjenjang dari pembangunan nasional hingga tingkat daerah maka perlu dipahami kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk periode pembangunan jangka menengah. Visi pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, yakni “Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskanlah misi sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai



4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun arahan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan yakni:

1. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten, dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang.
2. Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: (a) Meningkatnya konektivitas antar daerah, dengan indikator persentase jalan mantap dan persentase konektivitas jalan; dan (b) Meningkatnya kecukupan energi, dengan indikator meningkatnya rasio desa berlistrik dan Rasio elektrifikasi.
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, Daerah Pesisir dan Pantai; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan.
4. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: (a) Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi, dan (b) Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator Laju Inflasi dan pendapatan per kapita.
5. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara Konsisten; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: (a) Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau, dengan indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB; dan (b) Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator



Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan tingkat pengangguran terbuka.

6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: (a) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK; (b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); (c) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan (d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: (a) Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator IPM, rata-rata lama sekolah dan angka harapan usia sekolah; dan (b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup.
8. Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: Terpasarkannya destinasi wisata, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan.
9. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: Menurunnya degradasi lingkungan, dengan indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
10. Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan; dengan sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah: Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, persentase PAD terhadap total pendapatan transfer dan persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD.

Dalam RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 terdapat beberapa rencana pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan di Kabupaten Murung Raya sebagai berikut:

1. Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di



Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.

2. Kawasan Strategis *Heart of Borneo* (HoB) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara.
3. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:
 - 1) Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya.
4. Pembangunan Jalur KA: Puruk Cahu-Kuala Kurun Rabambang-Tumbang Samba-Sampit-Kuala Pembuang Teluk Segintung.
5. Pembangunan Jalur KA: Puruk Cahu-Bangkuang/Mengkatip Batanjung.
6. Pengembangan Bandara Khusus Dirung.

4.2.5.2 Telaahan RTRW Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan penataan ruang yang kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan arahan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam RTRW Kalimantan Tengah 2015-2035 terdapat beberapa rencana pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya sebagai berikut:

- 1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya.
- 2) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah meliputi: Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten



Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segitung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

- 3) Bandara pengumpan yang meliputi: Haji Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan, Tumbang Samba di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Dirung di Kabupaten Murung Raya, Beringin di Kabupaten Barito Utara dan Sanggu di Kabupaten Barito Selatan.
- 4) Rencana Bandara Baru meliputi: Bandara di Desa Trinsing di Barito Utara, Bandara di Desa Bahitom di Murung Raya, Bandara di Desa Guci di Lamandau, Bandara di Desa Kandris Barito Timur dan Bandara di Desa Natai Sedawak di Kabupaten Sukamara.
- 5) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau.
- 6) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara.
- 7) Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiyang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok.
- 8) Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau.
- 9) Embung Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau.
- 10) Instalasi pengolahan air minum tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk: Air Baku Kabupaten Murung Raya.



- 11) Pengendalian banjir mencakup kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi: Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional, seperti: Wilayah Sungai (WS) Barito meliputi DAS Barito (Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur) dan DAS Kapuas (Kabupaten Kapuas).
- 12) Kawasan cagar alam yaitu Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dengan seluas ±192.317 Ha di Kabupaten Murung Raya, Cagar Alam Pararawen I dan II dengan seluas ±5.945 Ha di Kabupaten Barito Utara, Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya seluas ±335 Ha.
- 13) Kawasan rawan tanah longsor yaitu daerah yang membentang dari Barat-Timur wilayah Kalimantan Tengah Bagian Utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan yaitu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Barito Utara.
- 14) Taman Buru di Kabupaten Kotawaringin Barat seluas ±4.036 Ha, di Kabupaten Lamandau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.
- 15) Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.
- 16) Kawasan Strategis *Heart of Borneo* (HoB) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Utara.

- 17) Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas: Cagar Alam Bukit Sapat Hawung dan Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya.

4.2.5.3 Telaahan Dokumen RPJMD Daerah Lainnya

Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan daerah lainnya maka perlu dilihat kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah sekitar Kabupaten Murung Raya. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya adalah Kabupaten Kapuas dan Barito Utara. Telaahan dokumen RPJMD daerah lainnya tercantum dalam tabel berikut

Tabel 4.10.

Visi Misi RPJMD Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara

RPJMD	VISI	MISI
RPJMD Kab. Kapuas Tahun 2018-2023	Terwujudnya kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya.2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi, membuka pelatihan pertanian, agro bisnis dan agro industri dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang dengan memberikan Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap GRATIS.3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi, memfasilitasi kehadiran investor pada bidang hilirisasi sesuai potensi sumber daya alam dan masyarakat bekerja di perusahaan yang sudah operasional (sawit dan batubara)5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat Dayak7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat



		<p>9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang, menerima guru kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa Kepada Lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas</p> <p>10. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk meraih kehidupan yang lebih baik</p> <p>11. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata, menerima tenaga kontrak bidang kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan Menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS</p> <p>12. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan (Bagi Yang Putus Sekolah Diberikan Pelatihan Perbengkelan, dan Jasa Lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata</p> <p>13. Meningkatkan peran, fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas dan meningkatkan Insentif Guru Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).</p> <p>14. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.</p> <p>1. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru-guru kontrak, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan Tunjangan Daerah bagi Pejabat dan ASN, serta meningkatkan Insentif guru - guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.</p>
<p>RPJMD Kab. Barito Utara</p>	<p>Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius,</p>	<p>1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi</p>



Tahun 2018-2023	Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat 4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup 5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
-----------------	---	--

Sumber: RPJMD Kapuas Tahun 2018-2023 dan RPJMD Barito Utara Tahun 2018-2023

4.2.6 Isu Strategis Lokal

4.2.6.1 Telaahan RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028

Dengan memperhatikan masalah mendasar yang diperkirakan dihadapi 20 tahun mendatang serta memperhitungkan kemampuan modal dasar yang dimiliki daerah serta memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005 - 2025, Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya periode 2008 -2028 adalah:

“Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Murung Raya tersebut, ditempuh melalui tujuh Misi, yaitu:

- (1) Meningkatkan kualitas penduduk agar memiliki daya saing tinggi
- (2) Meningkatkan ketersediaan prasarana (infrastruktur fisik) untuk kepentingan pelayanan publik.
- (3) Melaksanakan pembangunan ekonomi dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk mencapai kemakmuran.
- (4) Melakukan penyerasian pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah
- (5) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan daerah.
- (6) Melaksanakan pembangunan sosial-budaya politik dan hukum agar terwujud kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan meningkatnya kesadaran serta partisipasi politik masyarakat.
- (7) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar terwujud kondisi geomorfologi yang baik dan kondisi lingkungan hidup yang lestari.

4.2.6.2 Telaahan RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038



Penyusunan dokumen RPJMD selain memerhatikan RPJPD, juga harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya dalam rangka memerhatikan aspek tata ruang berdasarkan kondisi eksisting kabupaten Murung Raya. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Murung Raya, meliputi:

1. Pemerataan pertumbuhan ekonomi;
2. Peningkatan kualitas lingkungan;
3. Pengembangan kawasan budidaya untuk agroindustri dan potensi lokal; dan
4. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Murung Raya meliputi:

- a. pusat-pusat kegiatan; mencakup PKL, PKLp, PPK dan PPL.
- b. rencana sistem jaringan prasarana utama; mencakup sistem jaringan transportasi darat; kereta api; dan transportasi udara.
- b. rencana sistem prasarana lainnya; mencakup sistem jaringan prasarana energi, prasarana telekomunikasi dan prasarana sumber daya air.
- c. rencana sistem prasarana lingkungan, mencakup: sistem jaringan persampahan, sanitasi dan limbah, drainase, dan sistem jaringan air minum.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Murung Raya meliputi:

- a. rencana kawasan lindung;
- b. rencana kawasan budidaya; dan
- c. rencana kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (*Outline*).

Pada RTRW Kabupaten Murung Raya juga ditetapkan kawasan strategis yang terbagi menjadi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Murung Raya meliputi:

- a. Kawasan Andalan Puruk Cahu dan sekitarnya, meliputi:



1. Kecamatan Murung;
 2. Kecamatan Barito Tuhup Raya;
 3. Kecamatan Laung Tuhup; dan
 4. Kecamatan Tanah Siang.
- b. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu DAS Barito, meliputi:
1. Kecamatan Permata Intan;
 2. Kecamatan Murung;
 3. Kecamatan Muara Laung; dan
 4. Kecamatan Sumber Barito.

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Murung Raya meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berupa kawasan pengembangan peternakan di Kecamatan Murung;
- b. Kawasan strategis *Hearts of Borneo* (HoB) yang terdapat di Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan U'tut Murung, Kecamatan Seribu Riam, Kecamatan Sei. Babuat, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Kecamatan Permata Intan;
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berupa kawasan Suaka Alam Bukit Sapat Hawung di Kecamatan Uut Murung;
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa sumber daya energi sebagai sumber PLTA yang berada di Muara Joloi Kecamatan U'tut Murung;
- e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yang merupakan Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan meliputi:
 1. Rumah Adat Betang Konut yang terletak di Kecamatan Tanah Siang.
 2. Rumah Adat Betang Tumbang Bantian yang terletak di Kecamatan Permata Intan.



3. Rumah Adat Betang Apat yang terletak di Kecamatan Sungai Babuat

4.2.6.3 Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018- 2023 mengintegrasikan isu-isu strategis yang terdapat pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/



program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketentuan ini dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Murung Raya hanya melaksanakan 16 tujuan yang terbagi dalam 220 indikator TPB dengan gambaran sebagai berikut:
 - Indikator pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dimana pilar sosial 23, ekonomi 6, lingkungan 0, hukum dan tata kelola 1.
 - Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Murung Raya tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 20, pilar ekonomi 5, pilar lingkungan 4 dan pilar hukum, tata kelola adalah 0.
 - Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Murung Raya tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 20, pilar ekonomi 5, pilar lingkungan 4 dan pilar hukum, tata kelola adalah 0.
 - Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Murung Raya tetapi tidak ada data sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 52, pilar ekonomi 41, pilar lingkungan 21 dan pilar hukum, tata kelola adalah 36.
2. Hasil FGD para pemangku kepentingan diperoleh bahwa isu strategis pilar sosial, ekonomi dan pilar lingkungan sejumlah 25 isu strategis dan isu prioritas 6, sedangkan isu sesuai TPB prioritas 8 sebagai



berikut:

- Nomor TPB 1: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
 - Nomor TPB 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
 - Nomor TPB 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.
 - Nomor TPB 6: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.
 - Nomor TPB 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
 - Nomor TPB 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.
 - Nomor TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
 - Nomor TPB 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (pencemaran lingkungan).
3. OPD yang sudah melaksanakan TPB berdasarkan Kategori pencapaian TPB sebagai berikut:
- OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 11 OPD dengan total 30 indikator.
 - OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 9 OPD dengan total 29 indikator.
 - OPD yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 7 OPD dengan total 11 indikator.
 - OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 25 OPD dengan total



150 indikator.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Murung Raya telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

- a. Pencemaran Lingkungan.
- b. Lahan Kritis.
- c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat.
- d. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan.
- e. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.
- f. Pembangunan Wisata Berkelanjutan.

4.2.6.4 Isu Strategis Pembangunan Murung Raya Periode 2018-2023

Berdasarkan analisis permasalahan dan telaahan isu strategis internasional, nasional, regional dan global di atas, isu strategis mendasar di Kabupaten Murung Raya yang harus mendapatkan perhatian dalam kurun waktu perencanaan jangka menengah periode 2018-2023, yaitu:

a. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan secara konsisten dan berkesinambungan

Infrastruktur merupakan fasilitas yang dibangun untuk mendukung, membantu, dan mempermudah segala bentuk aktivitas kehidupan manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan daerah. Infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan dari hasil uang rakyat yang dikumpulkan melalui pembayaran pajak disebut dengan infrastruktur publik. Beberapa contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah dan memiliki nilai strategis pembangunan seperti jalan raya, fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasilitas listrik dan air bersih.

Sebagai salah satu daerah di Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya memiliki berbagai keterbatasan geografis sehingga mempengaruhi percepatan dan pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perwujudan infrastruktur yang berkualitas akan sangat mempengaruhi realisasi pembangunan daerah, khususnya wilayah pelosok. Hal tersebut menjadi penting karena kelengkapan, pemerataan, dan kualitas infrastruktur yang baik mengindikasikan keberhasilan



pelaksanaan pembangunan daerah utamanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Penurunan tingkat *stunting* melalui pelaksanaan program Kampanye Gizi Nasional di Murung Raya

Isu *stunting* merupakan isu nasional yang perlu diperhatikan secara mendalam oleh para pemegang kebijakan di Kabupaten Murung Raya. Banyaknya wilayah yang sulit untuk dijangkau dari fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun fasilitas penunjang kehidupan lainnya serta ketidaktahuan masyarakat mengenai *stunting* memberi peluang lebih berjangkitnya *stunting*, khususnya pada anak-anak.

Beberapa penyebab *stunting* yang mungkin terjadi di Murung Raya seperti:

- 1) Pemberian nutrisi yang kurang optimal oleh orang tua, khususnya pada rumah tangga yang jauh dari pusat keramaian/komoditas makanan terlebih lagi masyarakat miskin;
- 2) Kelahiran dengan berat badan yang rendah memiliki porsi dalam mengakibatkan *stunting* sehingga kondisi ibu hamil harus terjaga dari sisi lingkungan, makanan, hingga kesehatan;
- 3) Kondisi ekonomi yang belum memadai di sebagian wilayah Murung Raya menjadi salah satu penyebab adanya *stunting* karena berbagai komoditas kesehatan untuk keluarga tidak tercukupi dengan baik.

c. Pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah untuk perwujudan kualitas perekonomian Murung Raya

Perekonomian di Murung Raya meskipun belum memberikan andil yang optimal pada pembangunan Kalimantan Tengah, namun secara mandiri memiliki peluang untuk berkembang. Dominasi perekonomian dari sektor pertambangan secara implisit menjadi suatu permasalahan pada perencanaan perekonomian mendatang mengingat sumber daya alam tak terbaharukan memiliki keterbatasan volume sehingga suatu saat akan menipis dan habis. Oleh karena itu, dalam perwujudan kualitas perekonomian, pemerintah harus jeli melihat peluang berbagai sektor pendukung pembangunan perekonomian daerah.

Sektor yang memiliki dominasi tertinggi kedua di Murung Raya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan capaian 11,63



persen pada tahun 2017. Sektor ini merupakan sektor produksi sumber daya terbarukan sehingga kemungkinan besar akan terjaga kestabilannya dalam mengembangkan perekonomian masa mendatang. Pemerintah dalam menyikapi hal ini harus mempertimbangkan adanya produksi turunan dari sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah seperti sektor perdagangan maupun industri pengolahan.

d. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian Lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan yang dilaksanakan oleh manusia memiliki dampak yang cukup signifikan bagi degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, beberapa negara dan daerah sudah melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui gerakan ekonomi hijau.

Pada dasarnya ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program Lingkungan PBB (UNEP; *United Nations Environment Programme*) dalam laporannya berjudul *Towards Green Economy* menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

e. Penanggulangan Bencana Alam Melalui Mitigasi Bencana



Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

f. Perwujudan Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja.

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

g. Upaya pencapaian SDG's

SDG's secara umum sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dengan ditetapkannya perundang-undangan tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan berbagai turunannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kehidupan generasi masa mendatang.



Rumusan SDG's yang ditetapkan di Indonesia terdiri dari 4 pilar pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan yang meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan inklusif, kesehatan, kesamaan gender, kesediaan air bersih dan sanitasi untuk semua, serta akses dan kesediaan sumber energi untuk semua, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketersediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan inovasi, mengurangi kesenjangan, mengatasi dampak perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, mendorong tatanan masyarakat yang damai, dan mendorong kerja sama global.

h. Peningkatan Kajian, Penelitian dan Inovasi Bidang IPTEK

Setiap upaya pembangunan daerah membutuhkan suatu dasar/pijakan bagi perumusan kebijakan lebih lanjut maupun dalam kerangka pengembangan suatu metode/cara dalam meningkatkan kualitas atau daya saing suatu produk. Selain gambaran umum kondisi daerah yang didapatkan melalui data dan informasi sebagai hasil nyata dari penyelenggaraan pembangunan, maka perlu adanya berbagai penelitian dan pengembangan (litbang). Pada konteks pelaksanaan pembangunan Murung Raya, litbang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan melalui berbagai inovasi teknologi informasi.

Litbang sendiri memiliki arti suatu kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Melalui litbang, maka diharapkan Murung Raya memiliki suatu akselerasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dalam pencapaian target kinerja pembangunan. Namun dalam perjalanan selama ini, litbang belum menjadi salah satu sentral utama dalam implementasi pembangunan sehingga masih terkesan *bussines as usual* dan tentu saja dampaknya tidak signifikan dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya dorongan dari unsur pemerintahan termasuk kemitraan dengan organisasi/institusi dalam melaksanakan litbang dan menerapkannya secara terstruktur dalam upaya pembangunan Murung Raya.

i. Pemerataan penanganan fasilitas kelistrikan



Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, kebutuhan akan energi listrik di Murung Raya semakin meningkat. Karena kesalahan perencanaan di masa lalu, kebutuhan energi listrik meningkat jauh lebih pesat dibanding yang tersedia. Akibatnya, sering terjadi pemadaman bergilir. Padahal hampir 25% desa di Murung Raya belum mendapatkan fasilitas listrik.

Isu yang dihadapi ke depan adalah setiap daerah di rancang untuk mandiri energi termasuk di Kabupaten Murung Raya. Setiap daerah harus mempunyai pembangkit yang mampu memenuhi daerahnya. Pasokan dari daerah lain melalui saluran transmisi hanya digunakan sebagai *backup* atau cadangan. Sumber energi yang digunakan harus bisa didapat, bukan mendatangkan dari daerah lain.

j. Peningkatan Peran CSR dalam Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat

Tanggung jawab sosial perusahaan, lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*), kini menjadi salah satu topik umum yang mewabah termasuk di Kabupaten Murung Raya. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat selalu menginginkan adanya keberlanjutan lingkungan hidup dimana tempatnya melakukan usaha. Maka dari itu, perusahaan sebisa mungkin dapat menyadari adanya sebuah tanggung jawab atas tindakan operasional yang dilakukan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya CSR selama ini lebih banyak dilakukan secara sukarela (*voluntary*) dan kedermawanan (*philantrophy*), sehingga jangkauannya relatif terbatas. Setiap bisnis memiliki tanggung jawab kepada beberapa pihak utama yang berkepentingan, termasuk lingkungan, karyawan, pelanggan, investor dan komunitas, minimal yang berada dalam radius operasi usaha. Kebanyakan perusahaan beranggapan bahwa CSR dapat membantu mereka mengelola risiko, aset-aset yang kasat mata, proses-proses internal, dan hubungan dengan *stakeholder* internal maupun eksternal.

Sudah seharusnya terjadi perubahan paradigma perusahaan agar tidak hanya mengedepankan kepentingan memperoleh laba semata-mata, namun juga keberadaan perusahaan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar seiring dengan mendukung adanya *good governance*. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam



sesuatu yang bersifat makro agar dapat diwujudkan sebuah standardisasi yang dapat dijadikan pedoman dan memudahkan evaluasi/penilaian. Selanjutnya dalam proses implementasi dan penyelenggaraan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan.





BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Permendagri No. 86 Tahun 2017, visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah disampaikan semasa kampanye sebagai dasar dalam perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari visi RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028, yaitu **"Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**. RPJPD merupakan kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan jangka panjang guna mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang maju, mandiri dan sejahtera.

Selanjutnya untuk melaksanakan RPJPD pada lima tahun ketiga RPJMD, rumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun ketiga adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Murung Raya yang sejahtera dan bermartabat melalui pembangunan berkelanjutan berbasis perdesaan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas menuju Murung Raya Emas Tahun 2030.

Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028, pencapaian RPJMD lima tahun kedua (2013-2018), dan RPJMN Tahun 2015-2019, serta dengan memerhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 sebagaimana dijabarkan berikut ini.



5.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi penting karena dapat menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen pemangku kepentingan, mulai dari aparatur pemerintahan, masyarakat, hingga pihak swasta. Dalam hal ini, visi menjadi fokus dan prioritas pembangunan selama lima tahun kepemimpinan kepala daerah.

Berdasarkan kondisi masyarakat saat ini, permasalahan dan isu strategis daerah, serta dengan memperhitungkan berbagai potensi yang dimiliki maka dicanangkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”.

Visi tersebut mengandung tiga elemen utama, yaitu: **sejahtera**, **bermartabat**, dan **pembangunan berbasis perdesaan**; yang mana ketiga elemen tersebut merupakan bagian dari tonggak capaian pembangunan menuju Murung Raya Emas Tahun 2030. Dengan mengaitkan ketiga elemen utama tersebut maka terdapat 2 (dua) poin penting yaitu Murung Raya yang sejahtera merata dan berkeadilan dalam keberagaman dan Murung Raya sejahtera melalui kemandirian masyarakat. Adapun penjabaran dari ketiga elemen utama visi Kabupaten Murung Raya periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

✓ **Sejahtera**

Aspek penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan Murung Raya yang sejahtera selama periode lima tahun ke depan adalah kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat sampai ke wilayah pedalaman. Wujud kesejahteraan yang ingin dicapai tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, tetapi juga menjangkau sisi rohaniah seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Elemen visi Murung Raya yang **sejahtera** merupakan pengejawantahan dari tujuan (pembangunan) nasional kedua yakni “memajukan kesejahteraan umum” yang memberikan dorongan kepada daerah-daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di



daerahnya secara berkualitas, merata, dan berkesinambungan dengan tetap memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan yang hanya berfokus kepada pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat yang berakibat munculnya berbagai ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Murung Raya harus pula diselaraskan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup dengan tetap memerhatikan prinsip keberlanjutan.

✓ **Bermartabat**

Kabupaten Murung Raya yang bermartabat tercermin melalui kondisi daerah yang aman, tertib, bersih, dan asri, dengan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, berbudaya, dan memiliki nilai religiusitas dan sikap toleransi yang tinggi. Didukung dengan pemerintahan yang profesional dan bersungguh-sungguh melayani masyarakat, menjadikan Murung Raya sebagai kabupaten yang unggul dan berdaya saing tinggi. Keunggulan dan daya saing tinggi ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang bermartabat oleh setiap organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dalam hal ini, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat menunjukkan pribadi yang bermartabat sehingga pembangunan daerah yang dilaksanakan pada akhirnya mampu meningkatkan kemandirian daerah.

✓ **Pembangunan berbasis perdesaan**

Pembangunan Murung Raya dalam lima tahun kedepan akan menempatkan desa sebagai salah satu fokus penting perbaikan kinerja berbagai sektor, khususnya yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan berbasis perdesaan, masyarakat desa dapat mengembangkan kemampuan sesuai potensinya masing-masing. Pelaksanaan pembangunan berbasis perdesaan akan diperkuat pula dengan nilai-nilai dasar budaya yang dianut oleh masyarakat perdesaan dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan religius, agribisnis dan agroindustri. Pembangunan berbasis perdesaan ditujukan untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat Murung Raya. Kedepan, semua lapisan masyarakat Murung Raya akan

memperoleh kemudahan aksesibilitas terhadap seluruh fasilitas layanan publik dan keadilan dalam kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, transportasi, kebebasan politik, kesempatan ekonomi, transparansi dan lainnya). Melalui pembangunan berbasis perdesaan diharapkan mampu mendorong masyarakat Murung Raya untuk lebih aktif terlibat secara langsung dalam setiap upaya pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kemakmuran daerah Kabupaten Murung Raya akan dapat dicapai melalui kekuatan masyarakatnya yang berdaya saing.

Secara diagramatis, hubungan ketiga elemen utama visi jangka menengah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5.1
Gambar Hubungan Antar-Elemen Visi



Tabel 5.1
Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Murung Raya Terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Visi & Misi Kabupaten Murung Raya 2018-2023	Visi & Misi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021
Kesesuaian dan Konsistensi Visi:	
Visi: "Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030".	Visi: "Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"
Kesesuaian dan Konsistensi Misi:	
Misi 1 : Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.	Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata



<p>Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.</p>	<p>Misi 4 : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan</p> <p>Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam</p> <p>Misi 8 : Pengelolaan Pendapatan Daerah</p>
<p>Misi 3 : Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.</p>	<p>Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</p>
<p>Misi 4 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memerhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.</p>	<p>Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi</p> <p>Misi 2 : Pengelolaan Infrastruktur</p>
<p>Misi 5 : Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.</p>	<p>Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata</p>

5.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.**
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan**



kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.

- 3. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.**
- 4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memerhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.**
- 5. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.**

Penjelasan masing-masing misi di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif

Masyarakat adalah objek sekaligus subjek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, SDM yang sehat, unggul, berkarakter dan berdaya saing sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan. SDM Murung Raya yang sehat, unggul, berkarakter dan berdaya saing diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil, merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, utamanya bagi masyarakat terpencil dan masyarakat kurang mampu. Tercapainya Murung Raya yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan dengan pola hidup sehat. Adapun Murung Raya yang unggul, berkarakter dan berdaya saing diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas. Peningkatan kualitas bantuan sosial (beasiswa) baik dari segi jumlah maupun rumah tangga sasaran menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan dasar.



Pembangunan SDM Murung Raya juga dilaksanakan dengan memerhatikan pengembangan budaya sehingga akan menciptakan manusia dengan pola pikir, sikap, dan perilaku yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati, menjunjung tinggi adat istiadat, dan kesatuan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kehidupan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan melalui pembentukan watak dan penanaman budi pekerti pada generasi muda diharapkan dapat mewujudkan karakter masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama guna meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal SDM yang sehat, unggul, berkarakter, mandiri dan kompetitif diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat berbasis nilai budaya dan kearifan lokal.

2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Murung Raya. Amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah melalui perekonomian berbasis perdesaan juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dengan munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu menciptakan produk unggulan dan membuka lapangan kerja sendiri serta memastikan meningkatnya daya saing Murung Raya melalui kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi.

Upaya peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agroekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dalam arti luas, peningkatan keterampilan dan pemberdayaan angkatan kerja, optimalisasi pengelolaan UMKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan aktivitas perekonomian secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, serta peningkatan iklim



investasi daerah yang kondusif dengan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah di Murung Raya dapat mengembangkan produk unggulannya masing-masing. Pengembangan perekonomian kerakyatan memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

3) Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal

Tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, jujur, bersih, akuntabel, partisipatif dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *clean government* dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan reformasi birokrasi dilakukan melalui koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan konsisten, peningkatan kinerja administrasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN Murung Raya. Pembentukan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah Murung Raya. Dalam merealisasikan hal tersebut, seluruh perangkat pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya juga melakukan pembentukan manajemen kepegawaian, serta berbagai upaya terobosan inovatif guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan Kabupaten Murung Raya yang lebih baik dalam kerangka kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.

4) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memerhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan



dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah

Pembangunan infrastruktur secara merata sehingga mempermudah konektivitas antarwilayah merupakan kunci utama penggerak pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya dilaksanakan dengan memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata dari perkotaan sampai perdesaan dapat menurunkan biaya transportasi dan logistik yang berdampak kepada peningkatan daya saing produk, mempercepat pergerakan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Pembangunan infrastruktur dasar mencakup: pengelolaan kuantitas dan kualitas sanitasi pemukiman secara terpadu dan merata melalui upaya penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak huni bagi masyarakat Murung Raya, utamanya masyarakat kurang mampu; peningkatan aksesibilitas masyarakat dari dan antar desa/kecamatan ke perkotaan melalui pembangunan infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, dermaga, bandar udara); penyediaan sarana dan prasarana kelistrikan dan telekomunikasi hingga keseluruh pelosok Murung Raya; serta pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana distribusi air bersih yang dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber air baku secara merata, terpadu dan berkelanjutan dengan pembangunan jaringan irigasi ke seluruh pelosok Murung Raya. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan dilaksanakan dalam rangka untuk memperkuat pengembangan wilayah yang berkelanjutan dengan memerhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

5) Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif



Sektor pariwisata Kabupaten Murung Raya dengan segala potensi wisata yang dimiliki (alam, bahari, seni budaya, sejarah, dan buatan) mempunyai nilai dan pengaruh yang sangat vital terhadap pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian wilayah maka penting dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah dengan didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Dalam hal ini, perlu adanya terobosan-terobosan yang baru, kreatif, inovatif dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan destinasi wisata beserta unsur pendukungnya (tempat penginapan, restoran dan lain sebagainya), hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. Lebih lanjut, pengembangan sektor pariwisata Murung Raya harus mampu memberdayakan secara partisipatif aktif seluruh lapisan masyarakat terutama kaum marginal dan masyarakat lokal dalam rangka pemerataan keuntungan ekonomi sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam perencanaan kebijakan (*policy planning*), tahap perumusan tujuan merupakan aspek kebijakan dan kinerja tertinggi dalam penyusunan RPJMD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Berdasarkan rumusan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih, mengacu serta menyelaraskan dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya untuk periode 2018-2023 sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.**

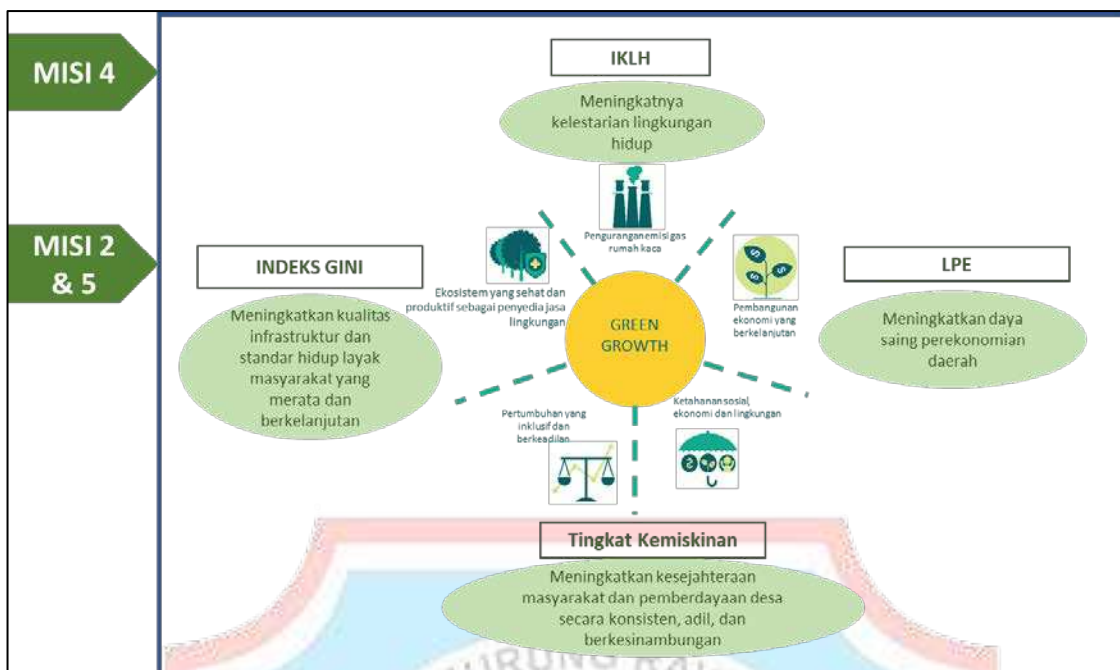
- 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan.**
- 3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah.**
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik .**
- 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan.**
- 6. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.**

Keenam tujuan pembangunan di atas dalam perumusannya harus memerhatikan prinsip pembangunan hijau yang memadukan tujuan pemeliharaan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan banyak peluang investasi hijau yang inovatif. Adapun keterhubungan antara tujuan pembangunan jangka menengah Murung Raya dengan lima pilar pertumbuhan ekonomi hijau tergambar sebagai berikut.



Gambar 5.2

Misi dan Tujuan RPJMD dalam Kerangka Pertumbuhan Hijau



Berdasar gambar 5.2 tersebut, setiap tujuan RPJMD telah tercakup dalam pilar pertumbuhan hijau di mana Tujuan RPJMD ke-3 “Meningkatkan daya saing perekonomian daerah” termasuk dalam pilar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menekankan pertumbuhan ekonomi Murung Raya yang kuat dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan secara luas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, guna memperkuat pilar ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dan pilar pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, pembangunan Murung Raya diarahkan kepada pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan (Tujuan 2) dalam rangka menekankan pertumbuhan yang membangun kapasitas masyarakat perdesaan untuk memelihara atau memulihkan stabilitas ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan dalam menghadapi berbagai guncangan agar tercipta ekosistem yang sehat dan produktif sebagai penyedia jasa lingkungan dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang mampu memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam secara bijak dan berkesinambungan. Terwujudnya Ekosistem yang sehat dan produktif harus pula didukung oleh kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan (Tujuan 5). Dalam hal ini, setiap upaya pembangunan harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kelestarian lingkungan hidup (Tujuan 6) sebagai bagian dari pilar pengurangan emisi gas rumah kaca dengan menekankan pentingnya pembangunan rendah karbon yang memberikan kontribusi bagi upaya global dan nasional untuk mengatasi perubahan iklim dan meminimalkan dampak yang merugikan masa

depan masyarakat lokal dan internasional, sekaligus meningkatkan keamanan energi dalam rangka mewujudkan Murung Raya Emas tahun 2030 dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (TPB).

Rumusan tujuan pembangunan daerah yang telah mengkomodir TPB kemudian dijabarkan kedalam sasaran pembangunan daerah sebagai upaya untuk percepatan pencapaian TPB. Dalam perumusan tujuan dan sasaran sekaligus pula dirumuskan indikator kinerjanya sebagai sarana evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Murung Raya lima tahun ke depan. Dengan demikian, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari implementasi strategi dan arah kebijakan serta pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Keenam tujuan pembangunan di atas sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Murung Raya lebih lanjut dapat diuraikan sasaran dan indikator tujuan/sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

❖ **Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter**

Berhasil atau gagalnya pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas dan daya saing SDM Murung Raya yang unggul dan berkarakter dapat diwujudkan dalam dua aspek utama, yakni kesehatan dan pendidikan. Upaya peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat Murung Raya, utamanya bagi masyarakat tidak mampu, dilakukan melalui penambahan dokter, tenaga kesehatan dan tenaga pengajar di setiap unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, perbaikan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan dan kegiatan belajar mengajar.

Tujuan **Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter** dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kemudian dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran pembangunan, sebagai berikut.



- 1) **Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat**, dengan indikator: Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
- 2) **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, dengan indikator: Angka Harapan Hidup.

❖ **Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan**

Pergerakan roda perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Murung Raya dilakukan melalui pemberdayaan desa disegala bidang secara konsisten, adil dan berkesinambungan. Peningkatan pergerakan perekonomian perdesaan akan memberikan suatu hasil optimal dalam pemerataan kesejahteraan wilayah Kabupaten Murung Raya yang memiliki kecamatan maupun desa yang menyebar hingga ke pedalaman. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

Tujuan **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan** dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut.

- 1) **Meningkatnya taraf hidup masyarakat**, dengan indikator: Pengeluaran Konsumsi Per Kapita.
- 2) **Meningkatnya penyerapan tenaga kerja**, dengan indikator: Tingkat Pengangguran.
- 3) **Terwujudnya pemberdayaan desa yang berkualitas**, dengan indikator: Indeks Desa Membangun.

❖ **Tujuan 3: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah**



Daya saing perekonomian daerah merupakan modal dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkualitas dan merata sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat yang mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Murung Raya harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada nilai budaya dan kearifan lokal. Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat Kabupaten Murung Raya tercermin dari meratanya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru hingga ke pelosok sehingga capaian pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya. Peningkatan daya saing perekonomian daerah harus didukung oleh terjaganya kualitas dan kuantitas pada sektor-sektor yang mendukung penuh peningkatan perekonomian seperti industri rumah tangga, pertanian, hingga jasa.

Tujuan **Meningkatkan daya saing perekonomian daerah** dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut.

- 1) **Meningkatnya pengembangan UMKM dalam perekonomian daerah**, dengan indikator sasaran: LPE sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.
- 2) **Meningkatnya kualitas sektor pertanian dalam perekonomian daerah**, dengan indikator: LPE sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.
- 3) **Meningkatnya nilai investasi di daerah**, dengan indikator: Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA.
- 4) **Meningkatnya Potensi Pariwisata Kabupaten Murung Raya**, dengan indikator: Jumlah Wisatawan.

❖ **Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Murung Raya yang baik dan bersih maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta



keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Murung Raya dilaksanakan melalui reformasi birokrasi sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional untuk melayani masyarakat dengan sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu: tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaran hukum, APBD baik, semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik, perijinan cepat dan mudah serta tidak ada *overlap*, komunikasi dengan publik berjalan baik, penggunaan waktu efektif dan produktif, adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah, dan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus pula melibatkan peran aktif masyarakat mengingat masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik** dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut.

- 1) **Terwujudnya integrasi yang baik, efektif dan efisien antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja**, dengan indikator: Nilai SAKIP.
- 2) **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel**, dengan indikator: Opini BPK.
- 3) **Terwujudnya aparatur pemerintah yang melayani, berkualitas, dan merata**, dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 4) **Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat**, dengan indikator: Angka Kriminalitas.

❖ **Tujuan 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga didasarkan kepada sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah

daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) seperti perhubungan, kelistrikan, pelayanan air bersih, pemukiman layak huni dan telekomunikasi, merupakan aspek penting untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam meningkatkan produktivitasnya, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menjadi daya dorong positif bagi pemerataan hasil pembangunan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat Kabupaten Murung Raya tanpa terkecuali sebagaimana tercermin pada terpenuhinya standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

Tujuan **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan** dengan indikator kinerja Indeks Gini kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut.

- 1) **Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah**, dengan indikator: Persentase panjang jalan dalam kondisi baik.
- 2) **Meningkatnya perumahan layak huni**, dengan indikator: Persentase perumahan layak huni.
- 3) **Meratanya akses air bersih**, dengan indikator: Persentase rumah tangga pengguna air bersih.

❖ **Tujuan 6: Meningkatkan kelestarian lingkungan**

Dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Murung Raya, keberlanjutan lingkungan hidup menjadi mutlak untuk diperhatikan mengingat salah satu sektor perekonomian dominan di Kabupaten Murung Raya adalah sektor pertambangan dan penggalian yang notabene merupakan sumber daya alam tak terbarukan di mana jika tidak dikelola secara bijak pasti akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, penting adanya perencanaan yang memberikan jaminan keberlanjutan lingkungan hidup melalui inovasi teknologi informasi, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar ekosistem yang telah terbina selama ini dapat dilestarikan dengan baik.



Tujuan **Meningkatkan kelestarian lingkungan** dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kemudian dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan, sebagai berikut.

- 1) **Optimalnya tata kelola lingkungan hidup**, dengan indikator: Indeks risiko bencana dan Tingkat emisi GRK.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.





Tabel 5.2

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter		IPM	67,16	68,11	68,58	69,05	69,53	70,00	70,00
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,38	7,59	7,69	7,79	7,90	8,00	8,00
			Harapan lama sekolah	11,72	12,15	12,36	12,57	12,79	13,00	13,00
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,39	70,26	70,70	71,13	71,57	72,00
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan		Tingkat kemiskinan	6,28	5,25	4,94	4,63	4,31	4,00	4,00
		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran konsumsi per kapita	1.111.088	1.240.725	1.305.544	1.370.363	1.435.181	1.500.000	1.500.000
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran	2,78	2,52	2,39	2,26	2,13	2,00



Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030										
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja		Terwujudnya pemberdayaan desa yang berkualitas	Indeks Desa Membangun	0,4635 (2015)	0,4818	0,4863	0,4909	0,4954	0,5000	0,5000
		Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,82	6,38	6,66	6,94	7,22	7,50	7,50
		Meningkatnya pengembangan UMKM dalam perekonomian daerah	LPE sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	6,14 dan 4,48	6,76 dan 4,99	7,07 dan 5,24	7,38 dan 5,49	7,69 dan 5,75	8,00 dan 6,00	8,00 dan 6,00
		Meningkatnya kualitas sektor pertanian dalam perekonomian daerah	LPE sektor pertanian terhadap perekonomian daerah	2,51	3,17	3,51	3,84	4,17	4,50	4,50
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Jumlah Nilai Investasi PMA (Rp)	5.351.042.700.000,-	5.886.146.970.000,-	6.474.761.667.000,-	7.112.237.833.700,-	7.834.461.617.070,-	8.617.907.778.777,-	8.617.907.778.777,-
			Jumlah Nilai PMDN (Rp)	673.313.300.000,-	740.644.630.000,-	814.709.093.000,-	896.180.000,-	985.798.000,-	1.084.377.800,-	1.084.377.800,-



Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030										
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
							2.300,-	2.530,-	2.783,-	
Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	NA	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
		Terwujudnya integrasi yang baik, efektif dan efisien antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja	Nilai SAKIP	NA	CC	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya aparatur pemerintah yang melayani, berkualitas, dan merata	IKM	NA	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik



Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030										
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat	Angka kriminalitas	5,71	4,71	4,21	3,81	3,46	3,15	3,15
Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan		Indeks Gini	0,303	0,294	0,289	0,284	0,280	0,275	0,275
		Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	14,84	26,56	32,42	38,28	44,14	50,00	50,00
		Meningkatnya perumahan layak huni	Persentase perumahan layak huni	NA	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	65,00
		Meratanya akses air bersih	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	69,90	73,27	74,95	76,63	78,32	80,00	80,00
		Meningkatkan kelestarian lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,90	67,20	68,80	70,40	72,00	73,30



Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030										
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
pengembangan wilayah		Optimalnya tata kelola lingkungan hidup	Indeks risiko bencana	NA	170	165	160	155	150	150
Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,82	6,38	6,66	6,94	7,22	7,50	7,50
		Meningkatnya potensi pariwisata Kabupaten Murung Raya	Jumlah wisatawan	41.691	52.794	58.346	63.897	69.449	75.000	75.000



BAB VI STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030,” perlu dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan target kinerja RPJMD selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Murung Raya. Dengan demikian, penyusunan strategi yang kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah harus selaras dengan misi, tujuan, sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai sebagaimana telah dijabarkan pada bab terdahulu.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Adapun arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan, melalui perumusan yang komprehensif, dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk melaksanakan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi secara menyeluruh dalam rangka menjamin proses pembangunan yang transparan, terukur dan proporsional mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Murung Raya disusun melalui serangkaian proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama lima tahun mendatang. Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan proses *consecutive* dan saling bersinergi satu



dengan yang lainnya. Sinergitas strategi dan arah kebijakan Murung Raya melalui kertas kerja perumusan kebijakan telah diselaraskan dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi pembangunan Kabupaten Murung Raya selanjutnya dijadikan prioritas pembangunan selama lima tahun dalam arah kebijakan tahunan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Misi 1: Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi pertama ini dicapai melalui strategi:

1. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan masyarakat;
2. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat;
3. Pemberian stimulus kepada masyarakat dalam pendirian PT.

Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusaha potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi kedua ini dicapai melalui strategi:

1. Optimalisasi penanganan penyandang masalah sosial;
2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberdayaan angkatan kerja;
3. Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan;
4. Optimalisasi pengelolaan UMKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam arti luas;
6. Peningkatan nilai investasi di daerah.

Misi 3: Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi ketiga ini dicapai melalui strategi:



1. Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan konsisten;
2. Peningkatan kinerja administrasi keuangan daerah;
3. Peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN Murung Raya;
4. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kehidupan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi keempat ini dicapai melalui strategi:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan prasarana perhubungan antar wilayah;
2. Pengelolaan sanitasi pemukiman secara terpadu;
3. Pembangunan sarana dan prasarana dalam kota Puruk Cahu;
4. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi air bersih;
5. Peningkatan kualitas dan kordinasi pengelolaan lingkungan hidup yang arif dan bijaksana;
6. Peningkatan pencegahan kerusakan ekosistem karena pencemaran lingkungan hidup.

Misi 5: Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif; untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi kelima ini dicapai melalui strategi:

1. Perbaiki pengelolaan manajemen kepariwisataan.

Berikut penjelasan dari masing-masing strategi pembangunan Kabupaten Murung Raya selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.

1. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan masyarakat

Pendidikan merupakan bagian dari upaya memungkinkan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Dalam UUD 1945, pendidikan diarahkan bagi seluruh rakyat dengan perhatian utama pada rakyat yang kurang mampu agar dapat



pula mengembangkan moral yang lebih baik sebagai generasi penerus bangsa. Jika ketentuan UUD 1945 dicermati maka mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap warga Indonesia dan itu merupakan kewajiban. Menghalangi dan melarang anak Indonesia (khususnya yang kurang mampu) untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar UUD 1945 dan ada sanksinya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan pelayanan pendidikan, terkhusus bagi masyarakat miskin, merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Murung Raya. Dengan bekal ilmu yang cukup, masyarakat akan mampu mengembangkan keterampilan dalam rangka meningkatkan potensi daya saing masyarakat Murung Raya.

Melihat pada capaian kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Murung Raya jika dikaitkan dengan perwujudan SDG's dan akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat, maka perbaikan akses dan pelayanan pendidikan bagi warga kurang mampu, khususnya ditingkat pendidikan dasar dan menengah, sangat mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Murung Raya dalam rangka pemerataan dan pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pendidikan dasar dan menengah diharapkan masyarakat mempunyai wawasan dan pengetahuan dasar yang berguna untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi dasar dalam membentuk kerangka pikir masyarakat sehingga diharapkan masyarakat Murung Raya dapat lebih memahami dan menyadari pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masa kini dan nanti.

Sebagai upaya awal memajukan pendidikan di Murung Raya, peningkatan tata kelola pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penjaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kata kunci dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan di Murung Raya. Dengan pelayanan pendidikan yang mudah diakses, memadai, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat diharapkan akan diperoleh hasil yang optimal dalam peningkatan pendidikan dan menjadikan masyarakat Murung Raya memiliki daya saing tinggi di kancah persaingan global. Dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang tinggi sudah dapat dipastikan



akan mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih layak, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Strategi “peningkatan akses dan pelayanan pendidikan masyarakat” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kuantitas dan pemerataan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar;
- c. Peningkatan kualitas bantuan sosial baik dari segi jumlah maupun rumah tangga sasaran; dan
- d. Peningkatan kualitas baca masyarakat melalui penggalakan perpustakaan.

2. Pemberian stimulus kepada masyarakat dalam pendirian Perguruan Tinggi

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Murung Raya, maka perlu adanya berbagai strategi yang dapat mendukung terwujudnya pendidikan masyarakat yang tinggi dan berdaya saing. Tentu saja hal tersebut memerlukan prasarana yang tidak sedikit dimana salah satu syarat pemenuhan jenjang tinggi adalah melalui pendidikan tinggi dimana Murung Raya belum memiliki Perguruan Tinggi sehingga masyarakat harus ke luar kota untuk mengenyam pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan dalam mendukung pencapaian kualitas pendidikan masyarakat melalui perencanaan pendirian perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi sehingga mampu memberikan daya saing pendidikan dengan wilayah lain.

Strategi “pemberian stimulus kepada masyarakat dalam pendirian PT” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan mendorong pembentukan yayasan untuk pembangunan perguruan tinggi oleh masyarakat beserta pemerintah daerah.

3. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat

Sama halnya dengan pembangunan bidang pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat juga merupakan investasi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya dan derajat hidup manusia. Kondisi kesehatan masyarakat Murung



Raya selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan tergolong dalam kondisi yang cukup baik, jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian penting dan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk kemudian segera dilakukan upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat Murung Raya.

Berdasarkan hasil analisis KLHS RPJMD, terdapat beberapa indikator bidang kesehatan yang selama lima tahun ke depan masih diperlukan upaya tambahan, antara lain: persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif diupayakan meningkat menjadi 50%; persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan diupayakan meningkat menjadi 85%; persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan diupayakan meningkat menjadi 85%; persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun diupayakan meningkat menjadi 95%; prevalensi tekanan darah tinggi diupayakan menurun menjadi 24,3%; angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern diupayakan meningkat menjadi 23,5%; dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi minimal 95%.

Dalam rangka mewujudkan target indikator bidang kesehatan di atas, peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Murung Raya selama lima tahun ke depan diarahkan dengan membangun kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui strategi peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan khususnya kepada penduduk yang menderita gizi buruk, ibu, bayi, anak dan penduduk/keluarga miskin secara merata hingga ke pedalaman Murung Raya. Penanganan masalah *stunting* dilakukan dengan intervensi *stunting* gizi spesifik dan sensitif. Program intervensi ini ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan dengan memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mengatasi kekurangan protein kronis, kekurangan zat besi dan asam folat,



kekurangan iodium dan menanggulangi cacingan pada ibu hamil serta melindungi dari malaria. Selain itu, disediakan juga obat cacing, suplementasi zink, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Kedua, intervensi *stunting* gizi sensitif. Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum. Intervensi gizi sensitif dilakukan dengan menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih, menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal). Selain itu juga memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) universal, memberikan pendidikan gizi masyarakat, memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Dengan meningkatnya kesadaran akan hidup sehat maka wawasan tentang pencegahan dan penanganan penyakit dapat dilakukan lebih maksimal sehingga angka kesakitan, angka kematian masyarakat dapat diminimalisir. Dengan ini, diharapkan kualitas kehidupan masyarakat Murung Raya dari aspek kesehatan dapat menjadi lebih baik.

Strategi “peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perbaikan, peningkatan jumlah, dan pemerataan sarana prasarana kesehatan;
- b. Intervensi *stunting* gizi spesifik;
- c. Penambahan tenaga medis dan paramedis di setiap unit pelayanan kesehatan di seluruh wilayah;
- d. Pembinaan masyarakat tentang pola hidup sehat; dan



- e. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat

4. Optimalisasi penanganan penyandang masalah sosial

Setali tiga uang dengan pentingnya peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan sosial ekonomi masyarakat Murung Raya juga menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Murung Raya lima tahun ke depan. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat identik dengan permasalahan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun dari tahun ke tahun, tingkat kemiskinan Murung Raya berkecenderungan meningkat, namun berbagai permasalahan yang mengiringi kemiskinan belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Strategi “Optimalisasi penanganan penyandang masalah sosial” akan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kelembagaan dalam penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- b. Optimalisasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran; dan
- c. Pembinaan, sosialisasi, maupun pemberian motivasi terhadap masyarakat miskin.

5. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberdayaan angkatan kerja

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Murung Raya tidak dapat dilaksanakan sendiri tanpa ada peran serta dan dukungan dari masyarakat dan *stakeholder*. Masyarakat merupakan sekumpulan/komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah. Komunitas masyarakat dengan berbagai keterampilan yang dimiliki akan sangat membantu dalam penyelenggaraan pembangunan jika dapat diberdayakan dengan maksimal. Memahami kondisi masyarakat Murung Raya saat ini yang memiliki kecenderungan tingkat kemandirian yang masih rendah mengakibatkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap orang lain dan pemerintah.

Menyikapi permasalahan tingginya ketergantungan masyarakat Murung Raya, perumusan strategi peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberdayaan angkatan kerja merupakan langkah jitu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri dalam berbagai aspek



kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat Murung Raya dapat lebih meningkat.

Strategi “Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberdayaan angkatan kerja” akan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemberian pelatihan bagi calon tenaga kerja (angkatan kerja) khususnya di bidang ekonomi kreatif;
- b. Peningkatan produktivitas dan distribusi tenaga kerja; dan
- c. Pengembangan lapangan kerja dan jaringan tenaga kerja.

6. Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan

Desa atau kelurahan merupakan satuan unit pemerintah daerah terkecil yang memiliki peran utama dalam menyentuh langsung perihal kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin penting dalam definisi menurut UU tersebut adalah masyarakat memiliki prakarsa dalam melaksanakan pembangunan desa atau yang biasa disebut swadaya masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, kelembagaan desa merupakan hal yang penting untuk menyukseskan pembangunan desa sehingga perlu adanya dibentuk pemerintahan desa yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sekaligus meningkatkan daya saing desa dalam pembangunan kewilayahan.

Dalam implementasi dokumen RPJMD, strategi “Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan” akan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:



- a. Peningkatan mutu kelembagaan pengawasan pembangunan desa;
- b. Peningkatan sarana prasarana pembangunan desa; dan
- c. Pembinaan masyarakat dalam kompetensi membangun desa berkualitas.

7. Optimalisasi pengelolaan UMKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Kekuatan ekonomi Kabupaten Murung Raya sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat dalam hal ini adalah suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya, menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, masyarakat merupakan penggerak utama jalannya roda perekonomian di Kabupaten Murung Raya melalui berbagai aktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Murung Raya.

Dalam rangka merealisasikan strategi “Optimalisasi pengelolaan UMKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan”, masyarakat Murung Raya diharapkan mampu berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Adapun Pemerintah Kabupaten Murung Raya lebih berperan sebagai pihak penyedia iklim yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha kecil dan menengah di Kabupaten Murung Raya melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perwujudan sistem kemitraan atau kerjasama dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM;
- b. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengembangan UKM dan Inovasi Industri; dan
- c. Pelatihan gratis dalam membuka usaha baru atau pengembangan usaha.



8. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam arti luas

Sektor pertanian sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Murung Raya. Namun demikian, pengelolaan potensi pertanian relatif belum maksimal sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih rendah. Dengan optimalisasi pengelolaan pertanian diharapkan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam arti luas. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Murung Raya melaksanakan berbagai upaya strategis untuk memajukan pertanian di Murung Raya, antara lain melalui upaya perbaikan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan ketahanan pangan, pemanfaatan teknologi informasi pertanian, serta secara kontinyu memberikan berbagai pelatihan dan penyuluhan kepada para petani Murung Raya.

Kemudian, agar hasil produksi pertanian memiliki nilai tambah, pengembangan industri kecil dalam pengelolaan komoditas unggulan dan pengolahan hasil pertanian juga menjadi alternatif solusi peningkatan komoditas pertanian Murung Raya. Upaya peningkatan nilai tambah pada komoditas unggulan dan peningkatan produksi pertanian dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi hasil olahan produk pertanian agar meningkatkan nilai ekonomisnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani di Murung Raya. Strategi “peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam arti luas” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan petani;
- b. Peningkatan ketersediaan dan penganekaragaman pangan daerah melalui TTG; dan
- c. Peningkatan kelembagaan serta penyediaan sarana produksi.

9. Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif

Investasi adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah mengingat andilnya yang besar terkait pendanaan (keuangan) terhadap setiap aspek pembangunan. Namun demikian, keberhasilan daerah dalam meningkatkan investasi



sangat bergantung pada keputusan para investor untuk menanamkan modalnya. Dalam hal ini, para investor memiliki banyak faktor yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan, antara lain faktor: sumber daya alam; sumber daya manusia; stabilitas politik dan perekonomian yang menjamin kepastian dalam berusaha; kebijakan pemerintah; dan faktor kemudahan dalam perizinan.

Kondisi investasi penanaman modal di Kabupaten Murung Raya saat ini masih terbatas sehingga perlu dicetuskan berbagai upaya peningkatan investasi dan penanaman modal daerah. Jika investasi dan penanaman modal daerah dapat meningkat maka akan tercipta penambahan lapangan kerja baru sehingga akan menekan tingkat pengangguran. Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi sangat penting untuk dilakukan agar investasi dan penanaman modal daerah di Murung Raya dapat meningkat.

Strategi “Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Investasi;
- b. Peningkatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal;
- c. Peningkatan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- d. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

10. Perbaikan pengelolaan manajemen kepariwisataan

Kabupaten Murung Raya kaya akan potensi pariwisata, baik itu wisata alam, budaya maupun buatan. Namun sayang, segala potensi wisata yang dimiliki Murung Raya (dari status 12 tempat wisata yang teridentifikasi di Kabupaten Murung Raya) hingga sekarang ini belum dikelola secara optimal dan belum dikomersialkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Murung Raya. Oleh karena itu, pengembangan sektor wisata di Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan, melalui strategi “perbaikan pengelolaan manajemen pariwisata”. Jika sektor pariwisata dikelola dengan baik maka akan memberikan tambahan pendapatan daerah untuk Kabupaten Murung Raya dari sektor pariwisata.



Belum optimalnya pengelolaan pariwisata juga terlihat dari capaian indikator jumlah wisatawan mancanegara di mana sampai pada tahun 2017 hanya sebesar 12 juta. Capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di tahun 2019 maupun PBB di tahun 2030 yaitu Meningkatkan menjadi 20 juta. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya harus segera melakukan berbagai terobosan penting kepariwisataan, antara lain melalui: pembinaan pokdarwis di lokawisata; pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata; pembangunan kelembagaan pariwisata; pemasaran pariwisata daerah; mengembangkan destinasi wisata daerah; integrasi even budaya dan olahraga daerah sebagai destinasi wisata daerah; pengembangan kemitraan; meningkatkan promosi wisata daerah; serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah.

Strategi “Perbaikan pengelolaan manajemen kepariwisataan” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Membangun sarana dan prasarana berkualitas penunjang pariwisata;
- b. Pengembangan kualitas destinasi khususnya agrowisata pertanian;
- c. Pengembangan kualitas penunjang pariwisata seperti akomodasi *homestay* dan wisata kuliner;
- d. Peningkatan promosi dan event pariwisata; dan
- e. Improvisasi dan pengembangan seni dan budaya kekhasan daerah.

11. Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan konsisten

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat masih perlu dioptimalkan. Salah satu isu penting dalam pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Implikasi dari lahirnya UU baru, maka sederet peraturan perundangan terkait lainnya perlu disesuaikan. Dalam hal ini, pengalaman dalam implementasi peraturan perundangan yang telah ada selama ini, perlu dijadikan sebagai



masuk dalam perumusan kebijakan yang akan disempurnakan. Sehingga dalam hal ini, koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan konsisten dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Strategi “Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan konsisten” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan penerapan dokumen perencanaan dalam implementasi pembangunan daerah;
- b. Penguatan inovasi, kajian, dan penelitian dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. Koordinasi terpusat antar OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

12. Peningkatan kinerja administrasi keuangan daerah

Kinerja aparatur pemerintah dalam penataan administrasi dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Untuk itu pengukuran kinerja pegawai sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan administrasi keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam administrasi keuangan dibutuhkan peningkatan kinerja administrasi keuangan daerah berbasis kinerja.

Strategi “Peningkatan kinerja administrasi keuangan daerah” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyusunan prosedur pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas;
- b. Penyusunan dan penerapan sistem alur keuangan daerah secara transparan, efektif dan akuntabel; dan
- c. Penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset.



13. Peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN Murung Raya

Pada hakikatnya, reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya aparatur. Perkembangan tata pemerintahan Kabupaten Murung Raya sekarang ini belum terlaksana dengan maksimal, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN Murung Raya agar dapat segera terwujud pemerintahan yang melayani, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN.

Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, baik dan bersih, antara lain melalui: upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perkantoran, serta perbaikan rencana/regulasi pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pembangunan. Reformasi birokrasi menjadi prioritas daerah Kabupaten Murung Raya untuk menuju pemerintah yang baik (*good governance*) dan aparatur yang bersih (*clean government*).

Strategi “Peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN Murung Raya” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. *Mapping* dan restrukturisasi penempatan ASN berdasarkan kompetensi; dan
- b. Peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi ASN serta pemerataannya.

14. Peningkatan keamanan dan ketertiban serta kondusivitas kehidupan masyarakat

Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga Murung Raya. Peningkatan kesadaran masyarakat akan kepedulian keamanan dan ketertiban lingkungan berdampak besar terhadap kenyamanan hidup masyarakat. Dengan kesadaran yang semakin meningkat secara otomatis akan menurunkan tingkat kriminalitas; meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan kearifan lokal Murung Raya; meminimalisir diskriminasi; meningkatkan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan



terhadap anak-anak. Kedisiplinan, kerjasama antarwarga, pemahaman akan pentingnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat perlu ditingkatkan dengan berbagai sosialisasi dan pelatihan yang dirasa perlu untuk membentuk masyarakat yang mengetahui peran dan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk segera diselesaikan dalam periode pembangunan lima tahun ke depan melalui rumusan strategi “Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kehidupan masyarakat” yang akan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakkan hukum;
- b. Pembinaan masyarakat tentang pentingnya menaati peraturan perundangan;
- c. Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
- d. Peningkatan intensitas penjagaan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

15. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan sarana perhubungan antarwilayah

Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan sarana perhubungan antarwilayah bertujuan untuk menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan dalam berbagai bidang. Adanya kemudahan aksesibilitas dengan infrastruktur yang memadai merupakan daya tarik terkuat bagi masuknya investasi dalam kerangka perspektif pengembangan daerah. Selain dari sisi ekonomi, adanya akses yang mudah ke berbagai wilayah di Murung Raya akan menjadikan masyarakat dapat menikmati berbagai layanan pembangunan berkualitas seperti pendidikan dan kesehatan.

Berbagai permasalahan pembangunan timbul akibat minimnya aksesibilitas wilayah. Faktor ketersediaan infrastruktur perhubungan yang rendah masih perlu ditingkatkan untuk mendukung dan memperlancar mobilisasi barang dan jasa, serta sebagai sarana untuk memperlancar hubungan antara wilayah terpencil dengan pusat-pusat pertumbuhan. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, sumber daya daerah yang tersebar merata di seluruh Murung Raya juga dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Dengan demikian, peningkatan



infrastruktur transportasi yang baik seperti halnya jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lainnya diyakini dapat memicu limpahan investasi dari wilayah sekitarnya ke Murung Raya.

Strategi “Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan sarana perhubungan antarwilayah” dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi proyek pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya jalan, jembatan, bandar udara dan fasilitas angkutan air, termasuk pemeliharannya;
- b. Penegakan aturan dan pengawasan penggunaan sarana perhubungan; dan

16. Pengelolaan sanitasi permukiman secara terpadu

Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan setiap keluarga di Murung Raya perlu terus ditingkatkan. Peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penataan perumahan dan permukiman di Murung Raya dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam upaya penataan perumahan dan permukiman, sudah merupakan standar umum terkait penyediaan utilitas umum meliputi antara lain jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, dan pemadam kebakaran. Utilitas umum membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan profesional oleh badan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Untuk



mewujudkan permukiman yang ideal, Pemerintah Kabupaten Murung Raya merumuskan strategi “Pengelolaan sanitasi permukiman secara terpadu” dilaksanakan dengan arah kebijakan:

- a. Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat.

17. Pembangunan sarana dan prasarana dalam kota Puruk Cahu

Sebagai ibukota Kabupaten, Kota Puruk Cahu seyogyanya memiliki berbagai fasilitas dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, beradab dan lestari. Selain itu, ibukota kabupaten sebagai pusat wilayah administrasi juga memiliki pertumbuhan perekonomian yang lebih signifikan dibandingkan yang lain sehingga dalam perjalanan pembangunan memiliki daya saing tertinggi diantara wilayah lain di Murung Raya. Namun dalam perkembangannya, pembangunan Kota Puruk Cahu belum dilakukan secara optimal khususnya dalam menyediakan berbagai fasilitas umum sebagai sarana dan prasarana masyarakat dalam menjalankan roda kehidupannya. Oleh karena itu, penting adanya perhatian yang intens terhadap pembangunan (khususnya fisik) Kota Puruk Cahu.

Untuk melaksanakan strategi “Pembangunan sarana dan prasarana dalam Kota Puruk Cahu” dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana umum masyarakat.

18. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi air bersih

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi Kabupaten Murung Raya membawa dampak terhadap kebutuhan dan peningkatan infrastruktur wilayah termasuk di dalamnya kebutuhan akan ketersediaan air bersih sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat yang sehat dapat terwujud salah satunya karena adanya dukungan air bersih dalam kehidupan keseharian mereka. Namun demikian, pembangunan yang diarahkan selama ini khususnya masalah pendistribusian air bersih masih terdapat kekurangan. Untuk melakukan perluasan dalam penyediaan dan distribusi air bersih, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana distribusi air bersih. Strategi “Peningkatan sarana dan prasarana distribusi air bersih” dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:



- a. Peningkatan titik sumber air baku secara merata.

19. Peningkatan kualitas dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup yang arif dan bijaksana

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang baik penting untuk segera dilakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara konsisten di segala bidang berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Peta ekoregion Pulau Kalimantan, menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung di Kabupaten Murung Raya, termasuk kategori tinggi sebesar 1.054.359,32 ha (62,37%) dan kategori rendah sebesar 221.020,46 ha (13,41%); Berdasarkan hasil analisis stok karbon di wilayah ekoregion Pulau Kalimantan untuk hutan lahan kering primer sebesar 222 ton/ha, hutan rawa primer 122 ton/ha dan hutan rawa sekunder 92 ton/ha. Dengan luas hutan 2.046.540,092 ha maka total stok karbon di Kabupaten Murung Raya adalah sebesar 398.282.335,49 ton; pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Murung Raya masih cukup baik, karena dari total Kawasan Lindung sebesar 667306,45 ha, masih merupakan kawasan hutan kering primer dan sekunder yakni 76,52% dan 22%. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Murung Raya ditinjau dari aspek banjir, kebakaran lahan dan lahan kritis menunjukkan bahwa untuk potensi banjir wilayah Kabupaten Murung Raya memiliki potensi rendah yakni sebesar 94,45% dan kategori tinggi hanya sebesar 5,5%.

Berdasar pada data capaian di atas, Kabupaten Murung Raya perlu melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, bersinergi dengan para pihak dan semua lapisan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup Murung Raya dilakukan dengan strategi “Peningkatan kualitas dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup” yang dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengelola lingkungannya;
- b. Peningkatan upaya rehabilitasi lahan secara bertahap; dan
- c. Optimalisasi penanggulangan bencana daerah.



20. Peningkatan pencegahan kerusakan ekosistem karena pencemaran lingkungan hidup

Kondisi lingkungan Kabupaten Murung Raya saat ini perlu perhatian yang cukup serius, khususnya dikarenakan tingginya dominasi sektor pertambangan dalam pembangunan perekonomian daerah. Dampak negatif dari dominasi sektor pertambangan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan berbagai efek domino bagi kerusakan ekosistem, terutama pada masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan degradasi lingkungan hidup dengan mempertimbangkan setiap kebijakan pemerintah khususnya yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan ekosistem lingkungan. Selain sektor pertambangan, permasalahan pencemaran lingkungan akibat dari pengelolaan persampahan dan limbah B3 yang kurang bijaksana juga menjadi ancaman tersendiri bagi kelestarian ekosistem.

Strategi “Peningkatan pencegahan kerusakan ekosistem karena pencemaran lingkungan hidup” dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengawasan kegiatan perekonomian yang berdampak pada lingkungan hidup, khususnya pertambangan; dan
- b. Peningkatan fungsi kelembagaan penegak perda pencemaran lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Murung Raya Tahun 2018-2023, disusunlah serangkaian strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Murung Raya periode 2018-2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030

Misi/Tujuan/Sasaran		Strategi	
Misi 1: Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif			
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter			
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	1	Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan masyarakat
		2	Pemberian stimulus kepada masyarakat dalam pendirian Perguruan tinggi
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusaha potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja			
Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan			
	Sasaran 3: Meningkatnya taraf hidup masyarakat	4	Optimalisasi penanganan penyandang masalah sosial
	Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	5	Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberdayaan angkatan kerja
	Sasaran 5: Terwujudnya pemberdayaan desa yang berkualitas	6	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan
Tujuan 3: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah			
	Sasaran 6: Meningkatnya geliat UMKM dalam perekonomian daerah	7	Optimalisasi pengelolaan UMKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan
	Sasaran 7: Meningkatnya kualitas sektor pertanian dalam perekonomian daerah	8	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam arti luas



Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030			
Misi/Tujuan/Sasaran		Strategi	
	Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Investasi daerah	9	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif
Misi 5: Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif			
	Sasaran 9: Meningkatnya Potensi Pariwisata Kabupaten Murung Raya	10	Perbaikan pengelolaan manajemen kepariwisataan
Misi 3: Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal			
Tujuan 4: Mewujudkan <i>good governance</i> secara menyeluruh			
	Sasaran 10: Terwujudnya integrasi yang baik antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja (SAKIP)	11	Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan konsisten
	Sasaran 11: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel	12	Peningkatan kinerja administrasi keuangan daerah
	Sasaran 12: Terwujudnya aparatur pemerintah Murung Raya yang berkualitas dan merata	13	Peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN Murung Raya
	Sasaran 13: Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat	14	Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kehidupan masyarakat
Misi 4: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah			
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan			
	Sasaran 14: Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	15	Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan sarana perhubungan antarwilayah
		16	Pengelolaan sanitasi pemukiman secara terpadu



Visi: Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030				
Misi/Tujuan/Sasaran			Strategi	
	Sasaran 15: Meningkatnya perumahan layak huni	17	Pembangunan sarana dan prasarana dalam kota Puruk Cahu	
	Sasaran 16: Meratanya akses air bersih	18	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi air bersih	
Tujuan 6: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup				
	Sasaran 17: Optimalnya tata kelola lingkungan hidup	19	Peningkatan kualitas dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup yang arif dan bijaksana	
		20	Peningkatan pencegahan kerusakan ekosistem karena pencemaran lingkungan hidup	

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Misi 1: Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif							
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter							
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan masyarakat	Peningkatan kuantitas dan pemerataan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar					
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar					
		Peningkatan kualitas bantuan sosial baik					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		dari segi jumlah maupun rumah tangga sasaran					
		Peningkatan kualitas baca masyarakat melalui penggalakan perpustakaan					
		Pemberian stimulus kepada masyarakat dalam pendirian Perguruan Tinggi					
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat	Perbaikan, peningkatan jumlah, dan pemerataan sarana prasarana kesehatan					
		Intervensi <i>stunting</i> gizi spesifik					
		Penambahan tenaga medis dan paramedis di setiap unit pelayanan kesehatan di seluruh wilayah					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Pembinaan masyarakat tentang pola hidup sehat					
		Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat					
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusaha potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja							
Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan							
Sasaran 3: Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Optimalisasi penanganan penyandang masalah sosial	Peningkatan kualitas kelembagaan dalam penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					
		Optimalisasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran					
		Pembinaan, sosialisasi, maupun pemberian motivasi terhadap masyarakat miskin					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberdayaan angkatan kerja	Pemberian pelatihan bagi calon tenaga kerja (angkatan kerja) khususnya di bidang ekonomi kreatif					
		Peningkatan produktivitas dan distribusi tenaga kerja					
		Pengembangan lapangan kerja dan jaringan tenaga kerja					
Sasaran 5: Terwujudnya pemberdayaan desa yang berkualitas	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan	Peningkatan mutu kelembagaan pengawasan pembangunan desa					
		Peningkatan sarana prasarana pembangunan desa					
		Pembinaan masyarakat dalam kompetensi membangun desa berkualitas					
Tujuan 3: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah							
Sasaran 6: Meningkatnya geliat UMKM dalam	Optimalisasi pengelolaan UMKM melalui	Perwujudan sistem kemitraan atau kerjasama dalam					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
perekonomian daerah	pemberdayaan ekonomi kerakyatan	pengelolaan Koperasi dan UMKM					
		Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengembangan UKM dan inovasi industri					
		Pelatihan gratis dalam membuka usaha baru atau pengembangan usaha					
Sasaran 7: Meningkatkan kualitas sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam arti luas	Optimalisasi pembinaan dan pendampingan petani					
		Peningkatan ketesediaan dan penganekaragaman pangan daerah melalui TTG					
		Peningkatan kelembagaan serta penyediaan sarana produksi					
Sasaran 8: Optimalnya penanaman modal usaha di daerah	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif	Peningkatan Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Investasi					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal					
		Peningkatan pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan					
		Peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan					
Misi 5: Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif							
Sasaran 9: Meningkatnya Potensi Pariwisata Kabupaten Murung Raya	Perbaiki pengelolaan manajemen kepariwisataan	Membangun sarana dan prasarana berkualitas penunjang pariwisata					
		Pengembangan kualitas destinasi khususnya agrowisata pertanian					
		Pengembangan kualitas penunjang pariwisata seperti akomodasi <i>homestay</i> dan wisata kuliner					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan promosi dan event pariwisata					
		Improvisasi dan pengembangan seni dan budaya kekhasan daerah					
Misi 3: Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal							
Tujuan 4: Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh							
Sasaran 10: Terwujudnya integrasi yang baik antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja (SAKIP)	Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan konsisten	Peningkatan penerapan dokumen perencanaan dalam implementasi pembangunan daerah					
		Koordinasi terpusat antar OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan					
		Penguatan inovasi kajian dan penelitian dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah					
Sasaran 11: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kinerja administrasi	Penyusunan prosedur pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawas					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	keuangan daerah	Penyusunan dan penerapan sistem alur keuangan daerah secara transparan, efektif dan akuntabel					
		Penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset					
Sasaran 12: Terwujudnya aparaturn pemerintah Murung Raya yang berkualitas dan merata	Peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN Murung Raya	Mapping dan restrukturisasi penempatan ASN berdasarkan kompetensi					
		Peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi ASN serta pemerataannya					
Sasaran 13: Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kehidupan masyarakat	Peningkatan sarana prasarana dalam penegakan hukum					
		Pembinaan masyarakat tentang pentingnya menaati peraturan perundangan					
		Peningkatan pemberdayaan perempuan					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	
		Peningkatan intensitas penjagaan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat						
Misi 4: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah								
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan								
Sasaran 14: Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan sarana perhubungan antarwilayah	Optimalisasi proyek pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya jalan, jembatan, bandar udara dan fasilitas angkutan air, termasuk pemeliharannya						
		Penegakan aturan dan pengawasan penggunaan sarana perhubungan						
Sasaran 15: Meningkatnya	Pengelolaan sanitasi	Pembinaan dan pendampingan dalam						



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
perumahan layak huni	pemukiman secara terpadu	penerapan sanitasi sehat					
	Pembangunan sarana dan prasarana dalam kota Puruk Cahu	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana umum masyarakat					
Sasaran 16: Meratanya akses air bersih	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi air bersih	Peningkatan titik sumber air baku secara merata					
Tujuan 6: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup							
Sasaran 17: Optimalnya tata kelola lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup yang arif dan bijaksana	Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengelola lingkungannya					
		Peningkatan upaya rehabilitasi lahan secara bertahap					
		Optimalisasi penanggulangan bencana daerah					
	Peningkatan pencegahan kerusakan	Peningkatan pengawasan kegiatan perekonomian yang					



Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	ekosistem karena pencemaran lingkungan hidup	berdampak pada lingkungan hidup, khususnya pertumbuhan					
		Peningkatan fungsi kelembagaan penegak perda pencemaran lingkungan					





Guna mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan pembangunan selama kurun waktu lima tahun, rumusan arah kebijakan harus mampu merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Murung Raya per tahun selama periode 2018-2023 diarahkan dengan fokus atau tema pembangunan sebagaimana tergambar berikut ini.

Gambar 6.1
Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023



Perumusan tema pembangunan Kabupaten Murung Raya dilakukan selama lima tahun pembangunan daerah dimana pada setiap temanya berusaha untuk mengimplementasikan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan pada tahun yang bersangkutan. Dalam rumusan tema pembangunan di tahun 2019 yakni “Pemenuhan infrastruktur dan konektivitas wilayah serta penguatan potensi SDM”, pemerintah berusaha untuk meningkatkan



berbagai kualitas dan kapasitas sarana/prasarana pendukung layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat Murung Raya. Selanjutnya, dalam upaya membangun perekonomian daerah maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya dalam distribusi dan pemasaran hasil produksi seperti pembangunan jalan untuk konektivitas wilayah.

Pada pembangunan tahun kedua, tema yang diusung adalah “Peningkatan nilai tambah berbagai sektor unggulan daerah khususnya sektor pertanian dan pariwisata”. Tema pembangunan ini ingin menekankan pada pembangunan ekonomi khususnya sektor pertanian dan pariwisata. Sektor pertanian diupayakan menjadi salah satu *leading sector* daerah karena memiliki dominasi yang tinggi pada pembentukan perekonomian Murung Raya sekaligus mendayagunakan potensi unggulan daerah. Sedangkan sektor pariwisata merupakan salah satu *leading sector* nasional yang digalakkan oleh pemerintah pusat karena memiliki nilai tambah yang tinggi dan berkesinambungan dalam setiap faktor produksi yang dikeluarkannya.

Tema pembangunan pada tahun ketiga lebih ditekankan pada “Penyiapan industrialisasi produk unggulan daerah berbasis potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan”. Industrialisasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah suatu barang baik secara mikro maupun menengah besar sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal pada pencapaian perekonomian. Dalam pelaksanaan industrialisasi harus mewacanakan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sehingga akan terealisasi pembangunan berkelanjutan. Dalam implementasi pembangunan tahun ketiga ini, perlu adanya pengembangan kualitas pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang dapat menunjang perekonomian daerah. Hal ini tentu akan berdampak positif juga pada



peningkatan kualitas tenaga kerja dan berbanding lurus terhadap kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, selain berfokus pada SDM, tema pembangunan ini juga ingin mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan stabil.

Pembangunan pada tahun keempat berfokus pada tata pemerintahan dan pengembangan desa untuk kesejahteraan masyarakat dengan tema “Penguatan daya saing daerah berbasis SDA terbarukan dan pengembangan pedesaan didukung penguatan manajemen sumber daya aparatur”. Dalam implementasinya, pembangunan tahun keempat akan dilakukan penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berbasis teknologi informasi. Upaya tersebut juga secara tidak langsung memberdayakan desa. Dari segi perekonomian, maka perlu adanya tatanan kelembagaan yang solid dan mengupayakan penguatan kerjasama pengelolaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kualitas tenaga kerja.

Pada tahun terakhir pembangunan jangka panjang daerah yakni tahun kelima, tema yang diangkat untuk mewujudkan pembangunan Murung Raya adalah “Pemantapan kesejahteraan masyarakat menuju Murung Raya Emas 2030”. Diharapkan pada akhir pembangunan di tahun 2023 akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang hakiki untuk mewujudkan cita-cita Murung Raya Emas pada tahun 2030. Berbagai pemantapan kebijakan strategis harus diupayakan dalam mewujudkan Murung Raya Emas ini seperti Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan merata di setiap daerah, Pemantapan kondisi masyarakat yang tentram, tertib dan nyaman melalui pengayoman dan pemupukan nilai-nilai pancasila, Peningkatan standar hidup masyarakat dengan penerapan kebijakan yang pro investasi, dan penggunaan teknologi informasi yang mempercepat terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mendukung perwujudan kesejahteraan rakyat.



Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung jawab
						Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1: Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif																
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter																
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan masyarakat tidak mampu	Peningkatan kuantitas dan pemerataan sarana prasarana kegiatan belajar mengajar	Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Rata - Rata Capaian Bidang Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	0	17,26	10191	19,39	11450	19,43	11470	20,92	12350	23,00	13578	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar	Program Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rata-Rata Capaian Bidang Program Pembinaan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	0	1,10	1050	22,65	2050	25,97	2350	25,97	2350	24,31	2200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan kualitas bantuan sosial baik dari segi jumlah maupun rumah tangga sasaran	Program manajemen pelayanan pendidikan	Rata - Rata Capaian Bidang Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0	4,01	400	25,31	2525	22,21	2215	24,26	2420	24,21	2415	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan kualitas baca masyarakat melalui penggalakan perpustakaan	Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan dan Taman Baca Masyarakat (TBM)	Rata-rata capaian Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan dan Taman Baca	100%	38,28	972,3	6,61	168	12,60	320	16,93	430	25,59	650	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

				Masyarakat (TBM)												
			Program penataan administrasi kependudukan	Rata-rata capaian perangkat daerah bidang penataan administrasi kependudukan	100%	20	1237,48	20	1237,48	20	1246,69	20	1576,68 642	20	1926,69	Dinas Dukcapil
	Pemberian stimulus kepada masyarakat dalam pendirian Perguruan Tinggi	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan mendorong pembentukan yayasan untuk pembangunan perguruan tinggi oleh masyarakat beserta pemerintah daerah	Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Rata-Rata Jumlah bantuan/ hibah	0	6,45	100	22,58	350	23,23	360	24,52	380	23,23	360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat	Perbaikan, peningkatan jumlah, dan pemerataan sarana prasarana kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusk esmas Pembantu dan jaringannya	Rata - Rata Capaian Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /Pu skesmas Pembantu dan jaringannya	97,19	1,02	600,10425	17,47	10265	26,04	15300	25,01	14700	30,46	17900	Dinas Kesehatan
		Intervensi stunting gizi spesifik	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rata - Rata Capaian Program Perbaikan Gizi Masyarakat	99,96	3,54	55	9,65	150	9,65	150	22,90	550	22,90	650	Dinas Kesehatan
		Penambahan tenaga medis dan paramedis di setiap unit pelayanan kesehatan di seluruh wilayah	Program Pengembangan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Rata- Rata Capaian Program Pengembangan dan Pendayagunaan n SDM Kesehatan	86,6	1,01	10	21,61	215	21,61	215	21,61	215	34,17	340	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi	Rata- Rata Capaian Program Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi	97,88	2,06	30	17,08	248,11775 7	17,55	254,953 76	25,46	370	37,85	550	Dinas Kesehatan



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

			Pembinaan masyarakat tentang pola hidup sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rata - Rata Capaian Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	99,05	2,30	75	21,59	705	24,35	705	24,35	755	24,35	1025	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Pasien	70 % Puas	75 % Puas	32000	79 % Puas	32000	83 % Puas	32000	87 % Puas	32000	90 % Puas	32000	RSUD Puruk Cahu
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	75%	80%	6492,13515	85%	9000	90%	8000	95%	8000	99%	8150	RSUD Puruk Cahu
<p>Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja</p>																	
<p>Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan</p>																	
	Sasaran 3: Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Optimalisasi penanganan penyandang masalah sosial	Peningkatan kualitas kelembagaan dalam penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Rata-rata Capaian Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	97000	2,44	10	24,39	100	24,39	100	24,39	100	24,39	100	Dinsos
				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rata-rata Capaian Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	2100000	9,68	15	22,58	35	22,58	35	22,58	35	22,58	35	Dinsos
				Optimalisasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rata-rata Capaian Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100000	5,83	125	23,31	500	24,24	520	23,31	500	23,31	500



		Pembinaan, sosialisasi, maupun pemberian motivasi terhadap masyarakat miskin	Program Gerakan Membangun Desa Mengatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-Rata Pelaksanaan Gerbang Desamu	116	100	100	100	400	100	300	100	300	100	300	DPMD
Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberdayaan angkatan kerja	Pemberian pelatihan bagi calon tenaga kerja (angkatan kerja) khususnya di bidang ekonomi kreatif	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja berkompentensi	11%	8%	593	40%	3028	16%	1183	13%	1020	23%	1770	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Peningkatan produktivitas dan distribusi tenaga kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0	14%	90	22%	140	22%	140	22%	140	22%	140	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengembangan lapangan kerja dan jaringan tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	17%	20%	47	20%	47	20%	47	20%	47	20%	47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sasaran 5: Terwujudnya pemberdayaan desa yang berkualitas	Peningkatan kualitas pembangunan wilayah perdesaan	Peningkatan mutu kelembagaan pengawasan pembangunan desa	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Tercapainya pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran sampai dengan pelaporan	88,43	98	298,1568	98	505	98	555	98	602,5	98	670	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	Rata-rata Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	100	100	354	0	950	0	950	0	950	0	950	DPMD
		Peningkatan sarana prasarana pembangunan desa	Program Pembinaan Desa Perbatasan	Rata-rata Pembinaan Desa Perbatasan	-	100	55,5	100	200	100	200	100	200	100	200	DPMD
		Pembinaan masyarakat dalam kompetensi membangun desa berkualitas	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan	Rata-rata Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan	-	100	281	100	450	100	450	100	450	100	450	DPMD
Tujuan 3: Meningkatkan daya saing perekonomian daerah																



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Sasaran 6: Meningkatnya geliat UMKM dalam perekonomian daerah	Optimalisasi pengelolaan UMKM melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Perwujudan sistem kemitraan atau kerjasama dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rata-rata Capaian Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	29	13,42	155,65	64,21	545	7	545	7	545	7	545	Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		Peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengembangan UKM dan inovasi industri	Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rata-rata Capaian Pengembangan Industri Kecil Menengah	16,67	14,18	1711,5	4,27	1620	6	2620	5	2620	5	2620	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		Pelatihan gratis dalam membuka usaha baru atau pengembangan usaha	Program Peningkatan Akses Pembinaan Organisasi Dan Usaha Koperasi Dan Ukm	Rata-rata Capaian Peningkatan Akses Pembinaan Organisasi Usaha Koperasi dan UKM	0	20	0	0	420	5	420	5	420	5	420	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
Sasaran 7: Meningkatnya kualitas sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam arti luas	Optimalisasi pembinaan dan pendampingan petani	Program Pengembangan Agribisnis	Jumlah pengusaha agribisnis baru	135	150	526	165	403	180	484	195	580	110	696	Dinas Pertanian dan Perikanan	
			Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluhan	384	384	61	1536	300	1536	400	1536	500	1536	600	Dinas Pertanian dan Perikanan	
		Peningkatan ketersediaan dan pengankaragaman pangan daerah melalui TTG	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Jumlah ketersediaan dan distribusi Pangan di tingkat Rumah Tangga yang beragam Gizi, seimbang dan Aman (B2SA) di 10 Kecamatan	26	15	325	20	450	21	650	21	685	21	715	Dinas Ketahanan Pangan	
			Peningkatan kelembagaan serta penyediaan sarana produksi	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi peternakan (Daging sapi, ayam dan telur)/ton	1602	1602	4827	1825	8106	1948	9728	2080	11673	2220	14008	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Program Pengembangan usaha tani menetap	Jumlah petani baru Secara menetap	0	1	270	1	389	1	467	1	560	1	672	Dinas Pertanian dan Perikanan



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Sasaran 8: Optimalnya penanaman modal usaha di daerah	Peningkatan iklim investasi daerah yang kondusif	Penjaminan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam berusaha	Program pengembangan Industri Kerajinan dan Industri Rumah Tangga	Rata-rata Capaian Pengembangan Industri Kerajinan dan Rumah Tangga	22,16	18,46	23	1510	655	6	655	6	655	6	655	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Koordinasi antara pengusaha dengan OPD terkait dalam mengkaji biaya produksi	Program perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rata-rata Capaian Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	95%	11,11	1439,5	5	1200	4	2200	3,02	2237,062	3,02	2270	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
			Program peningkatan Pengelolaan Pasar	Rata-rata Capaian Peningkatan Pengelolaan Pasar	10	70	79,825	8	435	4	435	4	435	4	435	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi	Program Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp. 2.137.869.620.000,00	Rp. 2.150.000.000.000,00	240,1	Rp. 2.200.000.000.000,00	260	Rp. 2.250.000.000.000,00	260	Rp. 2.300.000.000.000,00	470	Rp. 2.350.000.000,00	770	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	-	-	91,1	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi 5: Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif																
Sasaran 9: Meningkatnya Potensi Pariwisata Kabupaten Murung Raya	Perbaikan pengelolaan manajemen kepariwisataan	Membangun sarana dan prasarana berkualitas penunjang pariwisata	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rata-Rata Jumlah Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	4	1	80	1	50000	1	400	4	1900	2	2350	Dinas Perhubungan
		Pengembangan kualitas destinasi khususnya agrowisata pertanian	Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Jumlah pengusaha agribisnis baru perkebunan	40	50	1644	60	1839	70	2207	80	2648	90	3178	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Program Peningkatan Budidaya Perikanan	Jumlah pengusaha baru sektor Budidaya ikan lokal	1	1	96	1	115	1	138	1	166	1	199	Dinas Pertanian dan Perikanan



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

			Pengembangan kualitas penunjang pariwisata seperti akomodasi homestay dan wisata kuliner	Program Pembangunan Sarana Perdagangan	Rata-rata Capaian Pembangunan Sarana Perdagangan	6	12,9	3134	10,2	1250	4,5	2750	3,2	3250	3,3	4250	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
			Peningkatan promosi dan event pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	20	10	20	395	20	510	20	400	20	400	Disparpora	
				Program Pengembangan destinasi pariwisata	Tersedianya Pengembangan Destinasi Pariwisata	0	20	1976,5	20	1500	20	1500	20	1500	20	1500	Disparpora	
			Improvisasi dan pengembangan seni dan budaya kekhasan daerah	Program pengembangan nilai budaya	Tersedianya Program pengembangan nilai budaya	0	20	375	20	1085	20	1010	20	970	20	1000	Disparpora	
Misi 3: Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal																		
Tujuan 4: Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh																		
	Sasaran 10: Terwujudnya integrasi yang baik antara sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja (SAKIP)	Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan secara terintegrasi dan konsisten	Peningkatan penerapan dokumen perencanaan dalam implementasi pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	96,66	21,55	5262,4	14,52	3545	16,91	4130	16,91	4130	30,10	7350	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Koordinasi terpusat antar OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Program Pembinaan dan Pengembangan e-Government	Rata-rata capaian Program Pembinaan dan Pengembangan e-Government	6	7 Kali	75	7	75	7	70	7	100	7	60	Diskominfo
				Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tepat Guna	Rata-rata Peningkatan Kapasitas Posyantek Tepat Guna	-	100	95,4	100	412	100	340	100	340	100	340	100	340



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

		Penguatan inovasi kajian dan penelitian dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah	Program Pembangunan Pusat Data Perencanaan	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pengembangan Pusat Data Perencanaan	99,56	28,92	427,2	30,46	450	13,54	200	13,54	200	13,54	200	Bappeda
			Program Inovasi Pembangunan Daerah	Jumlah inovasi daerah yang dilaksanakan dalam kebijakan pembangunan daerah	0	19,85	1042,9	14,28	750	17,80	935	23,80	1250	24,27	1275	Bappeda
			Program Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian Pengendalian Pembangunan	0	1	163	1	163,5	1	195	1	198	1	209	Setda
Sasaran 11: Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kinerja administrasi keuangan daerah	Penyusunan prosedur pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Tercapainya pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran sampai dengan pelaporan	88,43	98	298	98	505	98	555	98	603	98	670	BPKAD
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi kinerja dan keuangan yang akurat	88,82	98	3273	98	4797	98	5534	98	5803	98	6060	BPKAD
			Penyusunan dan penerapan sistem alur keuangan daerah secara transparan, efektif dan akuntabel	Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi e-Government	Rata-rata capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi e-Government	0	0%	0	1	40	1	40	1	100	1	0



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

			Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	0	9,65	1183	17,93	2198	20,66	2533	25,25	3096	26,51	3251	Inspektorat
Sasaran 12: Terwujudnya aparatur pemerintah Murung Raya yang berkualitas dan merata	Peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN Murung Raya	Mapping dan restrukturisasi penempatan ASN	Program Mutasi dan Kepangkatan Pegawai	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	100	100	208,5	100	285	100	395	100	395	100	485	BKPSDM
			Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Informasi Aparatur	Persentase Terpenuhinya Data dan Informasi Kepegawaian	0	100	246	100	744	100	563	100	563	100	563	BKPSDM
		Peningkatan kualitas, kualifikasi dan kompetensi ASN serta pemerataannya	Program Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan Karier Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang berkualitas dan profesional pada jabatan struktural	0	100	821	100	804	100	4135	100	2135	100	2135	BKPSDM
Sasaran 13: Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kehidupan masyarakat	Peningkatan sarana prasarana dalam penegakan hukum	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase pekat	100 %	100 %	200	100 %	250	100 %	300	100 %	350	100 %	440,843 24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Pembinaan masyarakat tentang pentingnya menaati peraturan perundangan	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase masyarakat mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	210,38477 2	100 %	350	100 %	400	100 %	400	100 %	540	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Peningkatan pemberdayaan perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Rata-Rata Capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak	75	0	47	0	300	0	350	0	350	0	400	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

			Peningkatan intensitas penjagaan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Terlaksananay a semua kegiatan sosialisasi	1 kecamatan	2 Kecamatan	200	3 Kecamatan	224	5 Kecamatan	500	7 Kecamatan	700	8 Kecamatan	800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 4: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah																	
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan																	
	Sasaran 14: Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan sarana perhubungan antar wilayah	Optimalisasi proyek pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya jalan, jembatan, bandar udara dan fasilitas angkutan air, termasuk pemeliharaannya	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya Pembangunan /peningkatan infrastruktur	10 Bangunan /Pekerjaaa n	15 Bangunan	7500	15 Bangunan	9000	15 Bangunan	9000	15 Bangunan	9000	15 Bangunan	9000	DPUPR
	Penegakan aturan dan pengawasan penggunaan sarana perhubungan		Penegakan aturan dan pengawasan penggunaan sarana perhubungan	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rata- Rata Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan angkutan	49	49	258	49	225	49	275	49	295	49	295	Dinas Perhubungan
Program pembangunan jalan dan jembatan				Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan	50 Km	10 Km	50000	10 Km	44017	10 Km	44149	10 Km	41065	10 Km	46891	DPUPR	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dal aliran sungai	0	0,5 km	1000	0,5 km	1200	0,5 km	1200	0,5 km	1200	0,5 km	1200	DPUPR	
Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan				Rata-Rata Jumlah Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	4	1	80	1	50000	1	400	4	1900	2	2350	Dinas Perhubungan	



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Rata-rata capaian program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0	13 Informasi	50	20	150	20	150	22	185	22	485	Diskominfo
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rata-Rata Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	0	2	27,5	3	53	3	75	3	50	3	50	Dinas Perhubungan
Sasaran 15: Meningkatnya perumahan layak huni	Pengelolaan sanitasi permukiman secara terpadu	Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat	Program Lingkungan sehat Perumahan	Rata-rata Capaian lingkungan sehat perumahan bidang Kawasan Permukiman	85%	20%	250	20%	1017	20%	1017	20%	1150	20%	1350	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
	Pembangunan sarana dan prasarana dalam kota Puruk Cahu	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana umum masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata Capaian pengembangan perumahan bidang Perumahan	96%	50%	300	0%	5457	0%	5457	0%	8616	0%	16693	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
Sasaran 16: Meratanya akses air bersih	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi air bersih	Peningkatan titik sumber air baku secara merata	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan perluasan jangkauan distribusi air minum	25 Desa	25 Desa	2500	25 Desa	4144,95555	25 Desa	4475	25 Desa	4475	10 Desa	4475	DPUPR	
Tujuan 6: Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup																	
Sasaran 17: Optimalnya tata kelola lingkungan hidup	Peningkatan kualitas dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup	Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengelola lingkungannya	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Limbah berbahaya dan Beracun (LB3)	Peresentase Pengelolaan Sampah dan LB3	1210	13	784,87	16	935	21	1280	25	1505	24	1455	DLH	
		Peningkatan upaya rehabilitasi lahan secara bertahap	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas air dan Indeks Kualitas Udara	315,06	7,28	354,07	19,84	965	20,14	980	24,83	1208	27,91326744	1358	DLH	



RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

			Optimalisasi penanggulangan bencana daerah	Program Darurat Bencana	Persentase korban bencana yang berhasil ditangani	0,92	13,03	292,25	17,84	400	20,07	450	22,30	500	26,76	600	BPBD
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase menurunnya korban terdampak bencana	90%	3,01	40,4	22,01	295	23,50	315	24,99	335	26,48	355	BPBD
		Peningkatan pencegahan kerusakan ekosistem karena pencemaran lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan kegiatan perekonomian yang berdampak pada lingkungan hidup, khususnya pertambangan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Presentasi wilayah yang dikonservasi	0	0	0	10,11	140	19,13	265	35,38	490	35,38	490	DLH
			Peningkatan fungsi kelembagaan penegak perda pencemaran lingkungan	Program Pengembangan Masyarakat Hukum Adat	Penetapan Hak MHA	0	3,17	43,93	14,45	200	16,62	230	25,65	355	40,10	555	DLH
Total P1								149.481		281.777		197.337		205.696		236.569	





6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kabupaten Murung Raya adalah Kabupaten/kota terluas di Provinsi Kalimantan Tengah dengan wilayah seluas 23.700 km² atau 15,43 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan RPJMD Kabupaten Murung Raya 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038.

Dalam Bab VI RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ditetapkan pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan daerah. Setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah diarahkan pembangunan kewilayahannya dengan memerhatikan aspek keruangan (spasial) sehingga setiap potensi daerah dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi yang disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibagi menjadi 3 Zona, yaitu: Zona 1 (Barat), Zona 2 (Tengah), dan Zona 3 (Timur). Kabupaten Murung Raya termasuk dalam Zona 3 (Timur) dengan potensi prioritas dalam bidang: Batubara; Hasil hutan (kayu, rotan, dll); Karet dan *Heart of Borneo* (HoB).

Adapun pengembangan potensi ke depan diarahkan kepada:

1. Pembangkit tenaga listrik;
2. Industri berbasis hasil hutan;
3. Industri berbasis karet (*rubber industry*); dan
4. Konservasi Hayati di pegunungan Muller Schwaner.

Kabupaten Murung Raya memiliki beberapa sektor unggulan yang menjadi potensi daerah antara lain pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan,

pariwisata dan transportasi. Dari berbagai sektor unggulan tersebut sektor perkebunan menjadi unggulan Kabupaten Murung Raya dengan komoditi utama Karet. Perkebunan karet merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Murung Raya. Salah satu kelemahan di sektor komoditi karet di Murung Raya saat ini yaitu belum adanya standar karet. Harga karet tergantung kepada mekanisme pasar. Sebagian besar masyarakat Murung Raya mengandalkan kehidupan dari komoditi ini. Karena itu besar harapan petani agar para pegambil kebijakan baik Pemerintah Murung Raya maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat membuat kebijakan tentang standar harga karet.

Tabel 6.4
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis
Komoditi Karet di Kabupaten Murung Raya

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">▪ Tanaman karet bisa diperbaharui.▪ Adanya peluang pengembangan melalui ekstensifikasi dan instensifikasi.	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum ada asosiasi usaha tani karet.▪ Harga karet fluktuatif dan cenderung rendah. Harga masih dikuasai oleh tengkulak.
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan
<ul style="list-style-type: none">▪ Pemasaran mudah dan lancar.▪ Bahan baku mudah diperoleh dan banyak tersedia.▪ Mudah dibudidayakan, terlebih karena mayoritas penduduk memiliki usaha perkebunan karet secara turun temurun dan menguasai teknologi.	<ul style="list-style-type: none">▪ Tanaman karet banyak yang sudah tua, sehingga produksi tidak stabil.▪ Kadar air karet masih tinggi.▪ Petani sulit mendapatkan bibit unggul yang bersertifikasi.▪ Budidaya tanaman karet masih bersifat tradisional sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal.▪ Perawatan tanaman karet yang masih kurang.▪ Kurangnya pemberian sarana produksi antara lain: pisau sadap, talang, asam semut dan mesin press.▪ Masih di jual dalam bentuk lump.

Sumber: Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021



Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten yang maju mandiri melalui optimasi pemanfaatan ruang dan pengembangan perkebunan berbasis industri yang berwawasan lingkungan. Adapun arah kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Murung Raya sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038, meliputi:

1. Pemerataan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan;
 - b. meningkatkan konektivitas pusat-pusat kegiatan kabupaten yaitu antara PKL-PKLp-PPK-PPL;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wilayah pendukung ekonomi;
 - d. meningkatkan fungsi kawasan sebagai pendukung pengembangan agropolitan;
 - e. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya alam;
 - f. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - g. membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi; dan
 - h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi.
2. Peningkatan kualitas lingkungan, meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi kawasan hutan lindung;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan resapan air;
 - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat;
 - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;



- e. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana; dan
 - f. memantapkan kawasan lindung disertai dengan pemantapan zonasi.
3. Pengembangan kawasan budidaya untuk agroindustri dan potensi lokal, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perkebunan dengan memerhatikan keseimbangan lingkungan;
 - b. mengembangkan agropolitan untuk mengoptimalkan potensi perkebunan;
 - c. mengembangkan kawasan pertambangan berbasis teknologi ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan industri berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung agropolitan;
 - f. mengembangkan komoditi unggulan dikawasan agropolitan;
 - g. mengembangkan kawasan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan; dan
 - h. Memperlancar sirkulasi pengangkutan hasil perkebunan, pertambangan dan pertanian menuju industri pengolahan.
4. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan Kawasan lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona



penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan

- d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Adapun Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Murung Raya meliputi:

- a. Pusat-pusat kegiatan; mencakup PKL, PKLp, PPK dan PPL.
- b. Rencana sistem jaringan prasarana utama; mencakup sistem jaringan transportasi darat; kereta api; dan transportasi udara.
- c. Rencana sistem prasarana lainnya; mencakup sistem jaringan prasarana energi, prasarana telekomunikasi dan prasarana sumber daya air.
- d. Rencana sistem prasarana lingkungan, mencakup: sistem jaringan persampahan, sanitasi dan limbah, drainase, dan sistem jaringan air minum.

Kemudian, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Murung Raya meliputi: rencana kawasan lindung; rencana kawasan budidaya; dan rencana kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (*Outline*).

1). Kawasan Hutan Lindung, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung; dengan luas kurang lebih 501.388 hektar.

Tabel 6.5
Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	13.341
2	Laung Tuhup	873
3	Murung	-
4	Permata Intan	3.572
5	Seribu Riam	359.975
6	Sungai Babuat	265
7	Sumber Barito	12.601



No	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung (Ha)
8	Tanah Siang	21.607
9	Tanah Siang Selatan	-
10	Ut Murung	89.153
Jumlah		501.387

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038

- b. kawasan perlindungan setempat; merupakan kawasan perlindungan setempat kabupaten, meliputi:
 - a) sempadan sungai, dengan luas kurang lebih 14.169 hektar; dan
 - b) kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; berupa jalur hijau, pemakaman umum, lapangan olah raga; dan hutan kota.
- c. kawasan hutan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; meliputi:
 - a) kawasan Suaka Alam Bukit Sapat Hawung dengan luas 186.931 hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Ut Murung seluas 156.755 hektar.
 2. Kecamatan Seribu Riam seluas 30.176 hektar.
 - b) kawasan Cagar Budaya yang meliputi:
 1. Rumah Betang Konut terletak di Kecamatan Tanah Siang.
 2. Rumah Betang Bantian terletak di Kecamatan Permata Intan.
 3. Rumah Betang Apat terletak di Kecamatan Sungai Babuat.
 4. Bukit Puruk Kambang di Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, merupakan kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten Murung Raya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan tanah longsor, terdapat di:



- o Sepanjang ruas jalan antarkabupaten dari Kabupaten Barito Utara ke Kabupaten Murung Raya;
 - o Sepanjang ruas jalan di ibu kota kabupaten menuju ke kecamatan/kelurahan dan desa yang berada di Kabupaten Murung Raya; dan
 - o Sepanjang daerah aliran sungai yang berada di Kabupaten Murung Raya.
- b. Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Murung, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Permata Intan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Uut Murung, Kecamatan Seribu Riam.
- c. Daerah evakuasi bencana diarahkan pada ruang terbuka, kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, tempat ibadah, dan gedung sekolah terdekat yang aman dari bencana.
- d. Jalur evakuasi bencana menggunakan jaringan jalan dan jalur sungai yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.

2). Kawasan Budidaya, meliputi:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 1.558.147 hektar, meliputi kawasan Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 199.835 hektar, kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 1.225.625 hektar, dan kawasan Hutan Produksi Konversi seluas kurang lebih 132.687 hektar.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian, seluas kurang lebih 81.018 hektar, yang mencakup kawasan pertanian seluas 75.541,8 ha,



kawasan peternakan seluas 540,8 ha dan Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian seluas 4.935,7 ha.

c. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan, seluas kurang lebih 88.625 hektar, dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 6.6
Kawasan Peruntukan Perkebunan Kabupaten Murung Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung (Ha)
1	Barito Tuhup Raya	17.793,8
2	Laung Tuhup	34.803,8
3	Murung	13.148,7
4	Permata Intan	10.951,2
5	Seribu Riam	-
6	Sungai Babuat	6,8
7	Sumber Barito	4261,7
8	Tanah Siang	3591,7
9	Tanah Siang Selatan	3626,9
10	Uut Murung	441,4
Jumlah		88.625

Sumber: RTRW Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038

d. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan seluas kurang lebih 1.109.409,74 hektar, berupa kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan pertambangan batuan, yang terbagi atas wilayah tambang seluas 1.059.313,41 ha dan Wilayah Pertambangan Rakyat seluas 43.153 ha.

e. Kawasan Peruntukan Pariwisata

(1) Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:

- a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
- b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
- c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya, meliputi:



- a. Rumah Betang Konut di Kecamatan Tanah Siang;
- b. Rumah Betang Tumbang Bantian di Kecamatan Permata Intan;
- c. Rumah Betang Apat di Kecamatan Sungai Babuat; dan
- d. Rumah Adat dan Budaya Dayak di Kecamatan Murung.

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam, meliputi:

- a. Arung Jeram di Kecamatan Sumber Barito;
- b. Arung Jeram di Kecamatan Uut Murung;
- c. Pegunungan Mueller di Kecamatan Uut Murung;
- d. Air Terjun Bumbun di Kecamatan Tanah Siang; dan
- e. Liang Pandan di Kecamatan Murung.

(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan, meliputi:

- a. Jembatan Pajai di Kecamatan Uut Murung; dan
- b. Tugu Equator di Kecamatan Uut Murung.

f. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman, seluas kurang lebih 5.199,59 hektar meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan, seluas 867,44 hektar, kawasan peruntukan permukiman perdesaan, seluas 4332.15 hektar, kawasan transmigrasi, seluas 3.312,15 hektar.

g. Kawasan Peruntukan Industri

(1) Kawasan peruntukan industri, meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri rumah tangga; dan
- b. kawasan peruntukan industri sedang dan besar.

(2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga, tersebar di setiap kecamatan.



- (3) Kawasan peruntukan industri sedang dan besar, terkonsentrasi di Kecamatan Murung dan Kecamatan Laung Tuhup seluas kurang lebih 1.000 hektar.

h. Kawasan Peruntukan Budidaya Lain

Kawasan peruntukan budidaya lain, meliputi:

- a. kawasan militer yang terdiri dari kodim yang berada di Kota Puruk Cahu, Koramil disetiap kecamatan, Polres di Kota Puruk Cahu, Polsek berada di setiap kecamatan;
- b. hutan kota di Kecamatan Murung seluas kurang lebih 290 hektar; dan
- c. Kawasan untuk kegiatan pemerintahan, permukiman, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas umum, fasilitas sosial, pertambangan rakyat, industri dan perdagangan dan jasa.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah dalam RPJMD bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2018-2023. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan yang paling berdaya ungkit untuk mencapai *outcome* program.

Program pembangunan daerah selain dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, juga dalam rangka mencapai program unggulan



Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya 2018-2023. Penjabaran program-program unggulan tersebut diterjemahkan kedalam program perangkat daerah yang selanjutnya menjadi prioritas dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi bagian dari program pembangunan daerah.





BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Hubungan antara pemerintah daerah dengan perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dituangkan secara eksplisit ke dalam program perangkat daerah, baik strategis maupun operasional, di mana kinerjanya merupakan tanggung jawab kepala perangkat daerah. Adapun, untuk program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama kepala perangkat daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Selain itu, terhadap program prioritas yang bersifat strategis; perencanaan, pengendalian dan evaluasi dilakukan lebih dulu intensitasnya dibandingkan dengan yang operasional. Demikian pula dengan aspek penganggarannya, juga harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Dalam rangka memastikan bahwa setiap program pembangunan daerah mendapatkan pendanaan dengan baik dan tepat maka kapasitas kemampuan riil keuangan daerah harus diperhatikan dengan seksama. Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat. Idealnya, kapasitas riil keuangan daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan.

Pada RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 diproyeksikan bahwa pengeluaran daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat cenderung meningkat, sementara peningkatan penerimaan daerah diproyeksikan akan meningkat dari 1.281.901 (juta rupiah) di tahun 2018 menjadi 1.666.141 (juta rupiah) di tahun 2023. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.



Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023
Kabupaten Murung Raya (Juta Rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas Riil (1-2)	588.097	777.595	790.815	832.251	900.921
1	PENERIMAAN DAERAH	1.281.901	1.482.164	1.528.039	1.583.206	1.666.141
	a Pendapatan Daerah	1.273.288	1.361.596	1.430.137	1.486.599	1.565.477
	b Penerimaan Pembiayaan	8.613	120.568	97.902	96.607	100.664
2	PENGELUARAN DAERAH	693.805	704.569	737.224	750.955	765.220
	a Belanja Tidak Langsung	686.590	697.354	713.342	727.073	741.338
	b Pengeluaran Pembiayaan	7.215	7.215	23.882	23.882	23.882



Guna mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan OPD dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang, disusun indikasi rencana program prioritas Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (*outcomes*) yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan arahan Presiden Indonesia, dalam menyusun indikasi program dan perencanaan pendanaan diterapkan prinsip "*money follow program*", yaitu prinsip pengalokasian anggaran atau dana yang tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan tetapi dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi, misi dan pelayanan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip "*money follow program*", diharapkan program-program strategis dan prioritas mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program pembangunan daerah.

Selain prinsip "*money follow program*", strategi yang juga diterapkan dalam penyusunan indikasi program dan kerangka pendanaan adalah sinkronisasi dan kolaborasi program. Salah satu kelemahan perencanaan di pemerintahan adalah tidak sinerginya OPD dalam menyusun program sehingga banyak program yang mirip tersebar di berbagai OPD dengan anggaran yang relatif kecil. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan program dan hasil yang didapat tidak maksimal. Sinkronisasi dan kolaborasi program akan menyelaraskan program-program yang tersebar di berbagai OPD dengan karakteristik tujuan dan sasaran yang sama sehingga diharapkan program yang disusun dan dilaksanakan dapat memberikan dampak dan hasil yang lebih besar karena sumber daya yang dialokasikan juga lebih maksimal.



Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	URUSAN WAJIB														
1.01	Pendidikan														
1.01.01	Dinas Pendidikan				72.630,00	99.554,50	106.147,00	112.035,00	115.258,00						
1.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,74	17,71	5.750,00	20,45	6.640,00	19,84	6.440,00	21,75	7.060,00	20,25	6.575,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	99,75	-	-	32,26	200,00	25,81	160,00	16,13	100,00	25,81	160,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,85	17,13	560,00	19,88	650,00	18,35	600,00	23,24	760,00	21,41	700,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96,21	2,74	300,00	23,97	350,00	23,97	350,00	25,34	370,00	23,97	350,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94,03	5,83	75,00	28,16	145,00	19,42	100,00	23,30	120,00	23,30	120,00	100	Dinas Pendidikan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.01 33	Program Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Nonformal	Rata - Rata Capaian Bidang Program Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Nonformal	88,25	1,87	1.085,00	23,33	1.185,00	23,62	1.200,00	25,59	1.300,00	25,59	1.300,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 34	Program Kelembagaan, Sarana, Prasarana PAUD dan Non Formal	Rata - Rata Capaian Program Kelembagaan, Sarana, Prasarana PAUD dan Non Formal	99,98	1,64	60,00	27,40	1.000,00	23,29	850,00	23,84	870,00	23,84	870,00	100	
1.01.01 35	Program Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD	Rata - Rata Capaian Bidang Program Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD	99,21	1,40	1.150,00	24,95	1.250,00	24,95	1.250,00	23,95	1.200,00	24,75	1.240,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rata-Rata Capaian Bidang Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	99,75	6,45	100,00	22,58	350,00	23,23	360,00	24,52	380,00	23,23	360,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata - Rata Capaian Bidang Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	99,11	4,01	400,00	25,31	2.525,00	22,21	2.215,00	24,26	2.420,00	24,21	2.415,00	100	Dinas Pendidikan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.01 27	Program Pembinaan Pendidikan Dasar	Rata-Rata Capaian Bidang Program Pembinaan Pendidikan Dasar	80,61	17,71	19.926,00	19,95	22.450,00	20,40	22.950,00	20,75	23.350,00	21,20	23.850,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 38	Program Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar	Rata-Rata Capaian Bidang Program Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar	87,27	3,00	285,00	23,36	2.220,00	23,15	2.200,00	25,25	2.400,00	25,25	2.400,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 39	Program Seksi Sarana dan Kelembagaan Pendidikan Dasar	Rata-Rata Capaian Bidang Program Seksi Sarana dan Kelembagaan Pendidikan Dasar	-	-	-	25,00	850,00	25,00	850,00	25,00	850,00	25,00	850,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 40	Program Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar	Rata - Rata Capaian Bidang Program Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter pendidikan Dasar	97,43	0,83	2.000,00	19,76	4.500,00	24,59	5.600,00	26,13	5.950,00	28,68	6.530,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 36	Program Pembinaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rata-Rata Capaian Bidang Program Pembinaan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	95,97	1,10	1.050,00	22,65	2.050,00	25,97	2.350,00	25,97	2.350,00	24,31	2.200,00	100	Dinas Pendidikan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.01 30	Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Rata - Rata Capaian Bidang Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	99,15	17,26	10.191,00	19,39	11.450,00	19,43	11.470,00	20,92	12.350,00	23,00	13.578,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 32	Program DAK Pendidikan	Rata-Rata Capaian Bidang Program DAK Pendidikan	93,35	14,82	7.150,00	14,71	7.100,00	17,21	8.302,00	24,66	11.900,00	28,60	13.800,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 20	Program Percepatan Pembangunan Perdesaan/Kelurahan	Rata-Rata Capaian Bidang Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	98,26	14,19	21.918,00	19,65	30.339,50	22,41	34.600,00	21,95	33.895,00	21,80	33.660,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rata-Rata Capaian Bidang Pengembangan Nilai Budaya	79,44	3,04	330,00	23,99	2.600,00	23,99	2.600,00	25,00	2.710,00	23,99	2.600,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 17	Program Keragaman Budaya	Rata-Rata Capaian Bidang Program Keragaman Budaya	99,06	1,10	300,00	24,73	450,00	24,73	450,00	24,73	450,00	24,73	450,00	100	Dinas Pendidikan
1.01.01 .7	Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	Rata-Rata Capaian Bidang Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	92,89	-	-	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	100	Dinas Pendidikan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.01.01 22	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (GERBANG DESAMU)	Rata-Rata Capaian Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (GERBANG DESAMU)	98,42	-										100	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan														
1.02.01	Dinas Kesehatan				55.918,56		83.091,09		89.733,08		95.692,22		109.808,26		
1.02.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,34	15,63	16.093,07	19,35	19.920,00	19,37	19.940,00	20,50	21.100,00	25,15	25.890,00	100,00	
1.02.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,50	4,71	440,00	20,88	1.950,00	19,81	1.850,00	25,70	2.400,00	28,91	2.700,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur		-	-	18,18	300,00	18,18	300,00	18,18	300,00	45,45	750,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63,26	-	-	22,22	400,00	22,22	400,00	22,22	400,00	33,33	600,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata - Rata Capaian Bidang peningkatan pengembangan sistem pelaporan	95,68	2,42	39,00	19,89	320,00	19,89	320,00	22,37	360,00	35,43	570,00	100,00	Dinas Kesehatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		capaian kinerja dan keuangan													
1.02.01 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rata-Rata Capaian Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	99,11	0,27	30,00	18,30	2.000,00	18,30	2.000,00	23,79	2.600,00	39,34	4.300,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata - Rata Capaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat	97,50	1,53	20,00	8,05	105,00	21,46	280,00	34,48	450,00	34,48	450,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rata- Rata Capaian Program Pengawasan Obat dan Makanan	98,44	1,76	20,01	23,35	265,00	23,35	265,00	23,35	265,00	28,19	320,00	100,00	Dinas Kesehatan
1.02.01 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rata - Rata Capaian Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	99,05	2,30	75,00	21,59	705,00	24,35	705,00	24,35	755,00	24,35	1.025,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rata - Rata Capaian Program Perbaikan Gizi Masyarakat	99,96	3,54	55,00	9,65	150,00	9,65	150,00	22,90	550,00	22,90	650,00	100	Dinas Kesehatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01	Program Percepatan Pembangunan desa dan Kelurahan	Rata - Rata Capaian Program Percepatan Pembangunan desa dan Kelurahan	98,76	7,45	2.890,00	15,47	6.000,00	19,85	7.700,00	22,31	11.100,00	22,31	11.100,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rata - Rata Capaian Program Pengembangan Lingkungan Sehat	97,01	1,89	75,00	24,21	959,92	24,21	960,00	24,52	960,00	24,52	1.010,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rata - Rata Capaian Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular	87,97	2,49	190,00	27,18	2.078,05	24,05	1.839,05	21,58	1.650,05	24,70	1.888,05	100	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (GERBANG DESAMU)	Rata - Rata Capaian Program Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (GERBANG DESAMU)	99,87	-	-	22,22	200,00	22,22	200,00	22,22	200,00	33,33	300,00	100	Dinas Kesehatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Rata - Rata Capaian Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	97,19	1,02	600,10	17,47	10.265,00	26,04	15.300,00	25,01	14.700,00	30,46	17.900,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rata- Rata Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	23,10	3,33	10,00	13,33	40,00	16,67	50,00	16,67	50,00	50,00	150,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rata-Rata Capaian Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	100,00	2,13	10,00	12,77	60,00	21,28	100,00	21,28	100,00	42,55	200,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rata- Rata Capaian Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100,00	10,53	100,00	21,05	200,00	21,05	200,00	21,05	200,00	26,32	250,00	100	Dinas Kesehatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01 33	Program Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Rata - Rata Capaian Program Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	98,84	2,11	53,00	18,54	465,00	20,73	520,00	20,73	520,00	37,88	950,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 34	Program Yankes Haji	Rata- Rata Capaian Program Yankes Haji	47,55	8,70	50,00	13,04	75,00	17,39	100,00	26,09	150,00	34,78	200,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 35	Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan	Rata- Rata Capaian Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan	100,00	2,83	45,00	14,13	225,00	18,84	300,00	29,66	472,17	34,54	550,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 36	Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rata- Rata Capaian Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	34,82	4,29	65,00	16,50	250,00	19,80	300,00	23,10	350,00	36,30	550,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 37	Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Rata - Rata Capaian Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	89,09	3,34	69,99	17,90	375,00	17,90	375,00	17,90	375,00	42,96	900,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 38	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi	Rata- Rata Capaian Program Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi	97,88	2,06	30,00	17,08	248,12	17,55	254,95	25,46	370,00	37,85	550,00	100	Dinas Kesehatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01 39	Program Registrasi dan Akreditasi Kesehatan	Rata- Rata Capaian Program Registrasi Kesehatan	99,12	4,00	10,00	12,00	30,00	12,00	30,00	12,00	30,00	60,00	150,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 40	Program Pengembangan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Rata- Rata Capaian Program Pengembangan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	86,60	1,01	10,00	21,61	215,00	21,61	215,00	21,61	215,00	34,17	340,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 41	Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular	Rata- Rata Capaian Program Pemberantasan Penyakit Tidak Menular	93,27	3,38	60,00	18,60	330,00	20,24	359,08	20,29	360,00	37,48	665,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 42	Program Surveillance Masyarakat dan Bencana	Rata- Rata Capaian Program Surveillance Masyarakat dan Bencana	83,35	9,09	60,00	18,18	120,00	18,18	120,00	18,18	120,00	36,36	240,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 44	Program Akreditasi Puskesmas	Rata- Rata Capaian Program Akreditasi Puskesmas	99,91	48,79	1.905,12	12,80	500,00	12,80	500,00	12,80	500,00	12,80	500,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 45	Program Jaminan Persalinan	Rata- Rata Capaian Program Jaminan Persalinan	27,31	18,95	1.309,00	20,26	1.400,00	20,26	1.400,00	20,26	1.400,00	20,26	1.400,00	100	Dinas Kesehatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01 46	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Rata- Rata Capaian Program Jaminan Persalinan	95,50	19,22	15.014,40	20,48	16.000,00	20,10	15.700,00	20,10	15.700,00	20,10	15.700,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 47	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, dan Kefarmasian, Penanggulangan Penyakit Penurunan Stunting	Rata - Rata Capaian Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kefarmasian dan Penanggulangan Penyakit, Penurunan Stunting	95,64	20,19	7.789,86	19,95	7.700,00	19,95	7.700,00	19,95	7.700,00	19,95	7.700,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01 50	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Rata- Rata Capaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	53,49	20,00	8.800,00	20,00	8.800,00	20,00	8.800,00	20,00	8.800,00	20,00	8.800,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBH-CHT)	Rata- Rata Capaian Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBH-CHT)	98,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Akreditasi FKTP	Rata- Rata Capaian Program Akreditasi FKTP	95,36	-	-	22,58	175,00	25,81	200,00	25,81	200,00	25,81	200,00	100	Dinas Kesehatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.01	Program Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan	Rata- Rata Capaian Program Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan		-	-	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	25,00	150,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Rata- Rata Capaian Program Pelayanan Kesehatan Tradisional		-	-	17,65	75,00	23,53	100,00	23,53	100,00	35,29	150,00	100	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Rata- Rata Capaian Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	100,00	-	-	21,03	40,00	26,29	50,00	21,03	40,00	31,65	60,21	100	Dinas Kesehatan
1.02.02	RSUD				45.604,79		65.800,00		66.250,00		66.750,00		67.550,00		
1.02.02	Program Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Pelayanan Kesehatan	BOR	60%	-	-	68%	250,00	72%	300,00	76%	350,00	80%	400,00	80%	RSUD Puruk Cahu
1.02.02 54	Program Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Dasar	Paripurna	581,28	-	-	-	-	Paripurna	1.000,00	-	-	Akreditasi Paripurna	RSUD Puruk Cahu
1.02.02	Program Peningkatan SDM (Tenaga Medis)	Presentase Jumlah tenaga medis yang bersertifikat	80%	-	-	85%	500,00	90%	500,00	95%	500,00	100%	500,00	100%	RSUD Puruk Cahu



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.02	Program Sistem Keperawatan	Presentase Jumlah perawat yang bersertifikat/m emiliki STR	80%	-	-	85%	700,00	90%	1.000,00	95%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	RSUD Puruk Cahu
1.02.02	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,26 Tahun	-	-	68,5 Tahun	1.900,00	67 Tahun	2.000,00	67,5 Tahun	2.000,00	70 Tahun	2.000,00	70 Tahun	RSUD Puruk Cahu
1.02.02	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Presentase Jumlah kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan	60%	-	-	65%	300,00	70%	500,00	75%	500,00	80%	500,00	80%	RSUD Puruk Cahu
1.02.02	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)	60%	-	-	65%	600,00	70%	1.000,00	75%	1.000,00	80%	1.000,00	80%	RSUD Puruk Cahu
1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Bidang	4 Bidang	6.431,38	4 Bidang	9.750,00	4 Bidang	8.950,00	4 Bidang	9.000,00	4 Bidang	9.000,00	4 Bidang	RSUD Puruk Cahu
1.02.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	-	-	80%	6.000,00	85%	6.800,00	90%	6.000,00	95%	7.500,00	95%	RSUD Puruk Cahu



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	75%	80%	6.492,14	85%	9.000,00	90%	8.000,00	95%	8.000,00	99%	8.150,00	99%	RSUD Puruk Cahu
1.02.02	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Unit RS yang mendapatkan pemeliharaan sarana dan prasarana	25	-	-	30 Unit	2.000,00	35 Unit	2.300,00	40 Unit	2.500,00	45 Unit	2.600,00	45 Unit Gedung	RSUD Puruk Cahu
1.02.02 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	88%	-	-	91%	600,00	94%	700,00	97%	700,00	100%	700,00	100%	RSUD Puruk Cahu
1.02.02 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60%	-	-	70%	2.000,00	80%	2.000,00	80%	2.000,00	100%	2.000,00	100%	RSUD Puruk Cahu
1.02.02 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Laki RSUD	96,33%	-	-	96.5%	100,00	97%	100,00	97,50%	100,00	98%	100,00	98%	RSUD Puruk Cahu
1.02.02 22	Program Gerakan Membangun Desa Mengatang Utus (Gerbang Desamu)	Desa Binaan	2	3	100,00	3	100,00	4	100,00	4	100,00	5	100,00	5 Desa Binaan	RSUD Puruk Cahu



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.02 49	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Pasien	70 % Puas	75 % Puas	32.000,00	79 % Puas	32.000,00	83 % Puas	32.000,00	87 % Puas	32.000,00	90 % Puas	32.000,00	90 % Puas	RSUD Puruk Cahu
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			132.398,53	106.295,00			110.493,30			112.018,10		117.844,46		
1.03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	13.264,03	100%	10.000,00	100%	10.000,00	100%	12.000,00	100%	12.000,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.000,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	100%	100%	1.000,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	1.500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	150,00	100%	128,80	100%	128,80	100%	128,80	100%	128,80	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.01	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya alat berat dan pemeliharaan alat - alat berat	100%	1 thn	5.000,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	400,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan	50 Km	10 Km	50.000,00	10 Km	44.016,74	10 Km	44.149,04	10 Km	41.064,62	10 Km	46.890,98	50 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			1.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Telaksananya Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	1,25 Km	0,25 Km	6.500,00	0,25 Km	2.500,00	0,25 Km	3.500,00	0,25 Km	6.500,00	0,25 Km	6.500,00	1,25 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Pembangunan Sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	919,54 Km	199,54 Km	100,00	180 Km	100,00	180 Km	100,00	180 Km	100,00	180 Km	100,00	919,54 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Pengendalian Banjir	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat		1 km	1.000,00	1 km	1.000,00	1 km	1.000,00	1 km	1.000,00	1 km	1.000,00	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dal aliran sungai		0,5 km	1.000,00	0,5 km	1.200,00	0,5 km	1.200,00	0,5 km	1.200,00	0,5 km	1.200,00	0,25 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.01	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya penyediaan air baku	0%	0%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan Tata Ruang	0%	0%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	1.000,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0%	0%	1.000,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	800,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01	Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Murung Raya	0%	0%	1.000,00	100%	380,00	100%	380,00	100%	380,00	100%	380,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan perluasan jangkauan distribusi air minum	25 Desa	25 Desa	2.500,00	25 Desa	4.144,96	25 Desa	4.475,00	25 Desa	4.475,00	10 Desa	4.475,00	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 29	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya Pembangunan/ peningkatan infrastruktur	10 Bangunan /Pekerjaan	15 Bangunan	7.500,00	15 Bangunan	9.000,00	15 Bangunan	9.000,00	15 Bangunan	9.000,00	15 Bangunan	9.000,00	75 Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 31	Program Peningkatan Sarana Persampahan	Terciptanya kota yang bersih dari sampah dan Peraih Adipura	1 kota kecamatan	1 kota kecamatan	360,00	1 kota kecamatan	1.000,00	1 kota kecamatan	1.000,00	1 kota kecamatan	1.000,00	1 kota kecamatan	1.000,00	5 kota kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.03.01 33	Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya Ganti rugi tanah dan penguasaannya untuk bangunan dan air bersih pemerintah daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	5.400,00	2 kegiatan	1.400,00	2 kegiatan	1.400,00	2 kegiatan	1.400,00	2 kegiatan	1.400,00	10 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 41	Program Peningkatan kebersihan Perkotaan dan Pertamanan	Kota Bersih dan taman yang tertata	1 tahun kegiatan	1 tahun kegiatan	1.000,00	1 tahun kegiatan	500,00	1 tahun kegiatan	500,00	1 tahun kegiatan	500,00	1 tahun kegiatan	500,00	5 tahun kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan	150 km	25 Desa	400,00	25 Desa	500,00	25 Desa	500,00	25 Desa	500,00	25 Desa	500,00	125 Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 20	Program Percepatan Pembangunan Perdesaan/Kelurahan	Tersedianya Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan aplikasi kegiatannya	0	Desa/Kel se Kab. Mura	28.724,50	Desa/Kel se Kab. Mura	25.224,50	Desa/Kel se Kab. Mura	27.960,45	Desa/Kel se Kab. Mura	27.369,68	Desa/Kel se Kab. Mura	27.369,68	Desa/Kel se Kab. Mura	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan														
1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				15.703,54		41.941,17		41.941,17		44.812,44		56.959,29		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	85,42%	20%	2.240,99	20%	2.799,99	20%	2.799,99	20%	2.597,13	20%	2.682,16	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.04.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,33%	20%	787,00	20%	2.075,81	20%	2.075,81	20%	1.837,00	20%	1.837,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	0,00%	20%	26,13	20%	276,85	20%	276,85	20%	255,00	20%	260,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	64,69%	0%	-	18%	226,00	24%	226,00	29%	250,00	29%	250,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata Capaian bidang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,77%	0%	-	25%	29,52	25%	29,52	25%	26,13	25%	26,13	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata Capaian program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	99,95%	0%	-	25%	113,00	25%	113,00	25%	100,00	25%	100,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.04.01 15	Program Pengembangan Perumahan	Rata-rata Capaian pengembangan perumahan bidang Perumahan	96,33%	50%	300,00		5.457,28		5.457,28		8.615,91		16.692,72	50%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pengembangan dan Pembangunan Perumahan	Rata-rata Capaian pengembangan dan pembangunan perumahan bidang Perumahan	0,00%	0%	11.149,43	25%	1.864,50	25%	1.864,50	25%	1.950,00	25%	2.150,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rata-rata Capaian pemberdayaan komunitas perumahan bidang Perumahan	99,31%	20%	250,00	20%	395,50	20%	395,50	20%	450,00	20%	550,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Rata-rata Capaian pemberdayaan komunitas perumahan bidang Perumahan	0,00%	50%	100,00		-		-		-		-	50%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rata-rata Capaian lingkungan sehat perumahan bidang Kawasan Permukiman	85,13%	20%	250,00	20%	1.017,00	20%	1.017,00	20%	1.150,00	20%	1.350,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.04.01	Program Peningkatan Kapasitas Bidang kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian peningkatan kapasitas bidang kawasan permukiman	0,00%	0%	-	17%	226,00	22%	226,00	28%	250,00	33%	300,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rata-rata Capaian pengelolaan areal pemakaman bidang kawasan permukiman	0,00%	20%	600,00	20%	282,50	20%	282,50	20%	300,00	20%	350,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pencegahan Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian pencegahan kawasan permukiman bidang kawasan permukiman	0,00%	0%	-	20%	226,00	27%	226,00	27%	200,00	27%	200,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian peningkatan kualitas kawasan permukiman bidang kawasan permukiman	0,00%	0%	-	21%	282,50	26%	282,50	26%	250,00	26%	250,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pengembangan siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (KASIBA/LISIBA)	Rata-rata Capaian pengembangan siap bangun dan lingkungan siap bangun (KASIBA/LISIBA) bidang kawasan permukiman	0,00%	0%	-	20%	339,00	24%	339,00	28%	350,00	28%	350,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPDP 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.04.01	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rata-rata Capaian pengelolaan ruang terbuka hijau bidang kawasan permukiman	0,00%	0%	-	21%	226,00	21%	226,00	26%	250,00	32%	300,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	Rata-rata Capaian pengembangan sarana dan prasarana permukiman bidang kawasan permukiman	0,00%	0%	-	21%	395,50	24%	395,50	27%	380,00	28%	400,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01 22	Program Pengembangan, Peningkatan dan Penataan Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian pengembangan , peningkatan dan penataan kawasan permukiman bidang kawasan permukiman	77,31%	0%	-	25%	1.096,10	25%	1.096,10	25%	1.090,00	25%	1.200,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01 20	Program Percepatan Membangun Desa dan Kelurahan	Rata-rata Capaian Percepatan membangun desa dan kelurahan bidang PSU	90,05%	0%	-	25%	14.520,50	25%	14.520,50	25%	14.240,00	25%	15.840,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Rata-rata Capaian pembangunan prasaranan, sarana dan	0,00%	0%	-	25%	1.864,50	25%	1.864,50	25%	1.950,00	25%	2.290,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		utilitas bidang PSU													
1.04.01	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Rata-rata Capaian perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar bidang PSU	0,00%	0%	-	25%	1.412,50	25%	1.412,50	25%	1.440,00	25%	1.590,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Rata-rata Capaian pembangunan infrastruktur permukiman bidang PSU	0,00%	0%	-	27%	226,00	27%	226,00	23%	164,85	23%	164,85	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Rata-rata Capaian penyelesaian konflik-konflik pertanahan bidang pertanahan	46,22%	0%	-	25%	108,97	25%	108,97	25%	96,44	25%	96,44	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pengadaan Tanah	Rata-rata Capaian pengadaan tanah bidang pertanahan	0,00%	0%	-	25%	1.469,00	25%	1.469,00	25%	1.400,00	25%	1.550,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01 19	Program Penatausahaan Pertanahan	Rata-rata Capaian penatausahaan pertanahan bidang pertanahan	78,20%	0%	-	25%	1.971,85	25%	1.971,85	25%	2.060,00	25%	2.420,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.04.01	Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Rata-rata Capaian penyelesaian permasalahan pertanahan bidang pertanahan	0,00%	0%	-	25%	1.446,40	25%	1.446,40	25%	1.505,00	25%	1.795,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pengelolaan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Rata-rata Capaian pengelolaan subjek dan objek redistribusi tanah bidang pertanahan	0,00%	0%	-	25%	909,65	25%	909,65	25%	940,00	25%	1.140,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Pengaturan Bidang Pertanahan	Rata-rata Capaian pengaturan bidang pertanahan	0,00%	0%	-	25%	536,75	25%	536,75	25%	565,00	25%	655,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.04.01	Program Disertifikasi Bidang Tanah Masyarakat MBR dan Tanah Aset Pemda	Rata-rata Capaian disertifikasi bidang tanah masyarakat MBR dan tanah aset pemda bidang pertanahan	0,00%	0%	-	18%	146,00	24%	146,00	27%	150,00	31%	170,00	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
1.05	Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				0		0		0		0		0		
01.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				2.157,13		4.500,00		4.025,02		4.520,02		4.780,02		



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.05.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	95%	90%	857,13	90%	2.000,00	90%	1.925,02	90%	1.920,02	90%	1.980,02	90%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan Generasi Muda	1 Kec	2 Kec	200,00	3 Kec	450,00	5 Kec	500,00	7 Kec	700,00	8 Kec	800,00	10 Kec	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan politik masyarakat di Kab. Murung Raya	95%	90%	100,00	90%	300,00	90%	300,00	95%	400,00	95%	400,00	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	95%	90%	100,00	90%	200,00	90%	200,00	95%	200,00	95%	200,00	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01 23	Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat dan Organisasi Politik	Terlaksananya Data tentang ormas dan orpol di Kab. Murung Raya	95%	90%	100,00	90%	200,00	90%	100,00	95%	100,00	95%	100,00	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Pengawasan Politik	Terbentuknya Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	95%	90%	100,00	90%	100,00	90%	100,00	95%	100,00	95%	100,00	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Pengawasan Politik	Data dan informasi perkembangan Politik	95%	90%	100,00	90%	200,00	95%	100,00	95%	100,00	95%	100,00	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Program Peningkatan Pengawasan Politik	Terdatanya Pengamanan Persiapan Pilkada Bupati, Wakil Bupati, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemili Legislatif	100%	100%	100,00	90%	200,00	-	-	-	-	-	-	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01.25	Program Pencegahan Dini Terhadap Permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas daerah	Terdatanya laporan, informasi mengenai Deteksi Dini, Wna, NGO, lembaga asing, konflik sosial dan laporan Komunitas Intelijen Daerah KOMINDA) di kab. Murung Raya	95%	90%	300,00	90%	400,00	90%	300,00	95%	300,00	95%	300,00	95%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.01.26	Program Peningkatan Ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Terlaksananya semua kegiatan sosialisasi	1 kecamatan	2 Kecamatan	200,00	3 Kecamatan	450,00	5 Kecamatan	500,00	7 Kecamatan	700,00	8 Kecamatan	800,00	8 Kecamatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.03	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				9505,594772	-	7.955,59	-	9.640,70	-	11.185,56	-	14.749,93	-	



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.05.03.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,33 %	100 %	4.565,21	100 %	4.513,59	100 %	5.331,36	100 %	5.509,09	100 %	5.814,09	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,98 %	100 %	3.140,00	100 %	1.692,00	100 %	650,00	100 %	977,60	100 %	3.555,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	100 %	100 %	200,00	100 %	-	100 %	250,00	100 %	-	100 %	200,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur			140,00		-		109,34		148,86		300,00		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu.	100 %	100 %	50,00	100 %	50,00	100 %	50,00	100 %	50,00	100 %	50,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	persentasi jumlah operasi gabungan	99,97 %	100 %	500,00	100 %	500,00	100 %	850,00	100 %	1.050,00	100 %	1.050,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Peningkatan partisipasi masyarakat	100 %	100 %	200,00	100 %	250,00	100 %	300,00	100 %	300,00	100 %	400,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.05.03 .20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Menurunnya angka penyakit masyarakat	100 %	100 %	200,00	100 %	250,00	100 %	300,00	100 %	350,00	100 %	440,84	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 20	Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan		100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 22	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata Capaian program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 27	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	210,38	100 %	350,00	100 %	400,00	100 %	400,00	100 %	540,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 .28	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	100 %	100 %	300,00	100 %	350,00	100 %	1.400,00	100 %	2.400,00	100 %	2.400,00	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06	Sosial														
1.06.01	Dinas Sosial				9.406,23		10.900,00		12.607,64		12.554,87		12.553,32		



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.06.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,05	18,08	2.674,49	20,31	3.003,72	20,74	3.067,33	20,31	3.003,33	20,56	3.040,82	100	Dinas Sosial
1.06.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,51	22,61	3.246,74	14,66	2.105,00	20,89	3.000,00	21,62	3.105,00	20,23	2.905,00	100	Dinas Sosial
1.06.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	98,54	-	-	31,58	300,00	-	-	31,58	300,00	36,84	350,00	100	Dinas Sosial
1.06.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	-	-	21,43	150,00	28,57	200,00	21,43	150,00	28,57	200,00	100	Dinas Sosial
1.06.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98,57	-	-	21,77	67,50	23,39	72,50	21,77	67,50	33,06	102,50	100	Dinas Sosial
1.06.01 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rata-rata Capaian Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	99,55	26,57	2.012,46	11,80	893,78	21,25	1.610,00	20,45	1.549,04	19,93	1.510,00	100	Dinas Sosial



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPd 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya													
1.06.01 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rata-rata Capaian Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	2,44	10,00	24,39	100,00	24,39	100,00	24,39	100,00	24,39	100,00	100	Dinas Sosial
1.06.01 17	Program pembinaan anak terlantar	Rata-rata Capaian Program pembinaan anak terlantar	-	4,76	20,00	23,81	100,00	23,81	100,00	23,81	100,00	23,81	100,00	100	Dinas Sosial
1.06.01 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rata-rata Capaian Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	99,77	9,97	155,00	22,51	350,00	22,51	350,00	22,51	350,00	22,51	350,00	100	Dinas Sosial
1.06.01	Penanganan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Terlaksananya penanganan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	-	9,97	155,00	22,51	350,00	22,51	350,00	22,51	350,00	22,51	350,00	100	Dinas Sosial



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.06.01 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Rata-rata Capaian Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	-	9,68	15,00	22,58	35,00	22,58	35,00	22,58	35,00	22,58	35,00	100	Dinas Sosial
1.06.01 20	Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Rata-rata Capaian Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	99,44	9,18	700,00	21,65	1.650,00	25,03	1.907,81	21,65	1.650,00	22,50	1.715,00	100	Dinas Sosial
1.06.01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rata-rata Capaian Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	98,87	5,83	125,00	23,31	500,00	24,24	520,00	23,31	500,00	23,31	500,00	100	Dinas Sosial
1.06.01	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata Capaian Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.06.01.23	Program Keluarga Harapan	Rata-rata Capaian Program Program Keluarga Harapan	99,71	5,73	217,54	23,57	895,00	23,57	895,00	23,57	895,00	23,57	895,00	100	Dinas Sosial
1.06.01.25	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Rata-rata Capaian Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	-	4,48	75,00	23,88	400,00	23,88	400,00	23,88	400,00	23,88	400,00	100	Dinas Sosial
2.01	Ketenagakerjaan														
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				3.175,49		6.750,00		7.350,00		7.750,00		8.650,00		
2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	14%	12%	1.883,39	15%	2.396,90	21%	3.308,54	26%	4.070,90	26%	4.070,90	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	10%	200,00	13%	250,00	57%	1.123,36	10%	200,00	10%	200,00	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9%	4%	95,00	7%	185,00	27%	700,00	31%	800,00	31%	800,00	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.01.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11%	20%	57,10	20%	57,10	20%	57,10	20%	57,10	20%	57,10	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi		14%	90,00	22%	140,00	22%	140,00	22%	140,00	22%	140,00	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.01	Program Pengembangan HI dan Jamsostek	Jumlah tenaga kerja ditempatkan	10%	8%	60,00	16%	111,00	16%	111,00	30%	215,00	30%	215,00	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.01.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah tempat perlindungan ketenagakerjaan.	17%	12%	55,00	12%	55,00	12%	55,00	32%	150,00	32%	150,00	100%	Dinas Ketenagakerjaan
2.01.01.18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	9%	6%	95,00	11%	180,00	13%	225,00	35%	600,00	35%	600,00	100%	Dinas Ketenagakerjaan
2.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rata-rata produktivitas kerja	11%	8%	593,00	40%	3.028,00	0,16	1.183,00	13%	1.020,00	23%	1.770,00	100%	Dinas Ketenagakerjaan
2.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah kesempatan kerja	17%	20%	47,00	0,2	47,00	0,20	47,00	0,20	47,00	20%	47,00	100%	Dinas Ketenagakerjaan
2.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur				-		200,00		200,00		250,00		250,00		Dinas Ketenagakerjaan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.01.01.22	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata Capaian Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)				100,00		200,00		200,00		350,00		Dinas Ketenagakerjaan	
2.08	Pngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
2.08.01	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			100	6.958,00	100	9.817,00	100	10.851,00	100	11.421,00	100	12.065,00	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,07	100	1.648,00	100	2.408,00	100	2.465,00	100	2.467,00	100	2.755,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92,88	100	5,00	100	55,00	100	57,00	100	57,00	100	66,00	30	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.08.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	95,88	-	-	100	120,00	100	126,00	100	126,00	100	145,00	14	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	100	61,00	100	64,00	100	64,00	100	70,00	18	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,97	-	100	60,00	100	64,00	100	64,00	100	64,00	21	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01	Program Promosi Keluarga Berencana	Rata-Rata Capaian Program Keluarga Berencana	-	-	100	250,00	100	300,00	100	300,00	100	315,00	18	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01 15	Program Keluarga Berencana	Rata-Rata Capaian Program Gerdes	99,90	100	300,00	100	600,00	100	600,00	100	650,00	100	700,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.08.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Rata-Rata Capaian Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	99,97	100	146,00	100	520,00	100	412,00	100	480,00	100	525,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Rata-Rata Capaian Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	99,13	100	277,00	100	730,00	100	930,00	100	980,00	100	1.050,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rata-Rata Capaian Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	99,99	100	99,00	100	100,00	100	125,00	100	125,00	100	125,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Rata-Rata Capaian Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak	99,36	100	47,00	100	300,00	100	350,00	100	350,00	100	400,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.08.01 18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rata-Rata Capaian Program Promosi Keluarga Berencana	99,76	100	85,00	100	320,00	100	425,00	100	500,00	100	475,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	Rata-Rata Capaian Program Keluarga Berencana	98,84	100	166,00	100	455,00	100	550,00	100	625,00	100	625,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 20	Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak	Rata-Rata Capaian Program Pelayanan Kontrasepsi	99,39	100	421,00	100	853,00	100	918,00	100	1.038,00	100	885,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01	Program Pembangunan Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Capaian Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Rata-Rata Capaian Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv Aids	100	-	-	100	345,00	100	375,00	100	375,00	100	375,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.08.01	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (GERBANG DESAMU)	Rata-Rata Capaian Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (GERBANG DESAMU)	94,24		-	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rata-Rata Capaian Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	100	100	138,00	100	200,00	100	295,00	100	335,00	100	335,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 25	Program Pengembangan Data/Informasi	Rata-Rata Capaian Program Pengembangan Data / Informasi	99,28	100	50,00	100	920,00	100	1.070,00	100	1.160,00	100	1.205,00	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01	Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Keluarga Berencana	Rata-Rata Capaian Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Keluarga Berencana	30,23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.08.01 27	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Yang Mandiri	Rata-Rata Capaian Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Yang Mandiri	100	100	50,00	100	200,00	100	225,00	100	250,00	100	250,00	80	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 28	Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan	Rata-Rata Capaian Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program Kkbpk Lini Lapangan	99,58	100	2.148,00	100	143,00	100	200,00	100	225,00	100	300,00	95	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 29	Program Keserasian Kebijakan Penduduk	Rata-Rata Capaian Program Keserasian Kebijakan Penduduk	-	100	150,00	100	420,00	100	465,00	100	480,00	100	480,00	100	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 30	Program Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Penyuluh KB	Rata-Rata Capaian Program Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Penyuluh KB	-	100	921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.01 31	Program Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB	Rata-Rata Capaian Program Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan KB	-	100	307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.08.01	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Rata-Rata Capaian Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	-	-	100	50,00	100	75,00	100	75,00	100	75,00	80%	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01	Program Peningkatan Kapasitas Penyuluh KKBPK	Rata-Rata Capaian Program Peningkatan Kapasitas Penyuluh KKBPK	-	-	100	150,00	100	170,00	100	170,00	100	170,00	80%	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01	Program Meningkatkan Dukungan Pelayanan Kontrasepsi	Rata-Rata Capaian Program Meningkatnya Dukungan Pelayanan Kontrasepsi	-	-	100	100,00	100	115,00	100	125,00	100	125,00	80%	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rata-Rata Capaian Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	-	-	100	357,00	100	375,00	100	300,00	100	450,00	80%	Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.03	Pangan														



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan				3.307,67		4.841,03		5.031,74		5.531,74		6.031,74		
2.03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	6278	6175	1.976,17	7269	2.197,03	7269	2.186,74	7274	2.349,00	7272	2.489,24	7272	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 02	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11	9	159,00	14	625,00	17	445,00	18	295,00	18	325,00	18	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2 orang	2	37,00	3	50,00	3	70,00	3	80,00	3	80,00	3	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	74 Stel		-	148 Stel	120,00	74 Stel	155,00	148 Stel	275,00	74 Stel	150,00	74 Stel	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan tepat waktu dan akuntabel	14 Laporan	4	8,00	31	55,00	31	55,00	31	80,00	32	102,00	32	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah Desa yang terawasi	2 Desa	2 Desa	23,20	2 Desa	30,00	2 Desa	50,00	2 Desa	50,00	2 Desa	50,00	2 Desa	Dinas Ketahanan Pangan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPd 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.03.01 18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Jumlah ketersediaan dan distribusi Pangan di tingkat Rumah Tangga yang beragam Gizi, seimbang dan Aman (B2SA) di 10 Kecamatan	26	15	325,00	20	450,00	21	650,00	21	685,00	21	715,00	21	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 19	Program Perencanaan dan Pengembangan Ketahanan pangan	Jumlah Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Ketahanan Pangan	66	65	255,00	75	556,00	73	520,00	73	602,24	75	855,00	75	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01	Program Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (GERBANG DESAMU)	Jumlah Desa Binaan GERDES	4	-	-	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	4	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 23	Program Pengembangan Pertanian di Daerah terpencil dan Rawan Pangan	jumlah desa rawan pangan	36	33	350,00	35	324,00	36	360,00	35	420,50	36	525,50	36	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 25	Program Percepatan pengankeragaman konsumsi pangan lokal	Jumlah KRPL yang dikembangkan	8 kelompok Tani	6	78,00	10	185,00	12	250,00	13	360,00	14	370,00	14	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.01 26	Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan	Jumlah Data yang diperoleh dari kelompok tani / desa yang di bina	8	8	96,30	10	129,00	10	140,00	13	190,00	12	200,00	12	Dinas Ketahanan Pangan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.03.01	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lembaga Lumbung pangan Masyarakat yang di bentuk dan di kembangkan	-	-	-	5	20,00	1	50,00	5	45,00	1	70,00	1	Dinas Ketahanan Pangan
2.05	Lingkungan Hidup														
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup														
2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,60	15,80	2.681,40	19,87	3.371,65	21,84	3.706,25	20,66	3.505,25	21,83	3.704,25	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,44	29,92	570,00	18,90	360,00	11,81	225,00	19,69	375,00	19,69	375,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	100	31,20	83,00	0,00	-	31,20	83,00	37,59	100,00	0,00	-	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96,87	16,81	95,00	47,79	270,00	17,70	100,00	0,00	-	17,70	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan, Akuntabilitas kinerja dan keuamgan	100	19,79	53,95	17,74	48,35	20,82	56,75	20,82	56,75	20,82	56,75	100,00	Dinas Lingkungan Hidup



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan , Limbah berbahaya dan Beracun (LB3)	Peresentase Pengelolaan Sampah dan LB3	96,28	13,17	784,87	15,69	935,00	21,48	1.280,00	25,25	1.505,00	24,41	1.455,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Indeks Kualitas air dan Indeks Kualitas Udara	99,87	7,28	354,07	19,84	965,00	20,14	980,00	24,83	1.208,00	27,91	1.358,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Presentasi wilayah yang dikonservasi	99,84	0,00	-	10,11	140,00	19,13	265,00	35,38	490,00	35,38	490,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 . 05 . 01	Program Pengembangan Masyarakat Hukum Adat	Penetapan Hak MHA	-	3,17	43,93	14,45	200,00	16,62	230,00	25,65	355,00	40,10	555,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase Lahan yang di rehabilitasi	99,36	7,09	21,00	16,89	50,00	25,34	75,00	25,34	75,00	25,34	75,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Presentase meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pelestarian LH	99,77	12,32	280,20	36,48	830,00	20,00	455,00	20,00	455,00	11,21	255,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 . 05 . 01	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Presentase Pengendalian kebakaran	100	0,00	-	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		hutan dan lahan													
2.05.01	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Meningkatnya pembinaan dan pembangunan desa	92,19		-		-		-		-		-		Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH-DR)	Presentase tingkat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH-DR)	38,84		-		-		-		-		-		Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01	Penanaman Pohon di Luar kawasan (DBH-DR)	Terlaksananya kegiatan penghijauan dan hutan rakyat di lahan masyarakat dan lainnya diluar kawasan hutan negara	3,58		-		-		-		-		-		Dinas Lingkungan Hidup
2.06	Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3.783,98		3.783,98		4.100,00		4.500,00		4.850,00		
2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	20	2.418,50	20	2.418,50	20	2.580,31	20	2.630,31	20	2.605,31	20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.06.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99%	20	103,00	20	103,00	20	58,00	20	58,00	20	108,00	20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparat	100%	-	-	25	-	25	140,00	25	150,00	25	125,00	25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	-	25	-	25	20,00	25	30,00	25	30,00	25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	-	-	25	-	25	30,00	25	30,00	25	30,00	25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.01 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata capaian perangkat daerah bidang penataan administrasi kependudukan	100%	20	1.237,48	20	1.237,48	20	1.246,69	20	1.576,69	20	1.926,69	20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.01 22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata capaian perangkat daerah bidang membangun desa mangkatang	100%	5 Desa	25,00	5 Desa	25,00	5 Desa	25,00	5 Desa	25,00	5 Desa	25,00	5 Desa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		utus (gerbangdesamu)													
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				12.052,33		30.296,00		30.850,00		31.250,00		32.100,00		
2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	2.508,88	100	3.360,00	100	3.362,84	100	3.362,84	100	3.362,84	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	1.199,35	100	1.925,00	100	1.325,00	100	1.625,00	100	2.000,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	100	100	27,40	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	101,00	100	450,00	100	450,00	100	450,00	100	600,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	113,00	100	275,00	100	275,00	100	275,00	100	350,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata Capaian Peningkatan Keberdayaa Masyarakat Perdesaan	100	100	2.464,50	100	2.028,00	100	3.147,16	100	3.247,16	100	3.447,16	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rata-rata Capaian Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100	100	301,40	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rata-Rata Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membanguna Desa	100	100	177,55	100	600,00	100	600,00	100	600,00	100	600,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Desa / Kelurahan Yang Mengikuti Lomba Desa	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.07.01.20	Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Rata-Rata Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	100	100	2.945,90	100	16.096,00	100	16.300,00	100	16.300,00	100	16.300,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.21	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	Rata - rata Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan	100	100	281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01	Pembinaan Kemandirian Masyarakat Perdesaan	Jumlah Pembinaan Kemandirian Masyarakat Perdesaan	100	100	281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.22	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-Rata Pelaksanaan Gerbang Desamu	116	100	100,00	100	400,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.13	Program Pengembangan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan	Rata Rata Pengembangan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal			48,50	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.14	Pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA	Jumlah Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi SDA	100	100	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.15	Peningkatan Peran aktif Masyarakat Dalam emberdayaan Ekonomi Hijau	Jumlah Peningkatan Peran aktif Masyarakat dalam	100	100	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemberdayaan Ekonomi Hijau													
2.07.01.16	Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Lokal Pedesaan	Jumlah Pemetaan potensi Sumber Daya Alam Lokal Pedesaan	100	100	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.25	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Rata-rata Desa yang mendapatkan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	-	1	21,70	1	200,00	1	200,00	1	200,00	1	200,00	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.26	Program Peningkatan Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)	Rata-rata Peningkatan TSLP	-	2	73,35	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.32	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Rata-rata Pemberdayaan Masyarakat Miskin	100	100	148,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00	100	350,00	550	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.34	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Perbatasan	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Perbatasan			-	0	-	-	-	-	-	-	-	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.07.01.33	Program Pembinaan Desa Perbatasan	Rata-rata Pembinaan Desa Perbatasan	-	100	55,50	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	29486 Org	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rata-rata Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100	100	301,40	100	1.300,00	100	1.300,00	100	1.300,00	100	1.350,00	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.21	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan	Rata-rata Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan	-	100	281,00	100	450,00	100	450,00	100	450,00	100	450,00	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.24	Program Pengembangan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan	Rata-Rata Pengembangan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal	-	100	48,50	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.28	Program Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Tepat Guna	Rata-rata Peningkatan Kapasitas Posyantek Tepat Guna	-	100	95,40	100	412,00	100	340,00	100	340,00	100	340,00	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.29	Program Pengembangan Jenis, spesifikasi, dan Adopsi Teknologi Tepat Guna	Rata-rata pengembangan Jenis, spesifikasi, dan Adopsi Teknologi Tepat Guna	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	6519 org	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.07.01.30	Program Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	Rata-rata Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	100	100	354,00	100	950,00	100	950,00	100	950,00	100	950,00	6519 org/ 5925 ton	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.34	Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Rata-rata Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	-	100	20,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.35	Program Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Desa	Rata-rata Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat Desa	-	100	35,50	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.36	Program Pengembangan Kawasan Terpadu Pelestarian Lingkungan dan Potensi SDA	Rata-rata Pengembangan Kawasan Terpadu Pelestarian Lingkungan dan Potensi SDA	-	100	20,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.09	Perhubungan														
02.09.01	Dinas Perhubungan				4.591,46		56.719,96		7.007,06		7.678,18		8.677,34		
2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	1135	1079	2.920,21	1106	3.024,00	1112	3.085,31	1138	3.116,43	1157	3.165,59	550	Dinas Perhubungan
2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38	36	80,00	44	690,00	44	200,00	44	380,00	43	180,00	100%	Dinas Perhubungan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.09.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	87	216	185,00	222	125,00	222	205,00	223	220,00	223	220,00	29486 Org	Dinas Perhubungan
2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10	2	30,00	8	225,00	8	200,00	8	200,00	8	200,00	95%	Dinas Perhubungan
2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17	17	104,75	17	126,00	17	105,75	17	105,75	17	105,75	95%	Dinas Perhubungan
2.09.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rata-rata Jumlah kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6	2	695,00	2	1.690,96	2	1.900,00	2	900,00	2	1.600,00	2	Dinas Perhubungan
2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rata- Rata Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	0	2	27,50	3	53,00	3	75,00	3	50,00	3	50,00	3	Dinas Perhubungan
2.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rata- Rata Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan angkutan	49	49	258,00	49	225,00	49	275,00	49	295,00	49	295,00	6519 org	Dinas Perhubungan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKP 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.09.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rata-Rata Jumlah Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	4	1	80,00	1	50.000,00	1	400,00	4	1.900,00	2	2.350,00	6519 org/ 5925 ton	Dinas Perhubungan
2.09.01.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Rata-Rata Jumlah Program kerjasama informasi dengan mas media	12	12	11,00	12	11,00	12	11,00	12	11,00	12	11,00	100%	Dinas Perhubungan
2.09.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rata-Rata Jumlah Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	21	21	100,00	23	450,00	23	450,00	23	400,00	23	400,00	23	Dinas Perhubungan
2.09.01.22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-Rata Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00	15	100,00	15	100,00	15	Dinas Perhubungan
02.10	Komunikasi dan Informatika														
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				4.461,67		6.830,00		8.517,46		10.989,41		11.088,58		
2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan	35	15 Keg	2.192,57	15	2.375,00	16	2.692,46	15	2.955,91	16	3.657,08	15	Dinas Komunikasi dan Informasi



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Administrasi Perkantoran													
2.10.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	1 Paket	55,00	7	760,00	2	515,00	2	285,00	7	950,00	19	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	51	0 %	-	318	235,00	150	135,00	325	565,00	82	336,50	875	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7	8 Org	125,00	7	135,00	7	150,00	8	175,00	10	250,00	40	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9 5	9 Lap 5 Dok	54,20	9 5	90,00	9 5	130,00	9 5	130,00	9 5	130,00	45 25	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 24	Program Pengelolaan Data dan Statistik	Rata-rata capaian program Pengelolaan Data dan Statistik	0 0	1 Data - Buku	40,00	4 300	152,00	4 300	257,00	6 350	192,00	6 350	292,00	21 1300	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rata-rata capaian program Pengembangan Komunikasi,	0	13 Informasi	50,00	20	150,00	20	150,00	22	185,00	22	485,00	97	Dinas Komunikasi dan Informasi



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Informasi dan Media Massa													
2.10.01 16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rata-rata capaian Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	0	8 Org	138,78	10 Org	395,00	12 Org	370,00	10 Org	345,00	12 Org	440,00	52	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 17	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rata-rata capaian Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	8	9 Org	230,07	20	415,00	12	380,00	16	378,00	17	370,00	74	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rata-rata capaian Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	0	2 Kali 4 Buku - Org - Berita - Inform asi	41,50	4 100 40 140 4	160,00	4 100 40 140 4	660,00	2 100 40 140 4	510,00	4 100 40 140 4	160,00	4 100 40 140 4	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 20	Program Pengawasan dan Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	Rata-rata capaian Program Pengawasan dan Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	42 -	42 Menar a 4 Target	50,00	42 10	113,00	42 12	113,00	42 12	115,00	42 12	120,00	84 50	Dinas Komunikasi dan Informasi



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.10.01 21	Program Pembinaan dan Pengembangan e-Government	Rata-rata capaian Program Pembinaan dan Pengembangan e-Government	6	7 Kali	75,00	7	75,00	7	70,00	7	100,00	7	60,00	35	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata capaian Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	2	2 Kali	100,00	2	100,00	3	125,00	3	140,00	4	160,00	14	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01 25	Program Pembinaan dan Pengembangan untuk Mendukung Penyelenggaraan Komtel, Persandian dan Statistik	Rata-rata capaian Program Pembinaan dan Pengembangan untuk Mendukung Penyelenggaraan Komtel, Persandian dan Statistik	0	2 Unit 6 Kali	65,00	3 8	185,00	2 8	245,00	3 8	250,00	3 8	188,00	13 30	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01	Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi e-Government	Rata-rata capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi e-Government	0	0%	-	1	40,00	1	40,00	1	100,00	1	-	4	Dinas Komunikasi dan Informasi



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.10.01.26	Program Pembangunan dan Peningkatan e-Government	Rata-rata capaian Program Pembangunan dan Peningkatan e-Government	0	10 PD 350 Buku - Jenis	1.200,00	9 - 2	1.375,00	8 - 2	2.350,00	7 - 2	4.373,50	- - 2	3.380,00	34 350 8	Dinas Komunikasi dan Informasi
2.10.01.22	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Informasi Publik	Rata-rata capaian Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Informasi Publik	11	23 Kali	44,55	18	75,00	18	135,00	18	190,00	18	110,00	95	Dinas Komunikasi dan Informasi
3.06	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM														
3.06.01	Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM				9.503,91		12.000,00		15.613,06		16.037,06		17.070,06		
3.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	19,487	2.198,53	82,49	3.160,00	15,38	3.273,06	14,73	3.160,00	15,00	3.160,06	65,31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70,28	17,325	35,00	85,00	980,00	10,00	980,00	10,00	980,00	10,00	980,00	40,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.06.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparat	-	-	-	0	275,00	2,00	275,00	2,00	275,00	2,00	275,00	8,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	0	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	4,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	-	-	0	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	16,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata Capaian Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	100	19,441	37,33	2,68	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	4,37	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rata-rata Capaian Pengembangan Industri Kecil Menengah	16,667	14,182	1.711,50	4,27	1.620,00	6,00	2.620,00	5,00	2.620,00	5,00	2.620,00	21,61	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 20	Program Pengembangan Industri Kerajinan Dan Rumah Tangga	Rata-rata Capaian Pengembangan Industri Kerajinan dan Rumah Tangga	22,156	18,459	23,00	1.510	655,00	6,00	655,00	6,00	655,00	6,00	655,00	24,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.06.01 20	Program Peningkatan Dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rata-rata Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	7	20	190,00	27,43	1.060,00	10,00	1.060,00	10,00	1.060,00	10,00	1.060,00	40,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 22	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar	Rata-rata Capaian Peningkatan Pengelolaan Pasar	10	70,093	79,83	8,44	435,00	4,00	435,00	4,00	435,00	4,00	435,00	16,71	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 15	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Rata-rata Capaian Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	95%	11,111	1.439,50	5,00	1.200,00	4,00	2.200,00	3,02	2.237,06	3,02	2.270,00	11,63	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 21	Program Pembangunan Sarana Perdagangan	Rata-rata Capaian Pembangunan Sarana Perdagangan	6	12,903	3.133,58	10,18	1.250,00	4,50	2.750,00	3,20	3.250,00	3,33	4.250,00	11,85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01	Program Peningkatan Akses Pembinaan Organisasi Dan Usaha Koperasi Dan Ukm	Rata-rata Capaian Peningkatan Akses Pembinaan Organisasi Usaha Koperasi dan UKM	-	-	-	0,00	420,00	5,00	420,00	5,00	420,00	5,00	420,00	20,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rata-rata Capaian Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	29	13,423	155,65	64,21	545,00	7,00	545,00	7,00	545,00	7,00	545,00	29,86	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.06.01	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Koperasi Dan Ukm	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UKM	-	15	-	17,5	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	4,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.01 20	Program Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Capaian Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	-		500,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				3.484,06		6.161,53		6.191,53		7.191,53		8.191,53		
2.12.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	17,06	1.737,66	19,52	1.987,53	19,54	1.989,53	19,54	2.209,53	24,35	3.012,53	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	0,56	38,00	26,93	1.815,00	35,21	2.373,00	28,1	2.193,00	9,2	1.020,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6 Orang	0	-	22,22	200,00	33,33	300,00	22,22	200,00	22,22	200,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.12.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata – Rata Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	17,65	147,00	20,89	174,00	19,69	164,00	19,69	164,00	22,09	184,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor	31 Investor	5 Investor	200,00	5 Investor	405,00	10 Investor	405,00	15 Investor	815,00	15 Investor	815,00	50 Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan Prasarana				167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 22	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata – Rata Capaian Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	100%	12,73	35,00	18,18	50,00	18,18	50,00	25,45	95,00	25,45	70,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 25	Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Informasi Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	79,77%	0,08%	255,00	0,15%	465,00	0,10%	365,00	0,05%	560,00	0,05%	865,00	80,20%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.12.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan	Rata – Rata Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2 Paket	0	-	52,53	520,00	0	-	0	-	47,47	470,00	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 28	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Layanan	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 29	Program Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	91,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 30	Program Pembinaan Penanaman Modal	-	-	-	69,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 31	Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN	Rp. 2.137.869.620.000,00	Rp. 2.150.000.000,00	240,10	Rp. 2.200.000.000,00	260,00	Rp. 2.250.000.000,00	260,00	Rp. 2.300.000.000,00	470,00	Rp. 2.350.000.000,00	770,00	Rp. 11.250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.12.01 32	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	-	-	-	120,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.01 33	Program Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan	1.720 Dokumen	1.730 Dokumen	233,00	1.745 Dokumen	285,00	1.760 Dokumen	285,00	1.775 Dokumen	485,00	1.790 Dokumen	785,00	8.780 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.18	Kearsipan dan Perpustakaan														
2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				7.030,86		6.000,00		12.335,40		14.107,90		15.990,40		
2.18.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	47%	1.166,70	14%	1.327,20	25%	2.370,00	25%	2.370,00	25%	2.370,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	16%	149,00	15%	492,80	27%	880,00	27%	880,00	27%	880,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	100%	0%	-	16%	33,60	28%	60,00	28%	60,00	28%	60,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	0%	-	16%	84,00	28%	150,00	28%	150,00	28%	150,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.18.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	0%	-	16%	101,02	28%	180,40	28%	180,40	28%	180,40	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata capaian program gerdes	100%	22%	-	16%	56,00	28%	100,00	28%	100,00	28%	100,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Rata-rata Capaian Program Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan	4	8	300,00	10	179,20	14	390,00	16	410,00	18	430,00	64	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	Rata-rata Capaian Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana kearsipan	0	1	50,00	1	28,00	1	50,00	2	100,00	2	100,00	7	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Rata-rata Capaian Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	40%	40%	105,00	10,29	71,40	21,62	150,00	24,86	172,50	28,10	195,00	85,27	Dinas Arsip dan Perpustakaan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.18.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	16,50	100,00	9,24	56,00	24,75	150,00	24,75	150,00	24,75	150,00	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01	Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	Rata-rata Capaian Program penerapan kaidah good governance dalam Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	-	22	300,00	12	168,00	20	300,00	20	300,00	20	300,00	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01 20	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Rata-rata Capaian Program pembinaan dan pengawasan Kearsipan	-	22,33	830,00	12,96	481,60	20,45	760,00	21,12	785,00	23,14	860,00	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rata-rata capaian program peningkatan kualitas pelayanan informasi	-	21,929 825	100,00	20	56,00	20	100,00	20	100,00	20	100,00	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01 21	Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah	Rata-rata Capaian Peningkatan Program Pelayanan Arsip Daerah	-	21,50	670,00	12,58	392,00	21,33	665,00	21,98	685,00	22,62	705,00	100	Dinas Arsip dan Perpustakaan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.18.01.25	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rata-rata capaian Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100%	19,29	1.120,56	13,30	772,46	22,47	1.305,00	22,47	1.305,00	22,47	1.305,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01	Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan dan Taman Baca Masyarakat (TBM)	Rata-rata capaian Program Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan dan Taman Baca Masyarakat (TBM)	100%	38,28	972,30	6,61	168,00	12,60	320,00	16,93	430,00	25,59	650,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01	Program Pengembangan Perpustakaan Digital	Rata-rata capaian Program Pengembangan Perpustakaan Digital	20%	0,00	-	6,22	367,92	22,39	1.325,00	31,26	1.850,00	40,13	2.375,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.18.01	Program Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Rata-rata capaian Program Pengembangan Koleksi Perpustakaan	100%	0%	1.167,30	7,99	1.164,80	21,14	3.080,00	28,00	4.080,00	34,86	5.080,00	100%	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3.0303	Pertanian dan Perikanan														
3.03.01	Dinas Pertanian dan Perikanan				30.676,92		29.973,01		36.007,61		43.229,13		51.874,96		



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.03.01 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	20	20	4.569,44	20	5.483,33	20	6.579,99	20	7.895,99	20	9.475,19	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 02	Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20	20	330,00	20	396,00	20	475,20	20	570,24	20	684,29	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
	Program peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	20	20	250,00	20	250,00	20	250,20	20	250,24	20	250,29	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang disiplin aparatur	1	1	6,00	1	7,20	1	8,64	1	10,37	1	12,44	1	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	NTP	2,3	2,5	2.742,00	2,7	3.524,16	2,8	4.228,99	2,9	5.074,78	3	6.089,74	3	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan pangan utama	8.567	8567,1	12.167,97	20	5.364,39	20	6.437,27	20	7.724,73	20	9.269,67	100	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 20	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluhan	384	384	61,00	1536	300,00	1536	400,00	1536	500,00	1536	600,00	1536	Dinas Pertanian dan Perikanan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.03.01 20	Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mendapatkan penghargaan	6	7	2.832,50	8	3.399,00	9	4.078,80	10	4.894,56	11	5.873,47	11	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penyakit menular ternak hingga 0 kasus	0	0	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi peternakan (Daging sapi, ayam dan telur)/ton	1.602	1601,75	4.826,88	1825	8.106,45	1948	9.727,74	2080	11.673,29	2220	14.007,95	2220	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 25	Program Pengembangan Agribisnis	Jumlah pengusaha agribisnis baru	135	150	526,32	165	403,03	180	483,63	195	580,36	110	696,43	110	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 26	Program Peningkatan Budidaya Perikanan	Jumlah pengusaha baru sektor Budidaya ikan lokal	1	1	96,02	1	115,23	1	138,27	1	165,93	1	199,12	5	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 27	Program Pengembangan usaha tani menetap	Jumlah petani baru Secara menetap	0	1	270,00	1	388,80	1	466,56	1	559,87	1	671,85	4	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 30	program pengembangan sarana dan prasarana perkebunan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana perkebunan yang diberikan	3	3	538,79	4	646,55	5	775,85	6	931,03	7	1.117,23	7	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.03.01 31	Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Jumlah pengusaha agribisnis baru perkebunan	40	50	1.644,00	60	1.838,88	70	2.206,66	80	2.647,99	90	3.177,58	90	Dinas Pertanian dan Perikanan
3 . 0202	Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga														



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga				6.986,30		10.290,18		11.190,23		10.146,36		10.145,07		
3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,22	20	2.268,94	20,00	2.831,36	20,00	3.926,36	20,00	3.106,36	20,00	3.116,36	100,00	Disparpora
3.02.01.02	Program Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan sarana Dan Prasarana yang terbangun	99,00	20	770,00	20	1.378,47	20	1.273,87	20	1.090,00	20	1.248,71	100,00	Disparpora
3.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparat	99,00	-	-	50,00	140,00	-	-	50,00	190,00	-	-	100,00	Disparpora
3.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60,00	20	20,00	20,00	20,00	20,00	70,00	20,00	50,00	20,00	70,00	100,00	Disparpora
3.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	99,32	20	25,00	20,00	110,00	20,00	210,00	20,00	110,00	20,00	110,00	100,00	Disparpora
3.02.01.06	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya pengembangan pemasaran Pariwisata	90,00	20	10,00	20,00	395,00	20,00	510,00	20,00	400,00	20,00	400,00	100,00	Disparpora
3.02.01.15	Program pengembangan nilai budaya	Tersedianya Program pengembangan nilai budaya	99,00	20	375,00	20,00	1.085,00	20,00	1.010,00	20,00	970,00	20,00	1.000,00	100,00	Disparpora



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.02.1.113	Program analisa dan Pengembangan pasar pariwisata	Tersedianya analisa dan Pengembangan pasar pariwisata	-	-	25	120,00	25	90,00	25	130,00	25	100,00	100,00	Disparpora	
3.02.01 16	Program Pengembangan destinasi pariwisata	Tersedianya Pengembangan Destinasi Pariwisata	90,00	20	1.976,50	20,00	1.500,00	20,00	1.500,00	20,00	1.500,00	20,00	1.500,00	100,00	Disparpora
3.02.01 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Tersedia nya Kegiatan Pembinaan dan Permasarakat an Olah Raga	90,00	20	200,00	20,00	560,00	20,00	540,00	20,00	1.040,00	20,00	640,00	100,00	Disparpora
3.02.01 20	Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Tersedianya Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	91,00	100	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Disparpora
3.02.01 21	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga	Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga	91,00	100	276,36	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Disparpora
3.02.01 20	Program peningkatan Olah raga	Tersedianya Program peningkatan Olah raga	-	-	-	25,00	200,00	25,00	600,00	25,00	100,00	25,00	100,00	100,00	Disparpora
3.02.01 21	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana	Tersedianya Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga	91,00	-	-	25,00	850,35	25,00	360,00	25,00	360,00	25,00	760,00	100,00	Disparpora



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3.02.01.16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Tersedianya peningkatan Peran Serta Kepemudaan	92,00	20	544,50	20,00	768,69	20,00	768,69	20,00	768,69	20,00	768,69	100,00	Disparpora
3.02.01.23	Program Pembinaan Prestasi Kepemudaan	Tersedianya Pembinaan Prestasi Kepemudaan	99,00	20	20,00	20	331,31	20	331,31	20	331,31	20	331,31	100,00	Disparpora
4.05	Kepegawaian				0		0		0		0		0		
4.05.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				5.405,67		5.026,00		11.704,99		11.000,99		10.990,00		
4.05.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100	100	1.376,49	100	1.803,80	100	1.771,52	100	1.901,22	100	2.167,03	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	80	100	137,00	100	257,00	100	249,50	100	1.364,81	100	774,50	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase rata-rata tingkat kehadiran dan kedisiplinan berpakaian dinas	100	-	-	100	30,00	100	130,00	100	100,00	100	150,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/ku	-	100	80,00	100	60,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		alifikasi pada unit kerjanya													
4.05.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LKIP	80	80	73,40	80	49,20	80	65,40	80	65,40	80	63,90	80	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.22	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Jumlah Desa Binaan	3	4	80,00	2	50,00	4	100,00	4	100,00	4	100,00	18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.87	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.08	Program Mutasi dan Kepangkatan Pegawai	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	100	100	208,50	100	285,00	100	395,00	100	395,00	100	485,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.09	Program Disiplin dan Kesejahteraan	Jumlah aparatur sipil negara yang memperoleh penghargaan	84	50	131,50	50	215,00	50	341,00	50	342,00	50	367,00	250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.05.08.07	Program Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan Karier Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang berkualitas dan profesional pada jabatan struktural	-	100	820,98	100	803,70	100	4.134,57	100	2.134,57	100	2.134,57	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.10	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Informasi Aparatur	Persentase Terpenuhinya Data dan Informasi Kepegawaian	-	100	246,40	100	743,85	100	563,00	100	563,00	100	563,00	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4.05.08.20	Program Pendidikan Kedinasan	Presentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	30	32	2.251,39	35	728,45	40	3.755,00	45	3.835,00	50	3.985,00	50	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
4 .04	Keuangan														
4 . 04 . 05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				6.655,51		9.000,00		10.674,34		11.633,32		12.632,11		
4 .0 .05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	98	98	2.432,47	98	3.073,00	98	3.488,84	98	4.118,17	98	4.648,91	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4 .0 .05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93	98	165,00	98	140,00	98	491,50	98	345,00	98	413,00	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.0.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	99	99	165,00	99	195,00	99	215,00	99	260,00	99	280,00	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.0.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	76	90	165,00	90	75,00	90	120,00	90	160,00	90	160,00	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.0.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan laporan keuangan agar kembali tercapai opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	92	98	107,00	98	115,00	98	150,00	98	185,00	98	200,00	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.0.05.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan penyediaan laporan capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi kinerja dan keuangan yang akurat	89	98	3.272,88	98	4.797,00	98	5.534,00	98	5.802,65	98	6.060,20	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.0.05.16	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Tercapainya pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran	88	98	298,16	98	505,00	98	555,00	98	602,50	98	670,00	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		sampai dengan pelaporan													
4.0.05.22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Seluruh Desa Binaan lingkup BPKAD	100	100	50,00	100	100,00	100	120,00	100	160,00	100	200,00	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.05	Penanggulangan Bencana														Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.05.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				2.341,13		3.998,43		4.283,43		4.453,43		4.843,43	-	
2.05.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	94%	16,44	1.770,63	20,18	2.173,46	20,69	2.228,46	21,06	2.268,46	21,62	2.328,46	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.05.05.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94%	14,52	180,00	21,37	265,00	21,37	265,00	21,37	265,00	21,37	265,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.05.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	92%	-	-	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	100,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.05.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	89%	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.05.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94%	14,62	17,10	21,35	24,97	21,35	24,97	21,35	24,97	21,35	24,97	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.05.05.22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Terlaksananya Program Gerbang Desamu	90%	14,29	20,00	21,43	30,00	21,43	30,00	21,43	30,00	21,43	30,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.05.05.32	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase menurunnya korban terdampak bencana	90%	3,01	40,40	22,01	295,00	23,50	315,00	24,99	335,00	26,48	355,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.05.05.25	Program Darurat Bencana	Persentase korban bencana yang berhasil ditangani	92%	13,03	292,25	17,84	400,00	20,07	450,00	22,30	500,00	26,76	600,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.05.05.27	Program Logistik dan Peralatan	Terpenuhinya Logistik dan Bagi Korban bencana Alam dan Musibah	90%	-	-	17,78	400,00	22,22	500,00	26,67	600,00	33,33	750,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.05.05.31	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan kawasan terdampak Bencana	88%	1,70	20,75	17,20	210,00	22,12	270,00	27,03	330,00	31,95	390,00	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.04	Pengelolaan Pendapatan Daerah														
4.04.06	Badan Pendapatan Daerah				3.315,03		6.500,00		6.750,00		7.000,00		7.500,00		



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.04. 4.04.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	99%	98,00% dinas lingkungan	1.973	98,00%	2.364	98,00%	2.308	98,00%	2.315	98,00%	2.315	98,00%	Badan Pendapatan Daerah
4.04. 4.04.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mendukung Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai Bagi Aparatur Sipil Negara	100%	98,00%	119	98,00%	553	98,00%	115	98,00%	115	98,00%	115	98,00%	Badan Pendapatan Daerah
4.04. 4.04.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	99%	98,00%	-	98,00%	158	98,00%	60	98,00%	60	98,00%	60	98,00%	Badan Pendapatan Daerah
4.04. 4.04.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	98,00%	12	98,00%	200	98,00%	200	98,00%	200	98,00%	200	98,00%	Badan Pendapatan Daerah
4.04. 4.04.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Valid	98%	98,00%	51	98,00%	73	98,00%	73	98,00%	75	98,00%	75	98,00%	Badan Pendapatan Daerah
4.04. 4.04.06.22	Program Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (GERBANG DESAMU)	Terlaksananya Program Gerbang Desamu	98%	98%	-	98%	-	98%	100	98%	100	98%	100	98%	Badan Pendapatan Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.04. 4.04.06.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	99%	98,00%	582	98,00%	1.741	98,00%	1.111	98,00%	1.091	98,00%	1.224	98,00%	Badan Pendapatan Daerah
4.04. 4.04.06.16	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Target Penerimaan Daerah	99%	98,00%	348	98,00%	645	98,00%	356	98,00%	353	98,00%	370	98,00%	Badan Pendapatan Daerah
4.04. 4.04.06.17	Program Pengkajian dan Pengembangan Sumber - Sumber Potensi PAD	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengembangan Potensi-Potensi PAD	100%	98,00%	231	98,00%	765	98,00%	519	98,00%	514	98,00%	363	98,00%	Badan Pendapatan Daerah
4.03	Penelitian dan Pengembangan														
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				18.014,31		11.934,31		14.725,99		16.983,52		19.616,66		
4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,84	18,83	2.537,70	17,14	2.310,40	20,63	2.780,00	21,69	2.923,91	21,71	2.925,66	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.03.01 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86,94	7,58	455,00	14,50	870,00	24,58	1.475,00	34,58	2.075,00	18,75	1.125,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur		19,83	254,00	16,86	216,00	22,72	291,00	17,10	219,00	23,50	301,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63,92	23,36	320,00	10,95	150,00	21,90	300,00	21,90	300,00	21,90	300,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip Bapplitbangda	99,05	18,42	175,00	18,42	175,00	17,37	165,00	21,05	200,00	24,74	235,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	96,66	21,55	5.262,40	14,52	3.545,00	16,91	4.130,00	16,91	4.130,00	30,10	7.350,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rata-rata Capaian program teknis perangkat daerah di	82,28	37,57	2.160,00	8,70	500,00	12,00	690,00	20,87	1.200,00	20,87	1.200,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		bidang ekonomi													
4.03.01 22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata Capaian Program Gerdes	99,48	25,00	100,00	12,50	50,00	12,50	50,00	25,00	100,00	25,00	100,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 31	Program Pengembangan Pusat Data Perencanaan	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pengembangan Pusat Data Perencanaan	99,56	28,92	427,20	30,46	450,00	13,54	200,00	13,54	200,00	13,54	200,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 33	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	100,00	#REF!	45,00	39,05	40,00	39,05	40,00	39,05	40,00	39,05	40,00	200	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 35	Program perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Capaian program teknis perangkat daerah di bidang pemerintah dan pemb manusia	99,48	33,48	755,00	12,86	290,00	12,86	290,00	20,40	460,00	20,40	460,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.03.01 35	Program Perencanaan Tata Ruang	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	99,35	15,40	495,00	29,08	935,00	14,15	455,00	20,68	665,00	20,68	665,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 37	Program Perencanaan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang PPSP	99,91	23,66	447,83	10,57	200,00	23,51	445,00	21,13	400,00	21,13	400,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 38	Program Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Transmigrasi	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tras	99,91	24,55	205,00	11,98	100,00	11,98	100,00	27,54	230,00	23,95	200,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 39	Program Penelitian dan Pengembangan	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Litbang	99,99	26,67	3.332,28	10,83	1.352,91	19,05	2.379,99	20,73	2.590,60	22,73	2.840,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
4.03.01 40	Program Inovasi Pembangunan Daerah	Jumlah inovasi daerah yang dilaksanakan dalam kebijakan		19,85	1.042,90	14,28	750,00	17,80	935,00	23,80	1.250,00	24,27	1.275,00	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		pembangunan daerah													
4.0202	Pengawasan														
4.02.01	Inspektorat				3.352,10		6.000,00		6.575,00		7.275,00		7.500,00		
4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	82,21	17,85	1.806,00	19,84	2.007,80	20,56	2.079,70	20,77	2.101,80	20,98	2.122,30	100,00	Inspektorat
4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35,19	3,99	128,20	26,69	857,20	23,11	742,20	23,11	742,20	23,11	742,20	100,00	Inspektorat
4.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparat	45,44	-	-	11,39	45,00	27,85	110,00	30,38	120,00	30,38	120,00	100,00	Inspektorat
4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44,28	-	-	20,00	185,00	24,86	230,00	24,86	230,00	30,27	280,00	100,00	Inspektorat
4.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	14,93	60,00	17,91	72,00	22,39	90,00	22,39	90,00	22,39	90,00	100,00	Inspektorat



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.02.01 07	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	42,80	9,65	1.182,90	17,93	2.198,00	20,66	2.533,10	25,25	3.096,00	26,51	3.250,50	100,00	Inspektorat
4.02.01	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	41,92	1,46	25,00	18,42	315,00	24,56	420,00	27,78	475,00	27,78	475,00	100,00	Inspektorat
4.02.01 22	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (GERBANGDESAMU)	Rata-rata Capaian Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus	100	11,11	50,00	22,22	100,00	22,22	100,00	22,22	100,00	22,22	100,00	100,00	Inspektorat



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.02.01.38	Program Sapu Bersih Pungutan Liar	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Sapu Bersih Pungutan Liar	-	8,70	100,00	17,39	200,00	21,74	250,00	26,09	300,00	26,09	300,00	100,00	Inspektorat
4.02.01	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rata-rata Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-	-	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00	100,00	Inspektorat
4.01.03	Sekretariat Daerah				57.880,04		61.395,00		63.500,00		64.250,00		65.395,00		
4.01.03.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	96.43	100%	18.489,07	100%	15.541,13	100%	16.242,87	100%	16.512,73	100%	16.814,75	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.56	100%	1.253,00	100%	1.023,00	100%	1.110,00	100%	1.161,00	100%	1.240,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.120	Program Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rata-rata capaian Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	86.30	100%	430,00	100%	380,00	100%	430,00	100%	450,00	100%	450,00	100%	Sekretariat Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.121	Program Pengembangan & Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Rata-rata capaian Pengembangan & Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.022	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata capaian Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbang Desamu)	99.43	100%	356,16	100%	355,16	100%	406,16	100%	437,16	100%	478,22	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.007	Program Penanaman Modal Daerah Penyelenggaraan Investasi	Rata-rata capaian Penanaman Modal Daerah Penyelenggaraan Investasi	100	100%	100,00	100%	75,00	100%	80,00	100%	80,00	100%	85,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.008	Program Sinkronisasi dan Monitoring Pembinaan Bantuan Pra Sejahtera/Rastra	Rata-rata capaian Sinkronisasi dan Monitoring Pembinaan Bantuan Pra Sejahtera/Rastra	100	100%	135,00	100%	75,00	100%	75,00	100%	80,00	100%	85,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.009	Program Monitoring dan Survey Harga Kebutuhan Pokok	Rata-rata capaian Monitoring dan Survey Harga Kebutuhan Pokok	100	100%	80,00	100%	80,00	100%	90,00	100%	90,00	100%	100,00	100%	Sekretariat Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.010	Program Penjaringan Dewan Direksi	Rata-rata capaian Penjaringan Dewan Direksi	100	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	100,00	100%	130,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.015	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rata-rata capaian Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	99.54	100%	145,00	100%	80,00	100%	90,00	100%	90,00	100%	110,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.022	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rata-rata capaian Perencanaan Pembangunan Ekonomi	99.74	100%	215,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	101,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.017	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Rata-rata capaian Kerjasama Informasi dengan Mas Media	100	100%	1.350,31	100%	1.832,26	100%	1.926,63	100%	1.926,63	100%	1.950,63	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.023	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pemerintah Daerah	98.12	100%	460,00	100%	700,00	100%	700,00	100%	730,00	100%	750,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.28	100%	11.613,71	100%	8.527,00	100%	8.684,00	100%	8.749,00	100%	8.776,00	100%	Sekretariat Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	88.38	100%	683,77	100%	1.591,03	100%	1.669,80	100%	1.715,49	100%	1.752,30	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.032	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rata-rata capaian Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	97.28	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.033	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Rata-rata capaian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	96.71	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.034	Program Penerapan Pemerintah yang Baik dan Pemberantasan KKN	Rata-rata capaian Penerapan Pemerintah yang Baik dan Pemberantasan KKN	97.56	100%	215,00	100%	215,00	100%	215,00	100%	215,00	100%	215,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparat	96.46	100%	381,14	100%	55,00	100%	77,00	100%	70,00	100%	97,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.015	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rata-rata capaian Pengembangan Data dan Informasi	95.56	100%	375,54	100%	375,54	100%	400,54	100%	400,54	100%	405,88	100%	Sekretariat Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.019	Program Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian Pengendalian Pembangunan	97.26	100%	163,00	100%	163,50	100%	195,00	100%	198,00	100%	209,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.012	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	93.86	100%	100,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.029	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Rata-rata capaian Penataan Peraturan Perundang-undangan	99.92	100%	491,50	100%	490,00	100%	500,00	100%	490,00	100%	500,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.030	Program Penataan Perkara Perdata / PTUN / Pidana	Rata-rata capaian Penataan Perkara Perdata / PTUN / Pidana	0	100%	30,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.031	Program Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Rata-rata capaian Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	97.14	100%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	250,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.037	Rencana Aksi Nasional HAM	Rata-rata capaian Rencana Aksi Nasional HAM	96.76	100%	134,92	100%	150,00	100%	150,00	100%	150,00	100%	150,00	100%	Sekretariat Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.117	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rata-rata capaian Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	98.67	100%	984,03	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.016	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rata-rata capaian Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	92.62	100%	410,00	100%	370,00	100%	370,00	100%	370,00	100%	370,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.020	Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Rata-rata capaian Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan	97.83	100%	2.780,00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.040	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan Pelaksanaan Keagamaan	Rata-rata capaian Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan Pelaksanaan Keagamaan	0	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	200,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.041	Program Pembinaan Lembaga dan Bina Agama	Rata-rata capaian Pembinaan Lembaga dan Bina Agama	92.75	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	Sekretariat Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.042	Program Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rata-rata capaian Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	88.36	100%	350,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	300,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.043	Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan	Rata-rata capaian Pengembangan Kegiatan Keagamaan	95.56	100%	1.845,00	100%	18.670,00	100%	18.875,00	100%	18.875,00	100%	19.025,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.044	Program Pembinaan Iman dan Taqwa	Rata-rata capaian Pembinaan Iman dan Taqwa	97.18	100%	9.727,00	100%	5.806,45	100%	6.278,09	100%	6.408,24	100%	6.762,28	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.011	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rata-rata capaian Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	0	100%	505,00	100%	525,00	100%	575,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.012	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	93.86	100%	160,03	100%	250,00	100%	285,00	100%	285,00	100%	285,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.013	Program Penataan Otonomi Baru	Rata-rata capaian Penataan Otonomi Baru	97.07	100%	1.210,00	100%	668,06	100%	668,06	100%	668,06	100%	694,30	100%	Sekretariat Daerah



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.03.014	Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	87.97	100%	890,00	100%	775,00	100%	775,00	100%	805,28	100%	825,28	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.015	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	99.57	100%	240,00	100%	240,00	100%	250,00	100%	260,00	100%	300,00	100%	Sekretariat Daerah
4.01.03.025	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Daerah	Rata-rata capaian Peningkatan Sarana Dan Prasarana Daerah	98.92	100%	636,86	100%	541,86	100%	541,86	100%	542,86	100%	543,36	100%	Sekretariat Daerah
4.01.04	Sekretariat DPRD				13.981,95		18.000,00		20.424,38		20.500,00		21.000,00		
4.01.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Capaian Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan yang berlaku	96,62%	85%	6.930,50	85%	10.104,82	85%	12.568,50	85%	12.618,50	100%	12.768,50	100%	Sekretariat DPRD



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.04 16	Program Pengembangan Kinerja Anggota DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan yang berlaku	92.44 %	85%	701,50	85%	701,50	85%	1.317,90	85%	1.229,98	100 %	1.155,40	100 %	Sekretariat DPRD
4.01.04 17	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Terlaksannnya Kerja sama dengan Mas Media Agar Tersebar nya Informasi Pembangunan Daerah	97.82 %	85%	250,00	85%	250,00	85%	250,00	85%	250,00	100 %	250,00	100 %	Sekretariat DPRD
4.01.04 14	Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	Terselengraany a Pelantikan Anggota DPRD Periode 2019 - 2023	97.92 %		72,00		-		-		-	100 %	72,00	100 %	Sekretariat DPRD
4.01.04	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Pembuatan Buku Profil DPRD sebagai informasi mengenai DPRD kepada Masyarakat	85.20 %	100 %	-	100 %	155,70		-		-		-		Sekretariat DPRD
4.01.04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.35 %	95 %	4.722,68	95 %	5.022,68	95 %	5.022,68	95 %	5.072,68	95 %	5.182,68	95 %	Sekretariat DPRD



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96.37 %	90 %	525,97	90 %	986,00	90 %	486,00	90 %	486,00	100 %	686,00	100 %	Sekretariat DPRD
4.01.04 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	96.43 %	98 %	462,00	98 %	462,00	98 %	462,00	98 %	462,00	100 %	462,00	100 %	Sekretariat DPRD
4.01.04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	100 %	150,00	100 %	150,00	100 %	150,00	100 %	200,00	100 %	250,00	100 %	Sekretariat DPRD
4.01.04 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	100 %	67,30	100 %	67,30	100 %	67,30	100 %	80,84	100 %	73,42	100 %	Sekretariat DPRD
4.01.04 22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Terselenggaranya Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu) Guna Mempercepat dan Membantu Mefasilitasi Desa dalam mempercepat Pembangunan di Desa Binaan	-	100 %	100,00	100 %	100,00	100 %	100,00	100 %	100,00	100 %	100,00	100 %	Sekretariat DPRD
4 . 01 . 11	Kecamatan Murung				2.362,35		6.521,00		6.750,00		7.150,00		7.500,00		



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.11.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,12	100	1.632,35	100	4.175,90	100	4.690,90	100	4.842,90	100	5.071,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.024	Program Peningkatan Pengawasan Politik	Tersedianya peningkatan pengawasan politik	99,98	100	30,00	100	35,00	100	35,00	100	35,00	100	45,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.026	Program Tanggap Pasca Bencana	Terlaksananya tanggap pasca bencana	-	100	-	100	-	100	25,00	100	35,00	100	50,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.015	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan	-	100	42,00	100	140,00	100	140,00	100	140,00	100	150,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.018	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tersedianya peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Kecamatan Murung
4.01.11.022	Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbangdesamu)	Rata-rata Capaian Program Gerdes	-	-	-	-	-	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.020	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan	-	-	-	-	-	100	25,00	100	30,00	100	40,00	100	Kecamatan Murung



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.11.024	Program Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksannya pendataan, pengawasan dan pengendalian perijinan dan non perijinan		-	-	-	-	100	25,00	100	35,00	100	40,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.016	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	Kecamatan Murung
4.01.11.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,63	100	99,00	100	294,00	100	294,00	100	412,00	100	435,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparat		-	-	-	-	-	-	100	50,00	100	50,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	90,00	100	300,00	100	300,00	100	325,00	100	350,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	55,62	100	59,00	100	74,00	100	74,00	100	74,00	100	74,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.014	Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	Rata-rata capaian penyelenggara n tugas di	99,99	100	40,00	100	105,00	100	105,00	100	105,00	100	105,00	100	Kecamatan Murung



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		bidang pemerintahan													
1.11.01.226	Program Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya pembinaan administrasi pemerintahan desa	99,93	100	30,00	100	50,00	100	75,00	100	85,00	100	85,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.027	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rata-rata perencanaan tingkat kecamatan	99,07	100	135,00	100	185,00	100	185,00	100	200,00	100	200,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.028	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan	99,98	100	75,00	100	441,10	100	441,10	100	441,10	100	455,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.035	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersediannya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	99,83	100	30,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.118	Program Kerja Sama Publikasi dan Informasi Dengan Masmedia	Terwujudnya kerja sama publikasi dan informasi di longkungan masyarakat	-	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.039	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Terciptanya peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan	-	-	-	-	-	100	35,00	100	40,00	100	50,00	100	Kecamatan Murung



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4.01.11.044	Program Pengembangan Iman dan Taqwa	Tersedianya pengembangan iman dan taqwa	-	-	-	-	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	Kecamatan Murung	
4.01.11.047	Program Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan	-	100	50,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	Kecamatan Murung
4.01.11.0	Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan Secara Merata	-	-	-	521,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Murung	
04.01.18	Kecamatan Sungai Babuat				1.875,86		3.607,00		4.165,00		4.785,00		5.370,00				
4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,2	100	1.410	100	1.729	100	1.908	100	2.153	100	2.250	100	2.250	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,68	100	170	100	1.222	100	1.415	100	1.705	100	2.063	100	2.063	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.01.18.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	100	-	-	100	95	100	145	100	145	100	220	100	220	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.01.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	25	100	45	100	45	100	55	100	55	100	55	100	Kecamatan Sungai Babuat



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.18	Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99,24	100	5	100	7	100	75	100	75	100	85	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.01.18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Terlaksananya Pelayanan dibidang Pemerintah	99,47	100	22	100	46	100	62	100	62	100	62	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.03.4.03.0 1.35	Program Pembinaan Administrasi Pedesaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat	99	100	50	100	85	100	110	100	110	100	130	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.01.18.27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat	99,32	100	80	100	120	100	140	100	140	100	150	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.01. 4.01.18.01. 28	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa/Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat		100	49	100	125	100	165	100	165	100	180	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.01.18.35	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya keakuratan Pelaporan Keuangan Desa	95,86	100	65	100	133	100	100	100	175	100	175	100	Kecamatan Sungai Babuat
4.01.12	Kecamatan Tanah Siang				3.803,16		5.170,00		5.449,66		5.689,83		6.447,48		
01.4.01.114	Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	0%	100,00	60,18	100,00	140,00	100,00	165,00	100,00	193,10	100,00	193,65	100	Kecamatan Tanah Siang



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01.4.01.135	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase kelembagaan desa/kelurahan yang dibina	74,48%	100,00	150,00	100,00	205,00	100,00	265,00	100,00	259,00	100,00	265,00	100	Kecamatan Tanah Siang
01.4.01.102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98,27%	100,00	1.478,00	43,19	1.285,00	43,19	1.285,00	43,19	1.285,00	45,51	1.933,83	100	Kecamatan Tanah Siang
01.4.01.101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,42%	100	1.869,48	100	2.754,00	100	2.955,00	100	3.045,95	100	3.040,00	100	Kecamatan Tanah Siang
01.4.01.105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,60%	100,00	30,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100	Kecamatan Tanah Siang
01.4.01.106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	81,71%	100,00	50,00	100,00	76,00	100,00	76,00	100,00	76,00	100,00	76,00	100	Kecamatan Tanah Siang
01.4.01.126	Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya dana untuk penyelenggaraan kegiatan pembersihan (gotong Royong) dan kegiatan lainnya	99,88%	100,00	40,90	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	215,00	100,00	250,00	100	Kecamatan Tanah Siang



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01.4.01.127	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Tersedianya dana untuk penyelenggaraan musrenbang	99,88%	100,00	54,60	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	120,00	100,00	120,00	100	Kecamatan Tanah Siang
01.4.01.128	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa/Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggaraan	99,21%	100,00	50,00	100,00	130,00	100,00	130,00	100,00	179,78	100,00	239,00	100	Kecamatan Tanah Siang
01.4.01.103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparat	99,60%	100,00	20,00	100,00	90,00	100,00	83,66	100,00	66,00	100,00	70,00	100	Kecamatan Tanah Siang
01.4.01.139	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	0,00%	12 Bulan	-	12 Bulan	50,00	12 Bulan	50,00	12 Bulan	50,00	12 Bulan	60,00	72 Kali	Kecamatan Tanah Siang
4.01.15	Kecamatan Sumber Barito	0			3.393,93		4.440,00		5.086,25		5.511,25		5.969,55		
4.01.15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	20	2.086,25	20	1.843,12	20	2.152,37	20	2.190,37	20	2.362,47	100	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	20	187,30	20	2.045,00	20	2.348,00	20	2.770,00	20	2.810,30	100	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	0			-		-		-		-		-		Kecamatan Sumber Barito
4.01.15 05	Program Peningkatan	Rata-Rata Capaian Kapasitas	100	20	45,00	20	45,00	20	45,00	20	50,00	20	70,00	100	Kecamatan Sumber Barito



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur													
4.01.15 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	100	20	-	20	66,00	20	80,00	20	40,00	20	146,00	100	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Pengembangan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	20	12,68	20	21,68	20	21,68	20	21,68	20	21,68	100	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15 27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian program perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	100	20	34,80	20	65,80	20	70,80	20	70,80	20	76,80	100	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15 28	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	Rata-rata Capaian Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	20	20	61,00	20	60,00	20	75,00	20	75,00	20	150,00	100	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15 30	Program Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	Rata-rata capaian Program Pendampingan Pengelolaan Dana Desa	20	20	38,90	20	116,70	20	116,70	20	116,70	20	116,70	100	Kecamatan Sumber Barito



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.15.35	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Rata-rata capaian Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		20	38,90	20	38,90	20	38,90	20	38,90	20	77,80	100	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15.45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	-	-	697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15.46	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	-	-	153,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sumber Barito
4.01.15	Program Pembinaan Administrasi Desa	Terwujudnya pengembangan dan tertib administrasi pelaporan desa		20	38,90	20	137,80	20	137,80	20	137,80	20	137,80	100	Kecamatan Sumber Barito
4.01.17	Kecamatan Barito Tuhup Raya	0			2.032,58		4.000,00		4.100,00		4.500,00		5.000,00		
1.4.01.1701	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	99	6,16	1.217,58	10,42	2.060,00	10,70	2.115,00	10,70	2.115,00	12,02	2.375,00	50,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya
01.4.01.102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98	1,44	165,00	11,32	1.300,00	11,72	1.345,00	11,72	1.345,00	13,81	1.585,00	50,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya
01.4.01.103	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparat	98	-	-	12,50	200,00	12,50	200,00	12,50	200,00	12,50	200,00	50,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01.4.01.105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98	4,72	25,00	11,32	60,00	11,32	60,00	11,32	60,00	11,32	60,00	50,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya
03.4.01.115	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Rata-rata Capaian jalan komplek perumahan dinas dan perkantoran	99	-	-	-	-	-	25,00	250,00	25,00	250,00	50,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya	
07.4.01.115	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata-rata Capaian pembinaan TP-PKK Kecamatan	100	4,47	27,50	9,76	60,00	9,76	60,00	13,01	80,00	13,01	80,00	50,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya
04.4.01.116	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rata-rata Capaian tanah untuk pengembangan kantor dan perumahan dinas	100	-	-	25,00	50,00	25,00	50,00	-	-	-	-	50,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya
03.4.01.117	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Rata-rata Capaian turap komplek perumahan dinas dan perkantoran	99	50,00	415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya
01.4.01.127	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Capaian perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	99	12,50	50,00	18,75	75,00	18,75	75,00	25,00	100,00	25,00	100,00	100,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01.4.01.128	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	Rata-rata Capaian pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	98	15,24	102,50	20,07	135,00	20,07	135,00	22,30	150,00	22,30	150,00	100,00	Kecamatan Barito Tuhup Raya
03.4.01.135	Program Perencanaan Tata Ruang	Rata-rata Capaian perencanaan Tata Ruang	-	5,45	30,00	10,91	60,00	10,91	60,00	36,36	200,00	36,36	200,00	100,00	
4.01.13	Kecamatan Laung Tuhup			100	3.937,00	100	3.987,00	100	4.037,04	100	4.087,04	100	4.137,04	20.185,00	
4.01.13	Program Percepatan	Rata-Rata Terlaksananya Program percepatan	99	100	394,29	100	444,29	100	494,29	100	544,29	100	594,29	2.471,48	Kec. Laung Tuhup
4.01.13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rata-Rata Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	-												Kec. Laung Tuhup
4.01.13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,12	100	1.658,35	100	1.658,35	100	1.658,35	100	1.658,35	100	1.658,35	100	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,63	100	339,50	100	339,50	100	339,50	100	339,50	100	339,50	100	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	99	99	66,00	99	66,00	99	66,00	99	66,00	99	66,00	99	Kec. Laung Tuhup



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.13 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	500	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-Rata Terlaksanya Capaian Kinerja keuangan	55,62	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	50	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 14	Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	Rata-Rata Terlaksananya Tugas Bidang Pemerintahan	99,99	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	50	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rata-rata terlaksananya penguasaan, pemilikan, penggunaan	99,99	100	900,00	100	900,00	100	900,00	100	900,00	100	900,00	450	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 26	Program Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Desa	Rata-Rata Terlaksananya Pemerintahan Desa	99,93	100	25,00	100	25,00	100	25,00	100	25,00	100	25,00	100	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rata-Rata Terlaksannya Musrenbang	99,07	100	35,00	100	35,00	100	35,00	100	35,00	100	35,00	100	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 28	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa/Kelurahan	Rata-Rata Terlaksananya Pembinaan Desa/Kelurahan	99,98	100	195,00	100	195,00	100	195,00	100	195,00	100	195,00	97	Kec. Laung Tuhup



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.13 35	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Laung Tuhup
4.01.13 46	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Laung Tuhup
4.01.16	Kecamatan Tanah Siang Selatan	-	-	-	2.268,68	-	4.580,00	-	4.867,50	-	4.423,00	-	5.624,50	-	
4.01.16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	14,87	1.504,16	18,43	1.865,00	20,26	2.050,00	21,46	2.171,00	24,98	2.527,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86,94	6,01	240,00	26,78	1.070,00	27,78	1.110,00	18,77	750,00	20,65	825,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16.003	Program peningkatan disiplin aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	99,89	-	-	31,62	296,00	33,12	310,00	-	-	35,26	330,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	18,52	100,00	11,11	60,00	14,81	80,00	18,52	100,00	37,04	200,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.16.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99,05	15,63	35,00	18,75	42,00	20,31	45,50	21,88	49,00	23,44	52,50	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16.226	Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	Terwujudnya Program Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemerintahan	100	12,76	47,52	131,25	70,00	20,13	75,00	21,48	80,00	26,84	100,00	212	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16.227	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	17,30	-	22,13	70,00	34,15	80,00	45,15	90,00	33,22	100,00	152	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16.228	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah	Rata-rata Capaian Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah	100,00	17,95	175,00	20,51	200,00	20,51	200,00	20,51	200,00	20,51	200,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16.335	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100	-	-	36,36	200,00	27,27	150,00	18,18	100,00	18,18	100,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.16 26	Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Rata-rata Capaian Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	99,56	6,39	37,00	14,16	82,00	19,86	115,00	24,18	140,00	35,41	205,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16 27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100	18,24	60,00	29,71	90,00	41,18	120,00	48,31	140,00	62,56	180,00	200	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16 28	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa/Kelurahan	Terwujudnya Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa/Kelurahan	100	3,36	50,00	26,17	390,00	21,61	322,00	23,02	343,00	25,84	385,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16 35	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terwujudnya Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100	5,19	20,00	11,69	45,00	15,58	60,00	23,38	90,00	44,16	170,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Terwujudnya Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	100	-	-	14,93	100,00	22,39	150,00	25,37	170,00	37,31	250,00	100	Kecamatan Tanah Siang Selatan
4.01.14	Kecamatan Permata Intan				7.491,16		6.160,00		6.519,50		7.019,50		7.119,50		



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.14 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,12	100	3.142,48	100	3.495,00	100	3.689,50	100	3.844,50	100	4.158,00	100	Kecamatan Permata Intan
4.01.14 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,98	100	1.742,25	100	1.580,00	100	1.330,00		1.790,00	100	1.636,50	100	Kecamatan Permata Intan
4.01.14 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	90,15	100	81,20	100	90,00		405,00		185,00	100	100,00	100	Kecamatan Permata Intan
4.01.14 04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Tersedianya Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	-	100	7,50	100	-		10,00		10,00	100	10,00	100	Kecamatan Permata Intan
4.01.14 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	100	35,00	100	80,00	100	110,00		110,00	100	135,00	100	Kecamatan Permata Intan
4.01.14 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	100	55,00	100	135,00	100	130,00		165,00	100	165,00	100	Kecamatan Permata Intan
4.01.14 26	Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Tersedianya Program Pembinaan Administrasi	-	100	15,00	100	25,00	100	40,00	100	40,00		40,00		Kecamatan Permata Intan



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pemerintahan Desa													
4.01.14 27	Program Perencanaan Pembangunan Tk Kecamatan	Tersedianya Program Perencanaan Pembangunan Tk Kecamatan	-	100	125,00	100	165,00	100	180,00	100	210,00	100	210,00	100	Kecamatan Permata Intan
4.01.14 28	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	Tersedianya Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	-	100	572,73	100	565,00	100	595,00	100	635,00	100	635,00	100	Kecamatan Permata Intan
4.01.14 35	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	-	100	15,00	100	25,00	100	30,00	100	30,00	100	30,00	100	
4.01.14 45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		-	-	1.192,25		-		-		-		-		
4.01.14 46	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	-	507,75		-		-		-		-		Kecamatan Permata Intan
4.01.19	Kecamatan Uut Murung				2.102,60		3.600,00		4.018,02		4.317,60		4.818,00		
4.01.19 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,66%	14,15	1.369,10	19,62	1.898,00	21,59	2.088,52	22,43	2.169,60	22,20	2.147,00	100	Kecamatan Uut Murung



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RPKD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.19 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,03%	7,08	352,50	18,48	920,00	17,98	895,00	24,10	1.200,00	32,36	1.611,00	100	Kecamatan Uut Murung
4.01.19 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,16%	14,88	107,50	18,69	135,00	27,68	200,00	19,38	140,00	19,38	140,00	100	Kecamatan Uut Murung
4.01.19 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian disiplin aparatur	100%	-	-	18,75	75,00	31,25	125,00	18,75	75,00	31,25	125,00	100	Kecamatan Uut Murung
4.01.19 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata Capaian Bidang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,75%	13,89	22,50	16,67	27,00	21,30	34,50	23,46	38,00	24,69	40,00	100	Kecamatan Uut Murung
4.01.19 27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	100%	16,81	100,00	21,85	130,00	21,85	130,00	16,81	100,00	22,69	135,00	100	Kecamatan Uut Murung
4.01.19 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	12,20	50,00	14,63	60,00	24,39	100,00	24,39	100,00	24,39	100,00	100	Kecamatan Uut Murung



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4.01.19 35	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rata-rata capaian bidang Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	99,87%	5,76	40,00	23	160,00	23,02	160,00	23,74	165,00	24,46	170,00	100	Kecamatan Uut Murung
4.01.19 28	Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	Rata-rata Capaian Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa / Kelurahan	99,55%	6,62	61,00	17,92	165,00	22,26	205,00	26,06	240,00	27,14	250,00	100	Kecamatan Uut Murung
4.01.19	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat	0,00%	-	-	10,00	30,00	26,67	80,00	30,00	90,00	33,33	100,00	100	Kecamatan Uut Murung
4 . 01 . 20	Kecamatan Seribu Riam				1.913,00	108,56	3.600,00	119,82	4.050,00	130,40	4.250,00	143,49	4.900,00		
4.01.20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.033	12,86	1.501,00	19,52	2.278,00	21,14	2.467,00	22,36	2.610,00	24,12	2.815,00	100	Kecamatan Seribu Riam
4.01.20 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	345	3,84	117,00	17,23	525,00	22,15	675,00	23,47	715,00	33,31	1.015,00	100	Kecamatan Seribu Riam
4.01.20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-Rata Capaian Kapasitas	40	6,83	44,00	18,63	120,00	23,29	150,00	24,07	155,00	27,17	175,00	100	Kecamatan Seribu Riam



Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2023)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019 (SESUAI RKPD 2019)		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Sumber Daya Aparatur													
4.01.20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25	11,63	25,00	17,44	37,50	19,77	42,50	23,26	50,00	27,91	60,00	100	Kecamatan Seribu Riam
4.01.20 26	Program Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	Rata-rata Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		4,94	94,00	21,01	400,00	23,63	450,00	23,90	455,00	26,52	505,00	100	Kecamatan Seribu Riam
4.01.20 27	Program Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	33	12,09	33,00	18,32	50,00	21,98	60,00	20,15	55,00	27,47	75,00	100	Kecamatan Seribu Riam
4.01.20 36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Rata-rata Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	135	10,32	99,00	19,76	189,50	21,43	205,50	21,90	210,00	26,59	255,00	100	Kecamatan Seribu Riam
Total					588.096,62		777.595		790.815		832.251		900.921		



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam melihat kinerja penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya maka perlu adanya penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja Kabupaten Murung Raya bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama, namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Berikut penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Kondisi Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	IPM	68,11	68,58	69,05	69,53	70,00	70,00
2	Rata-rata lama sekolah	7,59	7,69	7,79	7,90	8,00	8,00
3	Harapan lama sekolah	12,15	12,36	12,57	12,79	13,00	13,00
4	Angka harapan hidup	70,26	70,70	71,13	71,57	72,00	72,00
5	Tingkat kemiskinan	5,25	4,94	4,63	4,31	4,00	4,00
6	Pengeluaran konsumsi per kapita	1.240.725	1.305.544	1.370.363	1.435.181	1.500.000	1.500.000
7	Tingkat pengangguran	2,52	2,39	2,26	2,13	2,00	2,00
8	Indeks Desa Membangun	0,4818	0,4863	0,4909	0,4954	0,5000	0,5000
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,38	6,66	6,94	7,22	7,50	7,50
10	LPE sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	6,76 dan 4,99	7,07 dan 5,24	7,38 dan 5,49	7,69 dan 5,75	8,00 dan 6,00	8,00 dan 6,00
11	LPE sektor pertanian terhadap perekonomian daerah	3,17	3,51	3,84	4,17	4,50	4,50
12	Jumlah Nilai Investasi PMA (Rp)	5.886.146.970.000,-	6.474.761.667.000,-	7.112.237.833.7000,-	7.834.461.617.070,-	8.617.907.778.777,-	8.617.907.778.777,-
13	Jumlah Nilai PMDN (Rp)	740.644.630.000,-	814.709.093.000,-	896.180.002.300,-	985.798.002.530,-	1.084.377.802.783,-	1.084.377.802.783,-
14	Indeks Reformasi Birokrasi	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
15	Nilai SAKIP	CC	B	BB	BB	A	A



No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Kondisi Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	
16	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	IKM	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
18	Angka kriminalitas	4,71	4,21	3,81	3,46	3,15	3,15
19	Indeks Gini	0,294	0,289	0,284	0,280	0,275	0,275
20	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	26,56	32,42	38,28	44,14	50,00	50,00
21	Persentase perumahan layak huni	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00	65,00
22	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	73,27	74,95	76,63	78,32	80,00	80,00
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,20	68,80	70,40	72,00	73,30	73,30
24	Indeks risiko bencana	170	165	160	155	150	150
25	Jumlah wisatawan	52.794	58.346	63.897	69.449	75.000	75.000

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah



terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Murung Raya Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,38	6,66	6,94	7,22	7,50
1.2	Tingkat inflasi (Palangkaraya)	%	2,99	2,93	2,87	2,81	2,75
1.3a	PDRB ADHB	Juta Rp	7.813.296,20	8.331.648,00	8.849.999,80	9.368.351,60	9.886.703,40
1.3b	PDRB Per Kapita	Juta Rp	64,65	67,47	70,17	72,77	75,26
1.4	Indeks gini	%	0,29	0,29	0,28	0,28	0,28
1.5	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	%	94,75	95,06	95,37	95,69	96,00
1.6	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.7	Tingkat pengangguran	%	2,52	2,39	2,26	2,13	2,00
1.8	Paritas daya beli	Ribu Rp	10.182,20	10.355,00	10.527,80	10.700,60	10.873,40
1.9	Jumlah Penduduk	Jiwa	120.863	123.489	126.115	128.741	131.367
1.10.a	Pertumbuhan Penduduk	%	2,22	2,17	2,13	2,08	2,04
1.10.b	Pengeluaran per kapita	Rp.	1.240.725,33	1.305.544,00	1.370.362,67	1.435.181,33	1.500.000,00
1.11	IPM		68,11	68,58	69,05	69,53	70,00
II	Fokus Kesejahteraan Sosial						
2.1	Pendidikan						
2.1.2	Angka melek huruf	%	99,08	99,19	99,29	99,40	99,50
2.1.3	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,59	7,69	7,79	7,90	8,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.1.4a	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB	%	111,73	110,05	108,37	106,68	105,00
2.1.4b	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB	%	91,77	93,83	95,89	97,94	100,00
2.1.4c	Angka Partisipasi Kasar SLTA/MA/SMK	%	71,15	75,86	80,57	85,29	90,00
2.1.5a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB	%	99,97	99,98	99,98	99,99	100,00
2.1.5b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB	%	76,49	79,87	83,24	86,62	90,00
2.1.5c	Angka Partisipasi Murni SLTA/MA/SMK	%	45,97	49,48	52,98	56,49	60,00
2.1.6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,15	12,36	12,57	12,79	13,00
2.2	Kesehatan						
2.2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,26	70,70	71,13	71,57	72,00
2.2.2	Persentase Bayi Gizi Buruk	%	15	13	11	9	7
2.2.3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20
2.2.4	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	65	70	75	80	85
2.3	Pertanahan						
2.4	Ketenagakerjaan						
2.4.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	97,48	97,61	97,74	97,87	98,00
Aspek Pelayanan Umum							
A	Urusan Pemerintahan Wajib						



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1.1	Urusan Pendidikan						
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99,30	99,48	99,65	99,83	100,00
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah SLTP/MTS	%	94,97	96,23	97,49	98,74	100,00
1.1.1.c	Angka Partisipasi Sekolah SLTA/MA/SMK	%	66,07	69,55	73,03	76,52	80,00
1.1.2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						
	- SD/MI	Orang	725	750	775	800	825
	- SMP/MTs	Orang	530	545	560	575	590
1.1.3	Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	12,15	12,36	12,57	12,79	13,00
1.2	Urusan Kesehatan						
1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	≤ 1,45	≤ 0,99	≤ 0,61	≤ 0,56	≤ 0,26
1.2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	%	0,45	0,01	0,39	0,44	0,74
1.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	2,17	1,66	1,22	0,84	0,52
1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	4,34	2,98	2,13	1,40	0,77



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	%	1,09	0,99	0,61	0,56	0,52
1.2.6	Rasio posyandu per satuan balita	%	12,33	12,11	11,91	11,76	11,48
1.2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27
1.2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.2.9	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29
1.2.10	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	%	4,68	5,68	6,68	6,68	6,68
1.2.11	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani	%	90,00	92,00	94,00	96,00	96,00
1.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	0,86	0,86	0,87	0,87	0,89
1.2.13	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	82,5	85	87,5	90	90



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	85,00	90,00	95,00	95,00	100,00
1.2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum standar yang digunakan Indonesia 2.100 kkal/kapita/hari	%	82	84	86	88	90
1.2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	90,00	92,00	94,00	96,00	100,00
1.2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	86,00	87,00	89,00	95,00	100,00
1.2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00
1.2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	247,40	235,40	220,40	200,40	175,40
1.2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	1	0,9	0,8	0,7	0,6
1.2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis	%	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	yang terdeteksi dalam program DOTS							
1.2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	
1.2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	85,00	90,00	95,00	95,00	100,00	
1.2.25	Penderita diare yang ditangani	%	85,00	90,00	95,00	95,00	100,00	
1.2.26	Angka kejadian Malaria	%	55,00	50,00	45,00	40,00	35,00	
1.2.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	
1.2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	30,00	32,00	34,00	35,00	35,00	
1.2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	85,00	90,00	95,00	95,00	100,00	
1.2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
1.2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks	%	40,00	45,00	50,00	55,00	70,00	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	berisiko tinggi terakhir							
1.2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	45,00	50,00	55,00	60,00	70,00	
1.2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	
1.2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	0,89	0,90	0,92	0,93	0,94	
1.2.35	Cakupan puskesmas	%	1,55	1,64	1,73	1,82	1,91	
1.2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	0,92	0,94	0,96	0,98	0,99	
1.2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	
1.2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	
1.2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	0,59	0,62	0,64	0,68	0,68	
1.2.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	85,04	86,04	87,04	89,04	90,04	
1.2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -	%	82,00	83,00	84,00	85,00	87,50	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	24 bulan keluarga miskin							
1.2.42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
1.2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	0,82	0,83	0,90	0,97	0,98	
1.2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
1.2.1	Urusan Kesehatan (SPM)							
12.1.1	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	72,00	78,00	85,00	90,00	100	
12.1.2	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	52,00	63,00	76,00	88,00	100	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
12.1.3	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	55,00	67,00	77,00	84,00	100
12.1.4	Cakupan anak usia 0-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	71,00	77,00	83,00	91,00	100
12.1.5	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	45,00	65,00	85,00	93,00	100
12.1.6	Cakupan warga negara usia 15-59 tahun (usia produktif) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	20,00	30,00	60,00	70,00	80,00
12.1.7	Cakupan warga negara usia 60 tahun keatas (Lansia) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	54,00	68,00	80,00	90,00	100
12.1.8	Cakupan penderita hipertensi mendapat	%	20,00	30,00	50,05	75,00	90,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	pelayanan kesehatan sesuai standar							
12.1.9	Cakupan penyandang Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,00	60,00	70,00	80,00	100	
12.1.10	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	80,00	90,00	100	100	100	
12.1.11	Cakupan orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	50,00	60,00	65,00	80,00	90,00	
12.1.12	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	30,00	45,00	60,00	75,00	100	
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	26,56	32,42	38,28	44,14	50,00	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk					
	Jumlah Masjid dan Mushola	Unit	175	175	175	175	175
	Jumlah Gereja dan Kapel Katolik	Unit	26	26	26	26	26
	Jumlah Gereja Protestan	Unit	99	99	99	99	99
	Jumlah Pura	Unit	1	1	1	1	1
1.3.3	Jumlah Pelanggan air bersih		4.123,40	4.171,80	4.220,20	4.268,60	4.317,00
1.3.4	Volume air yang disalurkan	m3	789.334,00	849.772,00	910.210,00	970.648,00	1.031.086,00
1.3.5	Rasio Elektrifikasi	%	89,08	90,56	92,04	93,52	95,00
1.3.6	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	73,27	74,95	76,63	78,32	80,00
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1.4.1	Persentase perumahan layak huni	%	55,00	57,50	60,00	62,50	65,00
1.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1.5.1	Persentase Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan	%	96,13	97,10	98,07	99,03	100,00
1.5.2	Angka Kriminalitas		4,71	4,21	3,81	3,46	3,15
1.6	Urusan Sosial						
1.6.1	Jumlah penduduk miskin	ribu jiwa	6.167	5.875	5.583	5.292	5.000



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.6.2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp.	1.240.725,33	1.305.544,00	1.370.362,67	1.435.181,33	1.500.000,00
1.6.3	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	43,75	45,31	46,87	48,44	50,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
2.1	Urusan Tenaga Kerja						
2.1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,48	73,95	74,42	74,91	74,95
2.1.2	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,52	2,39	2,26	2,13	2,00
2.1.3	Tingkat UMP	Rp.	2.855.788,17	3.009.247,67	3.162.707,17	3.316.166,67	3.469.626,17
2.1.4	Penduduk bekerja	%	97,48	97,61	97,74	97,87	98,00
2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.2.2	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00
2.3	Urusan Pangan						
2.3.1	Jumlah produksi padi	Ton	36.908,37	39.269,46	41.630,56	43.991,65	46.352,74
2.3.2	Produktivitas Padi	Ton/Ha	3,19	3,39	3,59	3,80	4,00
2.4	Urusan Pertanahan						
2.5	Urusan Lingkungan Hidup						



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,65	73,24	73,82	74,41	75,00
2.5.2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	170	165	160	155	150
2.5.3	Tingkat emisi GRK						
2.6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.6.1	Kepadatan penduduk	Jiwa/km2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Laju pertumbuhan penduduk	%	2,22	2,17	2,13	2,08	2,04
2.7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.7.1	Posyandu	Unit	160	165	170	175	180
2.7.2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,4818	0,4863	0,4909	0,4954	0,5000
2.8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.8.1	Rasio akseptor KB	-	88,21	88,66	89,11	89,55	90,00
2.8.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	84,91	85,57	86,23	86,89	87,55
2.2.3	Persentase Alat Kontrasepsi yang Digunakan oleh Penduduk						
	-WOW/MOP/IUD/Spiral	%	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	-Susuk KB	%	8,87	8,62	8,37	8,12	7,87
	-Suntik	%	50,63	51,13	51,63	52,13	52,63
	-Pil	%	36,50	35,75	35,00	34,25	33,50



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
	-Alat Tradisional lain	%	-	-	-	-	-
	-Kondom	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.9	Urusan Perhubungan						
2.9.1	Jumlah kendaraan bermotor	Unit	11.641,33	13.731,00	15.820,67	17.910,33	20.000,00
2.9.2	Panjang jalan	Km	1.029,69	1.084,77	1.139,85	1.194,92	1.250,00
2.9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	8.709	9.657	10.605	11.552	12.500
2.10	Urusan Komunikasi dan Informatika						
2.10.1	Jumlah surat kabar nasional/lokal	-	13	13	14	14	15
2.10.2	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Stasiun	3	3	4	4	4
2.10.3	Web site milik pemerintah daerah	Unit	1	1	1	1	1
2.11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	28,61	31,46	34,31	37,15	40,00
2.11.2	Jumlah koperasi	unit	110	120	130	140	150
2.11.3	Jumlah UMKM	Unit	2.747	2.810	2.873	2.937	3.000
2.12	Urusan Penanaman Modal						
2.12.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp.	740.644.630.000,-	814.709.093.000,-	896.180.002.300,-	985.798.002.530,-	1.084.377.802.783,-
2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Rp.	5.886.146.970.000,-	6.474.761.667.000,-	7.112.237.833.700,-	7.834.461.617.070,-	8.617.907.778.777,-



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga							
2.13.1	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	170	172	174	177	180	
2.13.2	Lapangan olahraga	Unit	55	57	59	62	65	
2.13.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	Unit	2	2	2	2	2	
2.13.4	Jumlah club olahraga	15	5	5	5	5	5	
2.13.5	Organisasi Pemuda	10	2	2	2	2	2	
2.13.5	Program pengembangan dan keserasian kebijakan kepemudaan dan olahraga	Unit	2	2	2	2	2	
2.13.6	Jumlah fasilitas pengembangan kemitraan (orang)	Orang	2	2	2	2	2	
2.13.7	Jumlah fasilitas pengembangan kemitraan (paket)	Paket	1	1	1	1	1	
2.13.8	Program Peningkatan penyandaran dan pemberdayaan kepemudaan							
2.13.9	Jumlah sarjana penggerak	Sarjana	15	15	15	15	15	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2019	2020	2021	2022	2023	
	pembangunan perdesaan (SP-3)							
2.13.10	Program peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda							
2.13.11	Jumlah kewirausahaan	Unit usaha	2	2	2	2	2	
2.13.12	Jumlah cabang olahraga unggulan	Cabang olahraga	2	2	2	2	2	
2.13.13	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	2	2	2	2	2	
2.13.14	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	10%	10%	10%	10%	10%	
2.13.15	Persentase wirausaha muda	%	2%	2%	2%	2%	2%	
2.13.16	Cakupan pembinaan olahraga	%	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	
2.13.17	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	10%	10%	10%	10%	10%	
2.13.18	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	
2.13.19	Jumlah atlet berprestasi	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	
2.14	Pariwisata							
2.14.1	Jumlah ODTW	ODTW	2	2	2	2	2	
2.14.2	Jumlah desa Wisata	Desa	3	3	3	3	3	
2.14.3	Jumlah pengunjung ke ODTW Wisnus	Orang	1800	1800	1800	1800	1800	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.14.4	Jumlah pengunjung ke ODTW Wisman	Orang	10	10	10	10	10
2.14.5	Rata-rata lama menginap Wisman	Hari/Bulan	2	2	2	2	2
2.14.6	Rata-rata lama menginap Wisman wisnus	Hari/Bulan	2	2	2	2	2
2.14.7	Kontribusi sektor pariwisata	Juta Rupiah	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000	Rp 125.000.000
2.14.8	Jumlah Pramuwisata	Pramuwisata	10	10	10	10	10
2.14.9	Jumlah kelompok sadar wisata	Kelompok	2	2	2	2	2
2.14.10	Persentase forum/klaster masyarakat peduli wisata yang difasilitas	%					
2.15	Urusan Statistik						
2.15.1	Buku Kabupaten Murung Raya Dalam Angka	Ada/Tidak	1	1	1	1	1
2.15.2	Buku PDRB Kabupaten Murung Raya	Ada/Tidak	1	1	1	1	1
2.16	Urusan Perpustakaan						
2.16.1	Jumlah perpustakaan	Unit	75	75	75	75	75
2.16.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2.219	2.665	3.110	3.555	4.000
2.17	Urusan Kearsipan						



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah					
			2019	2020	2021	2022	2023	
2.18	Urusan Perencanaan Pembangunan							
2.18.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/Tidak	1	1	1	1	1	
2.18.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	1	1	1	1	1	
2.18.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak	1	1	1	1	1	
2.19	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2.20.1	Pertumbuhan ekonomi	%	6,38	6,66	6,94	7,22	7,50	
2.20.2	Kemiskinan	%	5,25	4,94	4,63	4,31	4,00	
2.20.3	Opini laporan keuangan pemerintah kota	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.20.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	



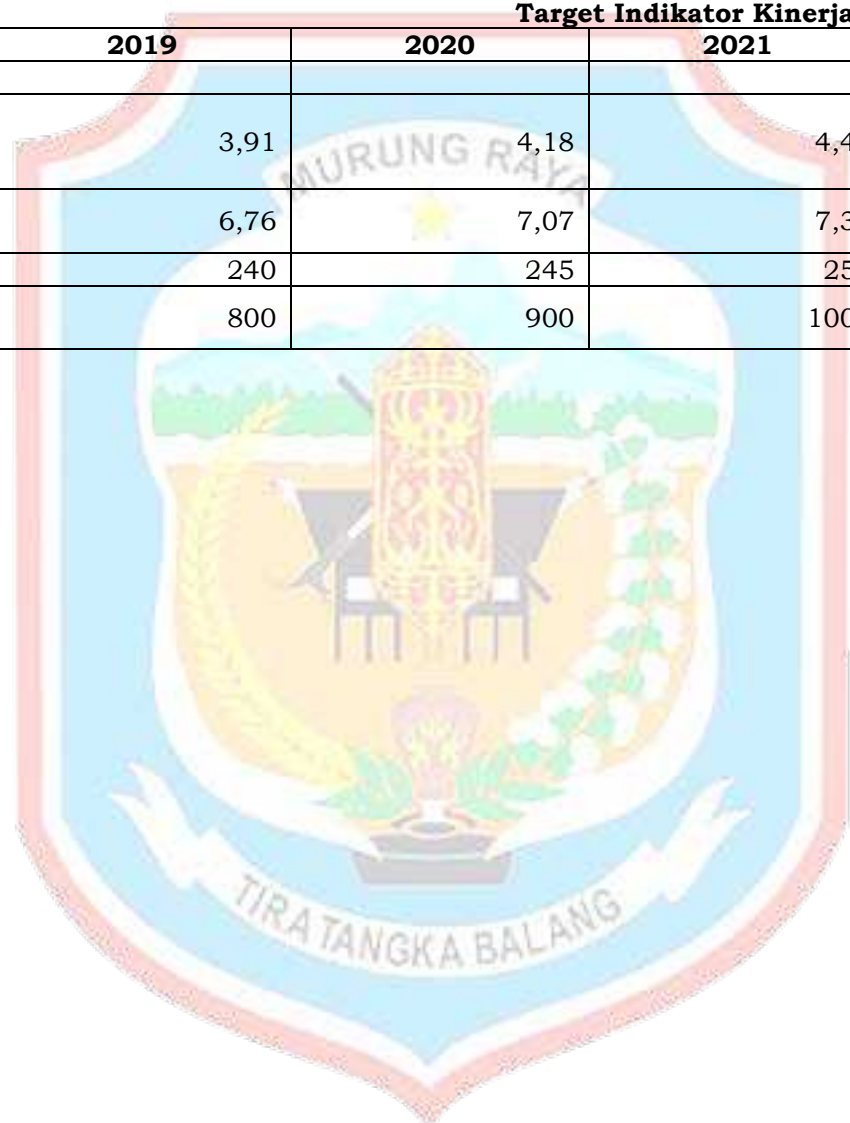
No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
2.20.5	Nilai SAKIP		CC	B	BB	BB	A
B	Urusan Pemerintahan Pilihan						
1	Urusan Kelautan dan Perikanan						
1.1	Produksi perikanan Umum	Ton	307,22	355,42	403,61	451,81	500,00
1.2	Produksi perikanan Darat	Ton	2.836,39	3.127,29	3.418,19	3.709,10	4.000,00
2	Urusan Pariwisata						
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	52.794	58.346	63.897	69.449	75.000
3	Urusan Pertanian						
3.1a	Produktivitas padi sawah	kw/ha	3,19	3,39	3,59	3,80	4,00
3.1b	Produktivitas padi ladang	kw/ha	3,19	3,39	3,59	3,80	4,00
3.2	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	11,92	12,07	12,21	12,36	12,50
3.3	Produksi padi	ton	36.908,37	39.269,46	41.630,56	43.991,65	46.352,74
3.4	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,17	3,51	3,84	4,17	4,50
3.5	Jumlah produksi daging (sapi, kambing, babi)	Kg	207.063,33	211.547,50	216.031,67	220.515,83	225.000,00
3.6	Jumlah produksi daging ayam/unggas	Kg	796.522,67	822.392,00	848.261,33	874.130,67	900.000,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
3.7	Jumlah produksi telur ayam/unggas	Kg	131.364,00	148.523,00	165.682,00	182.841,00	200.000,00
4	Urusan Kehutanan						
4.1	Luas Hutan	ha	2.246.447,00	2.246.447,00	2.246.447,00	2.246.447,00	2.246.447,00
4.2	Luas Hutan lindung	ha	501.388,00	501.388,00	501.388,00	501.388,00	501.388,00
4.3	Luas Hutan Produksi terbatas	ha	1.225.625,00	1.225.625,00	1.225.625,00	1.225.625,00	1.225.625,00
4.4	Luas Hutan Produksi tetap	ha	199.825,00	199.825,00	199.825,00	199.825,00	199.825,00
4.5	Luas Hutan produksi yang dikonversi	ha	132.678,00	132.678,00	132.678,00	132.678,00	132.678,00
4.6	Luas Hutan lainnya	ha	186.931,00	186.931,00	186.931,00	186.931,00	186.931,00
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral						
5.1	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54
5.2	Produksi listrik	KWh	29.564.383,33	29.673.287,50	29.782.191,67	29.891.095,83	30.000.000,00
6	Urusan Perdagangan						
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	%	6,28	6,56	6,83	7,11	7,38
6.2	LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)	%	4,99	5,24	5,49	5,75	6,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Daerah				
			2019	2020	2021	2022	2023
7	Urusan Perindustrian						
7.1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	3,91	4,18	4,45	4,73	5,00
7.2	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	6,76	7,07	7,38	7,69	8,00
7.3	Jumlah IKM	IKM	240	245	250	255	260
7.4	Tenaga kerja industri	orang	800	900	1000	1100	1250





RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Murung Raya lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan pembangunan nasional. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya; komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Murung Raya; serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Dokumen RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2018-2023, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2005-2025, memerhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJM Nasional. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Murung Raya.

9.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, perlu disusun RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun



berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024. Pedoman transisi dengan demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Murung Raya maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya;
- 3) RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Murung



Raya Tahun 2018-2023. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh PD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra PD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Murung Raya yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bapplitbangda Murung Raya dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, Bapplitbangda Kabupaten Murung Raya berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2018-2023 ke dalam Rencana Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bapplitbangda Kabupaten Murung Raya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati;



6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 kepada masyarakat;
8. Baplitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD; dan
9. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

